



WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

**PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA
NOMOR 8 TAHUN 2019**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA
NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2016-2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah dibentuk Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2016-2021;
 - b. bahwa sehubungan dengan adanya hasil evaluasi dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur terhadap rancangan Peraturan Daerah Kota Surabaya tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 dan Rancangan Peraturan Walikota Surabaya tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, maka Pemerintah Provinsi Jawa Timur merekomendasikan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya perlu dilakukan perubahan agar terdapat konsistensi antar dokumen perencanaan baik RPJMD, RENSTRA, RKPD dan Renja PD;
 - c. bahwa guna penyelarasan isu strategis pembangunan, visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah, strategi dan arah kebijakan pembangunan, program prioritas pembangunan daerah dan kerangka pendanaan program pembangunan daerah sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 050/4936/SJ dan Nomor 0430/M.PPN/12/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019, maka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2016-2021 perlu untuk disesuaikan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2016-2021.

- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2286);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 2);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
16. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199);
17. Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 364) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2018 (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 11);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 157);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312);
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2017;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 459);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 15);
25. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 4);

26. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Surabaya Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 17 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 16);
27. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2014 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10);
28. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 8) Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 7).

**Dengan Persetujuan Bersama,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURABAYA
dan
WALIKOTA SURABAYA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2016-2021.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 8) Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 7), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Lampiran Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021, masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2019.

2. Ketentuan Lampiran diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 26 Agustus 2019

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

TRI RISMAHARINI

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 26 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

HENDRO GUNAWAN

LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2019 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 251-8/2019.

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM

Ira Tursilowati, SH.MH

Pembina Tingkat I

NIP. 19691017 199303 2 006



**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA
NOMOR 8 TAHUN 2019**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA
NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2016-2021**

I. UMUM

RPJMD Kota Surabaya merupakan dokumen perencanaan Kota Surabaya untuk periode 5 tahun yang dimaksudkan untuk memberikan arahan sekaligus menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan di Kota Surabaya dalam menyelenggarakan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. RPJMD dituangkan dalam penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.

Bahwa dengan mendasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah dibentuk Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2016-2021.

Bahwa sehubungan dengan adanya hasil evaluasi dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur terhadap rancangan Peraturan Daerah Kota Surabaya tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 dan Rancangan Peraturan Walikota Surabaya tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, maka Pemerintah Provinsi Jawa Timur merekomendasikan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya perlu dilakukan perubahan agar terdapat konsistensi antar dokumen perencanaan baik RPJMD, RENSTRA, RKPD dan Renja PD.

bahwa guna penyelarasan isu strategis pembangunan, visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah, strategi dan arah kebijakan pembangunan, program prioritas pembangunan daerah dan kerangka pendanaan program pembangunan daerah sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 050/4936/SJ dan Nomor 0430/M.PPN/12/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019, maka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2016-2021 perlu untuk disesuaikan.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2016-2021

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I
Cukup jelas

Pasal II
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 8



Daftar Isi

Daftar Isi.....	i
Daftar Gambar	v
Daftar Tabel	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	I-1
I.1 Latar Belakang	I-1
I.2 Dasar Hukum Penyusunan.....	I-3
I.3 Hubungan Antar Dokumen	I-6
I.4 Maksud dan Tujuan	I-30
I.5 Sistematika Penulisan	I-31
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH.....	II-1
II.1 Aspek Geografi dan Demografi	II-1
II.1.1 Kondisi Kependudukan Kota Surabaya.....	II-1
II.1.2 Kerawanan Bencana di Kota Surabaya.....	II-6
II.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	II-8
II.2.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	II-7
II.2.2 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).....	II-16
II.2.3 Pertumbuhan Ekonomi.....	II-17
II.2.4 Indeks Gini	II-18
II.2.5 Kawasan permukiman yang telah ditingkatkan kualitas lingkungannya ..	II-18
II.2.6 Indeks Ketahanan Pangan	II-19
II.2.7 Indeks Pembangunan Gender (IPG).....	II-20
II.2.8 Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak.....	II-22
II.2.9 Persentase PMKS yang tertangani	II-23
II.3 Aspek Pelayanan Umum	II-24
II.3.1 Indeks Ketertiban dan Ketenteraman Kota.....	II-24
II.3.2 Pelanggaran Perda per 1.000 Penduduk	II-25
II.3.3 Rasio Linmas per 1.000 penduduk.....	II-26
II.3.4 Indeks Infrastruktur Kota	II-27
II.3.5 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Persampahan (IKLHS)	II-28
II.3.6 Indeks Budaya Lokal	II-30
II.3.7 Pariwisata di Kota Surabaya	II-33



II.3.8	Persentase luas kawasan permukiman kumuh	II-34
II.3.9	Indeks Reformasi Birokrasi.....	II-36
II.3.10	Peningkatan keamanan pangan olahan di masyarakat	II-38
II.3.11	Persentase capaian prasarana layanan kesehatan yang dibangun/direhabilitasi	II-39
II.3.12	Persentase lokasi lahan yang tersedia untuk kepentingan umum	II-41
II.3.13	Persentase pelaksanaan rekomendasi utilitas.....	II-42
II.3.14	Tingkat Keandalan Jaringan Jalan	II-42
II.3.15	Persentase rencana induk sektoral yang disusun dan telah tersinkronisasi dengan Rencana Tata Ruang Wilayah	II-43
II.3.16	Persentase panjang jalan yang sudah terpasang PJU hemat energi	II-44
II.3.17	Persentase capaian prasarana pendidikan yang dibangun/direhabilitasi	II-46
II.3.18	Rasio Guru dibanding Murid	II-50
II.3.19	Persentase pemanfaatan rusunawa yang tepat sasaran.....	II-52
II.3.20	Persentase wilayah dengan rumah tapak yang layak huni seluruhnya ...	II-52
II.3.21	Persentase budaya yang dapat dilestarikan	II-54
II.3.22	Atlet berprestasi di tingkat regional, nasional dan/atau internasional	II-55
II.3.23	Pemuda Kader Anti Kenakalan Remaja	II-55
II.3.24	Tingkat Kepuasan Penyelenggaraan TIK dalam Pelayanan Publik Administratif.....	II-56
II.3.25	Tingkat Produktivitas Koperasi	II-57
II.3.26	Tingkat Produktivitas Usaha Mikro	II-58
II.3.27	Indeks Kualitas Air Permukaan.....	II-59
II.3.28	Indeks Kualitas Udara Ambien	II-59
II.3.29	Persentase penurunan sampah yang masuk ke TPA melalui TPS	II-60
II.3.30	Persentase selisih luasan taman dan jalur hijau yang dibangun dan dipelihara	II-61
II.3.31	Persentase indikator Kota Layak Anak (KLA) yang terpenuhi	II-61
II.3.32	Load Factor Kendaraan Umum (Angkot).....	II-62
II.3.33	Load Factor Kendaraan Umum (Bis Kota).....	II-63
II.3.34	Persentase aset tanah dan/atau bangunan yang terintegrasi dalam sistem pengamanan dan pengelolaan asset.....	II-63
II.3.35	Persentase pencari kerja terserap pada pasar kerja formal	II-65



II.3.36	Indeks Profesionalisme Pegawai.....	II-66
II.3.37	Persentase pemenuhan kebutuhan prasarana pemerintahan dan pelayanan publik	II-67
II.3.38	Persentase kegiatan DPRD yang terfasilitasi	II-68
II.3.39	Persentase kontribusi pajak terhadap PAD	II-68
II.3.40	Angka Pelanggaran Disiplin Aparatur per 1.000 Pegawai.....	II-69
II.3.41	Persentase pelanggaran tata kelola administrasi keuangan pada kasus yang sama yang berhasil diturunkan.....	II-70
II.4.42	Persentase pengaduan masyarakat terkait aparatur yang ditindaklanjuti	II-71
II.4.43	Tingkat Capaian Keberhasilan Pelaksanaan Program	II-71
II.4	Aspek Daya Saing Daerah	II-72
II.4.1	Indeks Penanggulangan Bencana.....	II-72
II.4.2	Persentase jalan kewenangan kota dengan v/c ratio $\leq 0,95$	II-75
II.4.3	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	II-75
II.4.4	Inflasi Kota Surabaya	II-79
II.4.5	Volume Ekspor dan Impor	II-80
II.4.6	Nilai Kepuasan Masyarakat.....	II-83
II.4.7	Nilai SAKIP	II-84
II.4.8	Opini BPK.....	II-84
II.4.9	Persentase konflik yang menimbulkan gangguan ketenteraman dan ketertiban masyarakat	II-85
II.5	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah.....	II-86
BAB III	GAMBARAN KEUANGAN DAERAH	III-1
III.1	Kinerja Keuangan Masa Lalu	III-1
III.2	Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu	III-8
III.3	Kerangka Pendanaan.....	III-12
BAB IV	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH	IV-1
IV.1	Permasalahan Pembangunan	IV-1
IV.2	Isu Strategis	IV-5
BAB V	VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN.....	V-1
V.1	Visi	V-1
V.2	Misi.....	V-2



V.3 Tujuan dan Sasaran	V-6
BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	
DAERAH.....	VI-1
VI.1 Stategi	VI-1
VI.1.1 Misi Pertama.....	VI-1
VI.1.2 Misi Kedua.....	VI-4
VI.1.3 Misi Ketiga	VI-4
VI.1.4 Misi Keempat.....	VI-7
VI.1.5 Misi Kelima	VI-8
VI.1.6 Misi Keenam.....	VI-9
VI.1.7 Misi Ketujuh	VI-10
VI.2 Program Pembangunan Daerah.....	VI-24
BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM	
PERANGKAT DAERAH	VII-1
VII.1 Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah.....	VII-1
VII.2 Indikasi Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan	VII-3
BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	VIII-1
BAB IX PENUTUP.....	IX-1
IX.1 Pedoman Transisi.....	IX-1
IX.2 Kaidah Pelaksanaan.....	IX-2
IX.3 Pengembangan Pembiayaan Pembangunan	IX-2



Daftar Gambar

Gambar I.1	Hubungan Perencanaan dan Penganggaran	I-3
Gambar I.2	Hubungan antara Misi dan Tujuan RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021 dengan Misi RPJMN Tahun 2015-2019	I-9
Gambar I.3	Hubungan antara Misi RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021 dengan Agenda Prioritas Pembangunan Nasional (NAWA CITA) .	I-11
Gambar I.4	Hubungan antara Misi RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021 dengan Misi RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019.....	I-13
Gambar I.5	Hubungan antara Misi RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021 dengan Misi RPJPD Kota Surabaya Tahun 2005-2025	I-15
Gambar II.1	Jumlah Penduduk Kota Surabaya Berdasarkan Jenis Kelamin	II-2
Gambar II.2	Jumlah Penduduk Kota Surabaya Berdasarkan Kelompok Usia Tahun 2018.....	II-3
Gambar II.3	Jumlah Kepemilikan Akta Kelahiran 0-18 Tahun.....	II-4
Gambar II.4	Jumlah Penerbitan Akta Perkawinan	II-5
Gambar II.5	Jumlah Penerbitan Akta Kematian	II-5
Gambar II.6	Jumlah Penduduk Kota Surabaya Berdasarkan Tingkat Pendidikan .	II-6
Gambar II.7	Peta Kerawanan Banjir Kota Surabaya.....	II-7
Gambar II.8	Peta Kerawanan Kebakaran Kota Surabaya.....	II-7
Gambar II.9	Peta Kerawanan Puting Beliung Kota Surabaya	II-8
Gambar II.10	Tren IPM Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2015 – 2019.....	II-9
Gambar II.11	Prevalensi Balita Stunting Tahun 2015 – 2019	II-12
Gambar II.12	Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Surabaya Tahun 2015-2019	II-21
Gambar II.13	Jumlah Kunjungan Wisata Mancanegara dan Nusantara Kota Surabaya Tahun 2015-2019.....	II-32
Gambar II.14	Kawasan Negara Tujuan Ekspor-Impor Non Migas Kota Surabaya Tahun 2018.....	II-82
Gambar IV.1	Keterkaitan SDG's dengan Visi Kota Surabaya	IV-7



Daftar Tabel

Tabel I.1	Hubungan antara Visi RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021 dengan Norma Pembangunan RPJMN Tahun 2015-2019	I-8
Tabel I.2	Hubungan antara Program Perubahan RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021 dengan Kebijakan Strategi Struktur Ruang RTRW Kota Surabaya Tahun 2014-2034.....	I-16
Tabel I.3	Hubungan antara Program Perubahan RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021 dengan Kebijakan Strategi Pola Ruang RTRW Kota Surabaya Tahun 2014-2034.....	I-19
Tabel I.4	Hubungan antara Visi Misi Perubahan RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021 dengan Visi Misi RPJMD Kabupaten/Kota Sekitar	I-24
Tabel II.1	Perkembangan Angka Harapan Hidup Kota Surabaya Tahun 2014 – 2018	II-9
Tabel II.2	Prevalensi Balita Gizi Buruk Kota Surabaya Tahun 2014 – 2018.....	II-10
Tabel II.3	Prevalensi Balita Kurang Gizi (Gizi Buruk dan Gizi Kurang) Kota Surabaya Tahun 2014 – 2018	II-10
Tabel II.4	Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 Kelahiran Hidup Kota Surabaya Tahun 2014– 2018	II-10
Tabel II.5	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 Kelahiran Hidup Kota Surabaya Tahun 2014 – 2018	II-11
Tabel II.6	Indeks Pendidikan Kota Surabaya Tahun 2014 – 2018	II-12
Tabel II.7	Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Kota Surabaya Tahun 2014-2018.....	II-13
Tabel II.8	Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Kota Surabaya Tahun 2014 – 2018	II-14
Tabel II.9	Perkembangan Angka Melanjutkan (AM) Kota Surabaya Tahun 2014 – 2018	II-15
Tabel II.10	Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2014–2018	II-16
Tabel II.11	Pertumbuhan Ekonomi Kota Surabaya, Jawa Timur dan Nasional Tahun 2014 – 2018	II-18



Tabel II.12 Indeks Gini Kota Surabaya, Jawa Timur dan Nasional Tahun 2014 – 2018.....	II-18
Tabel II.13 Kawasan permukiman yang telah ditingkatkan kualitas lingkungannya Tahun 2014-2018.....	II-19
Tabel II.14 Ketersediaan Pangan Utama Kota Surabaya Tahun 2014 – 2018.....	II-19
Tabel II.15 Pola Pangan Harapan Tahun 2014 – 2018.....	II-20
Tabel II.16 KDRT Kota Surabaya Tahun 2014-2018	II-22
Tabel II.17 Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan Kota Surabaya Tahun 2014-2018	II-23
Tabel II.18 Penanganan PMKS Kota Surabaya Tahun 2014 –2018	II-23
Tabel II.19 Indeks Ketertiban dan Ketentraman Kota Surabaya Tahun 2014-2018	II-24
Tabel II.20 Pelanggaran Perda per 1.000 Penduduk Tahun 2014 –2018	II-25
Tabel II.21 Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 Kota Surabaya Tahun 2014 – 2018.....	II-26
Tabel II.22 Rasio Jumlah Linmas per 10.000 Penduduk Kota Surabaya Tahun 2014 – 2018.....	II-26
Tabel II.23 Level of Service (LOS) atau Tingkat Pelayanan Jalan	II-27
Tabel II.24 Lama Jam Sibuk Tahun 2014 – 2018	II-27
Tabel II.25 Penerangan Jalan Umum Tahun 2014 – 2018.....	II-28
Tabel II.26 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Surabaya Tahun 2014-2018	II-29
Tabel II.27 Indeks Penyusun IKLHS Kota Surabaya Tahun 2014-2018	II-30
Tabel II.28 Indeks Budaya Lokal Kota Surabaya Tahun 2014-2018	II-31
Tabel II.29 Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya Kota Surabaya Tahun 2014 – 2019	II-31
Tabel II.30 Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan Kota Surabaya Tahun 2014 – 2018.....	II-32
Tabel II.31 Daftar Kawasan Prioritas Penataan dan Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman di Kota Surabaya	II-34
Tabel II.32 Persentase Luas Kawasan Permukiman Kumuh Kota Surabaya Tahun 2014-2018.....	II-35



Tabel II.33 Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota Surabaya Tahun 2014-2018.....	II-36
Tabel II.34 Rata-Rata Nilai Kepuasan Masyarakat Kota Surabaya Tahun 2014-2018	II-37
Tabel II.35 Peningkatan Keamanan Pangan Olahan di Masyarakat Tahun 2014 – 2018	II-38
Tabel II.36 Jumlah Puskesmas, Poliklinik dan Pustu Kota Surabaya Tahun 2014 – 2018	II-39
Tabel II.37 Jumlah Rumah Sakit Kota Surabaya Tahun 2014 – 2018.....	II-39
Tabel II.38 Persentase capaian prasarana layanan kesehatan yang dibangun/direhabilitasi Tahun 2014 –2018.....	II-40
Tabel II.39 Persentase lokasi lahan yang tersedia untuk kepentingan umum Tahun 2014 – 2018	II-41
Tabel II.40 Luas tanah dan/atau bangunan yang disediakan bagi pembangunan infrastruktur untuk kepentingan umum (dalam Ha) Tahun 2014 – 2018	II-42
Tabel II.41 Tingkat Keandalan Jaringan Jalan Tahun 2014 – 2018	II-43
Tabel II.42 Persentase rencana induk sektoral dan rencana rinci yang disusun dan telah tersinkronisasi dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2014 – 2018	II-43
Tabel II.43 Persentase panjang jalan yang sudah terpasang PJU hemat energi Tahun 2014 – 2018	II-44
Tabel II.44 Penerangan Jalan Umum Tahun 2014 – 2018.....	II-45
Tabel II.45 Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Kota Surabaya Menurut Kecamatan Tahun 2018.....	II-47
Tabel II.46 Persentase capaian prasarana pendidikan yang dibangun/direhabilitasi Tahun 2014 – 2018	II-50
Tabel II.47 Jumlah Guru dan Murid Kota Surabaya Tahun 2014 – 2018	II-51
Tabel II.48 Jumlah Guru PNS Kota Surabaya Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2018.....	II-51
Tabel II.49 Jumlah Guru Non PNS Kota Surabaya Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2018.....	II-51
Tabel II.50 Jumlah Guru Kota Surabaya Bersertifikat Pendidik Tahun 2018.....	II-51



Tabel II.51 Persentase pemanfaatan rusunawa Tahun 2014 – 2018.....	II-52
Tabel II.52 Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki di Kota Surabaya Tahun 2014 –2018.....	II-53
Tabel II.53 Persebaran Situs, Bangunan dan Lingkungan Cagar Budaya di Tiap Kecamatan di Kota Surabaya	II-54
Tabel II.54 Persentase Budaya yang dapat dilestarikan Kota Surabaya Tahun 2014- 2018.....	II-55
Tabel II.55 Atlet Berprestasi di tingkat regional, nasional dan/atau internasional Tahun 2014-2018.....	II-55
Tabel II.56 Angka Pemuda Kader Anti Kenakalan Remaja Tahun 2014-2018.....	II-56
Tabel II.57 Survey Kepuasan Masyarakat Kota Surabaya Tahun 2014 – 2018...	II-56
Tabel II.58 Pertumbuhan Anggota Koperasi Tahun 2014 – 2018	II-57
Tabel II.59 Persentase Koperasi Aktif Kota Surabaya Tahun 2014 – 2018	II-57
Tabel II.60 Rasio Volume Usaha Koperasi Aktif Terhadap Jumlah Koperasi Aktif di Kota Surabaya Tahun 2014 – 2018	II-58
Tabel II.61 Tingkat Produktivitas Usaha Mikro di Kota Surabaya Tahun 2014 – 2018	II-59
Tabel II.62 Indeks Pencemaran Air (IPA) Kota Surabaya Tahun 2014-2018.....	II-59
Tabel II.63 Indeks Pencemaran Udara (IPU) Kota Surabaya Tahun 2014-2018 .	II-59
Tabel II.64 Jumlah Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Tahun 2014 – 2018....	II-60
Tabel II.65 Persentase penurunan sampah yang masuk ke TPA melalui TPS Tahun 2014 – 2018	II-60
Tabel II.66 Persentase selisih luasan taman dan jalur hijau yang dibangun dan dipelihara Tahun 2016 – 2018	II-61
Tabel II.67 Persentase indikator Kota Layak Anak (KLA) yang terpenuhi.....	II-62
Tabel II.68 Load factor Kendaraan Umum (Angkot) Kota Surabaya Tahun 2014 – 2018.....	II-62
Tabel II.69 Load factor Kendaraan Umum (Bis Kota) Kota Surabaya Tahun 2014 – 2018.....	II-63
Tabel II.70 Jumlah Aset Pemerintah Kota Surabaya yang Telah Tersertifikat Tahun 2014 – 2018	II-64



Tabel II.71 Pencari Kerja yang Difasilitasi dan Ditempatkan Kota Surabaya Tahun 2014 – 2018	II-65
Tabel II.72 Persentase Aparatur yang Berkompeten Tahun 2014 – 2018.....	II-66
Tabel II.73 Persentase Disiplin Aparatur Tahun 2014 – 2018	II-66
Tabel II.74 Persentase Aparatur Penilaian Kinerja Tahun 2014 – 2018.....	II-66
Tabel II.75 Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran Kota Surabaya Tahun 2014 – 2018	II-67
Tabel II.76 Persentase kegiatan DPRD yang terfasilitasi Kota Surabaya Tahun 2014 – 2018	II-68
Tabel II.77 Persentase Kontribusi Pajak terhadap PAD Kota Surabaya Tahun 2014 – 2018	II-69
Tabel II.78 Rekapitulasi Sanksi Disiplin Terhadap Aparatur Di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2014 – 2018	II-69
Tabel II.79 Persentase pelanggaran tata kelola administrasi keuangan pada kasus yang sama yang berhasil diturunkan Kota Surabaya Tahun 2014 – 2018	II-71
Tabel II.80 Persentase pengaduan masyarakat terkait aparatur yang ditindaklanjuti Kota Surabaya Tahun 2014 – 2018	II-71
Tabel II.81 Tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan program Kota Surabaya Tahun 2014 – 2018	II-72
Tabel II.82 Kejadian Bencana di Kota Surabaya Tahun 2014 –2018.....	II-72
Tabel II.83 Persentase Kelurahan Siaga Aktif Tahun 2014 – 2018.....	II-73
Tabel II.84 Kejadian Kebakaran per Penyebab Tahun 2014 –2018.....	II-73
Tabel II.85 Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Kota Surabaya Tahun 2014 –2018	II-74
Tabel II.86 Cakupan Pelayanan Wilayah Manajemen Kebakaran Kota Surabaya Tahun 2014 – 2018	II-74
Tabel II.87 Persentase V/C Ratio pada Jalan Kewenangan Kota Tahun 2014 – 2018	II-75
Tabel II.88 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Surabaya Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2014-2018 (dalam Juta Rupiah)	II-77
Tabel II.89 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Surabaya Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2014-2018 (Juta Rupiah).....	II-78



Tabel II.90	Perkembangan Inflasi Kota Surabaya, Jawa Timur dan Nasional Tahun 2014-2018	II-79
Tabel II.91	Nilai Komoditas Ekspor dan Impor Non Migas Kota Surabaya Tahun 2014 -2018	II-80
Tabel II.92	Komoditas Ekspor Non Migas Kota Surabaya Tahun 2017 dan 2018*	II-81
Tabel II.93	Komoditas Impor Non Migas Kota Surabaya Tahun 2017 dan 2018*	II-81
Tabel II.94	Survey Kepuasan Masyarakat Kota Surabaya Tahun 2014 – 2018	II-83
Tabel II.95	Penilaian Evaluasi SAKIP Kota Surabaya Tahun 2014 – 2018	II-84
Tabel II.96	Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2014-2018	II-85
Tabel II.97	Jumlah Kejadian Unjuk Rasa Kota Surabaya Tahun 2016 – 2018 .	II-85
Tabel II.98	Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan.....	II-86
Tabel II.99	Capaian Standar Pelayanan Minimal Kota Surabaya Tahun 2015-2017	II-152
Tabel III.1	Rata-rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Surabaya Tahun 2014-2018	III-2
Tabel III.2	Neraca Daerah Kota Surabaya 2014 - 2018	III-5
Tabel III.3	Analisis Rasio Keuangan Kota Surabaya Tahun 2016-2018	III-6
Tabel III.4	Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur	III-9
Tabel III.5	Tabel Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Daerah Tahun 2014 - 2018.....	III-10
Tabel III.6	Surplus/Defisit Riil Anggaran Kota Surabaya Tahun 2014-2018 ...	III-11
Tabel III.7	Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kota Surabaya Tahun 2014-2018.....	III-11
Tabel III.8	Realisasi Sisa lebih Perhitungan Anggaran	III-12
Tabel III.9	Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.....	III-17
Tabel III.10	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kota Surabaya Tahun 2019-2021	III-24
Tabel III.11	Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Keuangan Daerah Kota	



	Surabaya Tahun 2019 - 2021.....	III-24
Tabel IV.1	Pertumbuhan Ekonomi Kota Surabaya, Jawa Timur dan Nasional Tahun 2016 – 2018 (%)	IV-8
Tabel V.1	Perumusan Penjelasan Visi-Misi.....	V-2
Tabel V.2	Visi, Misi, Tujuan dan Indikator Tujuan (IKU) Jangka Menengah Kota Surabaya.....	V-14
Tabel V.3	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kota Surabaya	V-15
Tabel VI.1	Hubungan antara Tujuan, Sasaran dan Strategi Kota Surabaya ..	VI-13
Tabel VI.2	Arah Kebijakan Kota Surabaya	VI-23
Tabel VI.3	Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif Kota Surabaya	VI-25
Tabel VII.1	Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Tahun 2020 – 2021 Kota Surabaya.....	VII-2
Tabel VII.2	Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kota Surabaya	VII-4
Tabel VIII.1	Penetapan Indikator Kinerja Utama Kota Surabaya	VIII-3
Tabel VIII.2	Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Surabaya.....	VIII-4



LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA
NOMOR :
TANGGAL :

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun, yang merupakan penjabaran dari visi, dan misi Kepala Daerah yang mempertimbangkan isu strategis dan permasalahan daerah aktual. RPJMD ini menjadi rujukan agenda pembangunan lima tahunan serta alokasi pendanaannya pada masa jabatan Kepala Daerah Ir. Tri Rismaharini, MT dengan Wakil Kepala Daerah Whisnu Sakti Buana, S.T yang dilantik pada 11 Februari 2016 dan ditetapkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.35-493 Tahun 2016.

Perubahan RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021 dilakukan dengan mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pasal 342 Ayat (2) bahwa perubahan RPJMD terkait poin a dan b tidak dapat dilakukan jika sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 tahun, sehingga perubahan RPJMD Kota Surabaya dilakukan pada tahun 2019. Berbagai alasan yang mendasari perubahan RPJMD Kota Surabaya sebagai berikut:

1. Penyesuaian terhadap Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/Sj Tahun 2016 tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah bahwa diperlukan melakukan penyesuaian dokumen Rencana Pembangunan Daerah sesuai Kelembagaan Perangkat Daerah.
2. Penyelarasan terhadap perencanaan nasional dan provinsi sesuai himbauan Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan



Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor: 050/4936/Sj Nomor: 0430/M.Ppn/12/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 sehingga substansi yang telah ditulis dalam dokumen RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021 harus diperiksa dan dilakukan penyelarasan serta penyesuaian.

3. Rekomendasi dalam Surat Nomor 188/17094/013.4/2018 tanggal 22 Oktober 2018 perihal Penyampaian Hasil Evaluasi terhadap Raperda Kota Surabaya tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 menyebutkan bahwa pelaksanaan perubahan RPJMD Kota Surabaya 2016-2021 perlu segera dilaksanakan.
4. Rekomendasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui surat Nomor B/1114/AA.05/2018 tanggal 31 Desember 2018 perihal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018, untuk melakukan:
 - a. Restrukturisasi misi, tujuan, sasaran, program, dll.
 - b. *Review* dan *refocusing* terhadap program, kegiatan dan komponen anggaran dengan mengacu pada penyempurnaan indikator kinerja utama
 - c. Penyempurnaan terhadap kualitas atas ukuran kinerja (indikator) sehingga menggambarkan mandat keberadaan dari unit
 - d. Penyesuaian target program akibat adanya perubahan asumsi terhadap lingkungan eksternal daerah.

Proses penyusunan perubahan RPJMD Kota Surabaya sesuai dengan pasal 16 ayat (1) melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Persiapan Penyusunan.
2. Penyusunan Rancangan Awal.
3. Penyusunan Rancangan.
4. Pelaksanaan Musrenbang.
5. Perumusan Rancangan Akhir.
6. Penetapan RPJMD.

Penyusunan Perubahan RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021 tidak terlepas dari dokumen perencanaan lainnya dengan memedomani dokumen RPJPD Kota Surabaya Tahun 2005-2025. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah



yang selanjutnya disingkat RPJPD Kota Surabaya merupakan penjabaran dari visi, misi dan arah pembangunan daerah yang menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD Kota Surabaya yang memuat visi, misi dan program kepala daerah. Melalui kegiatan pemantauan dan pengawasan, Pemerintah Kota Surabaya melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD Kota Surabaya yang bertujuan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana pembangunan.

Perubahan RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021 merupakan pelaksanaan dari Sasaran Pokok RPJPD Kota Surabaya pada tahapan lima tahun ketiga.

Sesuai Pasal 342 ayat (4) bahwa perubahan RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021 kemudian menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan organisasi perangkat daerah, yaitu Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) Tahun 2016-2021 serta penyusunan dokumen tahunan pemerintah daerah yaitu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2020 dan 2021. Dalam penyusunannya, Perubahan RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021 mengacu pada RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019.

I.2 Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan RPJMD Kota Surabaya meliputi:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi Pemerintah daerah berhak menerapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2286)
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);



5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 2);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42);
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199);
15. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 11);



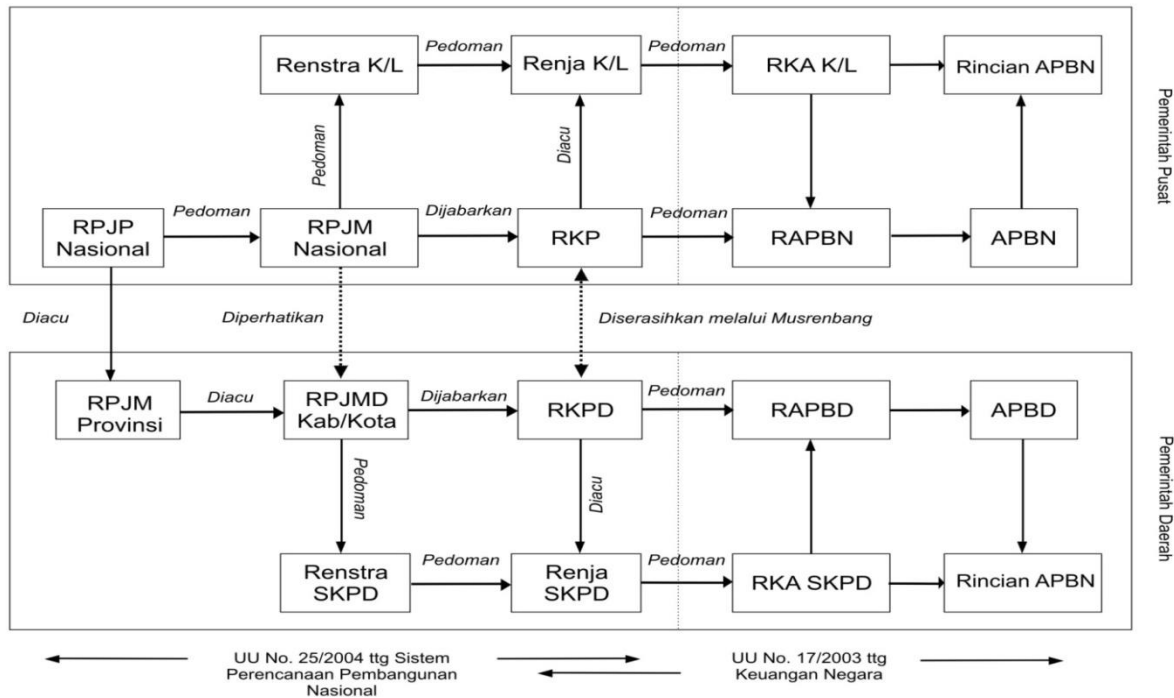
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
19. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke daerah dan Dana Desa;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 15);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;



25. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2021;
27. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Surabaya Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 17 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 16);
28. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2014 Nomor 12);
29. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 8);
30. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10).

I.3 Hubungan Antar Dokumen

Hirarki perencanaan pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Oleh karena itu Perubahan RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021 merupakan bagian yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional, yang bertujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan. Penyusunan Perubahan RPJMD Kota Surabaya tahun 2016-2021 selain memperhatikan sinkronisasi antar daerah, antarwaktu, antar ruang dan antarfungsi pemerintah, juga menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi pembangunan daerah.



Gambar I.1
Hubungan Perencanaan dan Penganggaran

Penyusunan Perubahan RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021 tidak terlepas dari dokumen perencanaan lainnya dengan berpedoman pada RPJPD Kota Surabaya Tahun 2005-2025 dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Surabaya Tahun 2014-2034. Selain itu juga memperhatikan RPJMN Tahun 2015-2019, RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 serta RPJMD kabupaten/kota lain disekitar Kota Surabaya. Adapun skema hubungan perencanaan dan penganggaran sebagaimana gambar berikut.

I.3.1 Hubungan Antara Dokumen RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021 dengan RPJMN Tahun 2015-2019

Hasil analisa dalam tabel hubungan antara Perubahan RPJMD Kota Surabaya dengan RPJMN menunjukkan bahwa telah selaras, meliputi keselarasan perumusan visi RPJMD dengan arah pembangunan atau norma pembangunan RPJMN serta keselarasan perumusan misi dan tujuan dalam Perubahan RPJMD Kota Surabaya dengan misi Presiden Republik Indonesia, kecuali pada Misi 3 “Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim” karena bukan menjadi kewenangan pemerintah daerah. Identifikasi hubungan visi dan misi

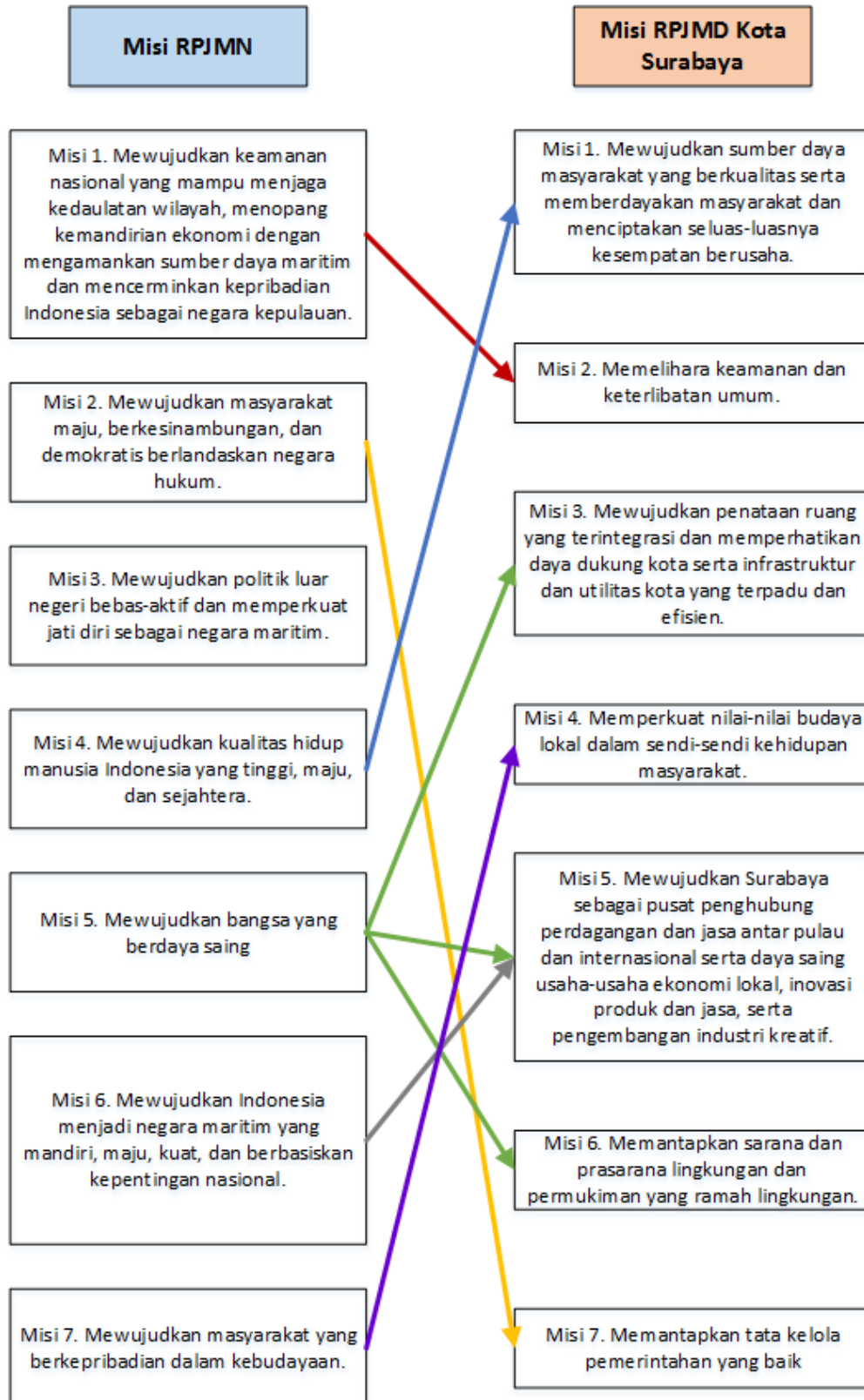


dalam Perubahan RPJMD Kota Surabaya dengan norma pembangunan dan misi RPJMN dapat dilihat pada Tabel I.1 dan Gambar I.1 sebagaimana berikut:



Tabel I.1
Hubungan antara Visi Perubahan RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021
dengan Norma Pembangunan RPJMN Tahun 2015-2019

No	Norma Pembangunan	RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021		
		Visi	Pokok Visi	Penjelasan Visi
1	Membangun untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat	Surabaya Kota Sentosa Yang Berkarakter dan Berdaya Saing Global Berbasis Ekologi	Sentosa dan Berkarakter	Sentosa adalah kondisi yang menggambarkan Kota Surabaya sebagai kota yang menjamin warganya dalam keadaan makmur, sehat, aman, selamat dan damai untuk berkarya dan beraktualisasi diri. Berkarakter adalah Kota Surabaya sebagai kota yang memiliki watak, kepribadian yang arif dengan mempertahankan budaya lokal, yang tercermin dalam perilaku warga kota yang berlandaskan falsafah Pancasila
2	Setiap upaya meningkatkan kesejahteraan, kemakmuran, produktivitas tidak boleh menciptakan ketimpangan yang makin melebar yang dapat merusak keseimbangan pembangunan. Perhatian khusus kepada peningkatan produktivitas rakyat lapisan menengah-bawah, tanpa menghalangi, menghambat, mengecilkan dan mengurangi keleluasaan pelaku-pelaku besar untuk terus menjadi agen pertumbuhan. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.		Berdaya Saing Global	Berdaya saing global bermakna Kota Surabaya sebagai kota yang mampu menjadi hub/pusat penghubung perdagangan dan jasa antar pulau dan internasional dengan didukung pemerataan akses ke sumberdaya produktif, tata kelola pemerintahan yang baik, infrastruktur dan utilitas kota yang terpadu dan efisien serta mampu memantapkan usaha-usaha ekonomi lokal, inovasi produk dan jasa dan pengembangan industri kreatif berdaya saing di pasar global.
3	Aktivitas pembangunan tidak boleh merusak, menurunkan daya dukung lingkungan dan mengganggu keseimbangan ekosistem		Berbasis Ekologi	Kota Surabaya sebagai kota yang penataan ruangnya mampu mengintegrasikan fungsi kawasan perdagangan/jasa dan kawasan permukiman dengan sistem jaringan jalan dan transportasi, mampu mengantisipasi resiko bencana serta mampu melestarikan kawasan pesisir dengan tetap memperhatikan daya dukung kota melalui pemantapan sarana dan prasarana lingkungan dan permukiman yang ramah lingkungan



Gambar I.2

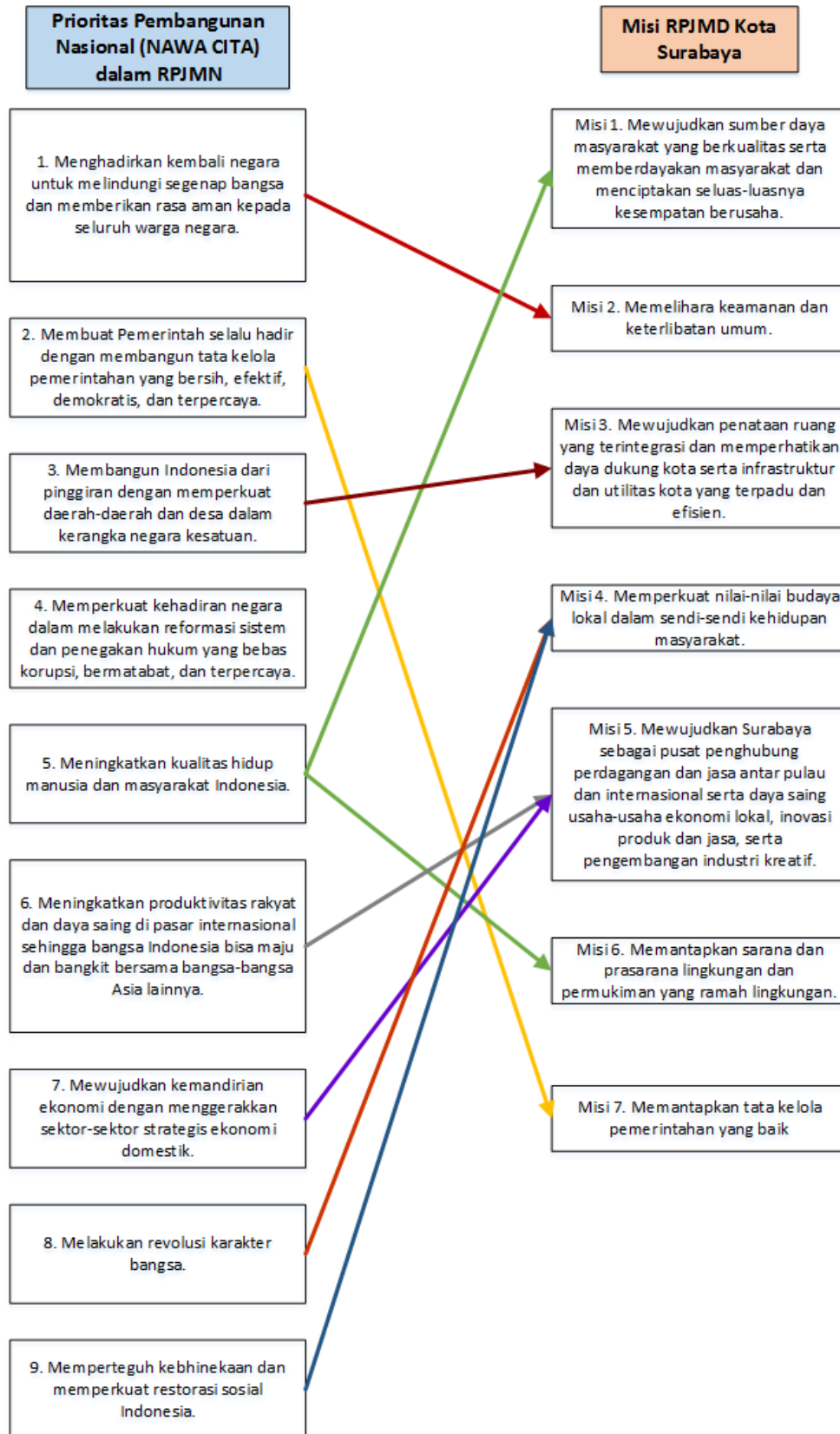
Hubungan antara Misi dan Tujuan Perubahan RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021 dengan Misi RPJMNTahun 2015-2019

Sebagai bagian dari perencanaan nasional, Perubahan RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021 juga mengacu dan mendukung 9 (sembilan) agenda prioritas pembangunan nasional yaitu NAWA CITA. Misi dalam Perubahan RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021 telah mendukung agenda prioritas nasional tersebut kecuali pada Agenda Nomor 4 yaitu Memperkuat Kehadiran Negara Dalam Melakukan Reformasi Sistem dan Penegakan Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya, karena agenda tersebut bukan merupakan kewenangan pemerintah daerah. Hubungan tersebut dapat dilihat pada Gambar I.3.

Sedangkan jika dianalisis berdasarkan hasil analisa terhadap keterkaitan program prioritas nasional dengan program dalam Perubahan RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021, upaya program pembangunan yang direncanakan telah sejalan dengan rencana program prioritas nasional, kecuali pada program-program yang bukan merupakan kewenangan pemerintah daerah maupun program-program yang belum menjadi kebutuhan kota karena tidak memiliki potensi atau kawasan sebagaimana dimaksud, antara lain:

1. Peningkatan Kapasitas IPTEK;
2. Inovasi, dan Daya Saing Perguruan Tinggi;
3. Peningkatan Energi Primer; dan lain sebagainya.

Adapun tabel keterkaitan program prioritas nasional dengan program dalam Perubahan RPJMD Kota Surabaya dijelaskan secara kualitatif pada Lampiran 1.



Gambar I.3

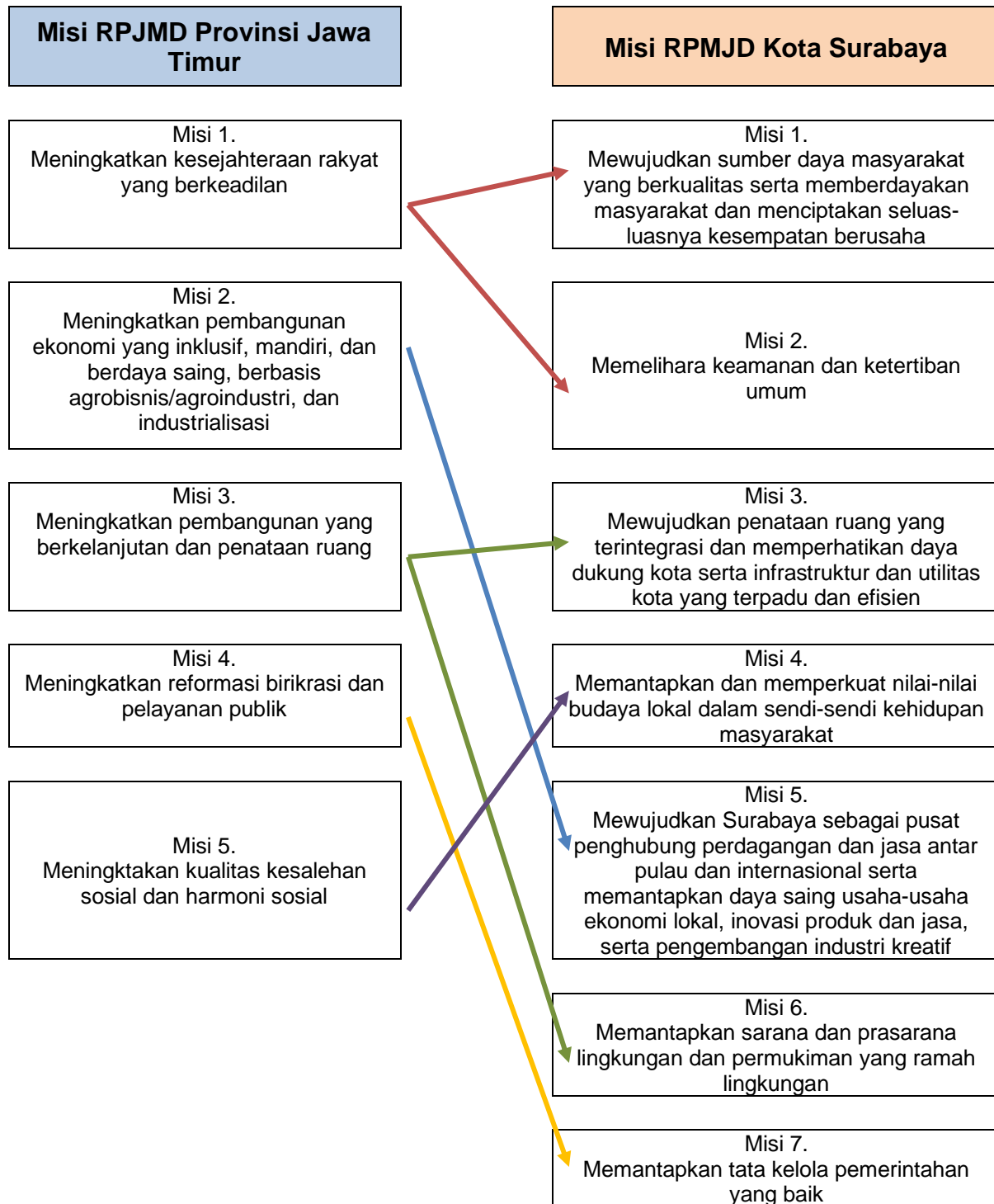
Hubungan antara Misi Perubahan RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021 dengan Agenda Prioritas Pembangunan Nasional (NAWA CITA)

I.3.2 Hubungan Antara Dokumen Perubahan RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021 dengan RPJMD Propinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019

Perubahan RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021 sebagai satu kesatuan dokumen perencanaan pembangunan dan wilayah juga memperhatikan Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Timur 2019-2024. Hal ini dilaksanakan melalui penyelarasan misi Walikota dalam Perubahan RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021 dengan rancangan misi Gubernur dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur 2019-2024. Berdasarkan hasil analisa, perumusan misi dalam kedua dokumen tersebut telah selaras, sebagai berikut:

1. Misi 1 Gubernur telah konsistenterhadap Misi 1 dan 2 Walikota;
2. Misi 2 Gubernur telah konsistenterhadap Misi 5 Walikota;
3. Misi 3 Gubernur konsistenterhadap Misi 3 dan 6 Walikota;
4. Misi 4 Gubernur konsisten terhadap Misi 7 Walikota; dan
5. Misi 5 Gubernur konsisten terhadap Misi 4 Walikota.

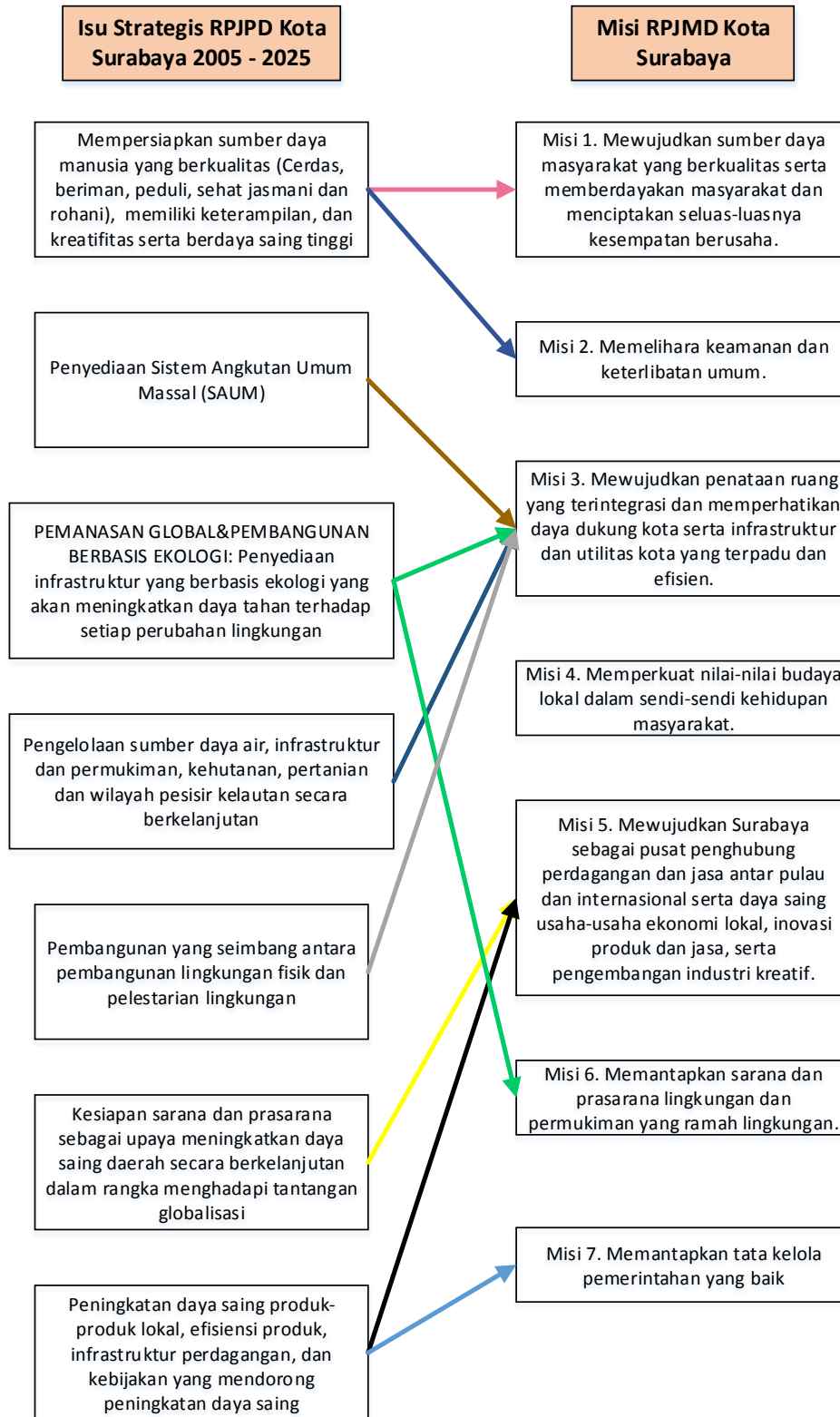
Penjelasan secara rinci dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:



Gambar I.4
Hubungan antara Misi Perubahan RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021 dengan Misi RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019

I.3.3 Hubungan Antara Dokumen Perubahan RPJMD Kota Surabaya dengan RPJPD Kota Surabaya

Dokumen perencanaan jangka menengah merupakan penjabaran dari dokumen perencanaan jangka panjang sehingga dalam penyusunannya, Perubahan RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021 harus mempedomani RPJPD Kota Surabaya Tahun 2005-2025 pada periode lima tahunan ketiga. Analisa terhadap hubungan misi RPJMD dengan isu strategis RPJPD tersebut diperlukan untuk menjamin konsistensi dan keberlanjutan arah pembangunan daerah. Hasil analisa menunjukkan bahwa perumusan misi dalam dalam RPJMD dengan isu strategis RPJPD tersebut telah selaras, yang dapat ditunjukkan melalui gambar sebagai berikut:



Gambar I.5
Hubungan antara Misi Perubahan RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021
dengan Isu Strategis RPJPD Kota Surabaya Tahun 2005-2025

I.3.4 Hubungan antara dokumen Perubahan RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021 dengan RTRW Kota Surabaya Tahun 2014-2034

Dalam penyusunan Perubahan RPJMD Kota Surabaya 2016-2021 telah memperhatikan kesesuaian dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Surabaya Tahun 2014-2034. Penyelarasan dilakukan terhadap program dalam Perubahan RPJMD Kota Surabaya dengan kebijakan, strategi, dan indikasi program dalam RTRW Kota Surabaya Tahun 2014-2034. Adapun kesesuaian antara kebijakan strategi struktur ruang dan pola ruang RTRW dengan program Perubahan RPJMD dapat dilihat pada tabel I.2 dan I.3 di bawah ini. Sedangkan kesesuaian antara program indikasi program RTRW dengan program Perubahan RPJMD dapat dilihat pada Lampiran 2.

Tabel I.2
Hubungan antara Program Perubahan RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021 dengan Kebijakan Strategi Struktur Ruang RTRW Kota Surabaya Tahun 2014-2034

Kebijakan Strategi RTRW Kota Surabaya Tahun 2014-2034	Program RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021
Struktur Ruang	
Strategi pengembangan pusat kegiatan nasional	
Mengembangkan fasilitas sosial-ekonomi kota yang representatif sebagai pusat pelayanan berskala nasional dan internasional	1. Program Perencanaan Kota 2. Program Distribusi Perdagangan
Mengembangkan jaringan infrastruktur terpadu dan berkelanjutan dalam skala kota dan wilayah sekitarnya	1. Program Pengelolaan dan Pembangunan Jalan dan Jembatan 2. Program Peningkatan Sistem Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas 3. Program Pembangunan dan Pemeliharaan Prasarana Transportasi 4. Program pengembangan dan pengelolaan sistem drainase kota 5. Program Pengelolaan dan Peningkatan Utilitas Kota
Strategi pengembangan pusat pelayanan kota	
Mengembangkan pusat pelayanan Kota Surabaya	Program Perencanaan Kota
Mengembangkan pusat pelayanan regional	
Strategi pengembangan sub pusat pelayanan kota	
Menetapkan 3 (tiga) sub pusat pelayanan kota dalam upaya pemerataan pengembangan wilayah kota	Program Perencanaan Kota
Strategi pengembangan pusat lingkungan di wilayah Unit Pengembangan di wilayah darat	



Kebijakan Strategi RTRW Kota Surabaya Tahun 2014-2034	Program RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021
Menetapkan 12 (dua belas) Unit Pengembangan beserta pusatnya dengan spesifikasi fungsi kawasan masing-masing	Program Perencanaan Kota
Membagi setiap Unit Pengembangan menjadi beberapa Unit Distrik (UD) sesuai kondisi masing-masing	
Strategi pengembangan unit pengembangan di wilayah laut	
Menetapkan 4 (empat) unit pengembangan di wilayah laut dengan mempertimbangkan karakter dan potensi masing-masing wilayah	Program Penataan Ruang
Strategi pengembangan sistem jaringan transportasi	
Mengembangkan transportasi darat	Program Pengelolaan dan Pembangunan Jalan dan Jembatan Program Peningkatan Sistem Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Program Pembangunan dan Pemeliharaan Prasarana Transportasi
Mengembangkan transportasi perkeretaapian secara terpadu dan terintegrasi dengan moda transportasi lainnya melalui peningkatan kapasitas sarana dan prasarana, perluasan jaringan serta penataan kawasan sekitar angkutan massal cepat berbasis rel	Program Distribusi Perdagangan
Mengembangkan sistem jaringan transportasi laut dengan mengoptimalkan fungsi dan peranan pelabuhan Tanjung Perak secara terintegrasi dengan pengembangan Pelabuhan di kawasan Teluk Lamong dan pelabuhan disekitarnya	
Mengembangkan prasarana penunjang jaringan transportasi udara dengan mengembangkan infrastruktur jalan dan interkoneksi moda transportasi yang menghubungkan terminal/stasiun dengan bandara	
Mengembangkan sistem jaringan transportasi darat, perkeretaapian, laut dan udara secara terpadu dan terkoneksi sebagai satu kesatuan sistem	
Strategi pengembangan sistem jaringan energi	
Mengembangkan jaringan gas kota yang dilakukan secara terpadu dengan sistem jaringan gas Provinsi Jawa Timur dan Nasional untuk meningkatkan kapasitas dan memperluas jaringan	Program Upaya Konservasi Energi
Meningkatkan pelayanan dan memperluas jaringan listrik termasuk mengembangkan jaringan listrik bawah tanah untuk memenuhi kebutuhan listrik kota	Program Pengembangan dan Pemanfaatan energi alternatif
Mengembangkan sumber energi alternatif untuk memenuhi kebutuhan listrik kota	
Strategi pengembangan sistem jaringan telekomunikasi	
Meningkatkan jangkauan pelayanan jaringan telekomunikasi khususnya untuk kawasan yang baru dikembangkan	1. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

Kebijakan Strategi RTRW Kota Surabaya Tahun 2014-2034	Program RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021
Meningkatkan pelayanan jaringan telepon nirkabel melalui penggunaan secara bersama menara telekomunikasi antar operator layanan telekomunikasi	2. Program Pengelolaan informasi dan Komunikasi Publik 3. Program Pengelolaan dan Peningkatan Utilitas Kota
Memperluas penggunaan teknologi informasi yang didukung penyediaan jaringan internet nirkabel pada berbagai kawasan fungsional di Kota Surabaya	
Strategi pengembangan sistem jaringan sumber daya air	
Mengembangkan prasarana sumberdaya air untuk air minum melalui pengoptimalan pemanfaatan sumber air permukaan dan sumber air lainnya	Program Pembangunan Jaringan Air Bersih Perkotaan
Meningkatkan tampungan/resapan air melalui pengoptimalan fungsi tampungan untuk wisata air, penataan lingkungan, konservasi serta pengendalian banjir	
Strategi pengembangan sistem jaringan infrastruktur perkotaan	
Meningkatkan jangkauan pelayanan air minum melalui perluasan cakupan pelayanan air minum	Program Pembangunan Jaringan Air Bersih Perkotaan
Meningkatkan kuantitas dan kualitas air menjadi layak dan siap minum pada kawasan budidaya yang dilakukan secara bertahap	
Mengoptimalkan dan membangun jaringan pelayanan hidran umum melalui pengintegrasian antara hidran dengan saluran sekunder perpipaan air bersih	
Mengelola limbah domestik kota untuk mengurangi tingkat pencemaran lingkungan, melalui penyediaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) terpusat dan IPAL Komunal secara terpadu	Program Pengendalian dan Pengawasan Dampak Lingkungan
Mengembangkan sistem pengelolaan sampah dengan pengurangan volume, penggunaan kembali dan pendaurulangan sampah	1. Program Peningkatan Sarana Prasarana Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau 2. Program Pengendalian dan Pengawasan Dampak Lingkungan
Mengoptimalkan fungsi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dan sarana prasarana kebersihan	
Mengembangkan teknologi persampahan yang ramah lingkungan	
Mengembangkan sistem drainase secara terpadu dengan memaksimalkan fungsi drainase sebagai saluran pematasan air hujan dan mengurangi genangan	Program pengembangan dan pengelolaan sistem drainase kota
Mengembangkan dan meningkatkan kualitas penyediaan prasarana jalur pejalan kaki dan jalur kendaraan tidak bermotor	Program Pengelolaan dan Peningkatan Utilitas Kota
Menyediakan jalur evakuasi bencana terhadap banjir, kebakaran dan bencana lainnya seperti gempa bumi dan lainlain di kawasan rawan bencana	1. Program Penanggulangan Bencana Kebakaran 2. Program Penanggulangan Bencana Alam
Menyediakan prasarana-sarana perkotaan lainnya	1. Program Pengelolaan dan Peningkatan Pelayanan PJU 2. Program Pengelolaan dan Peningkatan Utilitas Kota 3. Program Pengelolaan dan Pembangunan Jalan dan Jembatan



Tabel I.3
Hubungan antara Program Perubahan RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021 dengan Kebijakan Strategi Pola Ruang RTRW Kota Surabaya Tahun 2014-2034

Kebijakan Strategi RTRW Kota Surabaya tahun 2014-2034	Program RPJMD Kota Surabaya tahun 2016-2021
Pola Ruang	
Kawasan Lindung	
Strategi penetapan dan pelestarian kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya	
Mengoptimalkan ruang terbuka hijau dan/atau waduk/boezem sebagai daerah resapan air	Program Pengelolaan dan Peningkatan Ruang Terbuka Hijau
Mengendalikan pelaksanaan pembangunan pada daerah resapan air	Program Penataan Ruang
Strategi penetapan dan pelestarian kawasan perlindungan setempat	
Mengendalikan dan memantapkan fungsi kawasan sempadan pantai sebagai fungsi lindung untuk mencegah abrasi pantai, intrusi air laut, dan aktifitas yang merusak kelestarian pantai serta sebagai penunjang kegiatan pariwisata	Program Pengelolaan dan Peningkatan Ruang Terbuka Hijau
Mengendalikan dan memantapkan fungsi kawasan sempadan sungai untuk fungsi lindung dan penunjang kegiatan pariwisata	
Mengendalikan dan memantapkan fungsi kawasan sempadan waduk/boezem dengan perlindungan kawasan sekitarnya untuk kelestarian hidrologis dan penunjang wisata alam	
Mengendalikan dan memantapkan fungsi kawasan sempadan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)/Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) untuk fungsi lindung dengan pengendalian jarak bebas minimum dan pengendalian pembangunan	
Mengendalikan dan memantapkan fungsi kawasan sempadan rel kereta api dengan menetapkan jarak sempadan dan pengembangan fungsi lindung untuk kepentingan keamanan jalur perkeretaapian	
Strategi penetapan dan pelestarian kawasan pelestarian alam dan cagar budaya	
Mengendalikan dan memantapkan fungsi kawasan pelestarian alam dan cagar budaya sekaligus sebagai penunjang wisata alam dan pendidikan	Program perlindungan budaya lokal
Menetapkan batas kawasan pelestarian alam untuk mempertegas batasan kawasan antara kawasan pelestarian alam dengan kawasan budidaya maupun kawasan lainnya	Program Penataan Ruang
Mengendalikan secara ketat pemanfaatan lahan pada kawasan pelestarian alam dan cagar budaya yang bertentangan dan berpotensi merusak fungsi lindung	Program Pengelolaan dan Peningkatan Ruang Terbuka Hijau
Memantapkan fungsi perlindungan kawasan cagar budaya dengan pengendalian pelaksanaan pembangunan pada lingkungan dan bangunan cagar budaya	Program perlindungan budaya lokal

Kebijakan Strategi RTRW Kota Surabaya tahun 2014-2034	Program RPJMD Kota Surabaya tahun 2016-2021
Strategi penetapan dan pelestarian kawasan ruang terbuka hijau	
Menetapkan dan mengoptimalkan fungsi ruang terbuka hijau publik sebesar 20 (dua puluh) persen dari luas wilayah Kota Surabaya yang persebarannya disesuaikan dengan kebutuhan ruang terbuka hijau kota	Program Pengelolaan dan Peningkatan Ruang Terbuka Hijau
Mengatur pemanfaatan ruang terbuka hijau privat sebesar 10 (sepuluh) persen, melalui pengendalian intensitas ruang dan bangunan dengan perijinan bangunan pada wilayah terbangun kota	
Melestarikan ruang terbuka hijau untuk fungsi lindung, penciptaan iklim mikro, pereduksi polutan, serta pengendalian pelestarian lingkungan kota	
Strategi penetapan dan pelestarian kawasan rawan bencana	
Membuat klasifikasi tingkat kerentanan, upaya pengelolaan jalur evakuasi dan wilayah manajemen bencana, mitigasi dan jalur evakuasi bencana pada kawasan rawan banjir, kebakaran dan bencana lainnya seperti gempa bumi dan lain-lain	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Penanggulangan Bencana Alam 2. Program Penanggulangan Bencana Kebakaran
Strategi penetapan dan pelestarian kawasan lindung wilayah laut	
Menetapkan fungsi kawasan, peruntukan, dan upaya pengelolannya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Penegakan Peraturan Daerah Bidang Sarana Prasarana Wilayah 2. Program Penegakan Peraturan Daerah Bidang Ekonomi 3. Program Penegakan Peraturan Daerah Bidang Sosial 4. Program Pengembangan Kapasitas Aparatur Polisi Pamong Praja
Strategi penetapan kawasan strategis	
Mempertimbangkan potensi, daya dukung dan upaya pelestarian lingkungan pada kawasan lindung	Program Penataan Ruang
Kawasan Budidaya	
Strategi pengembangan kawasan perumahan dan permukiman	
Mengembangkan dan menata kepadatan perumahan dan permukiman kepadatan tinggi, sedang dan rendah secara proporsional dalam memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman 2. Program Penataan Ruang
Meningkatkan kualitas lingkungan kawasan perumahan dan permukiman, dan memperluas penyediaan perumahan vertikal	
Mengembangkan kawasan perumahan dan permukiman baru yang terintegrasi dengan kawasan sekitarnya	
Mewujudkan pembangunan kawasan perumahan dan permukiman dengan hunian berimbang yang meliputi pembangunan rumah sederhana, rumah menengah dan rumah mewah secara proporsional sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku	



Kebijakan Strategi RTRW Kota Surabaya tahun 2014-2034	Program RPJMD Kota Surabaya tahun 2016-2021
Strategi pengembangan kawasan perdagangan dan jasa	
Mengembangkan pusat perbelanjaan secara terintegrasi dalam skala unit pengembangan, koridor dan kawasan	Program pemanfaatan dan pengendalian tata ruang kota
Mengembangkan dan merevitalisasi pasar tradisional	1. Program Pengembangan Sentra Usaha 2. Program Pengembangan Produk Usaha Mikro
Mengembangkan toko modern dalam tingkat unit lingkungan yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan yang mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi dan ketentuan yang berlaku	Program Pengembangan Produk Usaha Mikro
Mengembangkan pusat perdagangan dan jasa serta usaha perdagangan maupun usaha jasa komersial lainnya pada setiap unit pengembangan	Program Penataan Ruang
Strategi pengembangan kawasan perkantoran	
Mempertahankan fungsi perkantoran yang telah ada Mengembangkan pemusatan layanan perkantoran pemerintah/pemerintah provinsi/pemerintah daerah secara berhirarki pada kawasan pelayanan publik; Mengembangkan perkantoran swasta pada pusat-pusat pelayanan kota	Program Penataan Ruang
Strategi pengembangan kawasan peruntukan industri	
Mengembangkan kawasan peruntukan industri yang ramah lingkungan	Program Penataan Ruang
Mengembangkan kawasan penyangga (<i>buffer zone</i>) pada kawasan peruntukan industri besar dan menengah untuk upaya pelestarian lingkungan	
Meningkatkan peran industri kecil dan industri rumah tangga sebagai sentra industri yang berperan dalam mendukung perekonomian masyarakat kota	
Menjaga kualitas lingkungan pada kawasan peruntukan industri	
Strategi pengembangan kawasan pariwisata	
Mengintegrasikan fungsi pariwisata pada berbagai kawasan fungsional kota lainnya	1. Program pengembangan destinasi wisata 2. Program pemasaran pariwisata
Mengembangkan obyek wisata tematik yang terintegrasi sebagai satu sistem kepariwisataan baik di dalam kota maupun sekitar wilayah kota	
Menyediakan area khusus untuk pameran produk usaha serta pagelaran acara wisata	
Mengembangkan obyek wisata potensial berbasis bahari	
Memperluas dan meningkatkan jaringan transportasi menuju kawasan dan tempat wisata	
Strategi pengembangan kawasan ruang terbuka non hijau	
Mengembangkan fungsi kawasan ruang terbuka non hijau sebagai satu kesatuan sistem yang menghubungkan sistem jaringan pada satu kawasan atau antar kawasan	Program Penataan Ruang

Kebijakan Strategi RTRW Kota Surabaya tahun 2014-2034	Program RPJMD Kota Surabaya tahun 2016-2021
Mengembangkan estetika, keterpaduan dan kenyamanan pada setiap kawasan ruang terbuka non hijau	
Strategi penyediaan kawasan ruang evakuasi bencana	
Menggunakan ruang terbuka hijau dan non hijau yang ada pada setiap lingkungan untuk ruang evakuasi bencana	1. Program Penanggulangan Bencana Alam 2. Program Penanggulangan Bencana Kebakaran
Menggunakan ruang-ruang dan bangunan lainnya yang dapat dimanfaatkan menjadi ruang evakuasi bencana	
Strategi penyediaan kawasan kegiatan sektor usaha informal	
Menyediakan ruang bagi kegiatan sektor usaha informal pada kawasan budidaya secara proporsional	1. Program Pengembangan Sentra Usaha 2. Program Pengembangan Produk Usaha Mikro
Mengintegrasikan antara ruang untuk pemanfaatan kegiatan sektor usaha informal dan sektor usaha formal dalam satu kesatuan sistem	1. Program Pengembangan Sentra Usaha 2. Program Pengembangan Produk Usaha Mikro
Mendukung penyediaan kebutuhan sarana dan prasarana pendukung bagi kegiatan sektor usaha informal	Program Pengembangan Produk Usaha Mikro
Strategi pengembangan kawasan peruntukan lainnya	
Mengembangkan kawasan pendidikan dan pendistribusikan fasilitas pendidikan yang berjenjang secara merata	Program Pengembangan Sekolah Dasar
	Program Peningkatan Mutu Guru dan Tenaga Kependidikan
	Program Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan masyarakat dan kesenian olahraga pendidikan
Mengembangkan fasilitas kesehatan yang berhirarki serta peningkatan pelayanan fasilitas kesehatan yang memenuhi standar pelayanan	Program Jaminan Kesehatan
	Program Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak
	Program Pengembangan Pola Hidup Bersih Sehat Masyarakat
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit
	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Rumah Sakit
	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Puskesmas/Puskesmas Pembantu Program Keluarga Berencana



Kebijakan Strategi RTRW Kota Surabaya tahun 2014-2034	Program RPJMD Kota Surabaya tahun 2016-2021
	Program Peningkatan Ketersediaan, Keanekaragaman dan Keamanan Pangan
Mengembangkan dan menyediakan fasilitas peribadatan yang tersebar di wilayah Kota Surabaya dan dapat menjamin penyelenggaraan kegiatan ibadah bagi setiap umat beragama	Program Penataan Ruang
Mengatur secara terkoordinasi pengembangan kawasan pertahanan dan keamanan negara, serta mengendalikan perkembangan pembangunan secara fisik pada kawasan disekitarnya	Program Kesatuan Bangsa
Mengembangkan kawasan pelabuhan yang terintegrasi dengan kawasan sekitarnya	Program Penataan Ruang
Strategi pengembangan kawasan budidaya wilayah laut	
Menetapkan dan mengendalikan fungsi kawasan, peruntukan dan pengelolaannya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Penegakan Peraturan Daerah Bidang Sarana Prasarana Wilayah 2. Program Penegakan Peraturan Daerah Bidang Ekonomi 3. Program Penegakan Peraturan Daerah Bidang Sosial 4. Program Pengembangan Kapasitas Aparatur Polisi Pamong Praja
Strategi pengembangan kawasan strategis	
Memperhatikan potensi, daya dukung lingkungan serta kesesuaian rencana tata ruang	Program Pengendalian dan Pengawasan Dampak Lingkungan

I.3.5 Hubungan antara dokumen Perubahan RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021 dengan RPJMD Kabupaten / Kota sekitarnya

Hasil analisa hubungan menunjukkan adanya konsistensi Perubahan RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021 terhadap RPJMD kabupaten/kota lain yang berbatasan dalam visi dan misipembangunan. Meskipun dalam rumusan detail di setiap visi dan misi terkadang berbeda, akan tetapi secara substansi dan makna tetap terdapat ada hubungan atau kesamaan. Hal yang perlu diperhatikan adalah meskipun visi misi tersebut memiliki kesamaan, namun bisa berbeda dalam penjabarannya ke dalam tujuan, sasaran dan program karena tiap daerah memiliki ciri khas potensi dan permasalahan yang berbeda. Perbedaan potensi dan masalah ini juga menjadi dasar untuk menentukan fungsi khusus suatu daerah dalam sebuah sistem pembangunan wilayah/regional yang lebih makro. Fungsi khusus berpengaruh pada program yang akan dilaksanakan oleh daerah tersebut. Berikut adalah tabel yang menjelaskan Hubungan Isu Strategis Perubahan RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021 dengan Isu Strategis RPJMD kota sekitar.



Tabel I.4
Hubungan antara Isu Strategis Perubahan RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021 dengan Isu Strategis RPJMD Kabupaten/Kota Sekitar

Perubahan RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021		RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021	RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2021	RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2016-2021
No	Isu Strategis	Isu Strategis	Isu Strategis	Isu Strategis
1.	Kebutuhan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dalam Persaingan Global.	Kualitas dan pemerataan pendidikan rendah	Masih rendahnya tingkat pendidikan masyarakat dan rendahnya akses pelayanan pendidikan kepada masyarakat	Atribusi Layanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan
		Belum optimalnya layanan dan Akses Kesehatan	Masih rendahnya tingkat pendidikan masyarakat dan rendahnya akses pelayanan pendidikan kepada masyarakat	Kesejahteraan Sosial; a. Penanggulangan Kemiskinan; b. Ketenagakerjaan; c. Kondusifitas Daerah; d. Penegakan Hak Asasi Manusia.
		Rendahnya aksesibilitas kesehatan bagi masyarakat miskin	Belum adanya puskesmas dan RS yang terakreditasi.	Pengarustamaan Gender
		Perselisihan perusahaan dan tenaga kerja meningkat	Belum tercapainya desa ODF, belum tersedianya pengolahan limbah medis di fasyankes.	
		Jumlah PMKS yang meningkat	Masih tingginya angka kematian ibu, bayi, penyakit menular, dan tidak menular	
		Penanggulangan Kemiskinan	Masih tingginya kasus gizi buruk, balita stunting, dan obesitas	
		Sarana dan prasarana kegiatan Kepemudaan yang masih minim	Nakes yang ada masih belum sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan	
			Kurangnya dukungan dana dan aktivitas kader di desa siaga yang berasal dari pemerintah desa mengingat desa siaga adalah milik	



Perubahan RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021		RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021	RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2021	RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2016-2021
No	Isu Strategis	Isu Strategis	Isu Strategis	Isu Strategis
			<p>desa dan masih kurangnya peran serta dari unsur dunia usaha.</p> <p>Peningkatan jumlah pencari kerja di Kabupaten Mojokerto pada tahun 2014 dari tahun sebelumnya. Selama 2014 jumlah pencari kerja sebanyak 4.247 orang, dimana pada 2013 sebanyak 3.996 orang.</p> <p>Meningkatnya jumlah pencari kerja</p> <p>Tingginya jumlah penduduk miskin mencapai angka 60.829 RTM atau 180.616 jiwa atau 16,88% dari jumlah penduduk Kabupaten Mojokerto</p>	
2.	Terpeliharanya Stabilitas Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam Kerukunan Tata Kehidupan Bermasyarakat.	Pencegahan konflik berbau SARA, dan Politik	<p>Masih sering terjadinya konflik antar umat beragama</p> <p>Belum optimalnya pembangunan keagamaan serta kesamaan pandangan pluraritas agama, suku, dan budaya</p> <p>Belum tersedianya database pengembangan adat dan sosial budaya masyarakat</p> <p>Masih tingginya angka kriminalitas serta rendahnya penegakan hukum</p> <p>Masih tingginya angka kriminalitas serta rendahnya penegakan hukum</p>	
3.	Keseimbangan Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan dalam Mendukung Keberlanjutan Ekologi.	Pencemaran lingkungan dan kerusakan sumber daya alam seiring dengan pesatnya sektor industri dan perdagangan	Belum seluruh wilayah di Kabupaten Mojokerto memiliki dokumen Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) terbaru atau belum lengkapnya	Pembangunan Berkelanjutan berwawasan lingkungan; a. Ketersediaan Air Minum Layak, Pengentasan Kawasan Kumuh, dan Pelayanan Sanitasi Dasar



Perubahan RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021		RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021	RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2021	RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2016-2021
No	Isu Strategis	Isu Strategis	Isu Strategis	Isu Strategis
			dokumen perencanaan yang lain yang terkait satu sama lainnya	b. Konektivitas Daerah c. Permukiman Inklusif d. Pengendalian Banjir e. Lingkungan Hidup f. Agenda Pembangunan Tata Ruang Wilayah Gresik
		Arah dan Komitmen Pemerintah dalam Mewujudkan Industri Ramah Lingkungan		
		Penanggulangan Banjir		
		Pencemaran Industri		
		Ruang Terbuka Hijau (RTH)		
		Pelayanan Persampahan		
		Limbah Domestik		
		Program 100-0-100		
		Menurunnya kualitas permukiman sehingga tumbuh kawasan kumuh di perkotaan		
		LP2B (Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan)		
		Letak Kabupaten yang Strategis dengan ibukota provinsi dan wilayah Gerbangkertasusila.		
4.	Melestarikan Budaya Lokal untuk Menunjung Tinggi Nilai-Nilai Luhur Kehidupan Masyarakat.	Degradasi Kebudayaan Lokal		
5.	Posisi Strategis Kota Surabaya yang Berpotensi sebagai Penghubung	Interchanges Tol dengan Kawasan Wilayah Barat Sidoarjo	Masih rendahnya kualitas infrastruktur jalan sebagai penghubung antar daerah dan pusat pertumbuhan	Kemandirian Ekonomi dan Ketahanan Pangan



Perubahan RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021		RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021	RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2021	RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2016-2021
No	Isu Strategis	Isu Strategis	Isu Strategis	Isu Strategis
	Perekonomian dalam Skala Nasional dan Internasional.	Frontage Road (FR)	Belum terkelolanya keuangan dan aset daerah secara optimal seperti kurangnya aksi promosi untuk aset pariwisata	
		Iklim investasi yang Kondusif	Belum berkembangnya sektor pariwisata dalam mendukung perekonomian daerah	
		Lemahnya UMKM (bukan hanya dibandingkan swalayan)		
		Belum produktifnya usaha ekonomi dan Kemandirian Pemerintahan Desa		
		Pengembangan Kawasan Geowisata		
		Belum berkembangnya sektor industri kreatif dalam mendorong sektor pariwisata		
		Potensi Unggulan pada Sektor Industri pengolahan, ekonomi kreatif dan perikanan.		
		Kemacetan		
6.	Tuntutan Masyarakat terhadap Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.	Lemahnya kapasitas kelembagaan dalam tata kelola pemerintahan		Peningkatan Pelayanan Publik dan Kualitas Data Pembangunan
		Lemahnya inovasi untuk menunjang pelayanan publik pada penyelenggaraan pemerintah kabupaten maupun pemerintah desa		Kemandirian Desa
		Komitmen Terhadap Reformasi Birokrasi		
		RTRW		
		Peningkatan pada penerimaan Retribusi dan pajak daerah		



Perubahan RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021		RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021	RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2021	RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2016-2021
No	Isu Strategis	Isu Strategis	Isu Strategis	Isu Strategis
		Optimalisasi Corporate Social Responsibility (CSR), Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), Kerjasama dengan Swasta		
7.	Peningkatan Insfrastruktur untuk Mendukung Peran dan Daya Saing Kota Surabaya dalam Menghadapi Persaingan Global.	Afirmasi pusat terhadap infrastruktur	Belum optimalnya pembangunan di daerah pertumbuhan.	Akselerasi pembangunan melalui Sistem Inovasi Daerah dan Gresik Smart City
		Smart City	Lemahnya pemanfaatan teknologi informasi sehingga kualitas pelayanan publik masih rendah seperti kurang memaksimalkan peran web untuk keperluan publikasi dan promosi wisata	
		Pembangunan jalan baru	Kurang optimalnya penyelenggaraan pemerintahan seperti banyaknya organisasi desa masih belum tertata sesuai dengan kriteria, kurangnya sarana dan prasarana pemerintahan serta pemanfaatan data atau profil suatu instansi pemerintahan	
		Pengembangan Kawasan Aerocity / Aerotropolis		
		Permukiman		



I.4 Maksud dan Tujuan

I.4.1 Maksud

Perubahan RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021 dimaksudkan untuk mempertimbangkan hal-hal sebagaimana yang diatur dalam Pasal 342 Ayat (1) Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa:

- a) hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri ini;
- b) hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan Menteri ini
- c) terjadi perubahan yang mendasar.

Perubahan yang mendasar dijelaskan dalam Ayat (3) yaitu mencakup terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

Telah dilakukan pengendalian dan evaluasi terkait huruf a dan b di atas yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri baik proses perumusan maupun substansi. Sedangkan dari aspek kebijakan nasional terdapat pemutakhiran sebagaimana yang disebutkan dalam Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor: 050/4936/Sj Nomor: 0430/M.Ppn/12/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 sehingga substansi yang telah ditulis dalam dokumen RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021 harus diperiksa dan dilakukan penyelarasan serta penyesuaian. Dengan demikian, perubahan RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021 harus dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Surabaya.



Pelaksanaan perubahan RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021 sesuai ketentuan sebagaimana Pasal 342 Ayat (2) bahwa perubahan RPJMD terkait poin a dan b tidak dapat dilakukan jika sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 tahun. Tahun 2019 merupakan tahun terakhir untuk melakukan perubahan RPJMD, oleh karena itu Pemerintah Kota Surabaya melaksanakan perubahan RPJMD ini pada tahun 2019.

I.4.2 Tujuan

Perubahan RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021 disusun dengan tujuan sebagai berikut:

- a. Sebagai pedoman bagi kepala organisasi perangkat daerah dalam menyusun dokumen perencanaan, diantaranya Perubahan Renstra Perangkat Daerah (Renstra-PD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD)
- b. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
- c. Sebagai pedoman dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPJMD
- d. Sebagai acuan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

I.5 Sistematika Penulisan

Sistematika Penyusunan Perubahan RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Rancangan Awal Perubahan RPJMD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang RPJMD, proses penyusunan RPJMD, kedudukan RPJMD tahun rencana dalam RPJPD, keterkaitan antara dokumen RPJMD dengan dokumen RKPD dan Renstra Perangkat Daerah.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan



Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RPJMD, baik yang berskala nasional, maupun lokal.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Bagian ini menjelaskan hubungan RPJMD dengan dokumen lain yang relevan beserta penjelasannya. Keterhubungan dengan dokumen lain seperti: RPJMD, RPJPD, RPJMD Provinsi, RTRW Nasional, RTRW Provinsi, dan RTRW kab/kota.

1.4. Maksud dan Tujuan

Memberikan uraian ringkas tentang tujuan penyusunan dokumen RPJMD bagi daerah yang bersangkutan dan sasaran penyusunan dokumen RPJMD bagi daerah yang bersangkutan.

1.5. Sistematika Penulisan

Mengemukakan organisasi penyusunan dokumen RPJMD terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab didalamnya.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bab ini menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

Pada bagian ini dijelaskan kondisi umum geografis mengenai kondisi geografi daerah, potensi pengembangan wilayah, dan wilayah rawan bencana.

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Pada bagian ini dijelaskan kondisi umum kesejahteraan masyarakat sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan.

2.3. Aspek Pelayanan Umum

Pada bagian ini dijelaskan kondisi umum aspek pelayanan umum sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan.

2.4. Aspek Daya Saing Daerah

Pada bagian ini dijelaskan kondisi umum aspek daya saing daerah sebagai bagian dari indikator kinerja secara keseluruhan.



BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini menyajikan gambaran hasil pengolahan data dan analisis terhadap pengelolaan keuangan daerah.

3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu

3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

Bagian ini menguraikan perkembangan pendapatan dan belanja tidak langsung, proporsi sumber pendapatan, pencapaian kinerja pendapatan, dan gambaran realisasi belanja daerah.

3.1.2. Neraca Daerah

Bagian ini menguraikan sekurang-kurangnya mengenai perkembangan neraca daerah, analisis rasio likuiditas, analisis rasio solvabilitas dan analisis rasio aktivitas.

3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Pada bagian ini dijelaskan gambaran kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu terkait proporsi penggunaan anggaran dan hasil analisis pembiayaan.

3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran

Dalam bagian ini diuraikan mengenai proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur dan proporsi realisasi belanja.

3.2.2. Analisis Pembiayaan

Dalam bagian ini diuraikan mengenai analisis pembiayaan.

3.3. Kerangka Pendanaan

3.3.1. Proyeksi Pendapatan dan Belanja

Dalam bagian ini diuraikan mengenai proyeksi data masa lalu dan asumsi yang digunakan untuk memproyeksi serta kebijakan-kebijakan yang mempengaruhi proyeksi data.

3.3.2. Penghitungan Kerangka Pendanaan

Dalam bagian ini diuraikan sekurang-kurangnya mengenai perhitungan kerangka pendanaan dengan tujuan untuk mengetahui kapasitas riil kemampuan keuangan daerah dan rencana penggunaannya.



BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

Bab ini akan menguraikan tentang permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis.

4.1 Permasalahan Pembangunan

Permasalahan pembangunan yang disajikan adalah permasalahan pada penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang relevan yang berdasarkan analisis yang merujuk pada identifikasi permasalahan pembangunan daerah dalam perumusan rancangan awal RPJMD.

4.2 Isu Strategis

Isu strategis dapat berasal dari permasalahan pembangunan yang dianggap paling prioritas untuk diselesaikan maupun isu dari dunia internasional, nasional, maupun regional.

BAB V VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

Bab ini menguraikan tentang visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah disepakati.

5.1 Visi

Dalam bagian ini diuraikan sekurang-kurangnya:

- a. Pengantar bagian ini, misalnya diuraikan mengenai visi RPJMD;
- b. Uraian visi kepala daerah terpilih dan jangka waktunya; dan
- c. Artikulasi atau penjelasan kata-kata kunci dari pernyataan visi.

5.2 Misi

Dalam bagian ini diuraikan sekurang-kurangnya:

- a. Maksud perumusan misi;
- b. Pernyataan misi merupakan penjabaran dari visi dengan bahasa yang jelas, ringkas dan mudah dipahami; dan
- c. Penjelasan masing-masing misi.

5.3 Tujuan dan Sasaran

Dalam bagian ini diuraikan sekurang-kurangnya:

- a. Uraian mengenai apa itu tujuan dan apa itu sasaran serta bagaimana merumuskannya;
- b. Uraian pernyataan tujuan-tujuan dengan bahasa yang jelas, ringkas dan mudah dipahami;
- c. Uraian pernyataan sasaran-sasaran dengan bahasa yang jelas, ringkas dan mudah dipahami; serta



- d. Menggambarkan keterkaitan elemen-elemen perencanaan dalam suatu tabel/matrik.

BAB VI STRATEGI,ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini menguraikan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih. Selain itu diberikan penjelasan hubungan setiap strategi dengan arah dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Program pembangunan daerah dirumuskan dari masing-masing strategi untuk mendapatkan program prioritas. Program pembangunan daerah menggambarkan kepaduan program prioritas terhadap sasaran pembangunan melalui strategi yang dipilih.

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam renstra Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, pagu indikatif target, Perangkat Daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan.

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.

BAB IX PENUTUP



BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Aspek Geografi dan Demografi

Kota Surabaya secara geografis terletak pada 7° 21' Lintang Selatan dan 112° 36' sampai dengan 112° 54' Bujur Timur, secara umum kondisi topografi Kota Surabaya memiliki ketinggian tanah antara 0-20 meter di atas permukaan laut, sedangkan pada daerah pantai ketinggiannya berkisar antara 1-3 meter di atas permukaan laut.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya nomor 12 tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya luas wilayah Kota Surabaya Tahun 2014-2034 bahwa luas wilayah Kota Surabaya meliputi daratan seluas ± 33.451,14 Ha dengan wilayah laut sejauh 1/3 dari wilayah kewenangan Propinsi Jawa Timur.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penggabungan Kelurahan Di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya, bahwawilayah Kota Surabaya terbagi menjadi 31 Kecamatan dan 154 Kelurahan, dengan batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Laut Jawa dan Selat Madura;
- Sebelah Selatan : Kabupaten Sidoarjo;
- Sebelah Timur : Selat Madura;
- Sebelah Barat : Kabupaten Gresik.

2.1.1 Kondisi Kependudukan Kota Surabaya

Jumlah penduduk Kota Surabaya berdasarkan hasil pencatatan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya sampai dengan akhir tahun 2018 sebanyak 3.094.732 jiwa. Komposisi berdasarkan jenis kelamin, kelompok usia, dan kelompok pendidikan diuraikan sebagai berikut.

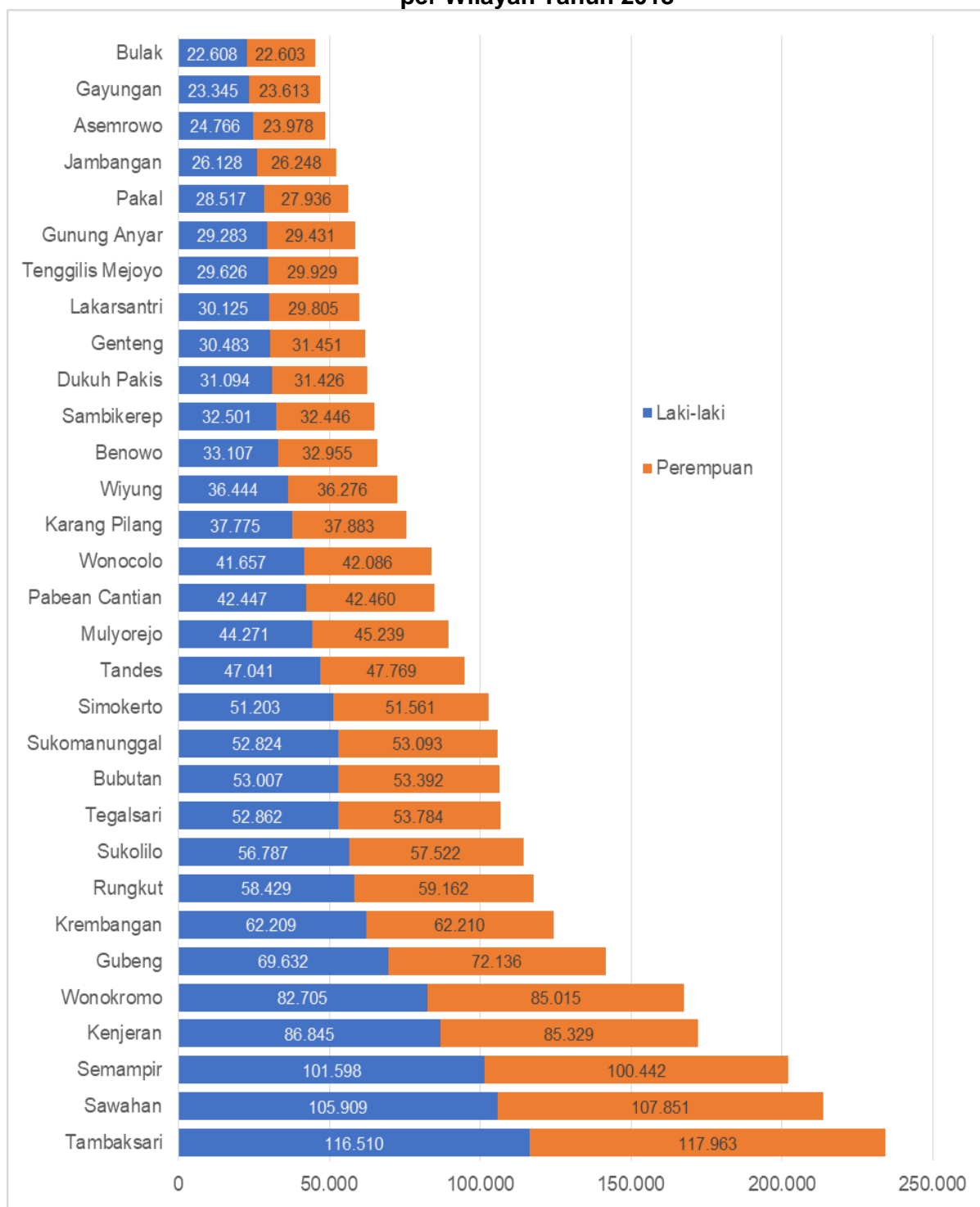
1) Komposisi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Komposisi penduduk Kota Surabaya pada tahun 2018 berdasarkan jenis kelamin meliputi 1.552.994 jiwa atau 50,18% penduduk perempuan dan 1.541.738 jiwa atau 49,82% penduduk laki-laki. Sedangkan komposisi penduduk berdasarkan persebaran tiap kecamatan menunjukkan bahwa jumlah penduduk terbanyak berada di Kecamatan Tambaksari yaitu 234.473 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk yang



paling sedikit terdapat di Kecamatan Bulak yaitu 45.211 jiwa. Komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin per wilayah disajikan pada gambar berikut.

Gambar II.1 Jumlah Penduduk Kota Surabaya Berdasarkan Jenis Kelamin per Wilayah Tahun 2018



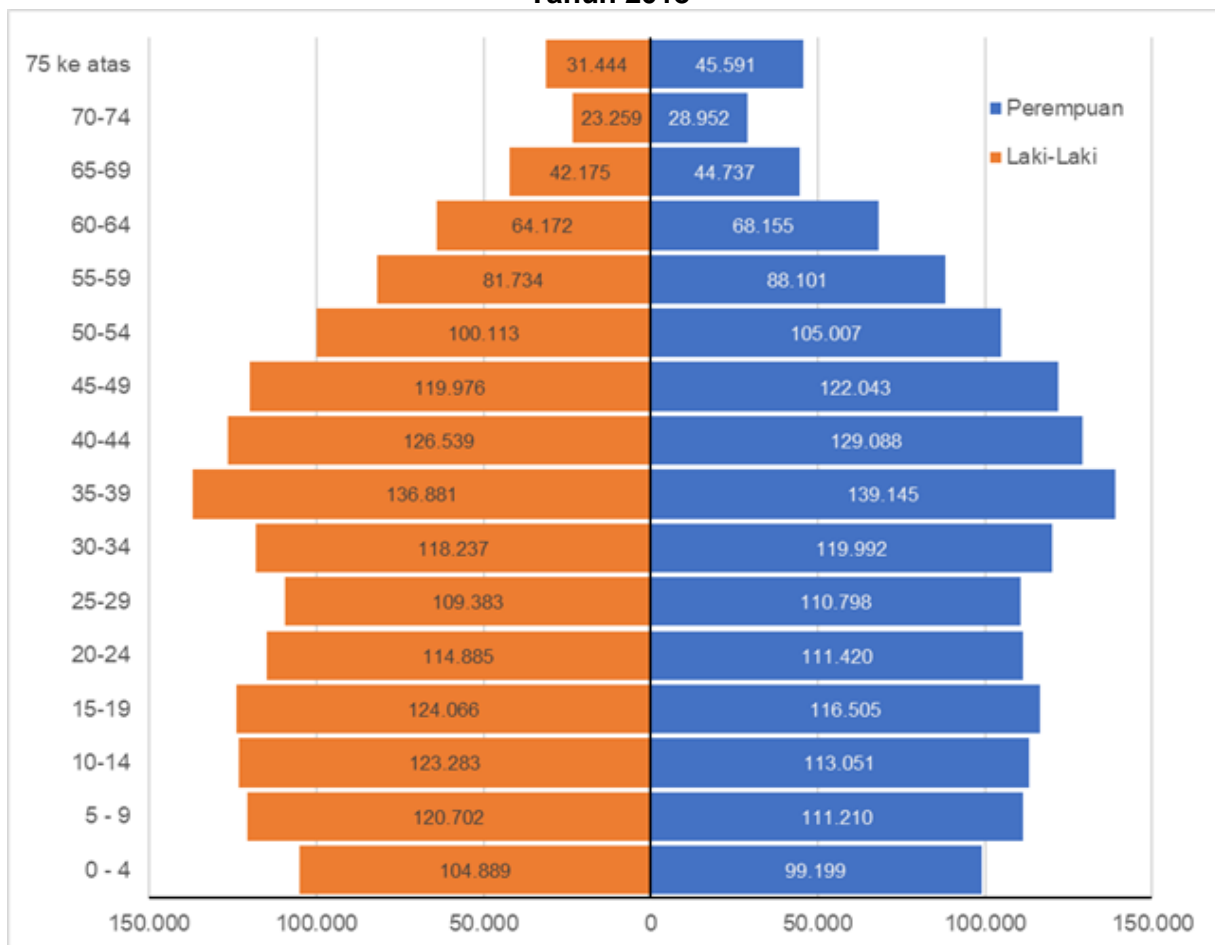
Sumber data: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2019, diolah.



2) Komposisi Penduduk Berdasarkan Kelompok Usia

Komposisi penduduk Kota Surabaya pada tahun 2018 berdasarkan kelompok usia ditunjukkan dengan bagan piramida penduduk berdasarkan kelompok usia sebagaimana gambar di bawah, menggambarkan bentuk Piramida Penduduk Dewasa (stasioner). Hal ini menunjukkan bahwa di Kota Surabaya pertumbuhan penduduknya kecil disebabkan angka kelahiran dan angka kematian hampir mendekati seimbang.

Gambar II.2 Jumlah Penduduk Kota Surabaya Berdasarkan Kelompok Usia Tahun 2018



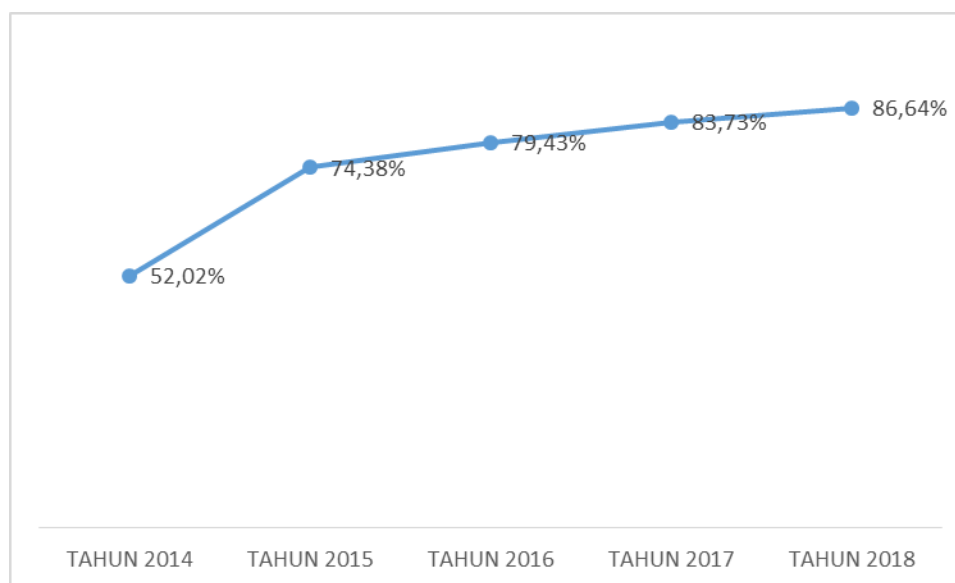
Sumber data: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2019, diolah

Gambar diatas menunjukkan bahwa kelompok usia produktif, yaitu kelompok penduduk usia 15 sampai dengan 64 tahun memiliki jumlah terbesar yaitu 2.206.240 jiwa atau 71,29%, sedangkan kelompok penduduk usia kurang dari 15 tahun adalah sebanyak 672.334 jiwa atau 21,73% dan kelompok usia diatas 64 tahun sebanyak 216.158 jiwa atau 6,07%.



Terkait dengan kepemilikan akta kelahiran di Kota Surabaya berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sampai dengan tahun 2018, diketahui kepemilikan akte kelahiran umur 0-18 tahun sebesar 751.764 atau 86,64% dari total penduduk yang memiliki akte di Kota Surabaya atau meningkat dibandingkan tahun 2017 dimana pada kelompok umur 0-18 tahun yaitu sebesar 718.015 atau 83,73% dari total penduduk yang memiliki akte, seperti dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar II.3 Jumlah Kepemilikan Akta Kelahiran 0-18 Tahun Tahun 2014 - 2018

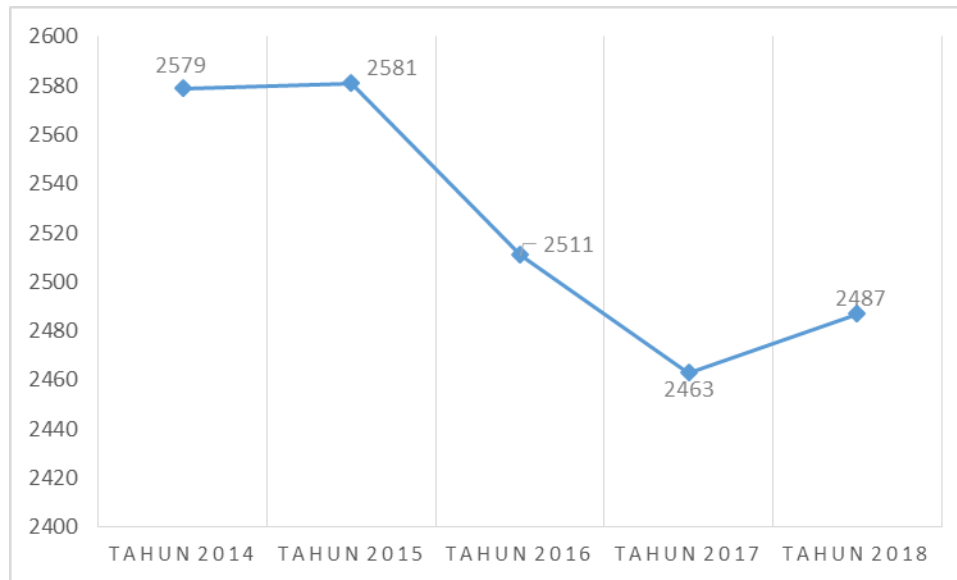


Sumber data: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2019, diolah

Selain penerbitan akta kelahiran, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga menerbitkan akta perkawinan dan akta kematian. Akta perkawinan mulai dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 telah diterbitkan sebanyak 12.621 buah, dimana rata-rata jumlah akta perkawinan yang diterbitkan sebesar 2524 buah setiap tahunnya. Sedangkan akta kematian mulai dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 telah diterbitkan sebanyak 113.236 buah, dimana rata-rata setiap tahunnya dikeluarkan sebanyak 22.647 buah. Jumlah akta perkawinan dan akta kematian yang telah diterbitkan dapat dilihat pada gambar II.4 dan gambar II.5 berikut:



**Gambar II.4 Jumlah Penerbitan Akta Perkawinan
Tahun 2014-2018**



Sumber data: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2019, diolah

**Gambar II.5 Jumlah Penerbitan Akta Kematian
Tahun 2014-2018**



Sumber data: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2019, diolah

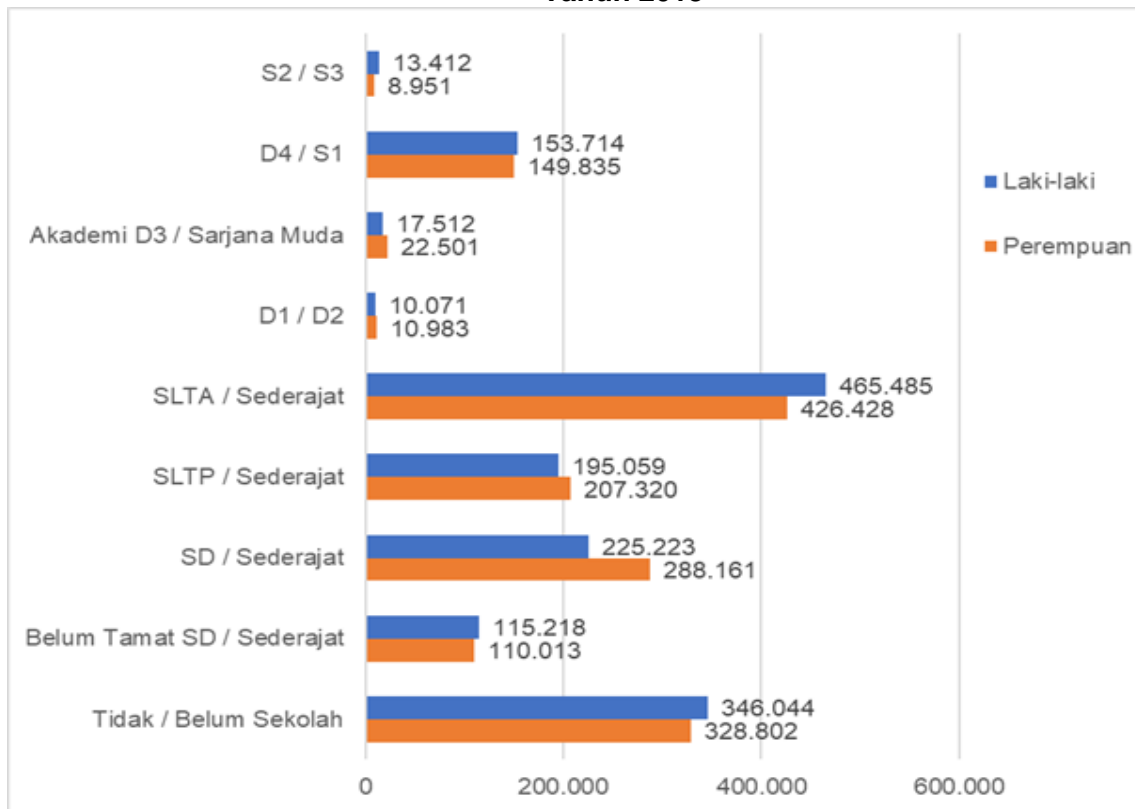
3) Komposisi Penduduk Berdasarkan Kelompok Pendidikan

Komposisi penduduk berdasarkan tingkat pendidikan menunjukkan bahwa tingkat pendidikan untuk kategori tingkat pendidikan tinggi (diploma dan sarjana), tertinggi didominasi tingkat pendidikan Diploma IV/Sarjana S1 sebanyak 303.549 jiwa. Sedangkan untuk tingkat pendidikan menengah dan dasar, didominasi oleh tingkat pendidikan SMA/ sederajat sebanyak 891.913 orang, tidak/belum sekolah



sebanyak 674.846 orang dan tamat SD/ sederajat sebanyak 513.384 orang. Komposisi penduduk berdasarkan kelompok pendidikan per jenis kelamin ditunjukkan oleh gambar sebagai berikut.

Gambar II.6 Jumlah Penduduk Kota Surabaya Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2018



Sumber data: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2019, diolah

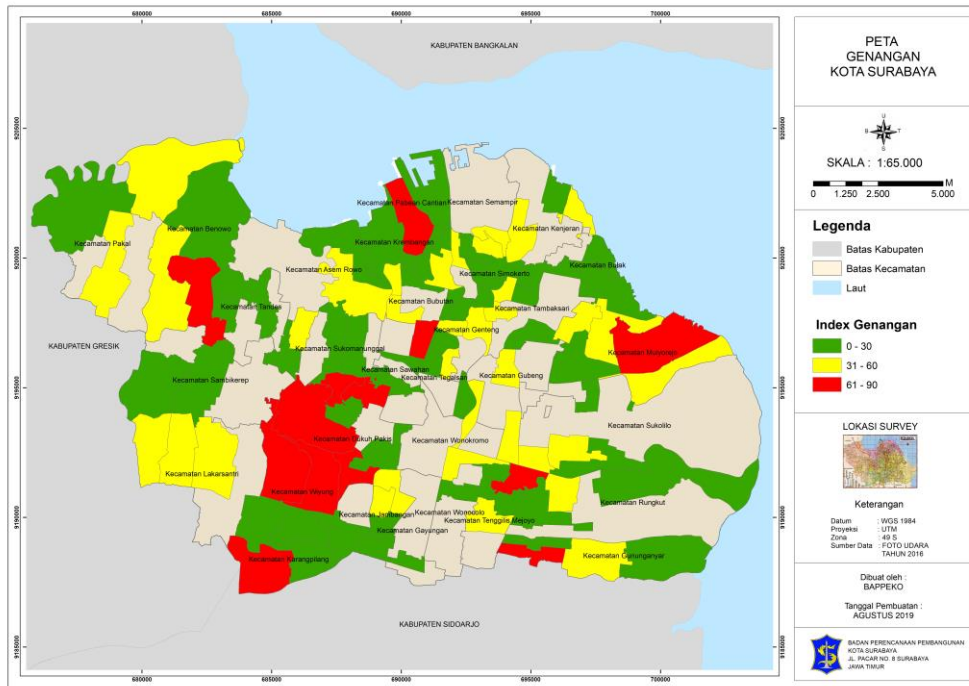
2.1.2 Kerawanan Bencana di Kota Surabaya

Kota Surabaya memiliki beberapa potensi rawan bencana antara lain banjir, kebakaran maupun puting beliung yang telah teridentifikasi di beberapa wilayah.

Dari peta kerawanan banjir di gambar II.7, dapat dilihat bahwa ada beberapa kecamatan yang rawan terhadap bencana banjir, antara lain Kec. Benowo, Kec. Pabean Cantian, Kec. Dukuh Pakis, Kec. Karang Pilang, Kec. Krembangan, Kec. Wiyung, Kec. Gununganyar, Kec. Mulyorejo dan Kec. Wonocolo, seperti pada gambar berikut:



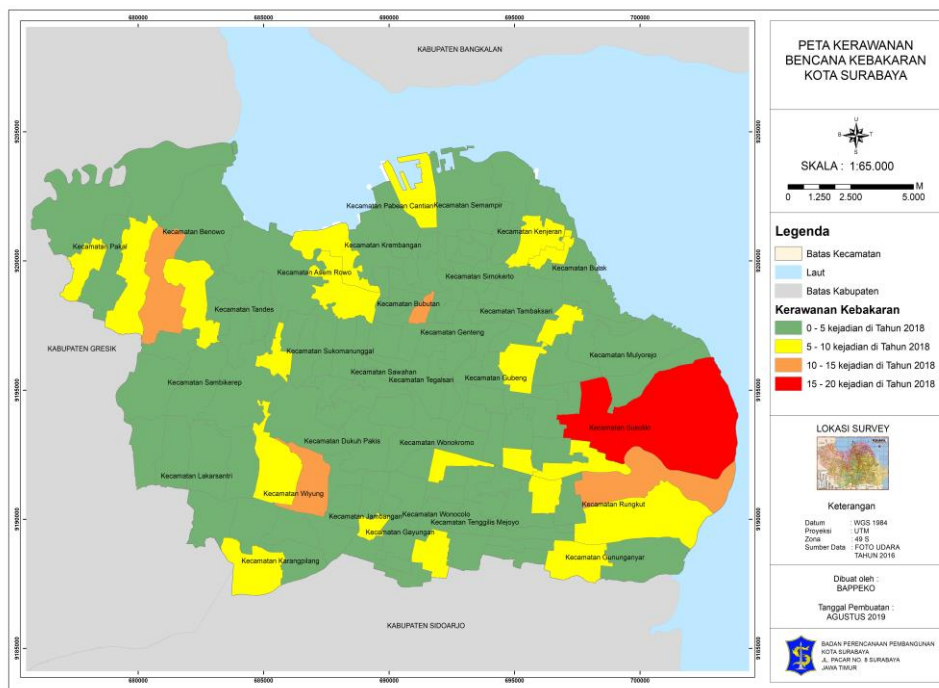
Gambar II.7
Peta Kerawanan Banjir Kota Surabaya



Sumber : Bappeko Surabaya, 2018, diolah

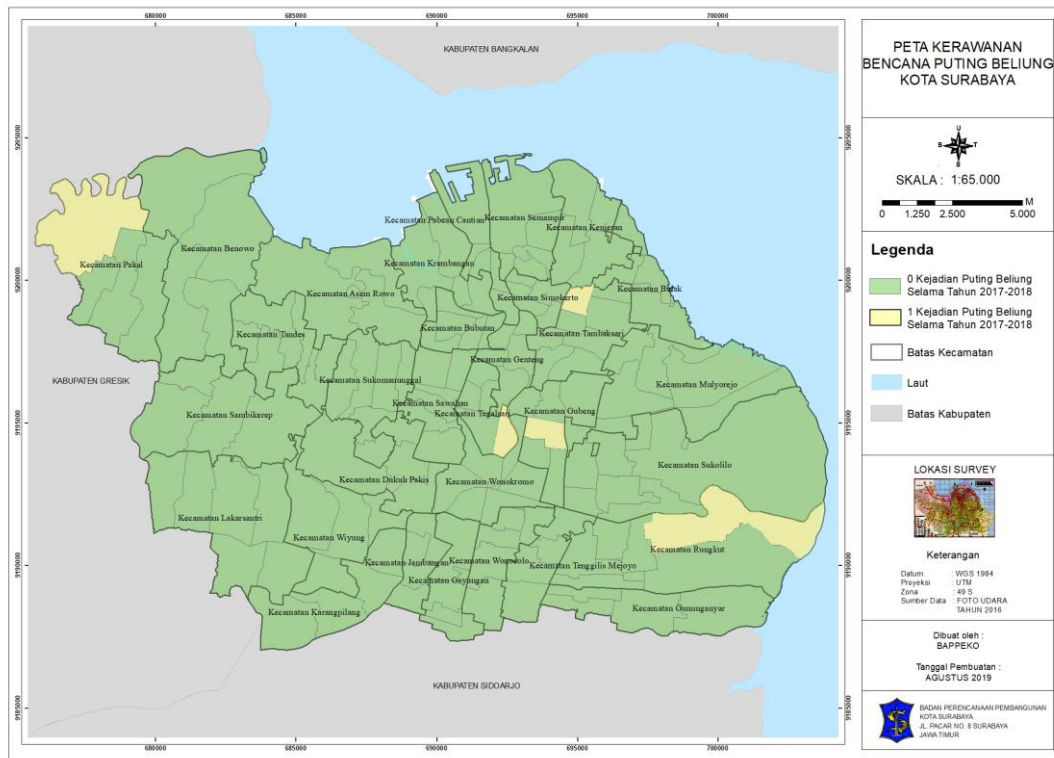
Selain banjir, Kota Surabaya juga dipetakan berdasarkan kerawanan atas bahaya kebakaran dipetakan di wilayah Kec.Benowo, Kec. Wiyung, Kec. Bubutan, Kec.Rungkut dan Kec.Sukolilo , yang dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar II.8
Peta Kerawanan Kebakaran Kota Surabaya



Sumber : Bappeko Surabaya, 2019, diolah

Gambar II.9
Peta Kerawanan Puting Beliung Kota Surabaya



Sumber : Bappeko Surabaya, 2018, diolah

Dari tabel II.9 diatas, dapat dilihat bahwa selain banjir dan bahaya kebakaran, Kota Surabaya juga dipetakan berdasarkan kerawanan atas bahaya puting beliung yang dipetakan di wilayah Kec. Pakal, Kec. Tegalsari, Kec. Gubeng, Kec. Simokerto dan Kec. Rungkut.

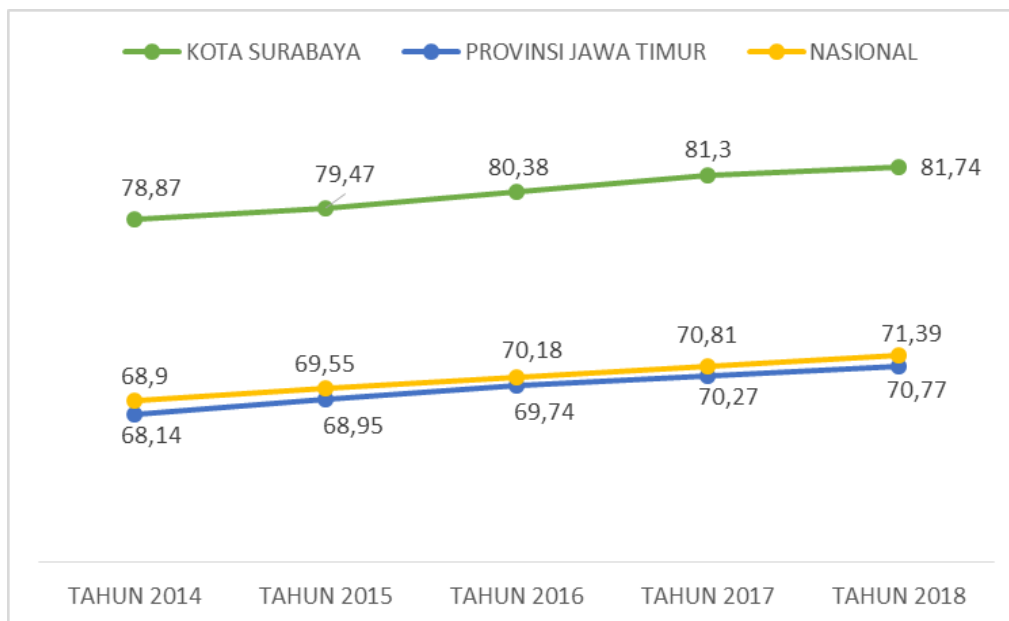
2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI) merupakan indeks komposit yang meliputi aspek kesehatan melalui pengukuran angka harapan hidup saat lahir, pendidikan melalui pengukuran angka harapan sekolah dan rata-rata lama sekolah, serta aspek kesejahteraan melalui pengukuran daya beli atau pengeluaran per kapita. Perkembangan angka IPM selama 5 tahun terakhir menunjukkan semakin meningkat sebagaimana disajikan pada gambar berikut ini:



Gambar II.10
Tren IPM Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur dan Nasional
Tahun 2014 – 2018



Sumber : Bappeko Surabaya, 2019, diolah

Sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2018, terjadi peningkatan angka IPM yang menunjukkan bahwa pencapaian pembangunan manusia di Kota Surabaya semakin membaik. Sejak tahun 2016 Indeks Pembangunan Manusia Kota Surabaya berkategori “sangat tinggi” dan pada tahun 2017 Indeks Pembangunan Manusia Kota Surabaya merupakan yang tertinggi di Jawa Timur.

Salah satu indeks komposit penyusun IPM adalah derajat kesehatan masyarakat di suatu wilayah yang salah satunya dapat diukur dengan angka harapan hidup (AHH) dan penurunan balita gizi buruk. Perkembangan AHH Kota Surabaya disajikan pada Tabel II.1

Tabel II.1
Perkembangan Angka Harapan Hidup Kota Surabaya
Tahun 2014 - 2018

Indikator	Realisasi				
	2014	2015	2016	2017	2018
Angka Harapan Hidup (tahun)	73,85	73,85	73,87	73,88	73,98

Sumber: BPS Kota Surabaya, 2019

AHH penduduk Kota Surabaya pada tahun 2014 dan tahun 2015 sebesar 73,85 tahun dan meningkat pada tahun 2018 menjadi 73,98 tahun.



Status gizi masyarakat pada balita di Kota Surabaya secara umum terus menunjukkan kemajuan signifikan yang ditandai dengan menurunnya angka prevalensi gizi buruk pada balita. Persentase balita gizi buruk pada tahun 2017 sebesar 0,15 persen dan pada tahun 2018 menurun menjadi 0,14 persen. Berikut ini merupakan rekapitulasi data prevalensi balita gizi buruk tahun 2014– 2018.

Tabel II.2
Prevalensi Balita Gizi Buruk Kota Surabaya
Tahun 2014 – 2018

No.	Uraian	Realisasi				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah balita dengan status gizi buruk	366	282	280	278	254
2	Jumlah balita yang ditimbang	174,085	176,728	176.439	179.662	181.842
3	Persentase (persen)	0,21	0,16	0,16	0,15	0,14

Sumber: Dinas Kesehatan, 2019

Tabel II.3
Prevalensi Balita Kurang Gizi (Gizi Buruk dan Gizi Kurang) Kota Surabaya
Tahun 2014 – 2018

No.	Uraian	Realisasi				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah balita dengan status gizi buruk dan kurang	366	282	29.888	16.627	15.020
2	Jumlah balita yang ditimbang	174.085	176.728	176.439	179.662	181.842
3	Persentase (persen)	0,21	0,16	16,94	9,25	8,25

Sumber: Dinas Kesehatan, 2019

Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.4
Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 Kelahiran Hidup Kota Surabaya
Tahun 2014 – 2018

No.	Uraian	Realisasi				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah Ibu melahirkan yang meninggal	39	38	37	34	31
2	Kelahiran Hidup	43.242	43.505	43.164	42.822	42.474
3	AKI per 100.000 KH	90,19	87,35	85,72	79,40	72,98

Sumber: Dinas Kesehatan, 2019



Tabel II.5
Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 Kelahiran Hidup Kota Surabaya
Tahun 2014 – 2018

No.	Uraian	Realisasi				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah bayi lahir meninggal	243	282	276	219	216
2	Kelahiran Hidup	43.242	43.505	43.164	42.822	42.474
3	AKB per 1.000 KH	5,62	6,48	6,39	5,11	5,08

Sumber: Dinas Kesehatan, 2019

Angka kematian ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup menunjukkan perkembangan yang makin baik dari tahun 2014 sebesar 90,19 menjadi 72,98 pada tahun 2018. Hal ini disebabkan semakin menurunnya jumlah kematian ibu dari tahun ke tahun. Demikian pula dengan Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2014 sebesar 5,62 menunjukkan perkembangan yang makin baik menjadi 5,08 pada tahun 2018. Namun demikian, Pemerintah Kota Surabaya berkomitmen meningkatkan pelayanan kesehatan guna mengurangi kematian ibu dan bayi di Kota Surabaya.

Dari data pada tabel II.2, II.3, II.4 dan II.5 menunjukkan bahwa Prevalensi Balita Gizi Buruk, Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi dan Prevalensi Balita kurang gizi di Kota Surabaya telah mengalami penurunan setiap tahunnya. Hal tersebut menunjukkan perkembangan yang baik karena jumlah balita yang mengalami gizi buruk, jumlah kematian ibu, dan jumlah kematian bayi semakin kecil dari tahun ke tahun.

Selain permasalahan diatas, salah satu hal yang menjadi perhatian adalah stunting (kerdil) dimana kondisi balita memiliki panjang atau tinggi badan yang kurang jika dibandingkan dengan umur. Balita stunting termasuk masalah gizi kronik yang disebabkan oleh banyak faktor seperti kondisi sosial ekonomi, gizi ibu saat hamil, kesakitan pada bayi, dan kurangnya asupan gizi pada bayi.

Prevalensi Balita Stunting menunjukkan perkembangan yang makin baik dari tahun 2015 sebesar 13,89% menjadi 8,92 pada tahun 2018. Hal ini tidak terlepas dari upaya pencegahan dan penurunan stunting yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Surabaya. Namun demikian, Pemerintah Kota Surabaya berkomitmen meningkatkan pelayanan kesehatan guna mengurangi jumlah balita stunting di Kota Surabaya, seperti dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar II.11
Prevalensi Balita Stunting
Tahun 2015 - 2018



Sumber: Dinas Kesehatan, 2019

Selain kesehatan, indeks Pendidikan juga memiliki peran penting sebagai salah satu indeks komposit penyusun IPM, dimana indeks pendidikan merupakan salah satu upaya meningkatkan kualitas hidup agar terjadi perubahan taraf kesejahteraan masyarakat. Semakin baik tingkat pendidikan akan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Semakin baik kualitas SDM menjadikan semakin baik pula kualitas hidup masyarakat. Kesejahteraan sosial di bidang pendidikan diukur melalui beberapa indikator, di antaranya meliputi angka partisipasi kasar (APS), angka partisipasi murni (APS), dan indeks pendidikan.

Indeks pendidikan diukur dengan angka harapan sekolah dan rata-rata lama sekolah. Angka Harapan Sekolah memiliki keterkaitan dengan angka partisipasi kasar dan murni PAUD, SD, dan SMP. Sedangkan untuk Rata-rata Lama Sekolah erat kaitannya dengan Angka Melanjutkan (AM) SD ke SMP dan Angka Melanjutkan SMP ke SMA.

Tabel II.6
Indeks Pendidikan Kota Surabaya
Tahun 2014 – 2018

Uraian	Realisasi				
	2014	2015	2016	2017	2018
Angka Harapan Sekolah	13,44	13,52	13,99	14,41	14,78
Rata-rata Lama Sekolah	10,07	10,24	10,44	10,45	10,46

Sumber : Bappeko Surabaya, 2019, diolah



Berdasarkan Tabel II.6, dapat dilihat bahwa rata-rata lama sekolah penduduk Kota Surabaya meningkat, dari tahun 2014 sebesar 10,07 menjadi 10,46 pada tahun 2018. Angka Harapan Sekolah anak-anak usia sekolah di Kota Surabaya juga mengalami peningkatan, hal ini menunjukkan bahwa dengan melihat pembangunan sarana dan prasarana pendidikan yang terus menerus dilakukan, masyarakat Kota Surabaya terutama anak-anak dan pelajar memiliki harapan yang tinggi untuk melanjutkan pendidikan, yaitu 14 tahun atau setara dengan mengenyam pendidikan sampai dengan lulus SMA/SMK/setara (tepatnya kuliah semester II).

Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan. APM merupakan indikator yang melihat partisipasi penduduk kelompok usia standar di jenjang pendidikan yang sesuai dengan standar usia siswa di jenjang tersebut. Khusus APM jenjang SMA/MA/SMK, terhitung mulai 1 Januari 2017 telah menjadi kewenangan pemerintah provinsi berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Rekap data perkembangan APM Kota Surabaya tahun 2014 - 2018 disajikan pada Tabel II.7 sebagai berikut:

Tabel II.7
Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Kota Surabaya
Tahun 2014-2018

No.	Jenjang Pendidikan	Realisasi				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	SD/MI					
1.1	Jumlah Siswa Kelompok usia 7-12 Tahun yang Bersekolah di Jenjang Pendidikan SD/MI	252.434	256.703	255.142	282.604	274.104
1.2	Jumlah Penduduk Kelompok Usia 7-12 Tahun	260.193	270.157	304.652	281.089	286.373
	APM SD/MI (persen)	97,02	95,02	83,75	100,54	95,72
2	SMP/MTs					
2.1	Jumlah Siswa Kelompok usia 13-15 Tahun yang Bersekolah di Jenjang Pendidikan SMP/MTs	124.018	131.306	128.810	108.231	118.636
2.2	Jumlah Penduduk Kelompok Usia 13-15 Tahun	129.367	138.173	158.893	144.127	141.554
	APM SMP/MTs (persen)	95,87	95,03	81,07	75,09	83,81

Sumber: Dinas Pendidikan, 2019



Sedangkan Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah rasio jumlah siswa, berapapun usianya yang sedang menempuh pendidikan di jenjang pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. APK ini berfungsi untuk menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan sekaligus merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan.

Dilihat dari tren perolehan APK pada tahun 2018 mulai dari jenjang pendidikan PAUD, SD/MI, dan SMP/MTs mengalami penurunan bila dibandingkan dengan perolehan APK pada tahun 2018. Rekap data perkembangan APK Kota Surabaya tahun 2014 - 2018 disajikan pada Tabel II.8 sebagai berikut.

Tabel II.8
Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Kota Surabaya
Tahun 2014 – 2018

No	Jenjang Pendidikan	Realisasi				
		2014	2015	2016	2017	2018
1.	PAUD (KB,TK, PPT, TPA)					
1.1	Jumlah Seluruh Siswa yang Bersekolah di Jenjang Pendidikan PAUD	N/A	N/A	123.925	119.747	119.047
1.2	Jumlah Penduduk Kelompok Usia 3-6 Tahun	N/A	N/A	192.239	177.009	179.389
	APK PAUD (persen)	N/A	N/A	64,46	67,65	66,36
2.	SD/MI					
2.1	Jumlah Seluruh Siswa yang Bersekolah di Jenjang Pendidikan SD/MI	281.789	284.313	281.310	287.406	287.830
2.2	Jumlah Penduduk Kelompok Usia 7-12 Tahun	260.193	270.157	276.183	281.089	286.373
	APK SD/MI (persen)	108,3	105,24	101,86	102,25	100,51
3.	SMP/MTs					
3.1	Jumlah Seluruh Siswa yang Bersekolah di Jenjang Pendidikan SMP/MTs	129.845	145.123	135.283	143.426	129.136
3.2	Jumlah Penduduk Kelompok Usia 13-15 Tahun	129.367	138.173	141.653	144.127	141.554
	APK SMP/MTs (persen)	100,37	105,03	95,50	99,51	91,23

Sumber: Dinas Pendidikan, 2019

Sedangkan Angka Melanjutkan (AM) adalah Jumlah siswa yang lulus ujian jenjang tertentu terhadap jumlah siswa yang melanjutkan ke jenjang selanjutnya. AM ini berfungsi untuk merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur rata-rata lama sekolah di antar jenjang pendidikan. Khusus AM SMP/MTs ke



SMA/MA/SMK, terhitung mulai 1 Januari 2017 telah menjadi kewenangan pemerintah provinsi berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Tabel II.9
Perkembangan Angka Melanjutkan (AM) Kota Surabaya
Tahun 2014 – 2018

No	Jenjang Pendidikan	Realisasi				
		2014	2015	2016	2017	2018
1.	SD/MI ke SMP/MTs					
1.1	Jumlah siswa SD/MI yang melanjutkan ke jenjang SMP/MTs	45.316	45.778	43.089	39.650	41.795
1.2	Jumlah siswa SD/MI yang lulus ujian	45.498	45.990	40.849	42.621	44.223
	AM SD/MI ke SMP/MTs (persen)	99,60	99,54	105,51	93,03	94,51
2.	SMP/MTs ke SMA/MA/SMK					
2.1	Jumlah siswa SMP/MTs yang melanjutkan ke jenjang SMA/MA/SMK	42.311	43.107	46.116	N/A	N/A
2.2	Jumlah siswa SMP/MTs yang lulus ujian	38.319	43.090	39.580	41.834	42.282
	AM SMP/MTs ke SMA/MA/SMK (persen)	110,42	100,04	116,54	N/A	N/A

Sumber: Dinas Pendidikan, 2019

Indeks minat baca masyarakat bertujuan memberikan informasi tentang kondisi bagaimana minat membaca pada masyarakat Kota Surabaya dengan menggunakan beberapa faktor yaitu aktivitas kunjungan pada layanan baca, aktivitas membaca, serta kepemilikan dan jumlah koleksi bacaan oleh masyarakat (baik cetak dan online).

Indeks minat baca masyarakat digunakan untuk melihat peningkatan minat masyarakat dalam hal membaca yang dapat ditunjukkan dengan jumlah kunjungan pada fasilitas layanan baca, antara lain Perpustakaan, TBM, dan Toko Buku serta melakukan aktivitas membaca guna memperoleh informasi. Indeks Minat Baca Masyarakat dihitung dari akumulasi bobot dikali indeks masing-masing komponen dengan formulasi sebagai berikut :

$$\text{Indeks Minat Baca Masyarakat} = (40\% \times \text{Aktivitas kunjungan ke Layanan Baca}) + (50\% \times \text{Aktivitas Membaca}) + (10\% \times \text{Kepemilikan dan Jumlah Koleksi Bacaan})$$



2.2.2 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Dengan semakin bertambahnya penduduk maka tidak bisa dipungkiri bahwa jumlah penduduk usia kerja (tenaga kerja) dari tahun ke tahun semakin meningkat, namun hal ini belum diiringi dengan perkembangan lapangan pekerjaan sehingga menimbulkan pengangguran. Perkembangan tingkat pengangguran terbuka dalam kurun waktu tahun 2014 – tahun 2018 mempunyai trend meningkat dengan angka tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2014 yaitu sebesar 5,82% sedangkan pada tahun 2018 sebesar 6,12%. Beberapa faktor yang menyebabkan semakin tingginya tingkat pengangguran di Kota Surabaya sebagian besar disebabkan akibat faktor kependudukan yang terdiri dari jumlah penduduk usia produktif yang cukup tinggi, tingkat urbanisasi yang tinggi serta faktor jumlah lapangan kerja yang terbatas, faktor tenaga kerja kontrak (*outsourcing*), dan faktor pemutusan hubungan kerja. Selain itu belum tercapainya kompetensi pencari kerja sesuai dengan kebutuhan pasar kerja formal yang semakin kompetitif juga menjadi salah satu penyebab masih tingginya tingkat pengangguran terbuka di Surabaya. Berikut adalah rekapitulasi data tentang tingkat pengangguran terbuka di Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur dan Nasional tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 disajikan pada Tabel II.10.

Tabel II.10
Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2014–2018

Tingkat Pengangguran Terbuka	Capaian Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018**
Surabaya	5,82	7,01	N/A *	5,98	6,12
Jawa Timur	4,19	4,47	4,21	4,00	3,99
Nasional	5,94	6,18	5,61	5,50	5,34

Sumber: BPS, 2019.

*) Tidak dilakukan perhitungan sampai tingkat Kab/Kota

***) Data per Agustus 2018

Jumlah angkatan kerja di Kota Surabaya mengalami peningkatan dari tahun 2017 ke tahun 2018 yang semula jumlah angkatan kerja di Kota Surabaya sebesar 1.495.837 menjadi 1.520.041. Pengangguran Terbuka mengalami sedikit peningkatan di 2018, namun hal tersebut telah diimbangi dengan peningkatan kegiatan ekonomi di berbagai sektor yang diharapkan dapat memberikan dampak positif baik langsung maupun tidak langsung terhadap ketersediaan lapangan



pekerjaan. Peningkatan kesempatan kerja yang diikuti dengan peningkatan produktivitas diharapkan mampu menambah penghasilan/pendapatan masyarakat yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, upaya Pemerintah Kota Surabaya melalui optimalisasi pelatihan dan pemberdayaan penduduk angkatan kerja membuat tingkat pengangguran terbuka Kota Surabaya pada tahun 2018 mencapai 6.12% lebih rendah dibandingkan dengan Kota Metropolitan lain seperti Kota Bandung dengan TPT sebesar 9,02% (data BPS per Mei 2018).

2.2.3 Pertumbuhan Ekonomi

Selama 4 tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya terus menunjukkan kecenderungan yang positif. Seperti yang diketahui, Kota Surabaya dengan karakteristik perdagangan dan jasa memiliki potensi produktivitas yang masih cukup besar untuk digali. Walaupun gejolak ekonomi sepanjang tahun 2018 yang sangat dinamis, capaian pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya senantiasa cukup tinggi berada pada angka 6.19% yang lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi Jawa Timur dan Nasional.

Di tengah berlangsungnya pemulihan ekonomi global, pertumbuhan ekonomi domestik tetap terjaga kestabilitasannya. Laju pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya masih tumbuh positif. Beberapa permasalahan diindikasikan beresiko menghambat kemampuan perekonomian untuk tumbuh lebih tinggi. Dari sisi permintaan, peran konsumsi rumah tangga sebagai sumber utama pertumbuhan ekonomi cenderung semakin terbatas. Kendati demikian, capaian pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya masih memiliki pola yang sama dari tahun ke tahun, yakni pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya lebih tinggi jika dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi Jawa Timur dan Nasional.

Untuk lebih meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kota Surabaya perlu dilakukan upaya meningkatkan daya saing koperasi dan usaha mikro dalam pasar ekonomi, mendorong volume ekspor dan import dalam pasar ekonomi, meningkatkan produktivitas sektor pertanian, kelautan, perikanan, dan pariwisata dalam upaya meningkatkan ekonomi. Selengkapanya pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya, Jawa Timur dan Nasional terangkum dalam tabel II.11.



Tabel II.11
Pertumbuhan Ekonomi Kota Surabaya, Jawa Timur dan Nasional
Tahun 2014 – 2018

Pertumbuhan Ekonomi	Realisasi (%)				
	2014	2015	2016	2017	2018*
Surabaya	6,73	5,97	6,00	6,13	6,19
Jawa Timur	5,86	5,44	5,57	5,45	5,50
Nasional	5,02	4,88	5,03	5,07	5,17

Sumber data: BPS Kota Surabaya, 2019

*) Angka Sementara

2.2.4 Indeks Gini

Tingkat pemerataan distribusi pendapatan sering diukur dengan koefisien gini. Koefisien Gini bernilai nol, jika pendapatan secara nyata menyebar merata, dan mendekati 1 jika secara nyata distribusi pendapatan menyebar tidak merata. Berdasarkan nilai gini ratio, terdapat tiga kelompok ketimpangan yaitu: ketimpangan tinggi jika nilai koefisien gini 0,5 atau lebih, sedang jika nilainya antara 0,30-0,49 dan rendah jika kurang dari 0,30.

Nilai Indeks Gini Kota Surabaya selama kurun waktu 5 tahun berada pada kisaran 0,3 – 0,4, yang tergolong dalam kategori sedang. Ketimpangan tertinggi terjadi pada tahun 2015. Tingkat pemerataan distribusi pendapatan perlu menjadi perhatian Pemerintah Kota Surabaya agar tidak terjadi kesenjangan ekonomi yang dapat berakibat pada kesenjangan sosial dan menimbulkan konflik karena tujuan akhir dari pembangunan ekonomi adalah rakyat sejahtera. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya-upaya untuk pemerataan ekonomi melalui peningkatan produktivitas usaha masyarakat.

Tabel II.12
Indeks Gini Kota Surabaya, Jawa Timur dan Nasional
Tahun 2014 – 2018

Indeks Gini	Realisasi				
	2014	2015	2016	2017	2018*
Surabaya	0,39	0,42	0,41	0,39	0,387
Jawa Timur	0,437	0,42	0,40	0,40	0,38
Nasional	0,40	0,402	0,394	0,391	0,389

Sumber data: BPS, 2019, *) Angka proyeksi Bappeko

2.2.5 Kawasan permukiman yang telah ditingkatkan kualitas lingkungannya

Peningkatan penyediaan serta pengelolaan lingkungan perumahan dan kawasan permukiman layak huni pada tahun 2018 diukur dengan menggunakan



indikator kinerja kawasan permukiman yang telah ditingkatkan kualitas lingkungannya mencapai 6.085,26 Ha, bila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebesar 6.717,51 Ha, maka capaian kerjanya mencapai 90,60%. Pemerintah Kota Surabaya terus melakukan peningkatan jalan lingkungan dan drainase lingkungan sebagai salah satu upaya peningkatan kualitas kawasan permukiman, seperti dapat terlihat pada tabel berikut:

Tabel II.13
Kawasan permukiman yang telah ditingkatkan kualitas lingkungannya
Tahun 2014 - 2018

Uraian	Realisasi				
	2014	2015	2016	2017	2018*
Kawasan permukiman yang telah ditingkatkan kualitas lingkungannya	N/A	N/A	3.330,17 Ha	4.053,29 Ha	6.085,26 Ha

Sumber data : Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya, 2019, diolah

2.2.6 Indeks Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan diukur dari ketersediaan pangan utama (beras), dibandingkan dengan tingkat konsumsi pangan utama (beras). Ketersediaan pangan utama di Kota Surabaya meningkat sejak tahun 2014 yaitu pada tahun 2014 sebesar 155,24 kg/kapita/th dan pada tahun 2015 turun menjadi 139,23 kg/kapita/th, pada tahun 2016 naik menjadi 145,01 kg/kapita/th dan pada tahun 2017 sebesar 167,946 kg/kapita/th. Pada tahun 2018, ketersediaan pangan utama sebesar 521,49 kg/kapita/th.

Tabel II.14
Ketersediaan Pangan Utama Kota Surabaya
Tahun 2014 – 2018

Uraian	Realisasi				
	2014	2015	2016	2017	2018
Rata-rata Jumlah Ketersediaan Pangan Utama (Kg)	443.021.157	404.158.210	479.602.970	561.380.280	1.613.871.020
Jumlah Penduduk (jiwa)	2.853.661	2.902.736	3.307.300	3.342.627	3.094.732
Ketersediaan Pangan Utama (kg/kapita/th)	155,24	139,23	145,01	167,95	521,49

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2019



Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur tingkat konsumsi beras masyarakat Kota Surabaya pada tahun 2018 rata-rata sebesar 101,54 kg/kapita/th, sehingga apabila dibandingkan dengan ketersediaan pangan kota Surabaya tahun 2018 masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat.

Mengingat Kota Surabaya bukan merupakan sentra penghasil pangan utama (beras), ketersediaan pangan utama dapat bersifat fluktuatif. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor eksternal. Salah satu faktor yang mempengaruhi adalah tidak stabilnya produksi beras di daerah penghasil akibat cuaca yang tidak menentu sehingga pasokan berkurang. Upaya untuk menjaga ketersediaan dan harga pangan menjadi fokus perhatian, antara lain: kerja sama dengan pemasok bahan pangan (daerah produsen), hingga pemanfaatan lahan pekarangan untuk budidaya hortikultura.

Selain diukur dari ketersediaan pangan utama, ketahanan pangan diukur juga dengan menggunakan skor Pola Pangan Harapan (PPH). PPH adalah indikator untuk mengukur pola konsumsi pangan masyarakat berdasarkan gizi yang cukup dan seimbang. Semakin tinggi skor pola pangan menunjukkan satuan pangan yang semakin beragam dan semakin baik komposisi dan mutu gizinya.

Berdasarkan Tabel II.15 dapat disampaikan bahwa Pola Pangan Harapan masyarakat kota Surabaya pada tahun 2014 sebesar 92,93, dan terus meningkat hingga pada tahun 2018 sebesar 96,80. Hal ini menunjukkan bahwa satuan pangan yang dikonsumsi masyarakat sudah semakin beragam, namun pola pangan yang terus meningkat juga dapat meningkatkan resiko terjadinya obesitas karena gizi yang tidak seimbang.

Tabel II.15
Pola Pangan Harapan
Tahun 2014 - 2018

Uraian	Realisasi				
	2014	2015	2016	2017	2018
Pola Pangan Harapan	92,93	95,00	95,28	95,62	96,80

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, 2019

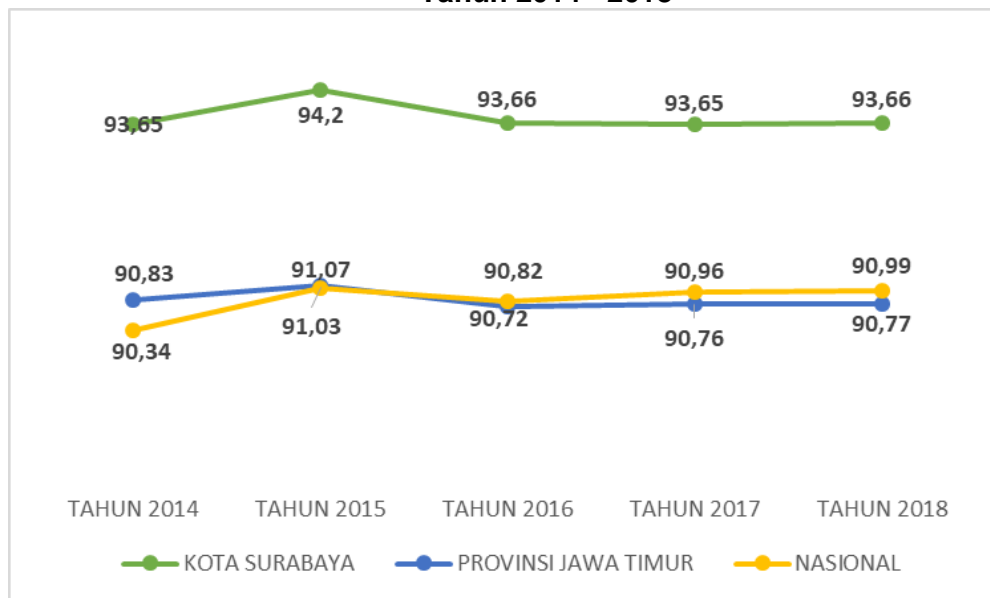
2.2.7 Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Pengarusutamaan gender diwujudkan dalam bentuk kesetaraan gender melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi,



kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam berbagai bidang kehidupan dan pembangunan. Hal tersebut dapat diukur melalui Indeks Pembangunan Gender Kota Surabaya yang dapat dilihat pada Gambar II.12.

Gambar II.12
Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Surabaya
Tahun 2014 - 2018



Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur dan Bappeko Surabaya, 2019, diolah

Dari gambar di atas, meskipun peningkatan Indeks Pembangunan Gender Kota Surabaya belum optimal, namun Indeks Pembangunan Gender (IPG) tersebut dapat dirasakan dengan telah diterimanya berbagai penghargaan nasional, antara lain:

- “Penghargaan Kota Layak Anak Kategori Utama” dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak pada tanggal 23 Juli 2019;
- “Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya” kategori utama dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak pada tanggal 19 2019.

Pada tahun 2019, Indeks Pembangunan Gender (IPG) ditetapkan target sebesar 93,68. Adapun beberapa permasalahan yang menghambat tercapainya IPG, yaitu:

1. Masih adanya PMKS yang belum sejahtera dikarenakan penanganan PMKS membutuhkan ketersediaan data yang terverifikasi dan dukungan stakeholder lainnya termasuk PSKS;
2. Belum optimalnya peran perempuan dalam pembangunan;
3. Masih ditemukannya kasus tindak kekerasan pada anak dan perempuan.



2.2.8 Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

Tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak umumnya adalah tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), non KDRT dan *trafficking* (perdagangan orang).

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan dengan cara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Kasus KDRT mengalami peningkatan di tahun 2017 sebesar 118 kasus dan turun menjadi 109 kasus pada tahun 2018. Kasus KDRT secara rinci dapat dilihat pada tabel II.16.

Tabel II.16
KDRT Kota Surabaya
Tahun 2014 - 2018

Uraian	Realisasi				
	2015	2015	2016	2017	2018
Kasus KDRT	70	41	79	118	109

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2019

Fenomena KDRT ibarat fenomena gunung es, kasus yang dilaporkan dengan fakta yang ada di masyarakat berbeda. Meskipun dari data pada Tabel II. 16 di atas kasus KDRT mengalami penurunan, Pemerintah Kota Surabaya harus tetap waspada dengan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat dan terbukanya akses bagi korban KDRT untuk mengadu ke berbagai layanan yang ada di masyarakat diantaranya adalah hotline Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (PPTP2A), Pusat Krisis Berbasis Masyarakat (PKBM), Pos Curhat, Forum Anak Surabaya, Satgas perlindungan perempuan dan anak serta Command Center 112.

Pemerintah Kota Surabaya memiliki kepedulian dalam menangani kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dapat dilihat pada rekap data penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan pada tabel II.17.



Tabel II.17
Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan
Kota Surabaya
Tahun 2014 - 2018

No	Uraian	Realisasi				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah pengaduan perlindungan perempuan dan anak	219	287	263	138	123
2	Jumlah pengaduan perlindungan perempuan dan anak yang terselesaikan	219	287	263	138	123
3	Persentase penyelesaian pengaduan	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2019

2.2.9 Persentase PMKS yang tertangani

Bentuk penanganan yang diterima PMKS antara lain berupa pembinaan dan pelatihan keterampilan, pemulangan PMKS ke daerah asal, perbaikan rumah tidak layak huni, pemberian permakanan, pembinaan mental, pemberian beasiswa, dan pelayanan di 5 (lima) UPTD Dinas Sosial, yaitu UPTD Griya Werdha melayani dan menangani lanjut usia miskin dan terlantar, UPTD Kampung Anak negeri yang melayani dan menangani anak jalanan, anak nakal dan anak terlantar, UPTD Babat Jerawat melayani dan menangani eks penderita kusta, UPTD Ponsos Kalijudan melayani dan menangani anak berkebutuhan khusus dan pengasramaan mahasiswa miskin berprestasi serta UPTD Liponsos Keputih yang melayani dan menangani gelandangan, penderita psikotik dan PMKS hasil penertiban.

Tabel II.18
Penanganan PMKS Kota Surabaya
Tahun 2014 –2018

No.	Uraian	Realisasi				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah PMKS yang ada	47.199	49.881	50.222	47.633	58.129
2	Jumlah PMKS yang ditangani	27.652	28.907	30.468	28.643	36.098
3	Persentase PMKS yang ditangani (persen)	58,59	57,95	60,67	60,13	62,09

Sumber : Dinas Sosial Kota Surabaya, 2019

Upaya pengentasan PMKS dilakukan melalui pemulangan ke daerah asal dan pelatihan PMKS usia produktif. Namun demikian, adanya jenis PMKS yang secara status tidak dapat berubah, misalnya penyandang cacat, lansia dan orang dengan gangguan mental tetap ditangani Dinas Sosial melalui pemberian permakanan, pembinaan mental maupun pelayanan mental di UPTD terkait. Bila dilihat dari data



penanganan PMKS Kota Surabaya, pada tahun 2018 jumlah PMKS yang ada sangat besar yakni mencapai 58.129 PMKS. Tabel II.18 menunjukkan bahwa penanganan PMKS oleh Pemerintah Kota Surabaya perlu dioptimalkan, didukung dengan ketersediaan data PMKS yang terverifikasi serta keterlibatan dan peran serta PSKS dalam penanganan PMKS.

2.3 Aspek Pelayanan Umum

2.3.1 Indeks Ketertiban dan Ketenteraman Kota

Berdasarkan Permendagri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat, perlindungan masyarakat adalah suatu keadaan dinamis dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan. Pemerintah Kota Surabaya mengupayakan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat melalui penegakan perda, penyelesaian pelanggaran K3, pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta upaya-upaya lainnya terkait pencegahan dan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban serta peningkatan kesadaran dan kepatuhan warga masyarakat.

Indeks Ketertiban dan Ketenteraman Kota sebagai salah satu Indikator Kinerja Daerah (IKD) telah terealisasi sebesar 1,73 di tahun 2018 meningkat dibandingkan dengan tahun 2017 yang sebesar 1.39 Hal ini menunjukkan bahwa kondisi Kota Surabaya semakin kondusif bagi kegiatan pemerintah dan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan dengan telah diterimanya penghargaan nasional “Indeks Kota Toleran (IKT) 2018” dalam kategori 10 kota paling toleran di Indonesia dari Kemendagri dan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) di Jakarta, seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel II.19
Indeks Ketertiban dan Ketenteraman Kota Surabaya
Tahun 2014 - 2018

Uraian	Capaian Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018
Indeks Ketenteraman dan Ketertiban	N/A	0.87	1,26	1,39	1,73

Sumber : Bappeko Surabaya, 2019, diolah



Indeks Ketertiban dan Ketenteraman Kota terdiri dari Nilai Ketertiban dan Nilai Ketenteraman. Nilai Ketertiban diperoleh dari realisasi angka pelanggaran Perda per 1.000 penduduk. Nilai Ketertiban ini juga dipengaruhi oleh faktor eksternal yang bersumber dari masyarakat serta pihak terkait di luar Pemerintah Kota Surabaya.

Nilai Ketentraman diperoleh dari realisasi angka kejadian anarkis per 100.000 penduduk, serta dipengaruhi oleh faktor eksternal yang bersumber dari masyarakat serta pihak terkait di luar Pemerintah Kota Surabaya. Kejadian anarkis adalah kejadian yang di dalamnya terdapat aksi antara lain: aksi dorong mendorong, aksi pembakaran, aksi penjarahan, aksi perusakan (misalnya pelemparan), dan/atau aksi lain yang menyebabkan kerusakan dan bahaya bagi masyarakat maupun lingkungan. Angka kejadian anarkis per 100.000 penduduk diharapkan selalu menurun, sehingga menunjukkan kondisi yang semakin tentram. Selain itu, masih terdapat kejadian unjuk rasa yang mengarah pada tindakan anarkis pada tahun 2015 sebanyak 32 kejadian anarkis, menurun pada tahun 2016 sebanyak 19 kejadian, pada tahun 2017 terdapat 10 kejadian anarkis, dan di tahun 2018, hanya ada 1 kejadian anarkis.

2.3.2 Pelanggaran Perda per 1.000 Penduduk

Pencapaian sasaran meningkatkan kualitas dan intensitas pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan daerah pada tahun 2018 diukur dengan menggunakan indikator kinerja angka pelanggaran perda per 1.000 penduduk mencapai 7,61 bila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebesar 17,61 maka capaian kinerjanya mencapai 156,77%. Permasalahan yang dapat menghambat tercapainya keberhasilan pelaksanaan program Kota Surabaya adalah masih terjadinya kasus pelanggaran Perda dan masih terjadinya pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum.

Tabel II.20
Pelanggaran Perda per 1.000 Penduduk
Tahun 2014 –2018

No.	Uraian	Realisasi				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Pelanggaran Perda per 1.000 Penduduk	N/A	N/A	14,38	13,97	7,61

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja, 2019



Tabel II.21
Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 Kota Surabaya
Tahun 2014 - 2018

No	Uraian	Realisasi				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah penyelesaian pelanggaran K3	84.382	72,218	47.067	41.111	7.470
2	Jumlah pelanggaran K3	84.382	72,218	47.067	41.111	7.470
3	% penyelesaian pelanggaran K3	100	100	100	100	100

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja, 2019

2.3.3 Rasio Linmas per 1.000 penduduk

Dalam rangka mewujudkan upaya pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban didukung dengan adanya keanggotaan Perlindungan Masyarakat (Linmas). Anggota Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kota Surabaya pada tahun 2014 adalah sebanyak 35.556 orang, maka rasio jumlah tenaga linmas per 10.000 orang penduduk adalah sebanyak 124,59 orang dari total jumlah penduduk sebanyak 2.853.661 orang, dan pada tahun 2018, setiap 10.000 penduduk dilayani oleh 60 personil Linmas. Data rasio jumlah Linmas per 10.000 penduduk dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.22
Rasio Jumlah Linmas per 10.000 Penduduk Kota Surabaya
Tahun 2014 - 2018

Uraian	Realisasi				
	2014	2015	2016	2017	2018
Jumlah Linmas	35.556	36.969	24.859	19.372	18.638
Jumlah penduduk	2.853.661	2.943.528	3.307.300	3.074.883	3.094.732
Rasio jumlah linmas per 10.000 penduduk	124,60	125,59	75,16	63,00	60,22

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, 2019

Terdapat penurunan jumlah personil Linmas yang disebabkan oleh adanya petugas Linmas yang pindah ke luar kota, menikah, memiliki pekerjaan baru, serta meneruskan pendidikannya. Untuk mewujudkan kondisi masyarakat yang tentram dan tertib sebagai salah satu prasyarat pelaksanaan pembangunan selain peningkatan petugas Satpol PP dan personil Linmas juga dilakukan pemasangan CCTV di setiap lokasi-lokasi yang berpotensi menimbulkan gangguan ketenteraman dan ketertiban serta peningkatan kesadaran dan kepatuhan warga masyarakat.



2.3.4 Indeks Infrastruktur Kota

Indeks infrastruktur kota merupakan indikator baru dalam Perubahan RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021. Indeks Infrastruktur Kota bertujuan memberikan informasi tentang kondisi infrastruktur kota dengan menggunakan tingkat Mobilitas, tingkat Konektivitas, dan tingkat Aksesibilitas sebagai indikator.

Indeks infrastruktur digunakan untuk melihat perkembangan pembangunan infrastruktur kota, pembangunan secara fisik perlu dilakukan, salah satunya untuk mengetahui ketimpangan perkembangan maupun pembangunan infrastruktur. Indeks Infrastruktur Kota dihitung dari akumulasi bobot dikali indeks komponen dan bobot masing-masing indeks 33,33% dengan formulasi sebagai berikut :

$$\text{Indeks Infrastruktur Kota} = (33,3\% \times \text{Tingkat Mobilitas}) + (33,3\% \times \text{Tingkat Konektivitas}) + (33,3\% \times \text{Tingkat Aksesibilitas})$$

Tingkat Mobilitas terdiri dari Level of Service (LOS) atau Tingkat Pelayanan Jalan dan Lama Jam Sibuk. Nilai LOS biasanya berkisar antara A sampai dengan F. nilai A mengindikasikan LOS yang baik sedangkan nilai F mengindikasikan sebaliknya. Lama Jam sibuk yang dimaksud adalah berupa hasil analisa yang diperoleh dari penghitungan volume lalu lintas pada suatu ruas jalan saat derajat kejenuhan suatu ruas jalan (DS) sama dengan 1. Berikut merupakan Level of Service (LOS) atau Tingkat Pelayanan Jalan pada tabel II.23 dan Lama Jam Sibuk dapat dilihat pada tabel II.24.

Tabel II.23
Level of Service (LOS) atau Tingkat Pelayanan Jalan
Tahun 2014 - 2018

Uraian	Capaian Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018
Nilai LOS (dalam abjad)	N/A	N/A	0,938 (E)	0,840 (D)	0,565 (A)

Sumber : Dinas Perhubungan, 2019

Tabel II.24
Lama Jam Sibuk
Tahun 2014 - 2018

Uraian	Capaian Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018
Lama Jam Sibuk	N/A	N/A	6 jam 19 menit	6 jam 17 menit	6 jam 13 menit

Sumber : Dinas Perhubungan, 2019



Tingkat Konektivitas terdiri dari Indeks Kapasitas Penanggulangan Bencana Daerah dan Penurunan luas kawasan tergenang. Tingkat Aksesibilitas terdiri dari Persentase cakupan penyebaran dan layanan jaringan utilitas kota dan Persentase sinkronisasi sistem penataan ruang dalam kebijakan satu peta tata ruang kota. Persentase cakupan penyebaran dan layanan jaringan utilitas kota dalam rangka meningkatkan pembangunan dan pelayanan utilitas kota secara terpadu dan merata, Pemerintah Kota Surabaya terus melakukan penyebaran dan layanan jaringan utilitas kota diantaranya dengan terus meningkatkan sistem jaringan dan kualitas PJU secara merata di seluruh wilayah Kota Surabaya. Penerangan Jalan Umum (PJU) yang terpasang pada tahun 2014 sejumlah 6.390 titik, dengan demikian sampai dengan tahun 2018 jumlah titik PJU sejumlah 96.744 titik dan seluruhnya terpasang dalam kondisi baik. Adapun Pertumbuhan pemasangan PJU dari tahun 2015 sebesar 146,92%, seperti dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.25
Penerangan Jalan Umum
Tahun 2014 - 2018

Tahun	Capaian				
	2014	2015	2016	2017	2018
Jumlah PJU terpasang (Titik)	6.390	6.960	4.337	4.558	8.975
Panjang jalan yang sudah mendapatkan penerangan	N/A	2.365.920	2.540.910	2.702.310	2.902.320

Sumber : Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau, 2019

2.3.5 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Persampahan (IKLHS)

Pertumbuhan kota dan penduduk Kota Surabaya, menyebabkan terjadinya peningkatan pembangunan dan penggunaan kendaraan bermotor yang menjadi pemicu terjadinya pencemaran lingkungan, antara lain tingginya produksi sampah kota serta pencemaran udara dan air, sehingga pengendalian pencemaran lingkungan, pengelolaan persampahan dan optimalisasi pengelolaan Ruang Terbuka Hijau menjadi upaya yang utama untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup.

Penyelesaian permasalahan lingkungan hidup tersebut dapat diukur melalui Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Persampahan (IKLHS) yang bertujuan memberikan informasi tentang kondisi lingkungan hidup menggunakan kualitas air sungai, kualitas udara, tutupan hutan dan persampahan sebagai indikator.



Indeks Kualitas Lingkungan Hidup merupakan pengukuran yang digunakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk menggambarkan kondisi lingkungan hidup Indonesia. IKLH dapat digunakan sebagai bahan evaluasi secara umum kualitas lingkungan hidup dan tren pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia yang difokuskan pada media lingkungan air, udara, dan tutupan lahan. Perhitungan IKLH terdiri atas tiga komponen, yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL). Namun Kota Surabaya fokus pada penggunaan Indeks Tutupan Hutan (ITH) dengan memasukkan pula komponen ruang terbuka hijau berupa hutan kota, taman dan jalur hijau, Kawasan lindung dan pesisir, makam, fasilitas umum dan permukiman, lapangan stadion serta telaga, waduk, dan boezem.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang telah dicapai pada tahun 2018 sebesar 63,13. IKLH dihitung berdasarkan rata-rata terbobot dengan nilai Indeks Kualitas Air (IKA) sebesar 57,62, Indeks Kualitas Udara (IKU) sebesar 90,27 dan Indeks Tutupan Hutan sebesar 42,44. Angka IKLH tersebut bila dibandingkan dengan tahun 2017 menunjukkan adanya peningkatan dari 61,30 menjadi 63,13. Data Penyusun IKLH dapat dilihat pada Tabel II.26.

Tabel II.26
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
Kota Surabaya Tahun 2014 - 2018

Uraian	Capaian Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	N/A	59,18	60,29	61,30	63,13

Sumber data : DKRTH dan DLH Surabaya, 2019, diolah

Keterangan : Data tersedia sejak tahun 2015

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Surabaya (IKLHS) merupakan pengukuran IKLH dengan menambah Indeks Persampahan selain indeks Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Tutupan Hutan (ITH). Indeks Persampahan menggunakan komponen indikator pengurangan sampah, indikator tingkat penanganan sampah, dan indikator pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Pengelolaan sampah merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam pembangunan berkelanjutan khususnya untuk wilayah perkotaan.



Rumus Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Surabaya (IKLHS) yaitu:

$$IKLH \text{ Kota Surabaya} = (\text{Indeks Persampahan} \times 40\%) + (\text{Indeks RTH} \times 30\%) + ((\text{Indeks Pencemaran Air (IPA)} + \text{Indeks Pencemaran Udara (IPU)} \times 30\%))$$

Dimana penyesuaian komponen IKLH terdiri dari:

1. Persampahan (40%),
2. RTH (30%) dan
3. Pencemaran (IPA+IPU) (30%)

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Persampahan (IKLHS) yang telah terealisasi adalah sebesar 64,91. IKLHS dihitung berdasarkan rata-rata tertimbang nilai Indeks Persampahan sebesar 74,98. Angka IKLHS tersebut bila dibandingkan dengan tahun 2017 menunjukkan adanya peningkatan dari 64,88 menjadi 64,91. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan kualitas lingkungan hidup di Kota Surabaya. Data Penyusun IKLHS dapat dilihat pada Tabel II.27.

Tabel II.27
Indeks Penyusun IKLHS Kota Surabaya
Tahun 2014 - 2018

Indeks	Capaian Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018
Indeks Kualitas Air (IKA)	N/A	N/A	54,90	57,50	57,62
Indeks Kualitas Udara (IKU)	N/A	N/A	89,57	90,26	90,27
Indeks Tutupan Hutan (ITH)	N/A	N/A	42,38	42,43	42,44
Indeks Persampahan	N/A	N/A	69,27	74,96	74,98
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Persampahan Surabaya (IKLHS)	N/A	59,18	62,09	64,88	64,91

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2019 diolah

2.3.6 Indeks Budaya Lokal

Indeks Budaya Lokal pada tahun 2018 mencapai 78,39% mengalami peningkatan bila dibandingkan tahun 2017 yang mencapai 70,73%. Meskipun indeks budaya lokal mengalami peningkatan, namun masih perlu dilakukan upaya-upaya untuk penguatan nilai-nilai budaya lokal, khususnya dalam pemahaman nilai-nilai kepahlawanan di kehidupan bermasyarakat, serta pelestarian beberapa jenis budaya yang sudah mulai ditinggalkan oleh masyarakat. Upaya pemberian pemahaman kepada masyarakat membutuhkan waktu sehingga perlu dilakukan



secara rutin agar pemahaman terhadap budaya lokal tidak menurun. Perhitungan indeks budaya lokal merupakan rata-rata geometrik dari tingkat pemahaman masyarakat terhadap budaya lokal, tingkat kemampuan rewriting dan retelling masyarakat, serta tingkat kepedulian masyarakat terhadap kegiatan-kegiatan bernilai kebangsaan.

Tabel II.28
Indeks Budaya Lokal Kota Surabaya
Tahun 2014 - 2018

Indeks	Capaian Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018
Indeks Budaya Lokal	N/A	N/A	69,37	70,73	78,39

Sumber data : Hasil Survey Bappeko, 2019, diolah

Adapun beberapa permasalahan yang dapat menghambat tercapainya Indeks Budaya Lokal, yaitu:

- a. Belum optimalnya pemahaman nilai-nilai kepahlawanan dalam kehidupan bermasyarakat;
- b. Masih adanya jenis budaya yang belum dilestarikan.

Upaya peningkatan budaya lokal mendapatkan apresiasi dari Pemerintah berupa penghargaan nasional “**Anugerah Purwakalagrha IMA 2018**” dalam kategori Pejabat Peduli Museum oleh Indonesian Museum Award pada tanggal 14 Oktober 2018.

Banyaknya penyelenggaraan festival seni dan budaya bertujuan untuk mendukung peningkatan kunjungan wisatawan serta memberi kesempatan pada seniman-seniman kota Surabaya untuk menampilkan karyanya. Disisi lain, banyaknya penyelenggaraan festival seni dan budaya dapat memberikan nilai tambah secara ekonomi bagi kelompok seni di Surabaya, Oleh karena itu diperlukan kerja sama dengan *stakeholder* untuk meningkatkan jumlah penyelenggaraan seni dan budaya. Perkembangan penyelenggaraan festival seni dan budaya dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel II.29
Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya Kota Surabaya
Tahun 2014 – 2019

Tahun	Realisasi				
	2014	2015	2016	2017	2018
Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	449	613	887	445	653

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 2019



Pada tahun 2018 sebanyak 653 festival seni dan budaya yang diselenggarakan. Banyaknya penyelenggaraan festival seni dan budaya bertujuan untuk mendukung peningkatan kunjungan wisatawan serta memberi kesempatan pada seniman-seniman kota Surabaya untuk menampilkan karyanya.

Pemerintah Kota Surabaya dalam mendukung perkembangan kesenian menyediakan sarana berupa gedung/tempat yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk menyelenggarakan kegiatan kesenian/berekspresi di UPTD Tugu Pahlawan, THR dan Balai Pemuda serta UPTD THP Kenjeran dan Wisata Religi Ampel.

Dalam rangka perlindungan dan pelestarian terhadap cagar budaya yang ada di kota Surabaya, pemerintah kota melakukan upaya perlindungan dan pelestarian dalam bentuk pemberian penetapan terhadap benda, situs dan kawasan sebagai cagar budaya dan pengawasan agar jika ada proses renovasi tidak sampai merubah bentuk aslinya. Jumlah benda, situs dan kawasan yang dilindungi dan dilestarikan oleh Pemerintah Kota Surabaya pada tahun 2015 terdapat 273 benda, situs dan kawasan yang dilindungi dan dilestarikan oleh Pemerintah Kota Surabaya. Pada tahun 2016 dan sampai dengan tahun 2018 tidak ada penambahan cagar budaya yang ditetapkan karena masih dalam proses evaluasi terhadap bangunan/benda yang telah ditetapkan sebagai cagar budaya. Hal ini dilakukan untuk melihat apakah cagar budaya tersebut masih memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai cagar budaya.

Rekapitulasi data jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan dapat dilihat pada Tabel II.30 di bawah ini.

Tabel II.30
Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan Kota Surabaya
Tahun 2014 - 2018

No.	Uraian	Realisasi				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Total Benda, Situs dan Kawasan yang Dimiliki Daerah	257	273	273	273	273
2	Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan	257	273	273	273	273
3	Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 2019

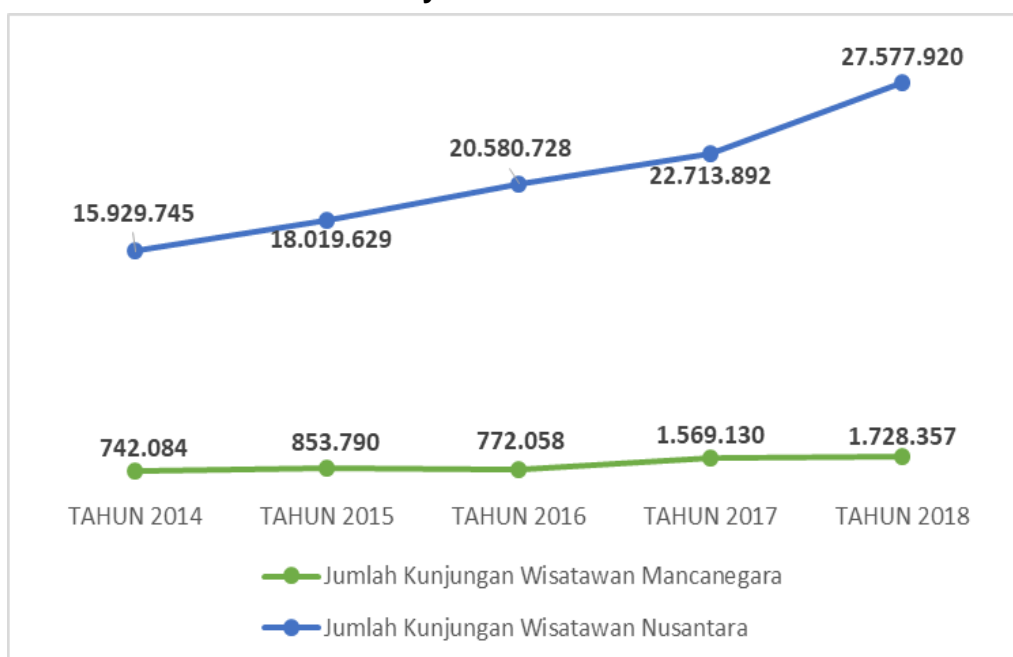


2.3.7 Pariwisata di Kota Surabaya

Sebagai kota terbesar kedua di Indonesia, Surabaya juga memiliki beberapa obyek wisata yang menarik untuk dikunjungi. Obyek wisata yang ada di Kota Surabaya bermacam-macam mulai dari wisata budaya, wisata olahraga, wisata rekreasi, wisata bahari, wisata bisnis hingga wisata religi. Dalam upaya untuk mengembangkan potensi di bidang pariwisata Pemerintah Kota Surabaya melaksanakan beberapa program yaitu Program Pengembangan Destinasi Wisata, Program Pemasaran Pariwisata dan Program Pengembangan Kerjasama dengan Stakeholder Bidang Pariwisata.

Peningkatan pariwisata di Kota Surabaya ditandai dengan jumlah kunjungan wisatawan ke Kota Surabaya semakin meningkat dari tahun ke tahun. Dengan meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan baik mancanegara maupun domestik diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi perkembangan perekonomian kota Surabaya, seperti dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar II.13 Jumlah Kunjungan Wisata Mancanegara dan Nusantara Kota Surabaya Tahun 2014 - 2018



Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 2019

Jumlah Kunjungan Wisatawan ke obyek wisata jika dibandingkan dengan total kunjungan wisata ke Surabaya masih relatif kecil, hal ini menunjukkan bahwa daya tarik objek wisata di Surabaya belum optimal sehingga masih diperlukan pengembangan destinasi dan pemasaran pariwisata yang efektif. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Surabaya terus berupaya untuk meningkatkan kualitas obyek-



obyek wisata sehingga mampu menjadi daya tarik bagi wisatawan. Beberapa upaya yang dilakukan diantaranya adalah membuat destinasi wisata baru di beberapa wilayah di Kota Surabaya, baik itu berupa wisata sejarah, museum, taman-taman, maupun kampung-kampung dengan tema wisata tertentu.

2.3.8 Persentase luas kawasan permukiman kumuh

Berdasarkan SK Walikota No. 188.45/143/436.1.2/2015 tentang Kawasan Prioritas Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman Kota Surabaya ditetapkan 26 Kelurahan dengan luas 145,89 Ha sebagai kawasan prioritas peningkatan kualitas perumahan dan permukiman. Upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kota Surabaya dalam penanganan permukiman kumuh antara lain melalui peningkatan sarana prasarana dasar permukiman antara lain jalan lingkungan, sanitasi, drainase lingkungan dan perbaikan kualitas kawasan permukiman dilakukan dalam rangka mendukung salah satu pencapaian target RPJMN III 2014 - 2018, yang dikenal dengan “Gerakan 100-0-100”, yakni pencapaian akses air minum 100%, mengurangi kawasan kumuh hingga 0% dan menyediakan akses sanitasi layak 100% untuk masyarakat. Daftar kawasan prioritas penataan dan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman dapat dilihat pada Tabel II.31.

Tabel II.31
Daftar Kawasan Prioritas Penataan dan Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman di Kota Surabaya

No	Kecamatan	Kelurahan	Keterangan
1	Wonokromo	Sawunggaling	PRIORITAS I
2	Bulak	Kenjeran	
3	Bulak	Kedung Cowek	
4	Bulak	Sukolilo Baru	
5	Kenjeran	Bulak Banteng	
6	Rungkut	Rungkut Kidul	
7	Rungkut	Kalirungkut	
8	Semampir	Wonokusumo	
9	Semampir	Sidotopo	
10	Gubeng	Airlangga	PRIORITAS II
11	Mulyorejo	Kalisari	
12	Pakal	Benowo	
13	Simokerto	Tambakrejo	
14	Sukomanunggal	Putat Gede	
15	Tenggiling Mejoyo	Kutisari	
16	Krempangan	Morokrempangan	



No	Kecamatan	Kelurahan	Keterangan
17	Asemrowo	Asemrowo	PRIORITAS III
18	Bubutan	Bubutan	
19	Bubutan	Gundih	
20	Bulak	Kenjeran	
21	Gunung Anyar	Gunung Anyar Tambak	
22	Semampir	Sidotopo	
23	Tandes	Tandes	
24	Wonokromo	Darmo	
25	Krembangan	Dupak	
26	Tandes	Karangpoh	

Sumber: RTRW Kota Surabaya, 2019

Salah satu faktor penilaian kawasan kumuh adalah cakupan layanan sanitasi di kawasan tersebut. Untuk itu untuk menurunkan luasan permukiman kumuh di Kota Surabaya dapat dilakukan dengan upaya pengelolaan air limbah domestik sistem terpusat dan sistem setempat untuk meningkatkan cakupan layanan sanitasi.

Penurunan angka persentase luas kawasan permukiman kumuh pada tahun 2018 dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, menunjukkan adanya upaya maksimal yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya, seperti dapat dilihat pada tabel II.32.

Tabel II.32
Persentase Luas Kawasan Permukiman Kumuh Kota Surabaya
Tahun 2014 - 2018

Uraian	Realisasi				
	2014	2015	2016	2017	2018
Persentase Luas Kawasan Permukiman Kumuh	N/A	0,86	0,78	0,58	0,25

Sumber data : Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya, 2019, diolah

Adapun beberapa permasalahan yang dapat menghambat tercapainya persentase luas kawasan permukiman kumuh, yaitu:

1. Belum optimalnya efektivitas pemanfaatan rusunawa sebagai rumah layak huni;
2. Belum optimalnya peningkatan atas sarana prasarana pemukiman antara lain jalan lingkungan, drainase lingkungan, dll;
3. Masih terdapat potensi rumah tidak layak huni yang menciptakan wilayah perumahan kumuh.



2.3.9 Indeks Reformasi Birokrasi

Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan hasil penilaian penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan reformasi birokrasi, yang berorientasi pada pencapaian outcome dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Pada tahun 2018, nilai SAKIP Pemerintah Kota Surabaya berada pada Kategori BB dengan hasil nilai 70,03 meningkat dibandingkan tahun 2017 dengan nilai 68,86.

Tabel II.33
Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota Surabaya
Tahun 2014 - 2018

Uraian	Realisasi				
	2014	2015	2016	2017	2018
Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	57,48	60,20	63,08	68,86	70,03
Nilai SAKIP	CC	B	B	B	BB

Sumber Data : Bagian Organisasi Surabaya, 2019, diolah

SAKIP di Kota Surabaya telah diterapkan di Kota Surabaya dengan didukung oleh sistem informasi yang terintegrasi, inovasi yang berkelanjutan, serta kolaborasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Nilai SAKIP Kota Surabaya selalu meningkat setiap tahun namun tidak secara signifikan, hal ini disebabkan rekomendasi untuk beberapa aspek penilaian belum ditindaklanjuti secara tuntas mengingat proses perbaikan dan/atau pengembangan membutuhkan dukungan antara lain: sarana, prasarana, sumber daya manusia, dan perkembangan teknologi, dan lain-lain.

Pada tahun 2019, Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ditetapkan target sebesar 70,00 atau setara dengan predikat B. Adapun beberapa permasalahan yang dapat menghambat tercapainya Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yaitu:

1. Perlunya meningkatkan pengelolaan arsip daerah meliputi pelestarian, pemeliharaan, dan pemanfaatan;
2. Perlunya meningkatkan nilai SAKIP sebagai bukti bahwa akuntabilitas pemerintahan telah diwujudkan;
3. Perlunya meningkatkan profesionalisme ASN terkait kompetensi, kompensasi, disiplin dan kinerja ASN;



4. Perlunya meningkatkan kualitas pelayanan dari berbagai aspek yaitu sistem informasi, standar layanan minimal dan kompetensi SDM;
5. Perlunya meningkatkan kualitas perencanaan agar dapat dilaksanakan untuk mencapai target yang ditetapkan;
6. Perlunya meningkatkan penyusunan perencanaan kebutuhan akan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran;
7. Perlunya menjaga opini BPK yaitu wajar tanpa pengecualian sebagai bukti bahwa keuangan daerah telah dikelola dengan baik;
8. Perlunya meningkatkan kedisiplinan aparatur/ASN;
9. Perlunya meningkatkan tindaklanjut atas pengaduan masyarakat terkait aparatur.

Tabel II.34
Rata-Rata Nilai Kepuasan Masyarakat Kota Surabaya
Tahun 2014 - 2018

Uraian	Realisasi				
	2014	2015	2016	2017	2018
Rata-rata Nilai Kepuasan Masyarakat	77,13	72,32	82,67	74,46	83,74

Sumber Data : Bagian Organisasi Surabaya, 2019

Pengukuran nilai kepuasan masyarakat ini diperoleh dari hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Pemerintah Kota Surabaya. Nilai kepuasan masyarakat terhitung mengalami kenaikan dibandingkan nilai kepuasan pada tahun 2017 yaitu 74,46 menjadi 83,74 pada tahun 2018.

Rata-rata nilai kepuasan masyarakat Kota Surabaya terhadap pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Surabaya bersifat fluktuatif karena merupakan hasil survey terhadap persepsi masyarakat. Keluhan yang disampaikan masyarakat terhadap layanan terkait dua aspek yaitu: 1) aspek sarana dan prasarana antara lain ketersediaan ruang tunggu, ketersediaan mesin pendingin ruangan, kebersihan kamar mandi/WC; 2) aspek sikap dan/atau perilaku yang ditunjukkan oleh petugas yaitu kurang ramah atau kurang baik dalam melayani.

Nilai rata-rata kepuasan masyarakat ini akan semakin ditingkatkan setiap tahun meskipun pada tahun 2018 sebesar 83,74 telah melampaui target yang ditetapkan yaitu 75,00. Peningkatan rata-rata nilai kepuasan masyarakat ini merupakan sebuah bukti keberhasilan pemerintah atas pelaksanaan pelayanan publik yang telah diberikan pada masyarakat.



2.3.10 Peningkatan keamanan pangan olahan di masyarakat

Peningkatkan ketersediaan, kualitas konsumsi, dan keamanan pangan pada tahun 2018 diukur dengan menggunakan indikator kinerja tingkat kualitas konsumsi dan keamanan pangan yang mencapai 95,62%. Bila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebesar 89,30%, maka capaian kerjanya mencapai 107,08%.

Tingkat keamanan bahan pangan segar yang beredar, dimana pada tahun 2018 mencapai 89,01%. Bila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebesar 82%, maka capaian kerjanya mencapai 108,55%. Tingkat keamanan bahan pangan segar yang beredar merupakan perbandingan antara jumlah bahan pangan segar yang disampling dan aman sebanyak 1.709 sampel, dengan jumlah bahan pangan segar yang disampling sebanyak 1.920 sampel.

Persentase sampel yang memenuhi syarat keamanan makanan, dimana pada tahun 2018 mencapai 98,04%. Bila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebesar 84%, maka capaian kerjanya mencapai 116,71%. Persentase sampel yang memenuhi syarat keamanan makanan merupakan perbandingan antara jumlah sampel makanan yang memenuhi syarat sebanyak 2.894 sampel, dengan jumlah sampel makanan yang diperiksa sebanyak 2.952 sampel. Dari keseluruhan upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota dalam Peningkatan keamanan pangan olahan di masyarakat Kota Surabaya dapat dilihat pada Tabel II.35.

Tabel II.35
Peningkatan Keamanan Pangan Olahan di Masyarakat
Tahun 2014 –2018

No.	Uraian	Realisasi				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Tingkat kualitas konsumsi dan keamanan pangan (persen)	N/A	N/A	94,74	94,78	95,62
2	Tingkat keamanan bahan pangan segar yang beredar (persen)	N/A	N/A	N/A	86,95	89,01
3	Sampel yang memenuhi syarat keamanan makanan (Persen)	N/A	N/A	94,19	96,02	98,04

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya, 2019
Dinas Kesehatan Kota Surabaya, 2019



2.3.11 Persentase capaian prasarana layanan kesehatan yang dibangun/direhabilitasi

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap sarana pelayanan kesehatan dasar di Kota Surabaya yang terus meningkat, maka Pemerintah Kota meningkatkan pelayanan Puskesmas menjadi Puskesmas rawat inap. Sampai dengan tahun 2018, dari 63 Puskesmas induk, sebanyak 21 Puskesmas merupakan puskesmas rawat inap, dan terdapat puskesmas pembantu sebanyak 59 puskesmas. Jika ditinjau dari skala wilayah Kota Surabaya dengan data jumlah penduduk Kota Surabaya sampai dengan tahun 2018 sejumlah 3.094.732 jiwa, maka 1 Puskesmas/Puskesmas Pembantu kurang lebih melayani 25.367 jiwa. Apabila dibandingkan dengan standar nasional bahwa 1 Puskemas melayani 30.000 jiwa, maka pada saat ini sarana kesehatan dasar di Kota Surabaya masih mencukupi.

Jumlah puskesmas, puskesmas pembantu, dan klinik tahun 2014 sampai tahun 2018 dapat dilihat pada Tabel II.36.

Tabel II.36
Jumlah Puskesmas, Poliklinik dan Pustu Kota Surabaya
Tahun 2014 - 2018

No	Uraian	Realisasi				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah puskesmas	62	63	63	63	63
2	Jumlah klinik	243	261	296	241	241
3	Jumlah pustu	60	59	59	59	59

Sumber: Dinas Kesehatan, 2019

Sebagai fasilitas kesehatan rujukan dari fasilitas kesehatan tingkat pertama, rumah sakit berperan dalam memberikan layanan kesehatan yang bersifat kuratif dan rehabilitatif. Data rumah sakit dapat dilihat pada Tabel II.37.

Tabel II.37
Jumlah Rumah Sakit Kota Surabaya
Tahun 2014 - 2018

No	Uraian	Realisasi				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah Penduduk	2.853.661	2.943.528	3.307.300	3.342.627	3.094.732
2	Rumah Sakit Umum (Pemerintah/ Provinsi)	3	2	3	4	4
3	Rumah Sakit Jiwa/Paru dan Penyakit Khusus Lainnya Milik	5	3	4	4	4



No	Uraian	Realisasi				
		2014	2015	2016	2017	2018
	Pemerintah/ Provinsi					
4	Rumah Sakit AD/AU/AL/POLRI	7	8	7	7	7
5	Rumah Sakit Daerah	2	2	2	2	2
6	Rumah Sakit Swasta	44	46	43	42	42
Jumlah Rumah Sakit		61	61	61	59	59
Rasio Rumah Sakit per 1.000 penduduk		0,0213	0,0210	0,0210	0,0179	0,0191

Sumber : Dinas Kesehatan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2019

Persentase ketersediaan sarana dan prasarana puskesmas dan puskesmas pembantu, dimana pada tahun 2018 mencapai 83,61%. Bila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebesar 76%, maka capaian kerjanya mencapai 110,01%. Persentase ketersediaan sarana dan prasarana puskesmas dan puskesmas pembantu merupakan perbandingan antara jumlah puskesmas dan puskesmas pembantu yang ditingkatkan sarana prasarannya tahun 2018 sebanyak 102 puskesmas, dengan jumlah puskesmas dan puskesmas pembantu keseluruhan tahun 2018 sebanyak 122 puskesmas.

Persentase fasilitas kesehatan dalam kondisi baik, dimana pada tahun 2018 mencapai 83,61%. Bila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebesar 64,52%, maka capaian kerjanya mencapai 129,58%. Fasilitas kesehatan meliputi puskesmas, puskesmas pembantu dan gudang kesehatan. Persentase fasilitas kesehatan dalam kondisi baik merupakan perbandingan antara jumlah fasilitas kesehatan dalam kondisi baik sebanyak 102 unit, dengan jumlah total fasilitas kesehatan pada tahun 2018 sebanyak 122 unit. Pada Kegiatan Pembangunan/rehabilitasi dan pengawasan puskesmas/ puskesmas pembantu sebanyak 54 bangunan.

Tabel II.38
Persentase capaian prasarana layanan kesehatan yang dibangun/direhabilitasi
Tahun 2014 –2018

No.	Uraian	Realisasi				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah total fasilitas kesehatan (Puskesmas dan Pustu)	122	122	122	122	122
2	Jumlah puskesmas dan puskesmas pembantu yang ditingkatkan sarana prasarannya	62	62	62	93	102
3	Jumlah fasilitas kesehatan dalam kondisi baik	N/A	N/A	60	81	102

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Surabaya, 2019



2.3.12 Persentase lokasi lahan yang tersedia untuk kepentingan umum

Seiring dengan perkembangan pembangunan Kota Surabaya, maka kebutuhan akan penyediaan sarana, prasarana dan fasilitas pendukung kegiatan masyarakat akan semakin meningkat pula. Penyediaan sarana dan prasarana yang akan dilakukan meliputi penyediaan sarana penunjang kegiatan masyarakat, sistem jaringan jalan dan drainase yang membutuhkan ruang dan lahan. Namun ketersediaan lahan aset Pemerintah Kota Surabaya yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan kebutuhan masyarakat sangatlah terbatas. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota dalam rangka memenuhi kebutuhan tersebut melalui pengadaan lahan untuk merealisasikan rencana pembangunan sehingga dapat terwujud sarana, prasarana dan fasilitas yang terpadu dan bermanfaat bagi masyarakat. Pada Tahun 2019 target yang telah ditetapkan sebesar 100%. Permasalahan yang dapat menghambat tercapainya keberhasilan pelaksanaan program Kota Surabaya adalah masih tingginya kebutuhan lahan untuk kemudian dibangun fasilitas yang bermanfaat bagi kepentingan umum.

Tabel II.39
Persentase lokasi lahan yang tersedia untuk kepentingan umum
Tahun 2014 - 2018

No	Uraian	Realisasi				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Persentase lokasi lahan yang tersedia untuk kepentingan umum	N/A	N/A	100	88,89	100

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan dan
Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah, 2019

Sedangkan untuk akumulasi luas tanah dan/atau bangunan yang disediakan bagi pembangunan infrastruktur untuk kepentingan umum. Perkembangan dari tahun 2015 hingga tahun 2019 dapat dilihat pada tabel II.39. Permasalahan yang dapat menghambat tercapainya keberhasilan pelaksanaan program Kota Surabaya adalah masih tingginya kebutuhan lahan untuk kemudian dibangun fasilitas yang bermanfaat bagi kepentingan umum, seperti dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel II.40
Luas tanah dan/atau bangunan yang disediakan bagi pembangunan infrastruktur
untuk kepentingan umum (dalam Ha)
Tahun 2014 - 2018

No	Uraian	Realisasi				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Luas pengadaan tanah dan/atau bangunan yang disediakan bagi pembangunan infrastruktur untuk kepentingan umum	N/A	N/A	1,7563	5,1768	5,68
2	Luas pengadaan tanah dan/atau bangunan yang disediakan bagi pembangunan non infrastruktur untuk kepentingan umum	N/A	0,4149	1,2231	17,6582	5,68

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematuan dan
Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah, 2019

2.3.13 Persentase pelaksanaan rekomendasi utilitas

Persentase pelaksanaan rekomendasi utilitas merupakan persentase rekomendasi utilitas yang dilaksanakan dibanding utilitas yang dikeluarkan. Sebagaimana Utilitas kota di luar kewenangan Pemerintah Kota, meliputi pipa gas, pipa air, kabel utilitas (PLN,dsb.), kabel FO, dan sebagainya sesuai pengajuan ijin pemasangan utilitas. Selain itu, Rekomendasi utilitas yang dilaksanakan adalah pemasangan utilitas yang telah diperiksa kesesuaian lokasi dan kondisinya terhadap rekomendasi SKPD.

2.3.14 Tingkat Keandalan Jaringan Jalan

Jalan merupakan salah satu infrastruktur yang mendasar dalam segala aktivitas pemenuhan kebutuhan manusia. Pemerintah Kota Surabaya berupaya penuh dalam pelaksanaan pengembangan jaringan jalan sehingga pemenuhan kebutuhan masyarakat dapat segera terlaksana. Pada tahun 2018, rasio panjang jalan terhadap jumlah penduduk Kota Surabaya adalah 0,55. Jalan Kota Surabaya sepanjang 1.692.531,60 meter melayani jumlah penduduk sebesar 3.094.732 orang.

Jalan dianggap dalam kondisi baik jika masih dapat dimanfaatkan secara optimal dan belum membutuhkan perbaikan yang mendasar. Untuk meningkatkan dan mempertahankan infrastruktur jalan dalam kondisi baik sebagai pendukung sarana transportasi dan peningkatan aksesibilitas kawasan perlu dilakukan upaya



pembangunan dan pemeliharaan jalan kota serta mengoptimalkan jalan yang mengalami *bottle neck* di Kota Surabaya yang terintegrasi dengan jaringan jalan regional dan nasional.

Penyediaan dan peningkatkan kinerja jaringan jalan pada tahun 2018 diukur dengan menggunakan indikator kinerja tingkat kehandalan jaringan jalan mencapai 0,41. Tingkat kehandalan jaringan jalan digunakan untuk mengukur konektivitas jaringan jalan berdasarkan jumlah link (jaringan jalan) yang dibandingkan dengan jumlah node (simpul/persimpangan). Tingkat kehandalan jaringan jalan akan bertambah dengan adanya penambahan/pembangunan jalan baru dengan lebar minimal 7m sehingga semakin banyak alternatif rute yang dapat ditempuh dalam mencapai tujuan tertentu. Pada Tahun 2019 target yang telah ditetapkan sebesar 0,41. Permasalahan yang dapat menghambat tercapainya keberhasilan pelaksanaan program Kota Surabaya adalah belum optimalnya kinerja jaringan jalan serta perlunya peningkatan kehandalan jaringan jalan, seperti dapat dilihat pada table berikut.

Tabel II.41
Tingkat Kehandalan Jaringan Jalan
Tahun 2014 - 2018

Uraian	Realisasi				
	2014	2015	2016	2017	2018
Tingkat kehandalan jaringan jalan	N/A	N/A	0,402	0,40	0,41

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan, 2019

2.3.15 Persentase rencana induk sektoral dan rencana rinci yang disusun dan telah tersinkronisasi dengan Rencana Tata Ruang Wilayah

Mewujudkan sinkronisasi sistem penataan ruang dan sistem pertanahan adalah dengan meningkatkan sinkronisasi dan integrasi rencana rinci dan rencana induk sektoral dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), mewujudkan penyediaan lahan untuk pembangunan bagi kepentingan umum, serta meningkatnya pengamanan dan pengelolaan aset tanah dan/atau bangunan yang capaiannya diukur dengan indikator kinerja peningkatkan sinkronisasi dan integrasi rencana rinci dan rencana induk sektoral dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) pada tahun 2018 diukur dengan menggunakan indikator kinerja persentase rencana Induk sektoral dan rencana rinci yang disusun dan telah tersinkronisasi dengan Rencana



Tata Ruang Wilayah mencapai 24,14%, bila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebesar 20,69%, maka capaian kinerjanya mencapai 116,66%.

Tabel II.42

Persentase Rencana Induk Sektorial dan Rencana Rinci yang Disusun dan telah Tersinkronisasi dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2014 - 2018

Uraian	Realisasi				
	2014	2015	2016	2017	2018
Persentase rencana Induk sektorial dan rencana rinci yang disusun dan telah tersinkronisasi dengan Rencana Tata Ruang Wilayah	N/A	N/A	6,90	20,69	24,14

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya, 2019

Jumlah rencana induk sektorial yang disusun sampai dengan tahun 2018 sebanyak 11 rencana induk sektorial dari 14 rencana induk sektorial yang akan disusun sampai dengan tahun 2021.

2.3.16 Persentase panjang jalan yang sudah terpasang PJU hemat energi

Peningkatan sistem jaringan dan kualitas PJU pada tahun 2018 diukur dengan menggunakan indikator kinerja persentase panjang jalan yang sudah terpasang PJU dalam kondisi baik mencapai 100%. Panjang jalan yang sudah mendapatkan penerangan, dimana pada tahun 2018 mencapai 2.902.320 meter. Persentase pemasangan PJU hemat energi, dimana pada tahun 2018 mencapai 146,92%. Pemerintah Kota Surabaya akan terus melakukan konversi PJU konvensional menjadi PJU hemat energi dalam rangka mewujudkan tata kelola kota ramah lingkungan. Persentase pemasangan PJU hemat energi merupakan perbandingan antara penambahan jumlah PJU hemat energi yang dipasang mulai tahun 2016 dengan total rencana pemasangan PJU hemat energi yang terpasang sampai dengan tahun 2018. Penambahan jumlah PJU hemat energi yang terpasang sampai di tahun 2018 sebanyak 7.176 PJU dari 7.272 PJU hemat energi yang direncanakan terpasang sampai dengan tahun 2018, seperti dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.43

Persentase panjang jalan yang sudah terpasang PJU hemat energi Tahun 2014 - 2018

Uraian	Realisasi				
	2014	2015	2016	2017	2018
Persentase panjang jalan yang sudah terpasang PJU hemat energi	N/A	N/A	6,90	20,69	24,14



Uraian	Realisasi				
	2014	2015	2016	2017	2018
Jumlah PJU hemat energi terpasang	1.263	609	1.741	3.508	7.176

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya, 2019

Dalam rangka meningkatkan pembangunan dan pelayanan utilitas kota secara terpadu dan merata, Pemerintah Kota Surabaya terus melakukan penyebaran dan layanan jaringan utilitas kota diantaranya dengan terus meningkatkan sistem jaringan dan kualitas PJU secara merata di seluruh wilayah Kota Surabaya. Penerangan Jalan Umum (PJU) yang terpasang pada tahun 2018 sebanyak 5.372 titik dan dengan demikian sampai dengan tahun 2018 jumlah titik PJU sebanyak 96.744 titik dan seluruhnya dalam kondisi baik.

Tabel II.44
Penerangan Jalan Umum
Tahun 2014 - 2018

Uraian	Realisasi				
	2014	2015	2016	2017	2018
Jumlah PJU terpasang (Titik)	6.360	6.960	4.405	5.380	5.372
Panjang jalan yang sudah mendapatkan penerangan	N/A	2.365.920	2.540.910	2.702.310	2.902.320

Sumber : Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau, 2019

Setiap tahun Pemerintah Kota Surabaya terus melakukan pemasangan PJU di seluruh Kota Surabaya secara merata. Selain melakukan pemasangan baru PJU tersebut, Pemerintah Kota Surabaya juga melakukan kegiatan pelimpahan rekening PJU dari warga. Oleh karena itu salah satu upaya yang terus dilakukan adalah dengan melakukan pemasangan PJU yang hemat energi sehingga semakin banyaknya PJU hemat energi yang terpasang di Kota Surabaya maka beban tagihan rekening listrik PJU yang harus ditanggung oleh Pemerintah Kota Surabaya bisa semakin berkurang dan sekaligus dapat mendukung upaya penghematan / konservasi energi kota. Sampai dengan tahun 2018, jumlah PJU hemat energi sebanyak 10.684 titik dari 96.744 titik PJU yang terpasang. Pertumbuhan pemasangan PJU dari tahun 2015 sebesar 146,92%.



2.3.17 Persentase capaian prasarana pendidikan yang dibangun/direhabilitasi

Ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan juga merupakan faktor penting dalam upaya pemerataan dan perluasan pendidikan, baik dari ketersediaan sekolah, kelas ataupun guru. Dengan demikian jika ketersediaan ruang kelas dan guru pengajar masih kurang memadai maka dibutuhkan perhatian untuk memperlancar proses belajar mengajar pada tingkat pendidikan dasar.



Tabel II.45
Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Kota Surabaya Menurut Kecamatan Tahun 2018

KECAMATAN	SD/MI					SMP/MTs				
	Jumlah SD	Jumlah MI	Total	Jumlah Penduduk Usia 7-12	Rasio	Jumlah SMP	Jumlah MTs	Total	Jumlah Penduduk Usia 13-15	Rasio
Asemrowo	8	7	15	5.143	1 : 360	4	2	6	2.434	1 : 439
Benowo	13	5	18	6.733	1 : 381	2	2	4	3.314	1 : 877
Bubutan	29	2	31	9.678	1 : 340	8	0	8	4.923	1 : 701
Bulak	14	6	20	4.557	1 : 240	6	1	7	2.314	1 : 350
Dukuh Pakis	25	1	26	5.599	1 : 230	11	1	12	2.698	1 : 254
Gayungan	14	1	15	3.971	1 : 288	6	1	7	2.033	1 : 342
Genteng	20	1	21	5.193	1 : 268	11	0	11	2.652	1 : 275
Gubeng	26	5	31	12.284	1 : 431	14	0	14	6.216	1 : 495
Gununganyar	13	1	14	5.481	1 : 414	7	0	7	2.633	1 : 417
Jambangan	6	5	11	4.895	1 : 465	7	0	7	2.437	1 : 379
Karangpilang	13	3	16	6.787	1 : 456	9	0	9	3.380	1 : 438
Kenjeran	24	20	44	17.806	1 : 417	13	6	19	8.635	1 : 500
Krembangan	34	7	41	11.287	1 : 291	17	1	18	5.679	1 : 354
Lakarsantri	21	5	26	5.936	1 : 238	11	2	13	2.837	1 : 246
Mulyorejo	28	0	28	7.806	1 : 301	16	0	16	3.942	1 : 268
Pabean Cantian	17	4	21	7.534	1 : 388	7	0	7	3.781	1 : 608
Pakal	16	6	22	5.758	1 : 271	7	2	9	2.883	1 : 353
Rungkut	22	4	26	10.725	1 : 436	9	2	11	5.215	1 : 509
Sambikerep	16	6	22	6.232	1 : 292	15	3	18	3.028	1 : 182
Sawahan	52	0	52	19.868	1 : 403	15	1	16	9.863	1 : 688
Semampir	40	30	70	19.778	1 : 299	17	7	24	9.712	1 : 456
Simokerto	20	7	27	9.123	1 : 353	9	2	11	4.592	1 : 460
Sukolilo	34	1	35	10.351	1 : 316	17	1	18	5.050	1 : 312
Sukomanunggal	31	1	32	9.729	1 : 321	17	2	19	4.779	1 : 277
Tambaksari	46	10	56	21.257	1 : 402	21	3	24	10.486	1 : 494
Tandes	23	10	33	9.146	1 : 299	13	2	15	4.301	1 : 316
Tegalsari	36	2	38	9.299	1 : 264	12	1	13	4.590	1 : 407
Tenggilis Mejoyo	19	1	20	5.370	1 : 284	7	0	7	2.495	1 : 391



KECAMATAN	SD/MI					SMP/MTs				
	Jumlah SD	Jumlah MI	Total	Jumlah Penduduk Usia 7-12	Rasio	Jumlah SMP	Jumlah MTs	Total	Jumlah Penduduk Usia 13-15	Rasio
Wiyung	16	1	17	6.648	1 : 412	11	0	11	3.269	1 : 335
Wonocolo	25	3	28	7.463	1 : 284	10	1	11	3.617	1 : 369
Wonokromo	36	8	44	14.936	1 : 373	19	3	22	7.766	1 : 416

Sumber: Dinas Pendidikan, 2019



Dari data pada Tabel II.45 rasio ketersediaan sekolah pada beberapa wilayah kecamatan yang memiliki rasio ketersediaan sekolah tinggi dan terdapat beberapa wilayah kecamatan dengan rasio ketersediaan sekolah rendah. Kecamatan yang memiliki rasio ketersediaan sekolah jenjang SD/MI tertinggi adalah Kecamatan Jambangan dengan nilai rasio sebesar 1:465, sedangkan kecamatan yang memiliki rasio terkecil adalah Kecamatan Dukuh Pakis dengan nilai rasio sebesar 1:230. Pada tingkat SMP/MTs Kecamatan Benowo memiliki rasio tertinggi yaitu 1:877 dan Kecamatan Sambikerep merupakan Kecamatan dengan rasio terendah yaitu 1:182.

Rasio kecamatan yang ketersediaan sekolahnya rendah justru menjadi tujuan bagi penduduk usia sekolah di wilayah kecamatan lain untuk sekolah di wilayah tersebut sehingga menyebabkan APK dan APM di wilayah kecamatan tersebut tinggi. Sedangkan untuk wilayah yang memiliki rasio ketersediaan sekolahnya tinggi perlu direncanakan penyediaan fasilitas pendidikan baru atau mengembangkan daya tampung sekolah yang ada agar penduduk usia sekolah dapat tertampung pendidikannya.

Selain ketersediaan sekolah, kualitas pendidikan juga dipengaruhi oleh mutu lembaga pendidikan yang dapat dilihat dari akreditasi lembaga pendidikan tersebut. Akreditasi memberikan gambaran tingkat kinerja sekolah yang dijadikan sebagai alat pembinaan, pengembangan dan peningkatan sekolah baik dari segi mutu, efektifitas, efisiensi, produktifitas dan inovasinya. Selain itu akreditasi juga memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa sekolah sudah memenuhi standar yang ditetapkan.

Dari data Dinas Pendidikan tahun 2018 terdapat 337 sekolah SMP/MTs/Sederajat baik negeri ataupun swasta yang telah terakreditasi, terdiri dari 215 sekolah yang terakreditasi A, 105 sekolah terakreditasi B dan 17 sekolah yang terakreditasi C. Sedangkan untuk sekolah SD/MI/Sederajat baik negeri atau swasta terdapat 777 sekolah yang telah terakreditasi, terdiri dari 504 sekolah yang terakreditasi A, 240 sekolah terakreditasi B dan 33 sekolah yang terakreditasi C. Sedangkan untuk lembaga kursus/pelatihan berdasarkan data dari Dinas Pendidikan tahun 2018 terdapat 264 lembaga kursus/pelatihan dan 72 lembaga kursus/pelatihan telah terakreditasi.

Disamping pendidikan di sekolah dan lembaga kursus/pelatihan juga terdapat Pusat Kegiatan Belajar Mengajar yang berperan dalam penyelenggaraan pendidikan kesetaraan berupa kejar paket A, B dan C. Berdasarkan data Dinas Pendidikan tahun 2019, dari PKBM yang tersebar di kecamatan terdapat 355 peserta yang



mengikuti ujian kesetaraan Paket A, sebanyak 305 peserta yang lulus ujian, atau sebesar 85,92%. Sedangkan peserta yang mengikuti ujian kesetaraan Paket B sebanyak 1.069 peserta, namun hanya 954 peserta yang lulus ujian atau sebesar 89,24%. Dan untuk pendidikan kesetaraan Paket C, terdapat 1.978 peserta yang mengikuti ujian kesetaraan Paket C, namun hanya 1.708 peserta yang lulus ujian atau sebesar 86,35%. Perkembangan persentase capaian prasarana pendidikan yang dibangun/direhabilitasi dapat dilihat pada indikator-indikator berikut.

Tabel II.46
Persentase capaian prasarana pendidikan yang dibangun/direhabilitasi
Tahun 2014 - 2018

Uraian	Realisasi				
	2014	2015	2016	2017	2018
Persentase PAUD yang ditingkatkan sarana prasarannya	N/A	N/A	N/A	99.56%	97.41%
Persentase daya tampung relatif terhadap jumlah kebutuhan SD/MI	N/A	N/A	N/A	100.31%	100,00%
Persentase daya tampung relatif terhadap jumlah kebutuhan SMP/MTs	N/A	N/A	N/A	89.15%	102,57%
Persentase lembaga pendidikan SD yang sarana prasarannya sesuai standar	N/A	N/A	N/A	99.46%	89,44%
Persentase lembaga pendidikan SMP yang sarana prasarannya sesuai standar	N/A	N/A	N/A	98.85%	82.66%
Persentase fasilitas pendidikan dalam kondisi baik	N/A	N/A	N/A	59.29%	66.58%
Pembangunan/rehabilitasi fasilitas gedung pendidikan	N/A	N/A	118	82	278

Sumber : Dinas Pendidikan & Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang, 2019

2.3.18 Rasio Guru dibanding Murid

Kebutuhan guru yang memenuhi kualifikasi menjadi sangat penting dalam upaya peningkatan kualitas dan pemerataan pendidikan di semua jenjang pendidikan. Dengan pendidikan guru yang sesuai dengan standar kualifikasi maka diharapkan akan mampu menghasilkan kualitas siswa didik yang lebih berkualitas pula. Dan tentunya juga dibutuhkan ketersediaan guru yang berkompetensi di setiap sekolah.

Pada tahun 2015, jumlah guru di jenjang SD/MI sebanyak 12.418 orang dengan jumlah murid sebanyak 284.313 siswa, sehingga rasio guru SD/MI sebesar 1:23. Jumlah guru meningkat pada tahun 2017 menjadi 12.797 orang dengan jumlah murid sebanyak 282.408 siswa, sehingga rasio guru SD/MI menjadi 1:22. Jumlah



guru di jenjang SMP/MTs pada tahun 2017 sebanyak 7.231 orang dengan jumlah murid sebanyak 128.471 siswa, sehingga rasio guru SMP/MTs sebesar 1:18.

Tabel II.47
Jumlah Guru dan Murid Kota Surabaya Tahun 2014 - 2018

No	Jenjang Pendidikan	2014	2015	2016	2017	2018
1	SD/MI					
1.1	Guru	12.767	12.418	12.642	12.797	14.132
1.2	Murid	281.794	284.313	281.310	282.408	287.830
1.3	Rasio	1 : 22	1 : 23	1:22	1 : 22	1 : 21
2	SMP/MTs					
2.1	Guru	7.723	6.460	7.167	7.231	7524
2.2	Murid	129.845	145.123	135.283	128.471	129.136
2.3	Rasio	1 : 17	1 : 22	1:19	1:18	1 : 18

Sumber : Dinas Pendidikan, 2019

Terkait dengan kualitas guru dapat dilihat dari jenjang pendidikan guru dan sertifikasi guru sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel II.48
Jumlah Guru PNS Kota Surabaya Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2018

JENJANG	≤ SMA	D1	D2	D3	S1/D4	S2	S3	TOTAL
TK	15	N/A	12	1	259	31	N/A	318
SD	155	1	92	13	3.616	573	1	4.451
SMP	26	6	6	15	1.527	437	5	2.022
TOTAL	196	7	110	29	5.402	1.041	6	6.791

Sumber : Dinas Pendidikan, 2019

Tabel II.49
Jumlah Guru Non PNS Kota Surabaya Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2018

JENJANG	≤ SMA	D1	D2	D3	D4	S1	S2	S3	TOTAL
TK	730	10	63	44	4	6.455	299	3	7.608
SD	382	4	4	29	4	3.706	319	1	4.449
SMP	1.315	55	126	53	2	3.984	126	4	5.665
TOTAL	2.427	69	193	126	10	14.145	744	8	17.722

Sumber : Dinas Pendidikan, 2019

Tabel II.50
Jumlah Guru Kota Surabaya Bersertifikat Pendidik Tahun 2018

No	Jenjang	Guru Bersertifikat Pendidik			Jumlah Total Guru			Guru Yang Belum Sertifikasi		
		PNS	NON PNS	Jumlah	PNS	NON PNS	Jumlah	PNS	NON PNS	Jumlah
1	SD	3.535	1.756	5.291	4.451	7.608	12.059	916	5.852	6.768
2	SMP	1.699	1.045	2.744	2.022	4.449	6.471	323	3.404	3.727

Sumber : Dinas Pendidikan, 2019

Dari data pada tabel tersebut diatas menunjukkan bahwa masih ada 10.103 guru di jenjang pendidikan dasar yang belum sertifikasi. Diharapkan dengan



program dan kegiatan yang telah diberikan oleh Pemerintah Kota Surabaya jumlah guru yang bersertifikasi akan mengalami peningkatan.

2.3.19 Persentase pemanfaatan rusunawa yang tepat sasaran

Persentase pemanfaatan rusunawa merupakan perbandingan antara jumlah kapasitas rumah susun dan rumah tapak yang disediakan pada tahun tahun 2018, dengan jumlah kebutuhan rumah susun pada tahun 2016 (sebagai tahun dasar) ditambahkan dengan jumlah pemohon rumah tinggal tapak pada tahun 2018. Jumlah kapasitas rumah susun dan rumah tapak yang disediakan sampai dengan tahun 2018 sebanyak 4.483 rumah, sedangkan jumlah kebutuhan rumah tinggal tapak pada tahun 2018 sebanyak 8.150 rumah. Sehingga pengelolaan dan pemeliharaan rumah susun sederhana sewa (blok) pada tahun 2018 sebanyak 91. Namun sampai dengan saat ini permintaan kebutuhan untuk rumah susun semakin meningkat, sehingga masih memerlukan pengembangan dan pengelolaan rumah susun guna mewujudkan pemanfaatan rumah susun yang tepat sasaran.

Tabel II.51
Persentase pemanfaatan rusunawa
Tahun 2014 - 2018

Uraian	Realisasi				
	2014	2015	2016	2017	2018
Jumlah kebutuhan rumah susun	N/A	4.234	5.158	6.517	8.150
Jumlah kapasitas rumah susun dan rumah tapak yang disediakan	N/A	3.953	4.183	4.419	4.483
Pengelolaan dan pemeliharaan rumah susun sederhana sewa (blok)	N/A	78	83	90	91

Sumber : Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah, 2019

2.3.20 Persentase wilayah dengan rumah tapak yang layak huni seluruhnya

Terkait dengan upaya perbaikan kualitas kawasan permukiman salah satunya dilakukan melalui perbaikan rumah tinggal tidak layak huni yang diutamakan pada kawasan prioritas. Data terkait jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki dapat dilihat pada Tabel II.52 di bawah ini.



Tabel II.52
Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki di Kota Surabaya
Tahun 2014 –2018

Uraian	Realisasi				
	2014	2015	2016	2017	2018
Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	602	723	749	1.442	845

Sumber: Dinas Sosial, 2019

Pemerintah Surabaya terus berupaya dalam mengentaskan kemiskinan, salah satunya adalah pelaksanaan kegiatan terpadu Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (RSDK) di Kota Surabaya, baik untuk perbaikan fisik lingkungan, maupun kondisi sosial ekonomi masyarakat di lingkungan perkampungan.

Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (RSDK) dalam kegiatan perbaikan rumah tidak layak huni ini merupakan bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Surabaya kepada masyarakat miskin yang menempati rumah tidak layak huni dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat dan / atau keluarga miskin utamanya dikawasan permukiman kumuh.

Sesuai Peraturan Walikota Surabaya Nomor 6 Tahun 2019, kegiatan RSDK Kota Surabaya ini memiliki tujuan adalah sebagai berikut :

- Meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat dan/atau keluarga miskin utamanya di kawasan permukiman kumuh;
- Meningkatkan kualitas lingkungan hunian melalui suatu upaya penyadaran dan perlunya penanganan terpadu baik dari aspek fisik, sarana dan prasarana maupun kondisi sosial ekonomi masyarakatnya;
- Pemberdayaan masyarakat untuk menumbuhkan inisiatif, kreatifitas, dan jiwa kemandirian dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan kesejahteraan di lingkungan tempat tinggalnya;
- Meningkatkan kemampuan usaha dalam rangka pengembangan sumber pendapatan yang dapat menunjang perekonomian keluarga. Dengan sasaran menanggulangi masyarakat miskin di Surabaya.

RSDK Kota Surabaya merupakan kegiatan pembangunan berdasar partisipasi masyarakat (community based development). Pelaksanaan kegiatan diarahkan untuk melakukan pemberdayaan kepada warga masyarakat setempat agar dapat meningkatkan kondisi sosial ekonomi dan lingkungannya secara mandiri dan berkelanjutan.



2.3.21 Persentase budaya yang dapat dilestarikan

Kawasan Strategis untuk Kepentingan Sosial Budaya adalah kawasan adat tertentu, kawasan dan konservasi warisan budaya. Kawasan strategis sosial-budaya yang ada di Kota Surabaya adalah :

- Kawasan Makam Sunan Ampel di Kecamatan Semampir berada di Unit Pengembangan V Tanjung Perak, yang merupakan kawasan cagar budaya dengan karakter dan daya tarik kuat sebagai obyek wisata ziarah sebagai kampung budaya yang khas tetapi juga memiliki kultur religi yang kuat.
- Kawasan Kota Lama Surabaya di Kecamatan Krembangan, Kecamatan Pabean Cantian, Kecamatan Semampir dan Kecamatan Bubutan berada di Unit Pengembangan V Tanjung Perak dan Unit Pengembangan VI Tunjungan. Kawasan ini merupakan kawasan yang pada era kolonial terdelienasi sebagai kawasan eropa, kawasan arab dan kawasan cina.
- Bangunan dan lingkungan pada kawasan Darmo-Diponegoro serta kawasan kampung lama Tunjungan di Kecamatan Tegalsari berada di Unit Pengembangan VI Tunjungan yang merupakan kawasan bangunan dan lingkungan cagar budaya.

Tabel II.53
Persebaran Situs, Bangunan dan Lingkungan Cagar Budaya di Tiap Kecamatan di Kota Surabaya

No	Kecamatan	Jumlah Situs Cagar Budaya
1	Pabean Cantian	29
2	Krembangan	50
3	Genteng	66
4	Sawahan	9
5	Wonokromo	21
6	Gubeng	11
7	Tegalsari	28
8	Bubutan	30
9	Semampir	14
10	Tambaksari	7
11	Simokerto	9
12	Dukuh Pakis	1
13	Lakarsantri	2
14	Wonocolo	1
15	Gayungan	1
Jumlah		277

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 2019



Tabel II.54
Persentase Budaya yang dapat dilestarikan Kota Surabaya
Tahun 2014 - 2018

No	Uraian	Realisasi				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Persentase Budaya yang dapat dilestarikan Kota Surabaya	N/A	N/A	89,79	90,31	90,84

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 2019

Pada tahun 2018, presentase budaya yang dapat dilestarikan sebanyak 90,84. Sedangkan pada tahun 2017, presentase budaya yang dapat dilestarikan adalah sebanyak 90,31.

2.3.22 Atlet berprestasi di tingkat regional, nasional dan/atau internasional

Pada tahun 2014, presentase atlet yang berprestasi baru mencapai 35,4%, dari 1.652 orang atlet olahraga yang dibina. Sedangkan pada tahun 2018, dari 2.307 atlet yang dibina mulai tahun 2018 seluruhnya dapat meraih prestasi olahraga di tingkat regional, nasional maupun internasional. Pada tahun 2020, sesuai hasil review RPJMD menggunakan indikator baru yaitu indeks prestasi atlet dengan target 1,99. Target ini diharapkan dapat meningkatkan dan memacu prestasi atlet Kota Surabaya dalam berbagai event olahraga dengan rata-rata setiap atlet yang dibina dapat mencapai setidaknya 2 (dua) prestasi di level regional, nasional dan/atau internasional.

Tabel II.55
Atlet Berprestasi di tingkat regional, nasional dan/atau internasional
Tahun 2014 - 2018

No	Uraian	Realisasi				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Persentase atlet yang berprestasi di tingkat regional, nasional dan/atau internasional (persen)	35,4	63,5	48,38	61,15	108,56
2	Akumulasi atlet yang dibina dan berprestasi	1.652	1.350	2.433	1.843	2.307

Sumber : Dinas Kepemudaan dan Olahraga, 2019

2.3.23 Pemuda Kader Anti Kenakalan Remaja

Dalam bidang kepemudaan, Pemerintah Kota Surabaya juga memiliki program dan kegiatan khusus terkait pembinaan kepemudaan diantaranya adalah pembentukan pemuda kader anti kenakalan remaja (anti narkoba dan peduli HIV AIDS). Pada tahun 2016 terdapat 389 orang pemuda menjadi kader anti kenakalan remaja yang dibentuk oleh Pemerintah Kota Surabaya. Selanjutnya sampai dengan



tahun 2017 terdapat 787 orang pemuda menjadi kader anti kenakalan remaja yang dibentuk oleh Pemerintah Kota Surabaya. Dan sampai dengan tahun 2018 terdapat 1.244 pemuda yang menjadi kader anti kenakalan remaja. Pada tahun 2020, terdapat indikator baru yaitu persentase kader anti kenakalan remaja dan pemuda pelopor yang menjalankan fungsi advokasi pembangunan kepemudaan dengan target 10%. Target yang baru diharapkan dapat mendorong kader pemuda yang tercipta melalui serangkaian pelatihan dan pembinaan untuk melakukan fungsi advokasi pembangunan kepemudaan kepada masyarakat.

Tabel II.56
Angka Pemuda Kader Anti Kenakalan Remaja Tahun 2014 - 2018

No	Uraian	Realisasi				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Angka pemuda kader anti kenakalan remaja per 10.000 pemuda	N/A	N/A	5,48	11,21	17,72
2	Jumlah pemuda yang menjadi kader anti kenakalan	N/A	N/A	389	787	1.244

Sumber : Dinas Kepemudaan dan Olahraga, 2019

2.3.24 Tingkat Kepuasan Penyelenggaraan TIK dalam Pelayanan Publik Administratif

Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhan. Hasil SKM menjadi salah satu indikator untuk mengukur keberhasilan Pemerintah Kota Surabaya dalam menyelenggarakan pelayanan publik.

Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kota Surabaya disajikan pada Tabel II.57 di bawah ini.

Tabel II.57
Survey Kepuasan Masyarakat Kota Surabaya Tahun 2014 - 2018

Uraian	Realisasi				
	2014	2015	2016	2017	2018
Survey Kepuasan Masyarakat	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Rata-rata nilai SKM Pelayanan Pemerintah Kota Surabaya	77,13	72,32	82,67	74,46	83,74

Sumber Data : Bagian Organisasi Surabaya, 2019



Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat pada tahun 2016 telah mengikuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 16 tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

2.3.25 Tingkat Produktivitas Koperasi

Salah satu upaya yang populer dilakukan oleh Pemerintah Kota untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi bagi masyarakatnya adalah dengan mengarahkan kelompok-kelompok masyarakat yang memiliki kesamaan visi dan misi tertentu untuk membentuk sebuah koperasi yang dapat memberikan kesejahteraan bagi anggotanya sendiri, upaya ini juga menjadi salah satu andalan bagi Pemerintah Kota Surabaya untuk menghadapi masalah perekonomian kota. Dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 jumlah anggota koperasi aktif di Kota Surabaya tercatat cenderung meningkat yakni dari sejumlah 252.345 orang di tahun 2014, meningkat menjadi 262.153 orang pada tahun 2017, jumlah anggota koperasi aktif tercatat menurun pada tahun 2018 menjadi 255.526 orang. Secara rinci perkembangan anggota koperasi di Kota Surabaya dapat dilihat pada Tabel II.58.

Tabel II.58
Pertumbuhan Anggota Koperasi Tahun 2014 - 2018

Uraian	Realisasi				
	2014	2015	2016	2017	2018
Jumlah anggota koperasi	252.345	252.645	261.799	262.153	255.526

Sumber : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, 2019

Pembinaan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya dapat dikatakan cukup berhasil, hal ini ditunjukkan dengan peningkatan jumlah koperasi aktif di Kota Surabaya. Pada tahun 2014 jumlah koperasi di Kota Surabaya sebanyak 1.637 koperasi dengan koperasi aktif sebanyak 1.357 koperasi atau sebesar 82,90%. Sedangkan pada tahun 2018, jumlah koperasi aktif sebanyak 1.487 koperasi dari 1.750 koperasi terdaftar di Kota Surabaya atau sebesar 84,97%. Secara rinci presentase koperasi aktif dapat dilihat pada Tabel II.59.

Tabel II.59
Persentase Koperasi Aktif Kota Surabaya Tahun 2014 - 2018

No.	Uraian	Realisasi				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah koperasi	1.637	1.669	1.726	1.747	1.750
2	Jumlah koperasi aktif	1.357	1.403	1.461	1.484	1.487
3	persen koperasi aktif	82,90	84,60	84,65	84,95	84,97

Sumber : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, 2019



Keberhasilan pembinaan dan pemberdayaan Pemerintah Kota Surabaya juga dapat ditunjukkan dengan besaran volume usaha koperasi. Pada tahun 2014 dan 2015 jumlah volume usaha koperasi tercatat sebesar 1.597 Milyar dari 1.357 koperasi aktif dan sebesar 1.605 Milyar dari 1.403 koperasi aktif. Pada tahun 2016 jumlah volume usaha koperasi tercatat sebesar 1.657 milyar dari 1.463 koperasi aktif, selanjutnya pada tahun 2017, volume usaha koperasi meningkat menjadi 1.797 milyar dari 1.484 koperasi. Pada tahun 2018, volume usaha koperasi aktif juga meningkat dari tahun sebelumnya yakni menjadi sebesar 2.092 milyar dari 1.487 koperasi aktif. Nilai rasio volume usaha koperasi aktif terhadap jumlah koperasi aktif cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Secara rinci rasio volume usaha koperasi dibandingkan dengan jumlah koperasi dapat dilihat pada Tabel II.60.

Tabel II.60
Rasio Volume Usaha Koperasi Aktif Terhadap Jumlah Koperasi Aktif
di Kota Surabaya Tahun 2014 - 2018

Uraian	Realisasi				
	2014	2015	2016	2017	2018
Jumlah Koperasi Aktif	1.357	1.403	1.463	1.484	1.487
Volume Usaha Koperasi Aktif (Rp. Milyar)	1.597	1.605	1.657	1.797	2.092
Rasio	1,18	1,14	1,13	1,21	1,41

Sumber : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, 2019

2.3.26 Tingkat Produktivitas Usaha Mikro

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi bagi masyarakat salah satunya juga dengan melakukan penumbuhan dan pemberdayaan pelaku-pelaku usaha mikro.

Progres dan capaian Pemerintah Kota Surabaya dalam melakukan penumbuhan dan pemberdayaan pelaku usaha mikro dapat ditunjukkan dengan data tingkat produktivitas usaha mikro di Kota Surabaya yang cenderung bergerak naik dari tahun ke tahunnya. Produktivitas usaha mikro dimaksud adalah perbandingan antara omzet tahunan dan jumlah pelaku usaha mikro. Pada tahun 2016 tercatat tingkat produktivitas usaha mikro sebesar 17.70%. Selanjutnya pada tahun 2017 tingkat produktivitas usaha mikro meningkat menjadi 31.26%, sedangkan di tahun 2018 tingkat produktivitas usaha mikro tercatat sedikit menurun menjadi 23,26% namun masih lebih tinggi dari capaian tahun 2016. Secara rinci data produktivitas usaha mikro tersebut dapat dilihat pada Tabel II.61



Tabel II.61
Tingkat Produktivitas Usaha Mikro di Kota Surabaya Tahun 2014 - 2018

Uraian	Realisasi				
	2014	2015	2016	2017	2018
Tingkat Produktivitas Usaha Mikro	N/A	N/A	17,70	31,26	23,26

Sumber : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, 2019

2.3.27 Indeks Kualitas Air Permukaan

Indeks kualitas air permukaan erat kaitannya dengan Indeks Pencemaran Air yang merupakan salah satu data penyusun Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Persampahan (IKLHS). Permasalahan yang dapat menghambat tercapainya Indeks Pencemaran Air (IPA) adalah Meningkatnya ancaman intrusi air laut ke daerah perkotaan dan tingginya tingkat pencemaran air sungai yang dapat mengancam penyediaan sumber air baku. Berikut perkembangan data Indeks Pencemaran Air (IPA) dari tahun 2016 hingga tahun 2018.

Tabel II.62
Indeks Pencemaran Air (IPA) Kota Surabaya
Tahun 2014 - 2018

Indeks	Realisasi				
	2014	2015	2016	2017	2018
Indeks Pencemaran Air (IPA)/Indeks kualitas air permukaan	N/A	N/A	54,9	57,5	57,62

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2019 diolah

2.3.28 Indeks Kualitas Udara Ambien

Indeks kualitas udara ambien erat kaitannya dengan Indeks Pencemaran Udara yang merupakan salah satu data penyusun Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Persampahan (IKLHS). Permasalahan yang dapat menghambat tercapainya Indeks Pencemaran Udara (IPU) adalah Meningkatnya pencemaran udara yang berpotensi menyebabkan efek gas rumah kaca dan perubahan iklim. Berikut perkembangan data Indeks Pencemaran Udara (IPU) dari tahun 2016 hingga tahun 2018.

Tabel II.63
Indeks Pencemaran Udara (IPU) Kota Surabaya
Tahun 2014 - 2018

Indeks	Capaian				
	2014	2015	2016	2017	2018
Indeks Pencemaran Udara (IPU)/Indeks kualitas udara ambien	N/A	N/A	89,57	90,26	90,26

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2019 diolah



2.3.29 Persentase penurunan sampah yang masuk ke TPA melalui TPS

Seiring dengan peningkatan volume produksi sampah diperlukan adanya peningkatan daya tampung TPS yang dapat melayani pertumbuhan penduduk dan perlunya upaya pengoptimalan fungsi TPS dalam mereduksi volume sampah yang akan diangkut ke TPA melalui pembangunan TPS 3R. Tabel terkait jumlah TPS tahun 2014 - 2018 dapat dilihat pada Tabel II.64.

Tabel II.64
Jumlah Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Tahun 2014 - 2018

Uraian	Capaian				
	2014	2015	2016	2017	2018
Jumlah Penduduk	2.853.661	2.218.411	3.307.300	3.342.627	3.094.732
Jumlah TPS (unit)	184	185	187	187	187

Sumber : Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau, 2019

Optimalisasi sistem pengelolaan kebersihan dan persampahan secara terpadu yang berbasis masyarakat dengan penerapan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan pada tahun 2018 diukur dengan menggunakan indikator kinerja persentase selisih timbulan sampah ke TPA mencapai 17,23%, bila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebesar 17,2%, maka capaian kinerjanya mencapai 100,17%. Permasalahan yang dapat menghambat tercapainya Persentase penurunan sampah yang masuk ke TPA melalui TPS adalah Meningkatnya ancaman intrusi air laut ke daerah perkotaan dan tingginya tingkat pencemaran air sungai yang dapat mengancam penyediaan sumber air baku.

Tabel II.65
Persentase penurunan sampah yang masuk ke TPA melalui TPS
Tahun 2014 - 2018

Uraian	Realisasi				
	2014	2015	2016	2017	2018
Persentase selisih timbulan sampah ke TPA	N/A	N/A	13,90	16,98	17,23
Persentase pengangkutan sampah dari TPS ke TPA yang ≤ 1 hari (%)	53	52	N/A	90,37	90,37

Sumber : Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau, 2019



2.3.30 Persentase selisih luasan taman dan jalur hijau yang dibangun dan dipelihara

Peningkatkan manajemen pengelolaan dan kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH) pada tahun 2018 diukur dengan menggunakan indikator kinerja persentase selisih luasan RTH yang dibangun dan dipelihara mencapai 10,93%, bila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebesar 5,6%, maka capaian kinerjanya mencapai 195,13%. Permasalahan yang dapat menghambat tercapainya persentase selisih luasan taman dan jalur hijau yang dibangun dan dipelihara adalah masih adanya taman dan jalur hijau yang membutuhkan peningkatan kualitas termasuk kerapatan dan variasi vegetasi.

Perkembangan Persentase selisih luasan taman dan jalur hijau yang dibangun dan dipelihara dari tahun 2016 hingga tahun 2018 dapat dilihat pada tabel II.66.

Tabel II.66
Persentase selisih luasan taman dan jalur hijau yang dibangun dan dipelihara Tahun 2014 – 2018

Uraian	Capaian				
	2014	2015	2016	2017	2018
Persentase selisih luasan taman dan jalur hijau yang dibangun dan dipelihara	N/A	N/A	0,29%	5,72%	10,93%

Sumber : Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau, 2019

2.3.31 Persentase indikator Kota Layak Anak (KLA) yang terpenuhi

Menyandang predikat Kota Layak Anak Peringkat Utama, Pemerintah Kota Surabaya berupaya untuk membangun sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk pemenuhan hak-hak anak. Komitmen untuk mencapai indikator-indikator Kota Layak Anak pada sektor Kelembagaan; Hak Sipil dan Kebebasan; Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif; Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan; Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya; serta Perlindungan Khusus terus ditingkatkan agar anak-anak di Kota Surabaya mendapatkan hidup yang layak dan berkualitas.



Tabel II.67
Persentase indikator Kota Layak Anak (KLA) yang terpenuhi
Tahun 2014-2018

Uraian	Capaian				
	2014	2015	2016	2017	2018
Jumlah indikator KLA yang terpenuhi	N/A	N/A	N/A	20	20
Jumlah indikator KLA seluruhnya	N/A	N/A	N/A	24	24
Persentase	N/A	N/A	N/A	83,33%	83,33%

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2019

Sampai dengan akhir tahun 2018, beberapa indikator KLA yang masih perlu dioptimalkan oleh Kota Surabaya antara lain terkait Pemenuhan Registrasi Anak dalam bentuk Kartu Identitas Anak (KIA) dan Akta Kelahiran; Menekan Jumlah Perkawinan Anak; Pembatasan Ketat terhadap Iklan, Promosi, dan Sponsor Rokok; serta Penanganan terhadap Situasi darurat dan pornografi dalam bentuk Pelayanan Rehabilitasi bagi penderita HIV-AIDS dan penyalahgunaan NAPZA. Selain itu, Permasalahan yang dapat menghambat tercapainya Persentase indikator Kota Layak Anak (KLA) yang terpenuhi adalah masih ditemukannya kasus tindak kekerasan pada anak dan perempuan.

2.3.32 Load Factor Kendaraan Umum (Angkot)

Load factor Kendaraan Umum (Angkot) merupakan ukuran untuk mengetahui tingkat okupansi/nilai kegunaan dari kapasitas muatan yang tersedia pada suatu moda transportasi Kendaraan Umum (Angkot). Pada tahun 2018 penyediaan dan optimalisasi sistem angkutan umum *massal* yang berkualitas dan ramah lingkungan capaiannya salah satu diukur dengan menggunakan Load factor kendaraan umum (angkot) yang mencapai 29,53%. *Load factor* erat kaitannya dengan Rata-rata *headway* angkutan umum (angkot/*feeder*). Perkembangan *Load Factor* Kendaraan Umum (Angkot) dari tahun 2016 hingga tahun 2018 dapat dilihat pada tabel II.68.

Tabel II.68
Load factor Kendaraan Umum (Angkot) Kota Surabaya Tahun 2014 - 2018

Uraian	Capaian				
	2014	2015	2016	2017	2018
<i>Load factor</i> Kendaraan Umum (Angkot) %	N/A	N/A	18,25%	30,00%	29,53%
Rata-rata <i>headway</i> angkutan umum (angkot/ <i>feeder</i>) (menit)	N/A	N/A	26,50 menit	28,11 menit	26,84 menit

Sumber : Bappeko, 2019 diolah



2.3.33 Load Factor Kendaraan Umum (Bis Kota)

Load factor Kendaraan Umum (Bis Kota) merupakan ukuran untuk mengetahui tingkat okupansi/nilai kegunaan dari kapasitas muatan yang tersedia pada suatu moda transportasi kendaraan umum (Bis Kota). Pada tahun 2018 penyediaan dan optimalisasi sistem angkutan umum *massal* yang berkualitas dan ramah lingkungan capaiannya salah satu diukur dengan menggunakan *Load factor* kendaraan umum (Bis Kota) yang mencapai 35,88%. *Load factor* erat kaitannya dengan rata-rata *headway* angkutan umum (Bis Kota). Permasalahan yang dapat menghambat tercapainya *load factor* dan rata-rata *headway* kendaraan umum angkot maupun bis kota adalah Belum optimalnya sistem angkutan umum massal yang berkualitas berupa kenyamanan, terjangkau, kemudahan akses, dan kapasitas besar. Perkembangan *Load Factor* Kendaraan Umum (Bis Kota) dari tahun 2016 hingga tahun 2018 dapat dilihat pada tabel II.69.

Tabel II.69
Load factor Kendaraan Umum (Bis Kota) Kota Surabaya Tahun 2014 – 2018

Uraian	Capaian				
	2014	2015	2016	2017	2018
<i>Load factor</i> kendaraan umum (Bis Kota) %	N/A	N/A	30,96%	35,60%	35,88%
Rata-rata <i>headway</i> angkutan umum (Bis Kota) (menit)	N/A	N/A	44,67 menit	46,73 menit	41,93 menit

Sumber : Bappeko, 2019 diolah

2.3.34 Persentase aset tanah dan/atau bangunan yang terintegrasi dalam sistem pengamanan dan pengelolaan aset

Seiring dengan perkembangan pembangunan Kota Surabaya, maka kebutuhan akan penyediaan sarana, prasarana dan fasilitas pendukung kegiatan masyarakat akan semakin meningkat pula. Penyediaan sarana dan prasarana yang akan dilakukan meliputi penyediaan sarana penunjang kegiatan masyarakat, sistem jaringan jalan dan drainase yang membutuhkan ruang dan lahan. Namun ketersediaan lahan aset Pemerintah Kota Surabaya yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan kebutuhan masyarakat sangatlah terbatas. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota dalam rangka memenuhi kebutuhan tersebut melalui pengadaan lahan untuk merealisasikan rencana pembangunan sehingga



dapat terwujud sarana, prasarana dan fasilitas yang terpadu dan bermanfaat bagi masyarakat.

Pemerintah Kota Surabaya memiliki cukup banyak aset khususnya aset tak bergerak berupa tanah yang tersebar di tiap-tiap wilayah Kota Surabaya yang pemanfaatannya dapat dimaksimalkan dan disesuaikan dengan arahan pemanfaatan ruang berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya dan Rencana Rincinya. Pada Tabel II.70 dapat disimpulkan bahwa hingga tahun 2016, masih 47,48 persen dari keseluruhan aset tanah Pemerintah Kota yang telah bersertifikat, sedangkan sisanya masih belum memiliki bukti kepemilikan berupa sertifikat. Pada tahun 2017 dan 2018, pemerintah Kota Surabaya memiliki 6.497 aset dan sebanyak 1.076 aset tanah Pemerintah Kota telah bersertifikat. Kemudian pada tahun 2018 sebanyak 1.317 aset pemerintah Kota Surabaya yang telah bersertifikat dari keseluruhan aset tanah Pemerintah Kota telah bersertifikat. Pengamanan administrasi berupa pencatatan / inventarisasi aset, sertifikasi dan pengamanan fisik berupa pemasangan pagar, papan, patok merupakan upaya yang terus menerus dilakukan oleh Pemerintah Kota dalam meningkatkan pengelolaan tanah aset bagi pembangunan untuk kepentingan umum, namun masih terdapat aset tanah maupun bangunan yang belum diamankan secara administrasi dan fisik. Permasalahan yang dapat menghambat tercapainya terkait aset pemerintah adalah Masih adanya aset pemerintah kota yang belum diamankan dan dikelola dan Perlunya integrasi dan sinkronisasi pelaksanaan pembangunan utilitas kota.

Tabel II.70
Jumlah Aset Pemerintah Kota Surabaya yang Telah Tersertifikat Tahun 2014 - 2018

Tahun	Capaian				
	2014	2015	2016	2017	2018
Jumlah Aset Pemerintah kota yang telah bersertifikat	580	611	744	1.076	1.317
Total aset pemerintah	1251	1251	1.567	6.497	6.497
Presentase Aset Pemerintah yang telah bersertifikat	46,36%	48,84%	47,48%	16,56%	20,27%

Sumber : Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya, 2019

**) Total aset sampai dengan tahun 2016 adalah aset tanah dan bangunan yang dikelola oleh DPBT. Total aset sejak tahun 2017 adalah aset tanah dan bangunan milik Pemerintah Kota Surabaya



2.3.35 Persentase pencari kerja terserap pada pasar kerja formal

Dalam data pengangguran terbuka, kontribusi terbesar adalah penduduk yang mempunyai pendidikan terakhir SLTA baik umum maupun kejuruan sehingga perlu dilakukan upaya sinkronisasi antara dunia pendidikan dan dunia kerja khususnya untuk penyiapan tenaga kerja siap pakai. Untuk menurunkan angka pengangguran terbuka, Pemerintah Kota Surabaya berupaya mengurangi angka tersebut dengan cara memfasilitasi para pencari kerja dengan kegiatan pelatihan keterampilan kerja, pemagangan, bimbingan keterampilan softskill, bursa kerja, dan sebagainya. Kegiatan tersebut diharapkan dapat mengurangi angka pengangguran terbuka dan bisa menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi para pengangguran.

Dengan adanya pelatihan, jumlah angkatan kerja yang ditempatkan semakin meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2014 jumlah pencari kerja yang difasilitasi sebanyak 12.307 orang dan berhasil ditempatkan sebanyak 3.902 orang. Sementara itu, pada tahun 2018 dimana dari 8.288 pencari kerja yang terdaftar, ada 5.805 orang berhasil ditempatkan. Secara rinci pencari kerja yang difasilitasi dan ditempatkan dapat dilihat pada Tabel II.71.

Tabel II.71
Pencari Kerja yang Difasilitasi dan Ditempatkan Kota Surabaya Tahun 2014 - 2018

Uraian	Realisasi				
	2014	2015	2016	2017	2018
Jumlah Pencari Kerja yang Difasilitasi dan berhasil ditempatkan	3.902	5.225	3.803	4.305	5.805
Jumlah Pencari Kerja yang difasilitasi	12.307	85.345	7.502	8.035	8.288

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya, 2019

Jumlah pencari kerja yang difasilitasi dan ditempatkan oleh Dinas Tenaga Kerja pada tahun 2018 mengalami peningkatan. Diharapkan kegiatan fasilitasi oleh Dinas Tenaga Kerja bisa efektif mengurangi angka pengangguran terbuka dan bisa menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi para pengangguran. Diharapkan dengan keahlian yang telah diperoleh dari fasilitasi oleh Pemerintah Kota Surabaya pencari kerja juga mampu membuka lapangan pekerjaan yang baru dari sektor informal agar mampu mengurangi jumlah pengangguran terbuka di Kota Surabaya.



2.3.36 Indeks Profesionalisme Pegawai

Indeks Profesionalisme Pegawai diukur dengan menggunakan akumulasi indikator kinerja aparatur terkait kompetensi, disiplin aparatur, dan penilaian kinerja yang telah disesuaikan dengan bobot masing-masing. Definisi dari Kompetensi Aparatur merupakan seluruh aparatur (non guru) yang mengikuti diklat pada tahun rencana (t), sedangkan Disiplin merupakan pelanggaran disiplin aparatur yang ditindaklanjuti dengan SK pada tahun rencana (t), dan Penilaian kinerja merupakan persentase nilai SKP (Sasaran Kerja Pegawai) untuk Aparatur Non Guru dengan kategori baik (diatas 76). Ketiga indikator tersebut dihitung setiap tahun dan bersifat akumulatif.

Permasalahan yang dapat menghambat tercapainya Indeks Profesionalisme Pegawai adalah

- Belum optimalnya profesionalisme ASN terkait kompetensi, kompensasi, disiplin dan kinerja ASN.
- Perlunya meningkatkan kualitas pelayanan dari berbagai aspek yaitu sistem informasi, standar layanan minimal dan kompetensi SDM.
- Masih terdapat pelanggaran disiplin aparatur yang dilakukan oleh ASN.

Perkembangan data penyusun indeks profesionalisme pegawai disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.72
Persentase Aparatur yang Berkompeten Tahun 2014 - 2018

Uraian	Capaian				
	2014	2015	2016	2017	2018
Aparatur (Non Guru) Telah Mengikuti Diklat	N/A	N/A	1.242	1.480	1.901
Aparatur (Non Guru) Belum pernah Mengikuti Diklat	N/A	N/A	6.685	6.067	5.230
Jumlah Aparatur (Non Guru)	N/A	N/A	7.927	7.547	7.131
Persentase Aparatur yang Berkompeten	N/A	N/A	15,67%	19,61%	26,66%

Sumber : BKD Kota Surabaya, 2019

Tabel II.73
Persentase Disiplin Aparatur Tahun 2014 - 2018

Uraian	Capaian				
	2014	2015	2016	2017	2018
Pegawai Melanggar	27	27	35	39	22
Jumlah seluruh Aparatur	17.546	18.225	17.484	14.444	13.678
Persentase Disiplin Aparatur	0,154	0,148	0,200	0,270	0,161

Sumber : BKD Kota Surabaya, 2019



Tabel II.74
Persentase Aparatur Penilaian Kinerja Tahun 2014 - 2018

Uraian	Capaian				
	2014	2015	2016	2017	2018
Jumlah Aparatur (Non Guru) yang dinilai baik	N/A	N/A	7.307	7.308	6.894
Jumlah Aparatur (Non Guru)	N/A	N/A	7.927	7.547	7.131
Persentase Penilaian Kinerja	N/A	N/A	92,18	96,83	96,68

Sumber : BKD Kota Surabaya, 2019

2.3.37 Persentase pemenuhan kebutuhan prasarana pemerintahan dan pelayanan publik

Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran pada tahun 2018 mencapai 99,11%, bila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebesar 100%, maka capaian kinerjanya adalah 99,11%. Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran merupakan perbandingan antara jumlah sarpas yang diadakan tahun 2018 sebanyak 3.553 unit dengan jumlah sarpras yang dibutuhkan tahun 2018 sebanyak 3.585 unit. Indikator tersebut erat kaitannya dengan indikator Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik mencapai 94,71%, bila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebesar 100%, maka capaian kinerjanya adalah 94,71%. Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik merupakan perbandingan antara jumlah sarana dan prasarana perkantoran layak pakai tahun 2018 sebanyak 78.175 unit dengan jumlah sarana dan prasarana perkantoran keseluruhan tahun 2018 sebanyak 82.541 unit. Permasalahan yang dapat menghambat tercapainya Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran adalah kurang tepatnya dalam penyusunan perencanaan kebutuhan akan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran.

Tabel II.75
Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran Kota Surabaya Tahun 2014 - 2018

Uraian	Capaian				
	2014	2015	2016	2017	2018
Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran	N/A	N/A	N/A	99.35%	99.11%

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya, 2019



2.3.38 Persentase kegiatan DPRD yang terfasilitasi

Salah satu indikator untuk mengukur peningkatan tata kelola administrasi pemerintahan yang baik dengan menggunakan indikator kinerja Persentase kegiatan DPRD yang terfasilitasi. Pada tahun 2018, indikator persentase kegiatan DPRD yang terfasilitasi mencapai 100%, bila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebesar 100%, maka capaian kerjanya mencapai 100%. Pada tahun 2019 target yang telah ditetapkan sebesar 100%, Permasalahan yang dapat menghambat tercapainya Persentase kegiatan DPRD yang terfasilitasi adalah Perlu adanya peningkatan kualitas fasilitasi kegiatan DPRD. Perkembangan persentase kegiatan DPRD yang terfasilitasi disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.76
Persentase kegiatan DPRD yang terfasilitasi Kota Surabaya Tahun 2014 - 2018

Uraian	Capaian				
	2014	2015	2016	2017	2018
Persentase kegiatan DPRD yang terfasilitasi	N/A	N/A	100	100	100
Kegiatan DPRD terkait rapat dan perundang-undangan yang terfasilitasi	N/A	N/A	N/A	968	849
Kegiatan DPRD terkait informasi dan protokol yang terfasilitasi	N/A	N/A	N/A	418	1.290

Sumber : Sekretariat DPRD Kota Surabaya, 2019

2.3.39 Persentase kontribusi pajak terhadap PAD

Pencapaian sasaran meningkatkan dan mengoptimalkan pengelolaan sumber penerimaan daerah secara efektif dan efisien menggunakan tahun dasar tahun 2015 sebesar 67,87%. Pengukurannya dengan menggunakan indikator kinerja, persentase kontribusi pajak terhadap PAD, untuk tahun 2016 mencapai 73,32 % bila dibandingkan dengan target sebesar 73,39% maka capaian kerjanya mencapai 99,90%. Untuk tahun 2017 kontribusi pajak terhadap PAD mencapai 69,92% bila dibandingkan dengan target sebesar 75,69% maka capaian kerjanya mencapai 92,37%. pada tahun 2018 diukur dengan menggunakan indikator kinerja, persentase kontribusi pajak terhadap PAD mencapai 78,03%, bila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebesar 75,04%, maka capaian kerjanya mencapai 103,99%. Perkembangan Persentase Kontribusi Pajak terhadap PAD Kota Surabaya yang terfasilitasi disajikan pada tabel berikut.



Tabel II.77
Persentase Kontribusi Pajak terhadap PAD Kota Surabaya Tahun 2014 - 2018

Uraian	Capaian				
	2014	2015	2016	2017	2018
Persentase kontribusi pajak terhadap PAD	N/A	67,87	73,32	69,92	78,03

Sumber : BPKPD Kota Surabaya, 2019

2.3.40 Angka Pelanggaran Disiplin Aparatur per 1.000 Pegawai

Selain peningkatan kapasitas dan kompetensi, diperlukan unsur pengawasan internal guna mendisiplinkan aparatur. Sanksi disiplin aparatur sebagaimana ditunjukkan pada Tabel II.74 mengalami fluktuasi. Oleh karena itu diperlukan optimalisasi pengawasan internal agar mengurangi sanksi. Pada tahun 2019 target yang telah ditetapkan Angka Pelanggaran Disiplin Aparatur per 1.000 Pegawai sebesar 1,26, Permasalahan yang dapat menghambat tercapainya Persentase pengaduan masyarakat terkait aparatur yang ditindaklanjuti adalah Masih terdapat pelanggaran disiplin aparatur yang dilakukan oleh ASN.

Tabel II.78
Rekapitulasi Sanksi Disiplin Terhadap Aparatur Di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2014 - 2018

JENIS HUKUMAN DISIPLIN		Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
Hukuman Disiplin Ringan						
1	Teguran Lisan	0	3	1	1	2
2	Teguran Tertulis	0	0	2	10	1
3	Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis	4	2	2	3	2
	Jumlah Hukuman Disiplin Ringan	4	5	5	14	5
1	Penundaan Kenaikan Gaji Berkala Selama 1 (Satu) Tahun	1	1	2	1	1
2	Penundaan Kenaikan Pangkat Selama 1 (Satu) Tahun	3	2	1	0	2
3	Penurunan Pangkat Pada Pangkat Yang Setingkat Lebih Rendah Selama 1 (Satu) Tahun	0	0	1	3	0
	Jumlah Hukuman Disiplin Sedang	4	3	4	4	3
1	Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 (tiga) Tahun	1	5	7	9	4
2	Pemindahan Dalam Rangka Penurunan Jabatan setingkat Lebih Rendah	0	0	0	1	1
3	Pembebasan Dari Jabatan	2	4	9	4	2
4	Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil	7	4	6	3	3



JENIS HUKUMAN DISIPLIN		Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
5	Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil	2	3	1	1	0
6	Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat sebagai CPNS	0	0	0	1	0
Jumlah Hukuman Disiplin Berat		12	16	23	19	10
1	Pemberhentian Sementara (PP. No. 11 Tahun 2017)	7	2	3	2	1
2	Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PNS	0	0	0	0	3
3	Pencabutan Pemberhentian Sementara	0	1	0	0	0
4	Pemberhentian Dengan Hormat Atas Permintaan Sendiri / Pensiun Dini / Mengundurkan diri	0	0	0	0	0
5	Pemberhentian Dengan Hormat Karena Menjadi Anggota Parpol	0	0	0	0	0
6	Rehabilitasi	0	0	0	0	0
Jumlah		7	3	3	2	4
TOTAL HUKUMAN DISIPLIN YANG DIJATUHKAN		27	27	27	39	22

Sumber : Badan Kepegawaian dan Diklat, 2019

2.3.41 Persentase pelanggaran tata kelola administrasi keuangan pada kasus yang sama yang berhasil diturunkan

Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik adalah dengan meningkatkan kapasitas dan kompetensi aparatur pemerintahan, meningkatkan tata kelola administrasi pemerintahan yang baik, serta meningkatkan kualitas pelayanan. Pada tahun 2018 persentase pelanggaran tata kelola administrasi keuangan pada kasus yang sama yang berhasil diturunkan mencapai 31,98%, bila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebesar 9,1%, maka capaian kinerjanya adalah 351,43%. Pada tahun 2019 target yang telah ditetapkan sebesar 11,7%, Permasalahan yang dapat menghambat tercapainya Persentase pelanggaran tata kelola administrasi keuangan pada kasus yang sama yang berhasil diturunkan adalah Perlunya menjaga opini BPK yaitu wajar tanpa pengecualian sebagai bukti bahwa keuangan daerah telah dikelola dengan baik dan Masih terdapat wajib pajak yang belum menyelesaikan kewajiban membayar pajak.



Tabel II.79

Persentase pelanggaran tata kelola administrasi keuangan pada kasus yang sama yang berhasil diturunkan Kota Surabaya Tahun 2014 - 2018

Uraian	Capaian				
	2014	2015	2016	2017	2018
Persentase pelanggaran tata kelola administrasi keuangan pada kasus yang sama yang berhasil diturunkan	N/A	N/A	3,05	6,60	31,98

Sumber : Inspektorat, 2019

2.3.42 Persentase pengaduan masyarakat terkait aparatur yang ditindaklanjuti

Pencapaian sasaran meningkatkan kapasitas dan kompetensi aparatur pemerintahan adalah melalui Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal. Salah satu upaya dalam meningkatkan pengawasan aparatur dapat melalui pengaduan masyarakat terkait aparatur yang ditindaklanjuti dari seluruh jumlah pengaduan masyarakat yang masuk. Pada tahun 2019 target yang telah ditetapkan sebesar 100%, Permasalahan yang dapat menghambat tercapainya Persentase pengaduan masyarakat terkait aparatur yang ditindaklanjuti adalah Masih terdapat pelanggaran disiplin aparatur yang dilakukan oleh ASN dan Masih terdapat pengaduan masyarakat terkait aparatur yang perlu ditindaklanjuti. Pengaduan masyarakat terkait aparatur yang ditindaklanjuti sebagaimana tabel berikut:

Tabel II.80

Persentase pengaduan masyarakat terkait aparatur yang ditindaklanjuti Kota Surabaya Tahun 2014 - 2018

Uraian	Capaian				
	2014	2015	2016	2017	2018
Jumlah pengaduan masyarakat	N/A	N/A	120	148	65
Jumlah pengaduan masyarakat terkait aparatur yang ditindaklanjuti	N/A	N/A	120	148	65
Persentase pengaduan masyarakat terkait aparatur yang ditindaklanjuti	N/A	N/A	100	100	100

Sumber : Inspektorat, 2019

2.3.43 Tingkat Capaian Keberhasilan Pelaksanaan Program

Peningkatan tata kelola administrasi pemerintahan yang baik dapat dihitung dengan menggunakan salah satu indikator Tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan program. Pada tahun 2018, tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan program mencapai 98,04%, bila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebesar 91,53%, maka capaian kinerjanya mencapai 107,11%. Dengan rincian



Jumlah program PD yang capaiannya lebih dari 76% tahun 2018 sebanyak 100 program terhadap Jumlah program Tahun 2018 sebanyak 102 program. Pada tahun 2019 target yang telah ditetapkan sebesar 91,96%, Permasalahan yang dapat menghambat tercapainya keberhasilan pelaksanaan program Kota Surabaya adalah Perlunya meningkatkan kualitas perencanaan agar dapat dilaksanakan untuk mencapai target yang ditetapkan.

Tabel II.81

Tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan program Kota Surabaya Tahun 2014 - 2018

Uraian	Capaian				
	2014	2015	2016	2017	2018
Tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan program	N/A	88,33	93,67	91,18	98,04

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan, 2019

2.4 Aspek Daya Saing Daerah

2.4.1 Indeks Penanggulangan Bencana

Dalam rangka mengantisipasi kejadian bencana di kota Surabaya diperlukan antisipasi dini dan kesiapsiagaan komponen masyarakat dan pemerintah agar sejalan dengan semangat untuk memberikan perlindungan dan rasa aman yang layak dan bermartabat kepada masyarakat, seperti pada tabel berikut:

Tabel II.82

Kejadian Bencana di Kota Surabaya Tahun 2014 –2018

No	Uraian	Capaian Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Banjir	1	2	10	1	0
2	Angin Puting Beliung / Angin Kencang	28	28	12	3	2
3	Kebakaran	596	608	300	383	496

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat dan Dinas Pemadam Kebakaran, 2019

Pembentukan kelurahan siaga aktif dan pengembangan Pembinaan Terpadu (Bindu) juga menjadi upaya pemerintah kota Surabaya untuk mengoptimalkan peran masyarakat untuk mencegah dan mengatasi masalah-masalah kesehatan, bencana dan kegawat daruratan kesehatan, secara mandiri. Pada tahun 2018, seluruh kelurahan telah memiliki Bindu. Persentase kelurahan siaga aktif kota Surabaya dapat dilihat pada Tabel II.83.



Tabel II.83
Persentase Kelurahan Siaga Aktif Tahun 2014 - 2018

No	Uraian	Capaian Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah kelurahan siaga aktif	154	154	154	154	154
2	Jumlah kelurahan siaga	154	154	154	154	154
3	Persentase (persen)	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Dinas Kesehatan, 2019

Pesatnya pembangunan yang diikuti oleh arus urbanisasi yang meningkat menimbulkan potensi munculnya kawasan-kawasan padat penduduk dengan sarana dan prasarana/infrastruktur yang belum memadai. Umumnya pemasangan dan pemeliharaan listrik rumah tangga yang belum sesuai ketentuan menjadi salah satu penyebab bencana kebakaran yang merupakan salah satu bencana perkotaan, di samping kejadian bencana lainnya.

Tabel II.84
Kejadian Kebakaran per Penyebab Tahun 2014 –2018

No	Penyebab	Realisasi				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Hubungan Listrik	118	153	142	114	107
2	Api Terbuka	383	417	125	140	301
3	Api Mekanis	0	0	3	0	4
4	Dalam Penyelidikan	95	38	30	129	70
5	Tidak Ada Keterangan	0	0	0	0	14
Total		596	608	300	383	496

Sumber: Dinas Pemadam Kebakaran, 2019

Penanggulangan bencana kebakaran dilakukan Pemerintah Kota dengan merespon laporan kejadian kebakaran hingga siap sampai di tempat tujuan dalam jangka waktu maksimal 15 menit. Waktu tanggap ini dapat terlaksana didukung oleh upaya dan kesigapan kerja tim pemadam kebakaran serta ketersediaan sarana prasarana pemadam kebakaran yang optimal. Pada tahun 2018, pemenuhan waktu tanggap Pemerintah Kota Surabaya dalam menangani kejadian kebakaran telah mencapai 100 persen. Rincian tingkat waktu tanggap dapat dilihat pada Tabel II.85.



Tabel II.85
Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Kota Surabaya Tahun 2014–2018

No.	Uraian	Realisasi				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah kejadian kebakaran dengan waktu tanggap (Response Time Rate) \leq 15 Menit	536	604	300	383	496
2	Jumlah Kejadian Kebakaran	596	608	300	383	496

Sumber: Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surabaya, 2019

Sepanjang tahun 2016 terdapat 300 kejadian kebakaran dengan jumlah kejadian yang waktu tanggapnya \leq 15 menit setelah pengaduan adalah 300 kejadian. Pada tahun 2017, jumlah kejadian kebakaran yaitu 383 kejadian dengan jumlah kejadian yang waktu tanggapnya \leq 15 menit setelah pengaduan adalah 383 kejadian. Pada tahun 2018, terjadi penurunan jumlah kejadian kebakaran yakni sejumlah 496 kejadian dimana seluruhnya memiliki waktu tanggap \leq 15 menit.

Cakupan pelayanan wilayah manajemen kebakaran Kota Surabaya Tahun 2015 – 2018 dapat dilihat bahwa jumlah pos pemadam kebakaran sebanyak 20 unit, seperti pada tabel berikut :

Tabel II.86
Cakupan Pelayanan Wilayah Manajemen Kebakaran Kota Surabaya Tahun 2014 - 2018

No.	Uraian	Realisasi				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah Pos Pemadam Kebakaran	19	20	20	20	20
2	Jumlah Penduduk	2.853.661	2.943.528	3.307.300	3.342.627	3.094.732

Sumber : Dinas Pemadam Kebakaran dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, 2019

Berikut adalah beberapa kondisi yang perlu mendapatkan perhatian lebih agar penanggulangan kebakaran dapat berjalan dengan optimal di masing-masing WMK:

- Terdapat kawasan yang belum dilayani WMK pos kebakaran pembantu (2,5 km), memiliki beberapa lapangan sebagai tempat evakuasi, terjadi kebakaran cukup sering namun tanpa ada sumber air sama sekali (atau tidak dilalui sungai).
- Terdapat WMK dengan kepadatan penduduk sedang dan tinggi, jumlah kejadian kebakaran banyak, kawasan kumuh luas, titik kemacetan banyak, tidak ada



lapangan dan taman sebagai tempat evakuasi, tetapi memiliki jumlah sumur kebakaran banyak dan dilalui sungai.

- c. Terdapat WMK dengan kepadatan penduduk rendah, jumlah kejadian kebakaran banyak, tidak ada kawasan kumuh, titik kemacetan sedang, tidak ada lapangan dan taman sebagai tempat evakuasi, memiliki jumlah sumur kebakaran sedikit bahkan tidak ada sama sekali tetapi dilalui sungai.

2.4.2 Persentase jalan kewenangan kota dengan v/c ratio $\leq 0,95$

Penyediaan sistem manajemen transportasi yang berkualitas pada tahun 2018 diukur dengan menggunakan indikator kinerja persentase jalan kewenangan kota dengan V/C ratio ≤ 0.95 , dimana pada tahun 2018 mencapai 88,10%. V/C ratio merupakan suatu ukuran mobilitas dan kualitas perjalanan dengan membandingkan volume kendaraan dengan kapasitas suatu jalan raya. Jika nilai V/C ratio < 1 mengindikasikan kelancaran lalu lintas, jika nilai V/C ratio $= 1$ berarti lalu lintas pada jalan tersebut sesuai dengan kapasitasnya sedangkan jika nilai V/C ratio > 1 maka arus lalu lintas pada ruas jalan tersebut mengalami kepadatan (kemacetan). Sehingga semakin banyak persentase jalan dengan V/C ratio < 1 , maka semakin baik sistem manajemen transportasi kota tersebut.

Tabel II.87
Persentase V/C Ratio pada Jalan Kewenangan Kota Tahun 2014 - 2018

No.	Uraian	Realisasi				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Persentase jalan kewenangan kota dengan V/C ratio ≤ 0.95	N/A	N/A	50,00	66,67	88,10

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Surabaya, 2019

2.4.3 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada dasarnya merupakan cerminan produktivitas (nilai tambah) yang dihasilkan dari aktivitas ekonomi yang berlangsung selama satu tahun di suatu daerah tertentu. Besaran PDRB tersebut dapat digunakan sebagai salah satu tolak ukur ekonomi suatu wilayah. Selain itu, besaran PDRB juga dapat digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dan struktur ekonomi. Penyajian PDRB terdiri dari 2 (dua) perhitungan yaitu PDRB atas dasar harga berlaku (PDRB ADHB) maupun atas dasar harga konstan (PDRB ADHK).



Nilai PDRB Kota Surabaya atas dasar harga berlaku sejak tahun 2014 hingga tahun 2018 menunjukkan kinerja yang selalu positif, yang ditunjukkan oleh kenaikan PDRB setiap tahunnya. Pada tahun 2014 PDRB ADHB Kota Surabaya sebesar Rp365.073.140,32 juga dan meningkat menjadi sebesar Rp547.769.496,6 juta di tahun 2018. Kinerja sektor ekonomi pembentuk PDRB tersebut selama 5 tahun terakhir mengalami peningkatan yang bervariasi. Kinerja sektor tertinggi yang berkontribusi terhadap PDRB ADHB Kota Surabaya tetap sama yakni masih dikotribusi sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor. Selanjutnya diikuti oleh sektor industri pengolahan dengan nilai kontribusi sebagai sektor yang berkontribusi paling tinggi kedua dalam pembentuk PDRB ADHB Kota Surabaya, seperti pada tabel berikut:



Tabel II.88

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Surabaya Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2014 - 2018 (dalam Juta Rupiah)

Kategori	Uraian	2014	2015	2016	2017*	2018**
		Juta (Rp)	Juta (Rp)	Juta (Rp)	Juta (Rp)	Juta (Rp)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	671.564,32	746.720,05	820.350,49	883.177,30	913.484,74
B	Pertambangan dan Penggalian	24.336,14	26.941,93	29.713,21	30.638,60	31.562,67
C	Industri Pengolahan	70.661.843,08	50.544.589,64	85.527.271,00	92.762.070,10	101.871.621,07
D	Pengadaan Listrik dan Gas	1.978.907,22	2.389.674,25	2.094.419,86	2.263.680,00	2.238.366,85
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	572.049,35	466.086,41	678.586,67	740.173,40	771.856,00
F	Konstruksi	37.891.835,80	27.121.124,20	45.133.943,92	49.603.609,40	52.770.743,61
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	99.966.844,35	76.324.230,12	124.801.368,44	137.322.725,10	154.687.454,96
H	Transportasi dan Pergudangan	18.927.734,93	12.475.016,56	23.634.681,26	26.215.295,80	29.211.518,37
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	54.062.910,64	35.963.839,60	70.922.863,27	78.971.933,90	88.834.803,18
J	Informasi dan Komunikasi	20.137.828,27	14.902.225,02	24.457.105,38	26.571.784,80	29.039.867,68
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	19.275.906,51	11.360.435,22	24.105.835,15	25.631.465,10	28.132.150,09
L	Real Estate	9.372.176,45	7.091.789,22	11.889.141,32	12.495.064,20	14.186.426,67
M,N	Jasa Perusahaan	8.889.028,16	6.392.280,61	10.926.169,75	12.098.851,20	13.339.657,11
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5.183.606,08	4.024.781,65	6.221.289,53	6.768.287,70	7.171.019,61
P	Jasa Pendidikan	9.259.950,73	6.048.494,03	11.036.182,83	11.958.097,20	12.661.378,86
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2.814.318,82	1.867.781,75	3.389.778,02	3.730.513,90	4.053.988,68
R,S,T,U	Jasa lainnya	5.382.299,44	4.321.651,60	6.676.541,93	6.995.936,80	7.853.596,80
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	365.073.140,32	406.196.760,34	452.345.242,07	495.043.304,50	547.769.496,96

Sumber data : BPS Kota Surabaya dan Bappeko Surabaya, Februari 2019, diolah

Catatan : *) data sementara

***) data sangat sementara



Tabel II.89
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Surabaya Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2014-2018 (Juta Rupiah)

Kategori	Uraian	2014	2015	2016	2017*	2018**
		Juta (Rp)	Juta (Rp)	Juta (Rp)	Juta (Rp)	Juta (Rp)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	522.264,93	547.043,18	570.894,08	589.909,40	587.185,38
B	Pertambangan dan Penggalian	18.674,88	19.418,14	20.183,42	20.544,80	20.121,43
C	Industri Pengolahan	59.358.226,45	63.458.578,25	66.657.284,99	69.881.287,90	73.033.402,38
D	Pengadaan Listrik dan Gas	1.569.076,33	1.518.492,24	1.508.608,17	1.541.129,00	1.540.006,38
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	474.422,91	498.808,24	528.322,40	564.406,80	583.121,24
F	Konstruksi	31.368.882,67	32.314.502,24	33.887.787,14	36.208.179,00	38.371.797,07
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	86.711.515,05	92.054.398,55	97.586.534,54	103.301.112,80	109.871.557,54
H	Transportasi dan Pergudangan	14.843.763,22	15.797.144,72	16.554.190,88	17.707.950,20	19.276.049,86
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	42.503.082,56	45.918.309,15	49.931.297,69	54.192.882,20	58.460.906,75
J	Informasi dan Komunikasi	19.701.365,86	20.958.313,00	22.421.127,22	23.974.911,30	25.925.129,71
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	14.842.875,73	15.964.079,11	17.184.785,53	17.685.808,00	18.536.478,96
L	Real Estate	8.264.384,73	8.683.388,83	9.145.630,78	9.610.228,80	10.165.858,67
M,N	Jasa Perusahaan	7.011.356,21	7.388.567,18	7.761.412,08	8.278.199,90	8.867.969,79
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4.004.411,47	4.172.196,31	4.384.611,62	4.597.265,30	4.585.695,63
P	Jasa Pendidikan	7.144.694,86	7.595.525,11	8.052.649,03	8.531.781,70	8.843.385,71
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2.348.390,77	2.502.680,04	2.649.121,77	2.804.625,20	3.023.872,00
R,S,T,U	Jasa lainnya	4.620.617,78	4.836.400,63	5.077.815,13	5.224.597,00	5.605.165,63
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	305.308.006,20	324.227.844,92	343.922.256,47	364.714.819,50	387.292.704,09

Sumber data : BPS Kota Surabaya dan Bappeko Surabaya, Februari 2019, diolah

Catatan : *) datasementara

***) data sangat sementara



Sama halnya dengan PDRB ADHB Kota Surabaya, PDRB ADHK selama tahun 2014- 2018 juga mengalami peningkatan setiap tahunnya. Kategori lapangan usaha yang paling besar menghasilkan PDRB ADHK masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya yaitu Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yang diikuti oleh sektor Industri Pengolahan serta Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, seperti dapat dilihat pada tabel II.89 diatas.

2.4.4 Inflasi Kota Surabaya

Perkembangan harga di Kota Surabaya ditunjukkan oleh nilai inflasi yang cukup berfluktuatif selama tahun 2014-2018. Pada tahun 2014 inflasi Kota Surabaya cukup tinggi sebesar 7,90 persen dan berangsur turun setiap tahunnya hingga pada tahun 2018 tingkat inflasi Kota Surabaya mencapai sebesar 3,03 persen. Selaras dengan target yang ditetapkan, tingkat inflasi Kota Surabaya tahun 2018 juga sejalan dengan target sasaran inflasi pemerintah tahun 2018 sebesar $3,5 \pm 1$ persen.

Tabel II.90
Perkembangan Inflasi Kota Surabaya, Jawa Timur dan Nasional
Tahun 2014 - 2018 (dalam persen)

No.	Uraian	Realisasi				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Surabaya	7,90	3,43	3,22	4,37	3,03
2	Jawa Timur	7,77	3,08	2,74	4,04	2,86
3	Nasional	8,36	3,35	3,02	3,61	3,13

Sumber : BPS Kota Surabaya, Februari 2019, diolah

Pergerakan inflasi Kota Surabaya dari tahun ke tahun selalu selaras dengan inflasi Jawa Timur dan Nasional. Bahkan capaian inflasi Kota Surabaya pada tahun 2018 cukup baik, dimana dalam 3 (tiga tahun terakhir) umumnya inflasi Kota Surabaya selalu lebih tinggi dibandingkan Jawa Timur dan Nasional, namun kali ini meskipun lebih tinggi dibanding inflasi Jawa Timur sebesar 2,86% namun lebih rendah dibandingkan Nasional yakni sebesar 3,13 persen.

Berdasarkan pemantauan harga yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik Kota Surabaya, 10 (sepuluh) komoditas utama yang memberikan sumbangan terbesar secara berurutan yang membentuk inflasi Kota Surabaya tahun 2018 antara lain: bensin, daging ayam ras, beras, kontrak rumah, rokok kretek filter, sekolah dasar, akademi/perguruan tinggi, bawang merah, emas perhiasan dan tukang bukan



mandor. Jika diamati berdasarkan kelompok pembentuknya, capaian inflasi Kota Surabaya tahun 2018 paling banyak dikontribusi oleh inflasi pada kelompok inti dan kelompok barang yang harganya diatur oleh pemerintah (*administered price*).

2.4.5 Volume Ekspor dan Impor

Kota Surabaya sebagai salah satu ibu kota Provinsi yang memiliki fungsi strategis dalam perekonomian Indonesia memiliki beragam infrastruktur untuk mendukung aktivitas ekonomi termasuk aktivitas perdagangan, baik perdagangan antar pulau maupun perdagangan antar negara. Beragam infrastruktur tersedia di Kota Surabaya seperti kemudahan aksesibilitas, transportasi, ketersediaan energi dan tersedianya kawasan industri. Di samping itu, keberadaan Pelabuhan Tanjung Perak dan Pelabuhan Teluk Lamong turut menjadikan faktor pendorong Kota Surabaya sebagai kota penghubung (*city hub*) aktivitas perdagangan, baik untuk daerah lain maupun daerah sekitar Kota Surabaya. Neraca perdagangan luar negeri Kota Surabaya selama 5 tahun terakhir cukup berfluktuatif. Selama tahun 2014 hingga 2017 neraca perdagangan Kota Surabaya mengalami surplus dengan nilai bervariasi. Adanya kontaksi neraca perdangan Kota Surabaya pada tahun 2018 dipengaruhi adanya faktor eksternal akibat kondisi ekonomi mitra dagang Kota Surabaya yang belum stabil, seperti dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.91
Nilai Komoditas Ekspor dan Impor Non Migas Kota Surabaya
Tahun 2014 - 2018

No	Uraian	Realisasi				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Nilai Ekspor (US \$)	18.022.413.011	16.452.486.419	17.901.405.669	18.268.869.178	19.165.996.010
2	Nilai Impor (US \$)	17.056.615.375	14.888.180.928	14.849.559.537	16.956.900.232	19.612.835.745
3	Nilai Ekspor Bersih (US \$)	965.797.636	1.564.305.491	3.051.846.000	1.311.968.946	(446.839.735)

Sumber data: Bank Indonesia dan Bappeko, Februari 2019, diolah
**) angka proyeksi Bappeko Surabaya



Tabel II.92
Komoditas Ekspor Non Migas Kota Surabaya Tahun 2017 dan 2018*

Ekspor Non Migas 2017		Ekspor Non Migas 2018	
Komoditi	Nilai	Komoditi	Nilai
	(US\$)		(US\$)
71. Perhiasan dan Permata	3.089.241.590	71. Perhiasan dan Permata	2.925.403.955
15. Lemak dan Minyak Nabati	1.391.160.020	15. Lemak dan Minyak Nabati	1.345.147.048
44. Kayu dan Barang dari Kayu	1.257.563.361	44. Kayu dan Barang dari Kayu	1.402.713.916
74. Tembaga	1.201.667.403	03. Ikan dan Udang	1.172.405.414
03. Ikan dan Udang	1.129.710.044	74. Tembaga	1.142.413.355
29. Bahan Kimia Organik	901.895.960	29. Bahan Kimia Organik	925.509.808
48. Kertas dan Karton	826.557.350	48. Kertas dan Karton	936.265.505
38. Produk-produk Kimia	713.564.473	38. Produk-produk Kimia	802.840.316
94. Perabot dan Penerangan Rumah	531.342.954	94. Perabot dan Penerangan Rumah	560.288.379
85. Mesin dan Peralatan Listrik	513.973.763	85. Mesin dan Peralatan Listrik	602.747.563
16. Daging dan Ikan Olahan	490.428.632	16. Daging dan Ikan Olahan	621.314.761
Jumlah 11 Komoditas	12.047.105.549	Jumlah 11 Komoditas	12.437.050.020
Jumlah Komoditas Lainnya	6.221.763.630	Jumlah Komoditas Lainnya	6.728.945.990
Nilai Total Ekspor Non Migas	18.268.869.178	Nilai Total Ekspor Non Migas	19.165.996.010

Sumber data: Bank Indonesia dan Bappeko, Februari 2019, diolah

Tabel II.93
Komoditas Impor Non Migas Kota Surabaya Tahun 2017 dan 2018*

Impor Non Migas 2017		Impor Non Migas 2018	
Komoditi	Nilai	Komoditi	Nilai
	(US\$)		(US\$)
84. Mesin/Peralatan Mekanik	1.900.070.709	83. Berbagai barang logam dasar	2.154.342.441
72. Besi dan Baja	1.566.582.204	71. Perhiasan dan Permata	1.814.900.398
39. Plastik dan Barang dari Plastik	1.130.751.962	39. Plastik dan Barang dari Plastik	1.402.474.053
23. Sisa Industri Makanan	990.682.630	10. Gandum-gandum	1.122.689.622
10. Gandum-gandum	870.140.658	23. Ampas/Sisa Industri Makanan	1.116.143.655
85. Mesin dan Peralatan Listrik	783.181.551	70. Kaca & Barang dari Kaca	1.022.039.457
31. Pupuk	754.377.682	84. Mesin-mesin/Pesawat Mekanik	965.288.768
08. Buah-buahan	676.872.659	31. Pupuk	836.230.720
29. Bahan Kimia Organik	583.822.609	29. Bahan Kimia Organik	709.585.753

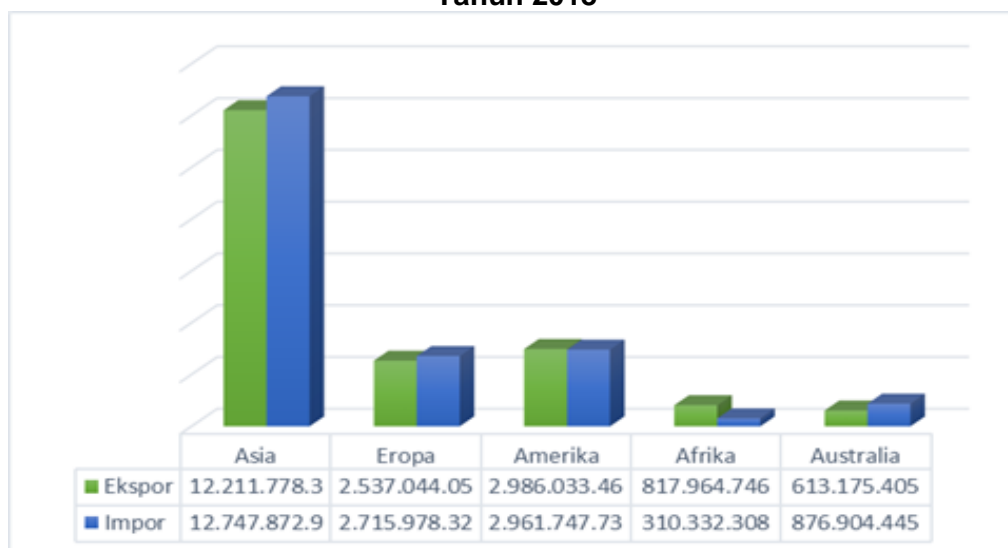


Impor Non Migas 2017		Impor Non Migas 2018	
Komoditi	Nilai	Komoditi	Nilai
	(US\$)		(US\$)
89.Kapal laut	540.243.870	75. Nikel	502.597.052
71. Perhiasan dan Permata	518.989.053	46. Jerami/Bahan anyaman	401.684.415
Jumlah 11 Komoditas	10.315.715.587	Jumlah 11 Komoditas	12.047.976.334
Jumlah Komoditas Lainnya	6.641.184.646	Jumlah Komoditas Lainnya	7.564.859.411
Nilai Total Impor Non Migas	16.956.900.232	Nilai Total Impor Non Migas	19.612.835.745

Sumber data: Bank Indonesia dan Bappeko, Februari 2019, diolah

Berdasarkan komoditasnya, komposisi komoditi yang diekspor Kota Surabaya hampir sama dengan tahun sebelumnya, di mana perhiasan dan permata masih menjadi daya tarik yang paling diminati di pasar internasional yang ditunjukkan oleh tingginya permintaan di tahun 2018 yang mencapai US\$2.925.403.955. Komoditi terbesar yang mendominasi ekspor Kota Surabaya selanjutnya adalah lemak dan minyak nabati, kayu dan barang dari kayu, tembaga serta ikan dan udang yang mencapai lebih dari 1 miliar dollar. Sebaliknya, komoditas yang mayoritas diimpor Kota Surabaya merupakan barang logam dasar, perhiasan dan permata, plastik, gandum, serta ampas/sisa industri makanan. Kawasan Negara tujuan ekspor-impor non migas Kota Surabaya Tahun 2018 dapat dilihat pada Gambar II.14.

Gambar II.14 Kawasan Negara Tujuan Ekspor-Impor Non Migas Kota Surabaya Tahun 2018



Sumber data: Bank Indonesia dan Bappeko, Februari 2019, diolah

Berdasarkan kawasan asal dan tujuan ekspor impor non migas Kota Surabaya, selama tahun 2018 ekspor non migas Kota Surabaya sebagian besar ke



negara kawasan Asia yaitu sebesar US\$12.211.778.332 atau 65% terhadap total ekspor Kota Surabaya tahun 2018. *Share* terbesar ekspor Kota Surabaya di Kawasan Asia mayoritas tujuan ekspor ke negara utamanya yaitu Jepang (US\$3.093.620.617), Cina (US\$1.900.355.099), Malaysia (US\$1.133.118.515) dan Singapura (US\$941.440.431). Tujuan mayoritas ekspor non migas Kota Surabaya selanjutnya adalah negara-negara di kawasan Amerika dengan nilai ekspor sebesar US\$2.986.033.468 dan negara-negara di kawasan Eropa sebesar US\$2.537.044.058.

Pola yang sama juga terjadi pada sisi impor, di mana asal negara yang menjadi pengimpor kebutuhan Kota Surabaya dan wilayah Indonesia Bagian Timur mayoritas dipenuhi oleh negara-negara yang berada di kawasan Asia yaitu sebesar US\$11.635.892.197. Negara yang menjadi pengimpor kebutuhan Kota Surabaya terbesar selanjutnya yaitu negara-negara di kawasan Amerika sebesar US\$2.703.398.247 serta negara kawasan Eropa sebesar US\$2.479.066.991.

2.4.6 Nilai Kepuasan Masyarakat

Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhan. Hasil SKM menjadi salah satu indikator untuk mengukur keberhasilan Pemerintah Kota Surabaya dalam menyelenggarakan pelayanan publik.

Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kota Surabaya disajikan pada Tabel II.94 di bawah ini.

Tabel II.94
Survey Kepuasan Masyarakat Kota Surabaya Tahun 2014 - 2018

Uraian	Realisasi				
	2014	2015	2016	2017	2018
Survey Kepuasan Masyarakat	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Rata-rata nilai SKM Pelayanan Pemerintah Kota Surabaya	77,13	72,32	82,67	74.46	83.74

Sumber Data : Bagian Organisasi Surabaya, 2019

Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat pada tahun 2016 telah mengikuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi



Republik Indonesia nomor 16 tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

2.4.7 Nilai SAKIP

Salah satu indikator tata kelola pemerintahan yang baik adalah evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pemerintah Kota Surabaya telah melakukan upaya peningkatan akuntabilitas kinerja meliputi perencanaan, pengukuran kinerja, dan evaluasi kinerja. Penilaian evaluasi SAKIP dapat dilihat pada Tabel II.95.

Tabel II.95
Penilaian Evaluasi SAKIP Kota Surabaya Tahun 2014 - 2018

Uraian	Realisasi				
	2014	2015	2016	2017	2018
Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	57,48	60,20	63,08	68,86	72,47
Nilai SAKIP	CC	B	B	B	BB

Sumber : Bagian Organisasi, 2019

Pada tahun 2018, nilai SAKIP Pemerintah Kota Surabaya berada pada Kategori BB dengan hasil nilai 70,03 meningkat dibandingkan tahun 2014 dengan nilai 57,48.

2.4.8 Opini BPK

Opini Badan Pemeriksa Keuangan merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Adapun jenis – jenis keterangan dari hasil opini BPK dalam pemeriksaan keuangan pemerintahan adalah :

- a. Wajar tanpa pengecualian
- b. Wajar dengan pengecualian
- c. Tidak wajar
- d. Tidak menyatakan pendapat

Hasil pemeriksaaan BPK atas laporan keuangan pemerintah Kota Surabaya pada Tahun 2015 – 2018 dapat dilihat pada Tabel II.96 berikut ini:



Tabel II.96
Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Surabaya
Tahun 2014 - 2018

Uraian	Realisasi				
	2014	2015	2016	2017	2018*
Opini BPK	N/A	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah, 2019

* *data sementara*

2.4.9 Persentase konflik yang menimbulkan gangguan ketenteraman dan ketertiban masyarakat

Untuk meningkatkan iklim investasi, Pemerintah Kota Surabaya perlu melakukan pengendalian terhadap demonstrasi atau unjuk rasa. Adapun jumlah kejadian unjuk rasa di Surabaya pada Tahun 2014-2018 dapat dilihat pada Tabel II.97 berikut.

Tabel II.97
Jumlah Kejadian Unjuk Rasa Kota Surabaya Tahun 2014 – 2018

No	Uraian	Realisasi				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Bidang Politik	86	90	48	35	67
2	Bidang Ekonomi	91	126	126	84	64
3	Bidang Sosial Budaya	63	115	165	107	105
4	Jumlah Unjuk Rasa	240	331	339	226	236

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, 2019

Jumlah unjuk rasa di kota Surabaya pada tahun 2018 cenderung meningkat dari tahun 2017, dimana unjuk rasa dengan topik utama di bidang sosial budaya yang paling banyak terjadi atau sekitar 105 kali selama kurun waktu satu tahun, namun masih tetap kondusif dan tidak menimbulkan kerusuhan, hal ini dikarenakan adanya pendekatan persuasif dan antisipasi dini yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya bersama dengan instansi terkait serta masih tingginya kesadaran warga kota Surabaya akan pentingnya menjaga ketenteraman dan ketertiban kota sebagai modal utama dalam meningkatkan kegiatan perekonomian di Kota Surabaya.



2.5 Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah

Berikut ini merupakan Tabel II.98 yang berisi tentang hasil evaluasi kinerja pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah mulai dari tahun 2014 hingga target tahun 2018.

Tabel II.98
Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Surabaya

VISI : SURABAYA KOTA SENTOSA YANG BERKARAKTER DAN BERDAYA SAING GLOBAL BERBASIS EKOLOGI																	
Mewujudkan sumber daya masyarakat yang berkualitas																	
1.1 Meningkatkan kualitas pendidikan																	
SASARAN	1.1.1 Mewujudkan pemerataan aksesibilitas dan kualitas pendidikan formal																
	Kode	Indikator Sasaran	Tahun 2014			Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
	1.1.1.a	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	97.00%	97.50%	100.52%	99.00%	99.02%	100.02%	61.34%	64.46%	105.10%	64.56%	67.65%	104.79%	65.93%	66.36%	100.66%
	1.1.1.b	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI	105.20%	108.30%	102.95%	105.20%	105.24%	100.04%	96.16%	92.34%	96.03%	99.13%	102.25%	103.15%	99.30%	100.51%	101.22%
	1.1.1.c	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs	105.00%	100.37%	95.59%	105.00%	105.03%	100.03%	88.25%	85.14%	96.48%	90.98%	89.14%	97.98%	91.13%	91.23%	100.11%
	1.1.1.d	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK	105.00%	121.85%	116.05%	105.00%	105.08%	100.08%	87.04%	90.57%	104.05%	-	-	-	-	-	-
	1.1.1.e	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	95.00%	97.02%	102.12%	95.00%	95.02%	100.02%	92.67%	83.75%	90.37%	95.54%	100.54%	105.23%	95.69%	95.72%	100.03%
	1.1.1.f	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs	95.00%	95.87%	100.91%	95.00%	95.03%	100.03%	81.07%	81.07%	100.00%	83.58%	75.09%	89.84%	83.72%	83.81	100.11%
	1.1.1.g	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/SMK	92.50%	93.47%	101.05%	92.50%	92.55%	100.05%	81.35%	85.59%	105.21%	-	-	-	-	-	-
	1.1.1.h	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	0.00%	0.0025%	tidak terdefinisi	0.00%	0.00%	100.00%	1.08%	0.00%	200.00%	1.00%	0.00%	200.00%	0.93%	0.00%	200.00%
	1.1.1.i	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	0.00%	0.002%	tidak terdefinisi	0.00%	0.00%	100.00%	1.08%	0.00%	200.00%	1.00%	0.00%	200.00%	0.93%	0.00%	200.00%
	1.1.1.j	Angka Putus Sekolah (APS) SMA/MA	0.00%	0.01%	tidak terdefinisi	0.00%	0.004%	tidak terdefinisi	1.04%	0.009%	199.13%	-	-	-	-	-	-
1.1.1.k	Angka Putus Sekolah (APS) SMK	0.00%	0.01%	tidak terdefinisi	0.00%	0.007%	tidak terdefinisi	1.04%	0.013%	198.75%	-	-	-	-	-	-	
1.1.1.l	Angka Kelulusan	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	



	(AL) SD/MI																
1.1.1.m	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	99.30%	99.99%	100.70%	99.50%	100.00%	100.50%	98.90%	99.97%	101.08%	99.00%	100.00%	101.01%	99.10%	100.00%	100.91%	
1.1.1.n	Angka Kelulusan (AL) SMA/MA	99.15%	99.93%	100.79%	99.50%	99.97%	100.47%	97.80%	99.96%	102.21%	-	-	-	-	-	-	
1.1.1.o	Angka Kelulusan (AL) SMK	99.11%	99.95%	100.85%	99.21%	99.97%	100.76%	97.80%	99.96%	102.21%	-	-	-	-	-	-	
1.1.1.p	Angka Melanjutkan (AM) SD/MI ke jenjang SMP/MTs	99.50%	99.60%	100.10%	99.50%	99.54%	100.04%	99.00%	105.51%	106.57%	99.10%	93.03%	93.87%	99.20%	92.35%	93.10%	
1.1.1.q	Angka Melanjutkan (AM) SMP/MTs ke jenjang SMA/MA/SMK	95.00%	110.42%	116.23%	95.00%	100.04%	105.30%	97.80%	116.54%	119.16%	98.00%	96.68%	98.65%	98.20%	100.00%	101.83%	
1.1.1.r	Persentase lembaga pendidikan TK, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK yang terakreditasi	-	-	-	-	-	-	21.66%	34.40%	158.82%	23.90%	69.87%	292.34%	26.14%	75.18%	287.62%	
1.1.1.1	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Pendidikan																
Kode	Indikator Program	Tahun 2014			Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018			
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
1.1.1.1.a	Persentase PAUD yang ditingkatkan sarana prasarannya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.00%	99.56%	398.24%	36.78%	97.41%	264.85%	
1.1.1.1.b	Persentase daya tampung relatif terhadap jumlah kebutuhan SD/MI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%	100.31%	100.31%	100.00%	100.00%	100.00%	
1.1.1.1.c	Persentase daya tampung relatif terhadap jumlah kebutuhan SMP/MTs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%	89.15%	89.15%	100.00%	102.57%	102.57%	
1.1.1.1.d	Persentase daya tampung relatif terhadap jumlah kebutuhan SMA/MA/SMK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.1.1.e	Persentase lembaga pendidikan SD yang sarana prasarannya sesuai standar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70.00%	99.46%	142.09%	71.40%	89.44%	125.27%	
1.1.1.1.f	Persentase lembaga pendidikan SMP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75.00%	98.85%	131.80%	76.50%	82.66%	108.05%	



Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kota Surabaya 2016 – 2021

		1.1.1.1.g	Persentase lembaga pendidikan SMA yang sarana prasarannya sesuai standar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		1.1.1.1.h	Persentase lembaga pendidikan SMK yang sarana prasarannya sesuai standar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		1.1.1.1.i	Persentase fasilitas pendidikan dalam kondisi baik	-	-	-	-	-	-	-	55.77%	59.29%	106.31%	66.83%	66.58%	99.63%		
		1.1.1.2	Program Penerapan Kurikulum	Tahun 2014			Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018		
		Kode	Indikator Program	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
		1.1.1.2.a	Persentase PAUD yang menerapkan kurikulum sesuai ketentuan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35.08%	100.00%	285.06%	49.11%	100.00%	203.62%
		1.1.1.2.b	Persentase lembaga pendidikan SD yang memiliki RPP untuk seluruh mata pelajaran yang sesuai dengan standar kurikulum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80.00%	97.56%	121.95%	81.60%	100.00%	122.55%
		1.1.1.2.c	Persentase lembaga pendidikan SMP yang memiliki RPP untuk seluruh mata pelajaran yang sesuai dengan standar kurikulum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80.00%	100.00%	125.00%	81.60%	100.00%	122.55%
		1.1.1.2.d	Persentase lembaga pendidikan SMA yang memiliki RPP untuk seluruh mata pelajaran yang sesuai dengan standar kurikulum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1.1.1.2.e	Persentase lembaga pendidikan SMK yang memiliki RPP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



			untuk seluruh mata pelajaran yang sesuai dengan standar kurikulum														
1.1.1.3	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan																
Kode	Indikator Program	Tahun 2014			Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018			
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
1.1.1.3.a	Persentase guru PAUD yang kompeten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62.18%	77.07%	123.95%	65.63%	100.00%	152.37%	
1.1.1.3.b	Persentase guru SD yang memiliki sertifikasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65.66%	64.32%	97.96%	74.23%	44.13%	59.45%	
1.1.1.3.c	Persentase guru SMP yang memiliki sertifikasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74.39%	70.69%	95.03%	80.77%	45.95%	56.90%	
1.1.1.3.d	Persentase guru SMA yang memiliki sertifikasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.1.3.e	Persentase guru SMK yang memiliki sertifikasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.1.3.f	Persentase guru SMP yang memiliki kesesuaian kualifikasi akademik dengan mata pelajaran yang diajar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95.43%	95.92%	100.51%	97.73%	100.00%	102.32%	
1.1.1.3.g	Persentase guru SMA yang memiliki kesesuaian kualifikasi akademik dengan mata pelajaran yang diajar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.1.3.h	Persentase guru SMK yang memiliki kesesuaian kualifikasi akademik dengan mata pelajaran yang diajar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.1.3.i	Persentase guru SD yang memiliki kesesuaian kualifikasi akademik yang dibuktikan melalui ijazah S1 dari Fakultas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86.53%	93.26%	107.78%	94.79%	100.00%	105.50%	



	(AL) SMP/MTs															
-	Angka Melanjutkan (AM) SD/MI ke jenjang SMP/MTs	99.50%	99.60%	100.10%	99.50%	99.54%	100.04%	99.00%	105.51%	106.57%	-	-	-	-	-	-
-	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	0.00%	0.0025%	tidak terdefinisi	0.00%	0.00%	100.00%	1.08%	0.00%	200.00%	-	-	-	-	-	-
-	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	0.00%	0.002%	tidak terdefinisi	0.00%	0.00%	100.00%	1.08%	0.00%	200.00%	-	-	-	-	-	-
-	Persentase fasilitas pendidikan dasar dalam kondisi baik	-	-	-	-	-	-	44.18%	54.83%	124.11%	-	-	-	-	-	-
-	Program Pendidikan Menengah															
Kode	Indikator Program	Tahun 2014			Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
-	Angka Kelulusan (AL) SMA/MA	99.15%	99.93%	100.79%	99.50%	99.97%	100.47%	97.80%	99.96%	102.21%	-	-	-	-	-	-
-	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK	105.00%	121.85%	116.05%	105.00%	105.08%	100.08%	87.04%	90.57%	104.05%	-	-	-	-	-	-
-	Angka Melanjutkan (AM) SMP/MTs ke jenjang SMA/MA/SMK	95.00%	110.42%	116.23%	95.00%	100.04%	105.30%	97.80%	116.54%	119.16%	-	-	-	-	-	-
-	Angka Kelulusan (AL) SMK	99.11%	99.95%	100.85%	99.21%	99.97%	100.76%	97.80%	99.96%	102.21%	-	-	-	-	-	-
-	Angka Putus Sekolah (APS) SMA/MA	0.00%	0.01%	tidak terdefinisi	0.00%	0.004%	tidak terdefinisi	1.04%	0.01%	199.13%	-	-	-	-	-	-
-	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/SMK	92.50%	93.47%	101.05%	92.50%	92.55%	100.05%	81.35%	85.59%	105.21%	-	-	-	-	-	-
-	Angka Putus Sekolah (APS) SMK	0.00%	0.01%	tidak terdefinisi	0.00%	0.007%	tidak terdefinisi	1.04%	0.01%	198.75%	-	-	-	-	-	-
-	Persentase lulusan SMK yang diterima di dunia kerja/wirausaha	65.00%	61.40%	94.46%	70.00%	67.00%	95.72%	53.13%	62.50%	117.64%	-	-	-	-	-	-
-	Persentase siswa kejuruan yang lulus ujian sertifikasi kompetensi	-	-	-	-	-	-	tidak terealisasi	tidak terealisasi	tidak terealisasi	-	-	-	-	-	-
-	Persentase fasilitas pendidikan menengah dalam kondisi baik	-	-	-	-	-	-	53.13%	62.50%	117.64%	-	-	-	-	-	-



Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kota Surabaya 2016 – 2021

1.1.1.4 Program Peningkatan Prestasi																
Kode	Indikator Program	Tahun 2014			Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.1.1.4.a	Persentase prestasi SD pada event tingkat provinsi/nasional/internasional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45.16%	92.81%	205.51%	46.15%	95.36%	206.63%
1.1.1.4.b	Persentase prestasi SMP pada event tingkat provinsi/nasional/internasional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.00%	97.74%	195.48%	50.00%	98.93%	197.86%
1.1.1.4.c	Persentase prestasi SMA pada event tingkat provinsi/nasional/internasional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.4.d	Persentase prestasi SMK pada event tingkat provinsi/nasional/internasional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.4.e	Persentase PAUD beprestasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.14%	2.27%	199.12%	1.70%	5.20%	305.60%
1.1.1.5 Program Peningkatan Manajemen Pengelolaan Pendidikan																
Kode	Indikator Program	Tahun 2014			Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.1.1.5.a	Persentase lembaga pendidikan SD yang tertib administrasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56.82%	100.00%	175.99%	60.88%	79.62%	130.78%
1.1.1.5.b	Persentase lembaga pendidikan MI yang tertib administrasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39.60%	100.00%	252.53%	42.95%	90.24%	210.11%
1.1.1.5.c	Persentase lembaga pendidikan SMP yang tertib administrasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64.44%	100.00%	155.18%	81.85%	87.28%	106.64%
1.1.1.5.d	Persentase lembaga pendidikan MTs yang tertib administrasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38.78%	100.00%	257.86%	48.98%	87.93%	179.52%
1.1.1.5.e	Persentase lembaga pendidikan SMA yang tertib administrasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.5	Persentase lembaga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



		.f	pendidikan MA yang tertib administrasi															
		1.1.1.5.g	Persentase lembaga pendidikan SMK yang tertib administrasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SASARAN	1.1.2	Mewujudkan pemerataan aksesibilitas dan kualitas pendidikan nonformal																
		Kode	Indikator Sasaran	Tahun 2014			Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018		
				Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
		1.1.2.a	Persentase lembaga pendidikan non formal yang terakreditasi	-	-	-	-	-	-	9.49%	13.04%	137.41%	15.22%	13.62%	89.49%	20.95%	27.27%	130.18%
		1.1.2.1	Program Pendidikan Kesetaraan															
		Kode	Indikator Program	Tahun 2014			Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018		
				Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
		1.1.2.1.a	Persentase ketuntasan pendidikan kesetaraan Paket A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70.00%	92.56%	132.23%	71.07%	89.04%	125.28%
		1.1.2.1.b	Persentase ketuntasan pendidikan kesetaraan Paket B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88.12%	82.93%	94.11%	88.51%	89.65%	101.28%
		1.1.2.1.c	Persentase ketuntasan pendidikan kesetaraan Paket C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90.85%	98.13%	108.01%	90.98%	91.06%	100.09%
		1.1.2.2	Program Pendidikan Masyarakat serta Lembaga Kursus dan Pelatihan															
		Kode	Indikator Program	Tahun 2014			Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018		
				Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
		1.1.2.2.a	Persentase lembaga kursus dan pelatihan yang mendaftarkan proses akreditasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.53%	11.09%	200.54%	5.73%	15.53%	271.03%
		1.1.2.2.b	Persentase pertumbuhan peserta didik yang mengikuti pendidikan masyarakat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00%	1.04%	10.36%	996.41%
-	Program Pendidikan Non Formal																	
Kode	Indikator Program	Tahun 2014			Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018				
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian		
-	Angka melek huruf	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	Persentase lembaga kursus dan pelatihan	-	-	-	-	-	-	25.00%	25.30%	101.19%	-	-	-	-	-	-		



Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kota Surabaya 2016 – 2021

			yang siap untuk diakreditasi																
		-	Persentase ketuntasan pendidikan kesetaraan	-	-	-	-	-	90.00%	100.00%	111.11%	-	-	-	-	-	-		
		-	Program Peningkatan Prestasi Non Akademik																
		Kode	Indikator Program	Tahun 2014			Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018			
		-	Persentase prestasi non akademik	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
		-		-	-	-	-	-	-	78.00%	86.96%	111.48%	-	-	-	-	-	-	
1.2	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat																		
SASARAN	1.2.1	Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat bagi warga miskin																	
		Kode	Indikator Sasaran	Tahun 2014			Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018			
				Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
		1.2.1.a	Persentase penduduk miskin yang terlayani di layanan kesehatan	-	-	-	-	-	-	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
		1.2.1.b	Indeks kepuasan pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin	-	-	-	-	-	-	70	76	108.63%	70	68.73	98.19%	70	86	122.85%	
		1.2.1.1	Program Pemberian Jaminan Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin																
			Kode	Indikator Program	Tahun 2014			Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018		
					Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
			1.2.1.1.a	Persentase Kepemilikan Jaminan Kesehatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%	99.09%	99.09%	100.00%	100.00%	100.00%
			1.2.1.1.b	Persentase penduduk miskin yang memanfaatkan pelayanan kesehatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.00%	14.47%	131.55%	12.00%	24.71%	205.88%
			-	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin															
			Kode	Indikator Program	Tahun 2014			Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018		
		-	Persentase masyarakat miskin yang memiliki jaminan kesehatan terlayani	-	-	-	-	-	-	100.00%	100.00%	100.00%	-	-	-	-	-	-	
SASARAN	1.2.2	Meningkatnya kualitas layanan kesehatan ibu dan anak																	
		Kode	Indikator Sasaran	Tahun 2014			Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018			
				Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
		1.2.2.a	Cakupan pelayanan ibu nifas	-	-	-	-	-	-	93.80%	93.88%	100.08%	94.04%	94.53%	100.52%	94.28%	95.95%	101.77%	

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kota Surabaya 2016 – 2021



1.2.2.b	Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 KH (kelahiran hidup)	-	-	-	-	-	-	85.72	85.72	100.00%	84.07 per 100.000 KH	79.4 per 100.000 KH	105.55%	82.00 per 100.000 KH	72.99 per 100.000 KH	110.99%
1.2.2.c	Cakupan pelayanan kesehatan bayi	-	-	-	-	-	-	93.69%	93.73%	100.04%	94.15%	95.97%	101.93%	94.62%	97.78%	103.34%
1.2.2.d	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 KH (kelahiran hidup)	-	-	-	-	-	-	6.46	6.39	101.02%	6.00 per 1.000 KH	5.11 per 1.000 KH	120.78%	6.00 per 1.000 KH	5.04 per 1.000 KH	116.03%
1.2.2.e	Persentase balita gizi buruk yang mendapat perawatan	-	-	-	-	-	-	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
1.2.2.1	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak															
Kode	Indikator Program	Tahun 2014			Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.2.2.1.a	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4	98.00%	98.22%	100.22%	98.00%	98.41%	100.42%	-	-	-	98.45%	98.55%	100.10%	98.47%	98.98%	100.51%
1.2.2.1.b	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan (Tolinakes)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96.94%	97.63%	100.71%	96.95%	97.68%	100.76%
1.2.2.1.c	Cakupan kunjungan neonatal lengkap	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81.00%	100.19%	123.69%	85.00%	100.28%	117.98%
1.2.2.1.d	Cakupan imunisasi dasar lengkap	-	-	-	-	-	-	-	-	-	93.81%	94.57%	100.81%	93.83%	97.77%	104.20%
-	Cakupan kunjungan bayi	90.00%	94.71%	105.23%	90.00%	93.69%	104.10%	90.00%	93.73%	104.15%	-	-	-	-	-	-
-	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan (Tolinakes) yang memiliki kompetensi kebidanan	96.00%	96.45%	100.47%	96.00%	96.92%	100.96%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Cakupan bayi 0-11 bulan yang mendapat imunisasi BCG	90.00%	97.10%	107.89%	90.00%	92.15%	102.39%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Cakupan bayi 0-11 bulan yang mendapat imunisasi DPT 1 + HB 1	90.00%	93.59%	103.99%	90.00%	92.91%	103.23%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Cakupan bayi 0-11 bulan yang mendapat imunisasi	90.00%	88.85%	98.72%	90.00%	91.49%	101.66%	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kota Surabaya 2016 – 2021

			DPT 3 + HB 3															
		-	Cakupan bayi 0-11 bulan yang mendapat imunisasi Polio 4	90.00%	88.66%	98.51%	90.00%	91.02%	101.13%	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	Cakupan bayi 0-11 bulan yang mendapat imunisasi Campak	90.00%	94.13%	104.59%	90.00%	93.04%	103.38%	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	Balita gizi buruk yang mendapat perawatan	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	-	-	-	-	-	-	-	-	
		1.2.2.2	Program Perbaikan Gizi Ibu dan Anak															
		Kode	Indikator Program	Tahun 2014			Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018		
				Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
		1.2.2.2	Prevalensi Balita Gizi kurang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.50%	9.10%	104.21%	9.50%	8.26%	113.05%
		1.2.2.2	Prevalensi Balita gizi buruk	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00%	0.15%	185.00%	1.00%	0.14%	186.03%
		1.2.2.2	Persentase Penimbangan balita	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81.30%	104.93%	129.07%	81.40%	85.95%	105.59%
		1.2.2.2	Persentase ibu hamil yang mendapatkan 90 tablet Fe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	94.62%	95.81%	101.26%	94.64%	99.96%	105.62%
		-	Program Perbaikan Gizi Masyarakat															
		Kode	Indikator Program	Tahun 2014			Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018		
				Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
		-	Prevalensi balita kurang gizi	-	-	-	-	-	-	< 20%	16.94%	115.30%	-	-	-	-	-	-
SASARAN	1.2.3	Meningkatkan kualitas sarana, prasarana, serta tata kelola layanan kesehatan																
		Kode	Indikator Sasaran	Tahun 2014			Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018		
				Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
		1.2.3.a	Persentase puskesmas yang terakreditasi	-	-	-	-	-	-	23.81%	23.81%	100.00%	39.68%	88.89%	224.02%	55.56%	100.00%	179.99%
		1.2.3.b	Persentase Rumah sakit yang terakreditasi	-	-	-	-	-	-	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
		1.2.3.c	Indeks Kepuasan Layanan RSUD Bhakti Dharma Husada	-	-	-	-	-	-	76	78.91	103.83%	77	78.73	102.25%	78	86.41	110.78%
1.2.3.d	Indeks Kepuasan Layanan RSUD dr. M Soewandie	-	-	-	-	-	-	74	77.03	104.09%	75	81.12	108.16%	75	87.72	116.96%		
		1.2.3.1	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu															



Kode	Indikator Program	Tahun 2014			Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.2.3.1.a	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana puskesmas dan puskesmas pembantu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74.00%	76.23%	103.01%	76.00%	83.61%	110.01%
1.2.3.1.b	Persentase fasilitas kesehatan dalam kondisi baik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52.70%	64.29%	121.99%	64.52%	83.61%	129.58%
- Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu (dan Jaringannya)																
Kode	Indikator Program	Tahun 2014			Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
-	Jumlah puskesmas induk yang meningkat menjadi puskesmas rawat inap	19 puskesmas	20 puskesmas	105.26%	21 puskesmas	21 puskesmas	100.00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Jumlah puskesmas pembantu yang meningkat menjadi puskesmas induk	8 puskesmas	9 puskesmas	112.50%	10 puskesmas	10 puskesmas	100.00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana puskesmas dan puskesmas pembantu	-	-	-	-	-	-	72.00%	72.95%	101.32%	-	-	-	-	-	-
-	Persentase fasilitas kesehatan dalam kondisi baik	-	-	-	-	-	-	40.87%	48.39%	118.39%	-	-	-	-	-	-
1.2.3.2 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Puskesmas/Puskesmas Pembantu																
Kode	Indikator Program	Tahun 2014			Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.2.3.2.a	Persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan Dinas Kesehatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
1.2.3.3 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan																
Kode	Indikator Program	Tahun 2014			Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.2.3.3.a	Persentase tenaga kesehatan yang memiliki izin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82.00%	96.08%	117.17%	84.00%	98.15%	116.85%
1.2.3.3	Persentase sarana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82.00%	98.77%	120.45%	84.00%	98.27%	116.99%



Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kota Surabaya 2016 – 2021

	.b	kesehatan yang memiliki izin															
	1.2.3.3	Persentase pencapaian SPM Rumah Sakit Bhakti Dharma Husada	-	-	-	-	-	-	-	-	72.00%	79.79%	110.82%	73.00%	86.73%	118.81%	
	1.2.3.3	Persentase pencapaian SPM Rumah Sakit dr. Mohamad Soewandhie	-	-	-	-	-	-	-	-	76.00%	85.11%	111.99%	77.00%	82.65%	107.34%	
	-	Persentase sarana kesehatan berizin yang memenuhi standar	-	-	-	-	-	100.00%	100.00%	100.00%	-	-	-	-	-	-	
	-	Persentase tenaga kesehatan yang teregistrasi	-	-	-	-	-	100.00%	97.77%	97.77%	-	-	-	-	-	-	
	1.2.3.4	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit															
	Kode	Indikator Program	Tahun 2014			Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
	1.2.3.4	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana RSUD dr. Mohamad Soewandhie sesuai standar tipe rumah sakit	-	-	-	-	-	-	-	-	78.00%	116.37%	149.19%	80.00%	96.08%	120.10%	
	1.2.3.4	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana RSUD Bhakti Dharma Husada sesuai standar tipe rumah sakit	-	-	-	-	-	-	-	-	85.00%	216.88%	255.15%	85.00%	98,95%	116,41%	
	1.2.3.4	Rata-rata waktu tunggu layanan operasi elektif RSUD Bhakti Dharma Husada	-	-	-	-	-	-	-	-	10.00 hari	11 hari	90.00%	10.00 hari	5 hari	150.00%	
	1.2.3.4	Rata-rata waktu tunggu layanan rawat jalan RSUD Bhakti Dharma Husada	-	-	-	-	-	-	-	-	47.00 menit	54 menit	85.11%	45.00 menit	52.5 menit	83.33%	
	1.2.3.4	Rata-rata waktu tunggu layanan	-	-	-	-	-	-	-	-	48.00 hari	18 hari	162.50%	48.00 hari	11 hari	177.08%	



			operasi elektif RSUD dr. Mohamad Soewandhie													
		- Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata														
Kode	Indikator Program	Tahun 2014			Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
-	Peningkatan klasifikasi rumah sakit RSUD dr. M. Soewandhie	B	B	100.00%	B	B	100.00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Peningkatan klasifikasi rumah sakit Bhakti Dharma Husada	B	B	100.00%	B	B	100.00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana rumah sakit sesuai standar RSUD dr. Mohamad Soewandhie	-	-	-	-	-	-	75.00%	78.00%	103.44%	-	-	-	-	-	-
-	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana rumah sakit sesuai standar RSUD dr. Mohamad Soewandhie	-	-	-	-	-	-	80.00%	90.99%	113.74%	-	-	-	-	-	-
-	Persentase bangunan/gedung RSUD dr. Mohamad Soewandhie dalam kondisi baik	-	-	-	-	-	-	100.00%	100.00%	100.00%	-	-	-	-	-	-
1.2.3.5		Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Rumah Sakit														
Kode	Indikator Program	Tahun 2014			Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.2.3.5.a	Persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan RSUD dr. M. Soewandhie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
1.2.3.5.b	Persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan RSUD Bhakti Dharma Husada	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%	99.87%	99.87%	100.00%	100.00%	100.00%



Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kota Surabaya 2016 – 2021

		Program Obat dan Perbekalan Kesehatan															
Kode	Indikator Program	Tahun 2014			Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018			
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
-	Persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan Dinas Kesehatan	-	-	-	-	-	-	100.00%	107.14%	107.14%	-	-	-	-	-	-	
-	Persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan RSUD dr. M. Soewandhie	-	-	-	-	-	-	100.00%	100.00%	100.00%	-	-	-	-	-	-	
-	Persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan RSUD Bhakti Dharma Husada	-	-	-	-	-	-	100.00%	100.00%	100.00%	-	-	-	-	-	-	
SASARAN	1.2.4	Mewujudkan lingkungan sehat di masyarakat															
	Kode	Indikator Sasaran	Tahun 2014			Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
	1.2.4.a	Persentase kelurahan siaga aktif	-	-	-	-	-	-	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
	1.2.4.b	Cakupan kelurahan mengalami KLB yang ditangani <20 jam	-	-	-	-	-	-	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
	1.2.4.1	Program Upaya Kesehatan Masyarakat															
	Kode	Indikator Program	Tahun 2014			Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
	1.2.4.1.a	Persentase rumah sehat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75.00%	84.36%	112.48%	76.50%	86.38%	112.92%
	1.2.4.1.b	Persentase TPM memenuhi syarat higienis sanitasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81.00%	93.02%	114.84%	82.00%	84.84%	103.47%
1.2.4.1.c	Cakupan Kelurahan Yang Memiliki Pembinaan Terpadu (Bindu)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82.00%	100.00%	121.95%	84.00%	100.00%	119.05%	
-	Cakupan kelurahan mengalami KLB yang ditangani <24 jam	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	-	-	-	-	-	-	
-	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	



		-	Persentase masyarakat yang terlayani pelayanan khusus	-	-	-	-	-	-	100.00%	100.00%	100.00%	-	-	-	-	-	
		-	Persentase sampel yang memenuhi syarat keamanan makanan olahan	-	-	-	-	-	-	80.00%	94.02%	117.52%	-	-	-	-	-	
SASARAN	1.2.5	Meningkatnya kualitas layanan KB dasar																
		Kode	Indikator Sasaran	Tahun 2014			Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018		
				Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
		1.2.5.a	Total Fertility Rate (TFR)	-	-	-	-	-	-	1.8-1.9	1.78	101.11%	1.9	1.78	106.32%	1.9	1.73	108.89%
		1.2.5.1 Program Keluarga Berencana																
		Kode	Indikator Program	Tahun 2014			Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018		
				Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
		1.2.5.1.a	Persentase peserta KB baru	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81.15%	96.15%	118.48%	81.95%	97.90%	119.46%
		1.2.5.1.b	Persentase peserta KB aktif	80.26%	81.42%	101.45%	81.00%	80.20%	99.01%	-	-	-	77.31%	80.96%	104.72%	78.40%	80.28%	102.40%
		1.2.5.1.c	Persentase peserta KB aktif yang drop out kontrasepsi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.80%	2.37%	159.14%	5.40%	3.20%	140.78%
		1.2.5.1.d	Persentase kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (unmeet need)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.85%	18.24%	112.52%	20.50%	19.78%	103.51%
		-	Persentase pasangan usia subur yang ber-KB aktif	-	-	-	-	-	-	76.32%	82.00%	107.44%	-	-	-	-	-	-
		1.2.5.2 Program Bina Keluarga																
		Kode	Indikator Program	Tahun 2014			Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018		
				Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.2.5.2.a	Persentase kelompok Bina Keluarga Balita (BKB)/Bina Keluarga Remaja (BKR)/Bina Keluarga Lansia (BKL) yang aktif	-	-	-	-	-	-	23.90%	24.96%	104.43%	47.90%	100.00%	208.77%	70.39%	100.00%	142.07%		
1.2.5.2.b	Persentase pasangan usia subur yang usia istrinya kurang dari 20 tahun	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.40%	0.05%	198.53%	3.30%	0.07%	198.03%		



Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kota Surabaya 2016 – 2021

SASARAN	1.3 Meningkatkan ketahanan pangan																
	1.3.1 Meningkatkan ketersediaan, kualitas konsumsi, dan keamanan pangan																
	Kode	Indikator Sasaran	Tahun 2014			Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018		
Target			Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
	1.3.1.a	Tingkat kualitas konsumsi dan keamanan pangan	-	-	-	-	-	-	87.50%	94.74%	108.27%	88.50%	94.78%	107.10%	89.30%	95.62%	107.08%
	1.3.1.1 Program Peningkatan Ketersediaan, Keanekaragaman, dan Keamanan Pangan																
	Kode	Indikator Program	Tahun 2014			Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
	1.3.1.1.a	Tingkat keamanan bahan pangan segar yang beredar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81.00%	86.95%	107.35%	82.00%	89.01%	108.55%
	1.3.1.1.b	Persentase sample yang memenuhi syarat keamanan makanan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82.00%	96.02%	117.10%	84.00%	98.04%	116.71%
	1.3.1.1.c	Tingkat keanekaragaman konsumsi masyarakat (PPH)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95.5	95.62	100.13%	95.5	96.76	101.32%
SASARAN	1.3.2 Meningkatkan distribusi pangan																
	Kode	Indikator Sasaran	Tahun 2014			Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
	1.3.2.a	Tingkat stabilitas harga komoditas pangan	-	-	-	-	-	-	91.00%	87.89%	96.58%	92.00%	133.82%	145.46%	92.00%	134.20%	145.87%
	1.3.2.1 Program Peningkatan Akses dan Distribusi Pangan																
	Kode	Indikator Program	Tahun 2014			Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
	1.3.2.1.a	Tingkat frekuensi intervensi ketersediaan komoditas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.00 kali/kejadian	16 kali/kejadian	108.00%	15.00 kali/kejadian	19 kali/kejadian	126.67%
	1.3.2.1.b	Persentase pasar yang dipantau harganya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.00%	7.46%	93.25%	8.00%	10.45%	130.60%
	- Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)																
-	Kode	Indikator Program	Tahun 2014			Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
	-	Pola Pangan harapan (PPH)	92.92%	92.93%	100.01%	95	95	100.00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	Persentase tersedianya informasi ketersediaan dan distribusi pangan	-	-	-	-	-	-	100.00%	100.00%	100.00%	-	-	-	-	-	-



		-	Tingkat keamanan produk pangan	-	-	-	-	-	-	-	> 80%	94.19%	117.74%	-	-	-	-	-	
SASARAN	1.4	Meningkatkan kualitas dan prestasi generasi muda																	
	1.4.1	Meningkatkan potensi pemuda dan organisasi pemuda dalam hal wawasan dan karakter kebangsaan agar mampu berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan																	
		Kode	Indikator Sasaran	Tahun 2014			Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018			
				Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
		1.4.1.a	Angka pemuda kader anti kenakalan remaja per 10.000 pemuda	-	-	-	-	-	-	6.11	5.48	89.75%	12.22	11.21	91.73%	18.32	17.72	96.75%	
		1.4.1.1	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan																
			Kode	Indikator Program	Tahun 2014			Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018		
					Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
		1.4.1.1.a	Persentase pemuda yang aktif sebagai kader anti kenakalan remaja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80.00%	100.00%	125.00%	80.00%	99.78%	124.73%	
		-	Meningkatnya kualitas pemuda/kelompok pemuda yang mampu mengembangkan usaha mandiri	100.00%	100.00%	100.00%	80.00%	80.00%	100.00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	Akumulasi pemuda yang dapat mengembangkan usaha mandiri	-	-	-	-	-	-	10 orang	36 orang	360.00%	-	-	-	-	-	-		
	-	Cakupan pemuda yang mendapat pembinaan	-	-	-	-	-	-	11.615 orang	9.802 orang	84.39%	-	-	-	-	-	-		
	-	Akumulasi pemuda sebagai pelopor pembangunan	-	-	-	-	-	-	10 orang	13 orang	130.00%	-	-	-	-	-	-		
SASARAN	1.4.2	Meningkatkan dan mempertahankan prestasi olahraga di tingkat regional, nasional dan internasional																	
		Kode	Indikator Sasaran	Tahun 2014			Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018			
				Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
		1.4.2.a	Persentase atlet yang memiliki prestasi di tingkat regional, nasional dan internasional	-	-	-	-	-	-	65.00%	48.38%	74.43%	65.00%	61.15%	94.08%	65.00%	108.56%	167.02%	
		1.4.2.1	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga																
		Kode	Indikator Program	Tahun 2014			Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018			
				Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
	1.4.2.1.a	Akumulasi atlet yang dibina dan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.107 orang	1.843 orang	166.49%	1.357 orang	2.307 orang	170.01%		



Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kota Surabaya 2016 – 2021

			berprestasi																
		1.4.2.1.b	Cakupan / sebaran fasilitas olahraga	-	-	-	-	-	-	-	-	103 kelurahan	115 kelurahan	111.65%	115 kelurahan	124 kelurahan	107.83%		
		-	Meningkatnya atlet/organisasi olahraga yang berprestasi	1,578 atlet/organisasi	1,761 atlet/organisasi	111.60%	1,736 atlet/organisasi	1,312 atlet/organisasi	76.00%	-	-	-	-	-	-	-	-		
		-	Meningkatnya prasarana olahraga yang dikembangkan	242 prasarana	272 prasarana	112.39%	282 prasarana	346 prasarana	123.00%	-	-	-	-	-	-	-	-		
		-	Meningkatnya jenis olahraga rekreasi yang digali, dibina, dan dikembangkan	43 jenis	41 jenis	95.35%	48 jenis	41 jenis	85.00%	-	-	-	-	-	-	-	-		
		-	Cakupan pembinaan atlet olahraga	-	-	-	-	-	-	1.937 orang	2.433 orang	125.61%	-	-	-	-	-		
		-	Akumulasi prasarana olahraga yang dikembangkan	-	-	-	-	-	-	322 lokasi	346 lokasi	107.45%	-	-	-	-	-		
		-	Akumulasi olahraga rekreasi yang digali	-	-	-	-	-	-	53 jenis	53 jenis	100.00%	-	-	-	-	-		
1.5	Meningkatkan kompetensi angkatan kerja																		
SASARAN	1.5.1	Meningkatkan pemenuhan kesempatan kerja bagi angkatan kerja																	
		Kode	Indikator Sasaran	Tahun 2014			Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018			
				Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
		1.5.1.a	Persentase pencari kerja terserap pada pasar kerja formal	-	-	-	-	-	-	> 40%	50.69%	126.73%	40.00%	53.58	133.95%	40.00%	70.04	175.10%	
		1.5.1.b	Persentase wirausaha muda yang berdaya	-	-	-	-	-	-	7.50%	12.24%	163.27%	7.50%	7.57	100.93%	7.50%	20.37	271.60%	
		1.5.1.1	Program Peningkatan Kesempatan Kerja																
			Kode	Indikator Program	Tahun 2014			Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018		
					Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
			1.5.1.1.a	Persentase pertumbuhan kesempatan kerja yang dapat diinformasikan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.00%	5.10%	102.00%	5.00%	5.04	100.72%
			1.5.1.1.b	Persentase pemuda yang membuka wirausaha mandiri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.00%	15.07%	100.47%	15.00%	35.19	234.57%
		-	Persentase penempatan pencari kerja pada pasar kerja	5.00%	5.01%	100.20%	6.00%	6.12%	102.00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	



		-	Persentase pencari kerja terserap pada pasar kerja	-	-	-	-	-	-	> 40%	50.69%	126.73%	-	-	-	-	-		
		1.5.1.2	Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas																
		Kode	Indikator Program	Tahun 2014			Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018			
				Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
		1.5.1.2.a	Persentase angkatan kerja yang lulus sertifikasi	-	-	-	-	-	-	> 50%	64.32%	128.63%	62.00%	68.69%	110.79%	64.00%	81.72%	127.69%	
		1.5.1.2.b	Persentase peserta pelatihan berbasis kompetensi yang lulus pelatihan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77.00%	97.93%	127.18%	79.00%	100.00%	126.58%	
		-	Persentase masyarakat yang mendapat sertifikat kompetensi	-	-	-	0.21%	0.17%	80.95%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SASARAN	1.5.2	Menciptakan hubungan antar pemangku kepentingan dalam lingkup industrial yang harmonis																	
		Kode	Indikator Sasaran	Tahun 2014			Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018			
				Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
		1.5.2.a	Persentase jumlah kasus ketenagakerjaan	-	-	-	-	-	-	2.80%	2.15%	123.16%	2.60%	2.19%	115.77%	2.50%	1.77%	129.28%	
		1.5.2.1	Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Syarat Kerja																
			Kode	Indikator Program	Tahun 2014			Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018		
					Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
			1.5.2.1.a	Persentase perusahaan yang memiliki Peraturan Perusahaan/Perjanjian Kerja Bersama	-	-	-	-	-	-	6.51%	6.70%	102.99%	6.67%	7.18%	107.65%	7.01%	7.77%	110.82%
			1.5.2.2	Program Pengawasan dan Perlindungan Ketenagakerjaan															
			Kode	Indikator Program	Tahun 2014			Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018		
				Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
		1.5.2.2.a	Persentase perusahaan yang telah diperiksa dan mematuhi norma ketenagakerjaan dan/norma K3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43.00%	44.70%	103.95%	52.00%	52.33%	100.64%	
		-	Persentase perusahaan yang mematuhi norma ketenagakerjaan dan/atau K3	-	-	-	-	-	-	33.00%	40.48%	122.66%	-	-	-	-	-	-	
		-	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan																
		Kode	Indikator Program	Tahun 2014			Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018			



Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kota Surabaya 2016 – 2021

			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian		
		-	Persentase penyelesaian sengketa pekerja pengusaha	75.00%	80.87%	107.83%	76.00%	76.19%	100.25%	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	Memberdayakan masyarakat dan menciptakan seluas-luasnya kesempatan berusaha																		
	2.1	Meningkatkan penanganan PMKS																	
SASARAN	2.1.1	Meningkatkan pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar dan rehabilitasi PMKS																	
		Kode	Indikator Sasaran	Tahun 2014			Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018			
				Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
		2.1.1.a	Persentase PMKS yang ditangani yang berhasil direhabilitasi	-	-	-	-	-	-	11.00%	13.03%	118.46%	12.00%	12.12%	101.00%	13.00%	27.28%	209.84%	
		2.1.1.1	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial																
			Kode	Indikator Program	Tahun 2014			Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018		
					Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
		2.1.1.1.a	Persentase PMKS yang ditangani	-	-	-	-	-	-	60.00%	60.67%	101.11%	60.00%	60.13%	100.22%	60.00%	62.10%	103.50%	
		-	Persentase penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	54.00%	149.98%	277.74%	70.00%	196.63%	280.89%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2.1.1.2	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial																
		Kode	Indikator Program	Tahun 2014			Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018			
				Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
	2.1.1.2.a	Persentase PSKS Yang Berpartisipasi Dalam Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial	60.00%	91.87%	153.12%	70.00%	94.83%	135.47%	-	-	-	45.00%	45.73%	101.62%	50.00%	58.36%	116.73%		
	-	Persentase terfasilitasnya kegiatan keagamaan dan nilai-nilai kepahlawanan	-	-	-	-	-	-	100.00%	100.00%	100.00%	-	-	-	-	-	-		
	2.2	Menurunkan PMKS melalui pemberdayaan PMKS usia produktif dalam kelompok-kelompok usaha																	
SASARAN	2.2.1	Meningkatkan keterampilan PMKS usia produktif																	
		Kode	Indikator Sasaran	Tahun 2014			Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018			
				Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
	2.2.1.a	Persentase PMKS usia produktif yang omzetnya ≥ 1 juta rupiah per bulan	-	-	-	-	-	-	80.00%	66.38%	82.97%	80.00%	73.09%	91.36%	80.00%	59.70%	74.62%		
	2.2.1.1	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat																	



	Kode	Indikator Program	Tahun 2014			Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
	2.2.1.1.a	Persentase PMKS usia produktif dari hasil pelatihan atau pembinaan yang berproduksi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75.00%	68.34%	91.12%	75.00%	100.00%	133.33%
	-	Persentase pelaksanaan pemutakhiran data keluarga miskin	-	-	-	-	-	100.00%	100.00%	100.00%	-	-	-	-	-	-	-
	-	Persentase kelompok Usaha Ekonomi Masyarakat (UEM) yang berdaya	-	-	-	-	-	1.00%	2.85%	285.00%	-	-	-	-	-	-	-
	Program Penanggulangan Kemiskinan																
	Kode	Indikator Program	Tahun 2014			Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
	-	Jumlah keluarga miskin yang melakukan usaha ekonomi produktif	1,487 orang	1,655 orang	111.30%	1,487 orang	1,725 orang	116.00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3	Meningkatkan pemberdayaan perempuan, serta perlindungan perempuan dan anak																
SASARAN	2.3.1	Meningkatkan pemberdayaan perempuan															
	Kode	Indikator Sasaran	Tahun 2014			Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
	2.3.1.a	Persentase kecamatan yang responsif gender	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48.39%	48.39%	100.00%	61.29%	61.29%	100.00%
	2.3.1.1	Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan															
Kode	Indikator Program	Tahun 2014			Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018			
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
2.3.1.1.a	Persentase indikator PUG tingkat kecamatan yang terpenuhi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
SASARAN	2.3.2	Meningkatkan perlindungan perempuan dan anak															
	Kode	Indikator Sasaran	Tahun 2014			Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
	2.3.2.a	Persentase kelurahan ramah anak	-	-	-	-	-	-	19.48%	19.48%	100.00%	35.71%	32.47%	90.93%	51.95%	52.60%	101.25%
	2.3.2.1	Program Perlindungan Perempuan dan Anak															
Kode	Indikator Program	Tahun 2014			Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018			
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
2.3.2.1	Persentase	-	-	-	-	-	-	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	



Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kota Surabaya 2016 – 2021

	.a	permasalahan perempuan dan anak yang ditangani															
	2.3.2.1	Persentase efektivitas pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak (PPTP2A)	-	-	-	-	-	-	-	-	65.21%	83%	127.28%	66.35%	72.70%	109.57%	
	2.3.2.1	Persentase jejaring yang berperan dalam penanganan permasalahan terhadap perempuan dan anak	-	-	-	-	-	-	-	-	10.00%	53.51%	535.10%	21.00%	100.00%	476.19%	
	2.3.2.1	Persentase berfungsinya fasilitas PKBM (Pusat Krisis Berbasis Masyarakat) di kecamatan	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
	-	Persentase indikator pengarusutamaan gender (PUG) yang terpenuhi	-	-	-	-	-	86.00%	85.71%	99.67%	-	-	-	-	-	-	
	-	Persentase indikator kota layak anak (KLA) yang terpenuhi	-	-	-	-	-	93.00%	100.00%	108.00%	-	-	-	-	-	-	
	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak																
	Kode	Indikator Program	Tahun 2014			Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
	-	Jumlah lembaga yang peduli terhadap perempuan dan anak	85 lembaga	85 lembaga	100.00%	85 lembaga	83 lembaga	97.65%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan																
	Kode	Indikator Program	Tahun 2014			Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
	-	Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dilaporkan dan ditangani	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Memelihara keamanan dan ketertiban umum																



SASARAN	3.1	Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum untuk mendukung pelaksanaan pemerintahan daerah															
	3.1.1	Meningkatkan kualitas dan intensitas pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan daerah															
	Kode	Indikator Sasaran	Tahun 2014			Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
	3.1.1.a	Angka pelanggaran Perda per 1.000 penduduk	-	-	-	-	-	-	18.34	14.38	121.59%	17.97	13.97	122.26%	17.61	2.54	185.59%
	3.1.1.1	Program Penegakan Peraturan Daerah															
			Tahun 2014			Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
	3.1.1.1.a	Persentase pelanggaran Perda terkait reklame yang ditemukan/dilaporkan dan ditindaklanjuti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
	3.1.1.1.b	Persentase pelanggaran Perda bidang terkait PKL, PSK, anjal dan gepeng, dan RHU yang ditemukan/dilaporkan dan ditindaklanjuti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
	3.1.1.1.c	Persentase pelanggaran Perda terkait HO, IMB, Kebersihan, Parkir Umum, Perda Lainnya yang ditemukan/dilaporkan dan ditindaklanjuti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
	3.1.1.1.d	Persentase wilayah kecamatan yang dilakukan pengawasan ketentraman dan ketertiban umum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
	-	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal															
			Tahun 2014			Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
	-	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman dan keindahan)	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	Persentase	-	-	-	-	-	-	100.00%	100.00%	100.00%	-	-	-	-	-	-



Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kota Surabaya 2016 – 2021

			tertanganinya kasus pelanggaran peraturan															
SASARAN	3.1.2	Meningkatkan kualitas pelaksanaan norma masyarakat, toleransi dan kerukunan antar umat beragama																
		Kode	Indikator Sasaran	Tahun 2014			Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018		
				Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
		3.1.2.a	Angka kejadian anarkis per 100.000 penduduk	-	-	-	-	-	-	1.05	0.58	144.70%	1.02	0.34	166.67%	0.99	0.37	162.25%
		3.1.2.1	Program Peningkatan Ketenteraman, Ketertiban dan Kenyamanan Lingkungan															
		Kode	Indikator Program	Tahun 2014			Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018		
				Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
		3.1.2.1.a	Persentase tertanganinya gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
3.1.2.1.b	Persentase kegiatan keagamaan yang dilaksanakan dan difasilitasi yang berjalan dengan lancar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%		
-	Persentase tertanganinya konflik di masyarakat	-	-	-	-	-	-	100.00%	100.00%	100.00%	-	-	-	-	-	-		
4	Mewujudkan penataan ruang yang terintegrasi dan memperhatikan daya dukung kota																	
	4.1	Mewujudkan sinkronisasi sistem penataan ruang dan sistem pertanian																
SASARAN	4.1.1	Meningkatkan sinkronisasi dan integrasi rencana rinci dan rencana induk sektoral dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW)																
		Kode	Indikator Sasaran	Tahun 2014			Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018		
				Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
		4.1.1.a	Persentase rencana Induk sektoral dan rencana rinci yang disusun dan telah tersinkronisasi dengan Rencana Tata Ruang Wilayah	-	-	-	-	-	-	6.90%	6.90%	100.00%	13.79%	20.69%	150.04%	20.69%	24.14%	116.66%
		4.1.1.1	Program Perencanaan Ruang Kota															
		Kode	Indikator Program	Tahun 2014			Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018		
Target	Realisasi			Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian		
4.1.1.1.a	Persentase rencana induk sektoral yang disusun	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64.29%	64.29%	100.00%	78.57%	71.43%	90.91%		
4.1.1.1.b	Persentase rencana rinci tata ruang yang disusun	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46.67%	53.33%	114.27%	53.33%	60%	112.51%		



Kode	Indikator Program	Tahun 2014			Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
		-	Program Penataan Ruang													
-	Proporsi luas area yang telah terlayani sistem informasi rencana tata ruang kota	81.12%	88.92%	109.62%	100.00%	92.31%	92.31%	20.00%	100.00%	500.00%	-	-	-	-	-	-
4.1.1.2	Program Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang Kota															
Kode	Indikator Program	Tahun 2014			Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018		
4.1.1.2.a	Persentase jumlah bangunan yang ber IMB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53.48%	54.31%	101.55%	55.13%	55.96%	101.51%
4.1.1.2.b	Persentase tindak lanjut terhadap laporan pelanggaran IMB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
4.1.2	Mewujudkan penyediaan lahan untuk pembangunan bagi kepentingan umum															
Kode	Indikator Sasaran	Tahun 2014			Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018		
4.1.2.a	Persentase lokasi lahan yang tersedia untuk pembangunan bagi kepentingan umum	-	-	-	-	-	-	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	88.89%	88.89%	100.00%	100%	100.00%
4.1.2.1	Program Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum															
Kode	Indikator Program	Tahun 2014			Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018		
4.1.2.1.a	Akumulasi luas tanah dan/atau bangunan yang disediakan bagi pembangunan infrastruktur untuk kepentingan umum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.40 Ha	6.93 Ha	288.39%	3.50Ha	12,61 Ha	360,04%
4.1.2.1.b	Akumulasi luas tanah dan/atau bangunan yang disediakan bagi pembangunan non infrastruktur untuk kepentingan umum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.30 Ha	18.88 Ha	97.82%	38.59Ha	24.56 Ha	63.65%
-	Luas tanah dan/atau bangunan yang disediakan bagi pembangunan untuk	-	-	-	-	-	-	43,367 ha	29,794 ha	68.70%	-	-	-	-	-	-



Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kota Surabaya 2016 – 2021

SASARAN	4.1.3	Meningkatnya pengamanan dan pengelolaan aset tanah dan/atau bangunan																
		Kode	Indikator Sasaran	Tahun 2014			Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018		
				Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
	4.1.3.a	Persentase aset tanah dan/atau bangunan yang terintegrasi dalam sistem pengamanan dan pengelolaan aset	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.55%	15.10%	176.61%	25.22%	26.47%	104.97%	
	4.1.3.1	Program Pengamanan Aset																
		Kode	Indikator Program	Tahun 2014			Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018		
				Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
	4.1.3.1.a	Persentase tanah aset yang telah dilakukan pemagaran, papan, patok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.52%	13.44%	92.56%	16.18%	16.21%	100.17%	
	4.1.3.1.b	Persentase tanah aset yang tersertifikasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.08%	16.56%	137.09%	12.62%	20.27%	160.63%	
	4.1.3.1.c	Persentase kasus tanah dan/ atau bangunan yang ditangani	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
	4.1.3.2	Program Pengelolaan Aset																
		Kode	Indikator Program	Tahun 2014			Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018		
				Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
	4.1.3.2.a	Persentase aset tanah dan/atau bangunan yang tercatat pemanfaatannya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.22%	49.45%	196.07%	43.92%	65.52%	149.19%	
	-	Program Sertifikasi Tanah Milik Pemerintah Kota																
		Kode	Indikator Program	Tahun 2014			Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018		
				Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
	-	Jumlah aset pemerintah kota Surabaya yang tersertifikat	647 bidang	580 bidang	89.64%	687 bidang	611 bidang	88.94%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	Rasio aset pemkot yang tersertifikat	-	-	-	-	-	-	55.72%	47.48%	85.21%	-	-	-	-	-	-	
	4.2	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup kota yang bersih dan hijau																
	4.2.1	Meningkatkan Manajemen Pengelolaan dan Kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH)																



Kode	Indikator Sasaran	Tahun 2014			Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
4.2.1.a	Persentase selisih luasan RTH yang dibangun dan dipelihara	-	-	-	-	-	-	1.86%	0.29%	15.56%	3.73%	5.72%	153.35%	5.60%	10.93%	195.13%
4.2.1.1	Program Pengelolaan dan Peningkatan Ruang Terbuka Hijau															
Kode	Indikator Program	Tahun 2014			Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
4.2.1.1.a	Persentase pertumbuhan luas RTH yang dipelihara dan diawasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.66%	5.54%	151.37%	5.40%	10.34%	191.40%
4.2.1.1.b	Persentase luas RTH yang dibangun dan ditingkatkan fungsinya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34.01%	54.05%	158.92%	43.60%	84.39%	193.56%
-	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)															
Kode	Indikator Program	Tahun 2014			Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
-	Persentase luas RTH yang berfungsi optimal terhadap keseluruhan luas RTH yang ada	-	-	-	20.00%	20.74%	103.70%	41.15%	36.88%	89.63%	-	-	-	-	-	-
-	Optimalisasi RTH	47.37%	32.76%	69.17%	51.88%	34.56%	66.62%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.2	Optimalisasi sistem pengelolaan kebersihan dan persampahan secara terpadu yang berbasis masyarakat dengan penerapan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan															
Kode	Indikator Sasaran	Tahun 2014			Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
4.2.2.a	Persentase selisih timbulan sampah ke TPA	-	-	-	-	-	-	13.80%	13.90%	100.74%	15.60%	16.98%	108.85%	17.20%	17.23%	100.17%
4.2.2.1	Program Pengelolaan Kebersihan															
Kode	Indikator Program	Tahun 2014			Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
4.2.2.1.a	Persentase pembangunan fasilitas pengelolaan sampah yang menerapkan teknologi 3R	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.69%	14.81%	192.59%	15.38%	14.81%	96.33%
4.2.2.1.b	Tingkat pertumbuhan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kebersihan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02%	4.76%	217.69%	0.04%	12.58%	28757.83 %
4.2.2.1	Persentase	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81.62%	90.37%	110.72%	82.70%	90.37%	109.28%



Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kota Surabaya 2016 – 2021

SASARAN	4.2.3	.c	pengangkutan sampah dari TPS ke TPA yang ≤ 1 hari															
		-	Program Pengelolaan Kebersihan Kota															
		Kode	Indikator Program	Tahun 2014			Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018		
				Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
		-	Jumlah sampah yang dikelola di TPA	1,192.87 ton/hari	1,455.90 ton/hari	77.95%	1,180.94 ton/hari	1,477.65 ton/hari	74.88%	1,400 ton/hari	1,571.31 ton/hari	87.76%	-	-	-	-	-	-
	-	Rata-rata jumlah sampah yang diangkat dari TPS	3,482.23 m3/hari	3,883.80 m3/hari	88.47%	3,447.41 m3/hari	3,940.40 m3/hari	85.70%	3,500 m3/hari	4,458.88 m3/hari	127.40%	-	-	-	-	-	-	
	-	Cakupan layanan kebersihan	0.99	1.05	106.06%	1	1.06	105.71%	187 TPS	187 TPS	100.00%	-	-	-	-	-	-	
	4.2.3	Meningkatkan kualitas udara dan air																
	Kode	Indikator Sasaran	Tahun 2014			Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018			
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
	4.2.3.a	Indeks kualitas udara ambien	-	-	-	-	-	-	84.00%	89.57%	106.63%	84.25	90.26	107.13%	84.5	90.26	106.82%	
	4.2.3.b	Indeks kualitas air permukaan	-	-	-	-	-	-	51.48%	54.90%	106.64%	51.88	57.5	110.83%	52.28	57.62	110.21%	
	4.2.3.1	Program Pengendalian dan Pengawasan Dampak Lingkungan																
	Kode	Indikator Program	Tahun 2014			Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018			
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
	4.2.3.1.a	Persentase ketaatan/ kepatuhan terhadap aspek lingkungan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.00%	50%	100.00%	60.00%	63.50%	105.83%	
	-	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup																
Kode	Indikator Program	Tahun 2014			Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018				
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian		
-	Tingkat kualitas air limbah industri BOD	72.00%	73.26%	101.75%	76.00%	77.91%	102.51%	77.00%	78.07%	101.39%	-	-	-	-	-	-		
-	Tingkat kualitas air limbah industri COD	66.00%	67.67%	102.53%	70.00%	71.77%	102.53%	71.00%	72.49%	102.10%	-	-	-	-	-	-		
-	Tingkat kualitas air limbah industri TSS	66.00%	67.40%	102.12%	72.00%	74.07%	102.88%	73.00%	74.37%	101.87%	-	-	-	-	-	-		
-	Tingkat kualitas air limbah domestik BOD	46.00%	49.50%	107.61%	52.00%	56.02%	107.73%	53.00%	53.69%	101.30%	-	-	-	-	-	-		
-	Tingkat kualitas air limbah domestik TSS	48.00%	48.51%	101.06%	54.00%	55.26%	102.33%	55.00%	56.26%	102.30%	-	-	-	-	-	-		
-	Tingkat kualitas air limbah rumah sakit BOD	63.00%	64.58%	102.51%	70.00%	72.09%	102.99%	71.00%	72.59%	102.24%	-	-	-	-	-	-		
-	Tingkat kualitas air limbah rumah sakit	62.00%	63.87%	103.02%	70.00%	72.65%	103.79%	71.00%	71.44%	100.61%	-	-	-	-	-	-		



			COD																
		-	Tingkat kualitas air limbah rumah sakit TSS	60.00%	61.18%	101.97%	72.00%	74.01%	102.79%	73.00%	74.61%	102.21%	-	-	-	-	-		
		-	Tingkat kualitas air limbah hotel BOD	48.00%	49.83%	103.81%	56.00%	58.42%	104.32%	57.00%	57.42%	100.74%	-	-	-	-	-		
		-	Tingkat kualitas air limbah hotel COD	36.00%	36.57%	101.58%	46.00%	47.05%	102.28%	47.00%	48.10%	102.34%	-	-	-	-	-		
		-	Tingkat kualitas air limbah hotel TSS	42.00%	43.72%	104.10%	50.00%	52.58%	105.16%	51.00%	52.66%	103.26%	-	-	-	-	-		
		-	Tingkat kualitas udara emisi di kawasan industri SO2	80.00%	81.37%	101.71%	85.00%	87.15%	102.53%	86.00%	88.19%	102.55%	-	-	-	-	-		
		-	Tingkat kualitas udara emisi di kawasan industri NO2	70.00%	70.85%	101.21%	85.00%	86.24%	101.46%	86.00%	86.77%	100.90%	-	-	-	-	-		
	4.3	Mewujudkan sistem ketahanan yang handal terhadap bencana																	
SASARAN	4.3.1	Pengembangan sistem penanggulangan bencana yang antisipatif dan tanggap.																	
		Kode	Indikator Sasaran	Tahun 2014			Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018			
				Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
		4.3.1.a	Indeks penanggulangan bencana	-	-	-	-	-	-	55.67%	66.59%	119.62%	61.88%	98.15%	158.61%	68.13%	89.09%	130.76%	
		4.3.1.1	Program Penanggulangan Bencana																
			Kode	Indikator Program	Tahun 2014			Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018		
					Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
		4.3.1.1.a	Angka kejadian kebakaran gedung/bangunan per 1 juta penduduk Surabaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54 kejadian	51.06 kejadian	105.44%	54 kejadian	51.38 kejadian	104.86%	
		4.3.1.1.b	Angka kejadian kebakaran non bangunan per 1 juta penduduk Surabaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110 kejadian	73.5 kejadian	133.18%	110 kejadian	108.69 kejadian	101.00%	
		4.3.1.1.c	Persentase waktu tanggap kejadian kebakaran kurang dari 15 menit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95.00%	100.00%	105.26%	96.00%	100.00%	104.17%	
	4.3.1.1.d	Persentase waktu tanggap ≤ 24 jam penanggulangan kejadian bencana alam	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%		
	4.3.1.1	Persentase	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.00%	30.52%	105.24%	49.00%	40.91%	83.49%		



Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kota Surabaya 2016 – 2021

	.e	kelurahan tangguh bencana															
	-	Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran															
	Kode	Indikator Program	Tahun 2014			Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
	-	Pencapaian waktu tanggap kurang dari 15 menit	82.00%	89.93%	109.67%	85.00%	99.34%	116.87%	90.00%	100.00%	111.11%	-	-	-	-	-	-
	-	Frekuensi kejadian kebakaran per satu juta penduduk	101 kali	209 kejadian	tidak tercapai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	Frekuensi kebakaran per satu juta penduduk	-	-	-	101 kali	206 kali	tidak tercapai (-3.96%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	Jangkauan pelayanan wilayah manajemen kebakaran	91.00%	92.56%	101.71%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	Cakupan pelayanan wilayah manajemen kebakaran	-	-	-	95.00%	92.56%	97.43%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	Jumlah penduduk Surabaya yang memiliki pengetahuan mengenai pencegahan dan penanganan kebakaran	-	-	-	-	-	-	7,427 Orang	10,284 Orang	138.00%	-	-	-	-	-	-
	-	Persentase pemenuhan kebutuhan jumlah sarana prasarana kebakaran eksisting dibanding kebutuhan ideal	-	-	-	-	-	-	66.00%	73.08%	111.00%	-	-	-	-	-	-
	-	Persentase pos pemadam kebakaran dalam kondisi baik	-	-	-	-	-	-	100.00%	100.00%	100.00%	-	-	-	-	-	-
5	Memantapkan sarana dan prasarana lingkungan dan permukiman yang ramah lingkungan																
	5.1	Memantapkan sarana prasarana pada kawasan perumahan dan permukiman untuk mewujudkan lingkungan yang berkualitas															
		5.1.1	Meningkatkan penyediaan serta pengelolaan lingkungan perumahan dan kawasan permukiman layak huni														



Kode	Indikator Sasaran	Tahun 2014			Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
5.1.1.a	Kawasan permukiman yang telah ditingkatkan kualitas lingkungannya	-	-	-	-	-	-	3,569.99 Ha	3,330.17 Ha	93.28%	5,124.52 Ha	4,053.29 Ha	79.10%	6,717.51 Ha	6,086.26 Ha	90.60%
5.1.1.1	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman															
Kode	Indikator Program	Tahun 2014			Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
5.1.1.1.a	Persentase rumah tinggal tapak tidak layak huni yang diperbaiki	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.00%	65.72%	328.60%	40.00%	91.06%	227.65%
5.1.1.1.b	Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.00%	12.02%	100.17%	23.00%	22.33%	97.10%
5.1.1.1.c	Persentase pembangunan (rehabilitasi) jalan lingkungan dan kelengkapannya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49.20%	55.21%	112.22%	55.35%	62.65%	113.19%
5.1.1.1.d	Persentase pelayanan sanitasi permukiman	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46.00%	47.50%	103.26%	59.00%	93.73%	158.86%
-	Program Perumahan dan Permukiman															
Kode	Indikator Program	Tahun 2014			Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
-	Luas kawasan kumuh yang mendapat peningkatan layanan prasarana permukiman	508 Ha	510.91 Ha	100.57%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Luas kawasan perumahan permukiman yang mendapat peningkatan layanan sarana prasarana	-	-	-	604 Ha	630.97 Ha	104.47%	591.51 Ha	674.04 Ha	113.95%	-	-	-	-	-	-
-	Jumlah MBR yang mendapatkan manfaat rumah layak huni	3,361 KK	3,242 KK	96.46%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Jumlah MBR yang telah mendapatkan	-	-	-	3,649 KK	3,479 KK	95.34%	3,691 KK	3,706 KK	100.41%	-	-	-	-	-	-



Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kota Surabaya 2016 – 2021

			rumah layak huni																
		-	Rasio kebutuhan makam selama lima tahun ke depan terhadap angka ketersediaan makam	0.47	0.21	155.32%	0.85	0.24	171.56%	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5.2	Meningkatkan upaya pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif yang ramah lingkungan																	
SASARAN	5.2.1	Meningkatkan upaya penerapan teknologi dan peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif																	
		Kode	Indikator Sasaran	Tahun 2014			Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018			
				Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
		5.2.1.a	Persentase upaya penerapan teknologi untuk pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif	-	-	-	-	-	-	59.18%	65.31%	110.35%	67.35%	81.63%	121.20%	75.51%	89.80%	118.92%	
		5.2.1.b	Persentase peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif	-	-	-	-	-	-	28.57%	35.71%	125.01%	42.86%	42.86%	100.00%	57.14%	50.00%	87.50%	
		5.2.1.1	Program Pengembangan dan Pemanfaatan Energi Alternatif																
			Kode	Indikator Program	Tahun 2014			Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018		
					Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
		5.2.1.1.a	Akumulasi penerapan teknologi dalam pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif terbarukan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33 unit	41 unit	124.24%	37.00unit	45 unit	121.62%	
		5.2.1.1.b	Akumulasi entitas lingkungan yang berperan serta dalam pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 lingkungan	6 lingkungan	100.00%	8.00lingkungan	7 lingkungan	87.50%	
	-	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi																	
		Kode	Indikator Program	Tahun 2014			Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018			
				Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
	-	Proporsi entitas yang membangun dan menggunakan energi terbaru dan terbarukan	-	-	-	1 lokasi	1 lokasi	100.00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	Rasio jumlah	-	-	-	5.00%	6.85%	137.00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	



			gedung minimal 4 tingkat dengan luas bangunan minimal 2500 m2 yang mendapat grade A dalam hal penggunaan teknologi hijau (ramah lingkungan)														
		-	Jumlah mobil yang menggunakan BBG yang terdaftar	-	-	-	150 mobil	257 mobil	171.33%	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	Jumlah perusahaan energi baru dan terbarukan yang dikembangkan	-	-	-	-	-	-	4 kegiatan	4 kegiatan	100.00%	-	-	-	-	-
5.3	Meningkatkan upaya konservasi energi																
SASARAN	5.3.1	Meningkatkan upaya penerapan konservasi energi															
	Kode	Indikator Sasaran	Tahun 2014			Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
	5.3.1.a	Persentase selisih kegiatan dan/atau usaha yang telah menerapkan konservasi energi	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	100.00%	8.85%	9.65%	109.04%	17.70%	114.91%	649.22%
	5.3.1.1	Program Upaya Konservasi Energi															
	Kode	Indikator Program	Tahun 2014			Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
	5.3.1.1.a	Akumulasi kegiatan dan/atau usaha yang telah menerapkan konservasi energi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	124 kegiatan dan /atau usaha	125 kegiatan dan /atau usaha	100.81%	134 kegiatan dan /atau usaha	245 kegiatan dan /atau usaha	182.84%
	-	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi															
	Kode	Indikator Program	Tahun 2014			Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
-	Proporsi entitas yang membangun dan menggunakan energi terbaru dan terbarukan	-	-	-	1 lokasi	1 lokasi	100.00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	Rasio jumlah gedung minimal 4 tingkat dengan luas bangunan minimal 2500 m2 yang mendapat grade A	-	-	-	5.00%	6.85%	137.00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	



Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kota Surabaya 2016 – 2021

			dalam hal penggunaan teknologi hijau (ramah lingkungan)																
		-	Jumlah mobil yang menggunakan BBG yang terdaftar	-	-	-	150 mobil	257 mobil	171.33%	-	-	-	-	-	-	-	-		
		-	Jumlah perusahaan energi baru dan terbarukan yang dikembangkan	-	-	-	-	-	-	4 kegiatan	4 kegiatan	100.00%	-	-	-	-	-		
6	Memperkuat nilai-nilai budaya lokal dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat																		
	6.1	Melestarikan budaya lokal																	
SASARAN	6.1.1	Meningkatkan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan budaya lokal																	
		Kode	Indikator Sasaran	Tahun 2014			Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018			
				Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
		6.1.1.a	Persentase budaya yang dapat dilestarikan	-	-	-	-	-	-	91.19%	89.79%	98.46%	91.39%	90.31%	98.82%	91.39%	90.84%	99.40%	
		6.1.1.1	Program Perlindungan Budaya Lokal																
			Kode	Indikator Program	Tahun 2014			Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018		
					Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
		6.1.1.1.a	Persentase cagar budaya yang terpelihara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91.50%	91.58%	100.09%	91.50%	91.58%	100.08%	
		-	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya																
			Kode	Indikator Program	Tahun 2014			Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018		
					Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
		-	Persentase bangunan dan situs cagar budaya yang terawat dengan baik	-	-	-	-	-	-	-	91.50%	91.58%	100.08%	-	-	-	-	-	-
		6.1.1.2	Program Pengembangan dan Pemanfaatan Budaya Lokal																
			Kode	Indikator Program	Tahun 2014			Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018		
				Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
	6.1.1.2.a	Persentase kelompok seni terdaftar yang layak tampil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44.00%	38.55%	87.61%	45.00%	57.63%	128.07%	
	6.1.1.2.b	Persentase hotel, restoran, dan ruang publik yang menampilkan budaya lokal pada 17 lokasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52.90%	52.94%	100.08%	64.70%	100.00%	154.56%	
	-	Program Pengelolaan Keragaman Budaya																	
		Kode	Indikator Program	Tahun 2014			Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018			



			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian		
		-	Jumlah kelompok seni yang layak ditampilkan dalam even/festival seni budaya	200 kelompok seni	211 kelompok seni	105.50%	225 kelompok seni	232 kelompok seni	103.11%	-	-	-	-	-	-	-	-		
		-	Persentase kelompok seni dan budaya yang difasilitasi	-	-	-	-	-	40.00%	41.97%	104.92%	-	-	-	-	-	-		
6.2	Meningkatkan minat dan budaya baca masyarakat																		
SASARAN	6.2.1	Mewujudkan peningkatan minat dan budaya baca masyarakat melalui peningkatan akses baca																	
		Kode	Indikator Sasaran	Tahun 2014			Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018			
				Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
		6.2.1.a	Persentase koleksi buku yang dimanfaatkan	-	-	-	-	-	-	73.10%	89.58%	122.54%	74.60%	133.89%	179.48%	76.10%	90.06%	118.35%	
		6.2.1.b	Persentase pengunjung layanan baca yang meminjam buku	-	-	-	-	-	-	65.20%	65.21%	100.01%	68.50%	100.00%	145.99%	71.90%	100.00%	139.08%	
		6.2.1.c	Persentase siswa yang mempunyai kemampuan membaca sesuai dengan reading text levelling	-	-	-	-	-	-	tidak ditetapkan	72.97%	tidak ditetapkan	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
		6.2.1.1	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan																
			Kode	Indikator Program	Tahun 2014			Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018		
					Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
			6.2.1.1.a	Persentase pertumbuhan event literasi yang diselenggarakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.00%	13.42%	134.20%	10.00%	8.33%	83.33%
		6.2.1.1.b	Persentase koleksi buku	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86.18%	86.63%	100.52%	88.63%	87.45%	98.67%	
		6.2.1.1.c	Persentase siswa yang terlibat dalam tes reading text levelling	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.50%	20.55%	100.24%	40.40%	40.93%	101.31%	
		6.2.1.1.d	Persentase perpustakaan yang berhasil dibina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.90%	12.90%	100.00%	17.85%	31.06%	173.99%	
		-	Jumlah kunjungan perpustakaan	1,936,800 Orang	3,243,366 Orang	167.46%	2,246,064 Orang	4,711,419 Orang	209.76%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	Rata-rata kunjungan layanan baca per	-	-	-	-	-	-	205,889 pengunjung	396,869 pengunjung	192.76%	-	-	-	-	-		



Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kota Surabaya 2016 – 2021

		bulan			ng/bulan			ng/bulan									
SASARAN	6.3	Mewujudkan wawasan, karakter, dan nilai-nilai kebangsaan generasi muda															
	6.3.1	Mewujudkan wawasan, karakter, dan nilai-nilai kebangsaan															
	Kode	Indikator Sasaran	Tahun 2014			Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
	6.3.1.a	Persentase pertumbuhan partisipasi lembaga/komunitas dalam kegiatan yang mendorong nilai-nilai kebangsaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.00%	5.38%	134.50%	4.00%	3.77%	94.14%
	6.3.1.1	Program Pengembangan Wawasan dan Karakter Kebangsaan dalam Konteks Budaya Lokal															
	Kode	Indikator Program	Tahun 2014			Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
6.3.1.1.a	Persentase partisipasi peserta dalam kegiatan yang mendorong nilai-nilai kebangsaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.00%	14.59%	97.27%	15.50%	29.63%	191.17%	
6.3.1.1.b	Persentase kader wawasan kebangsaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%	96.88%	96.88%	100.00%	98.49%	98.49%	
7	Mewujudkan Surabaya sebagai pusat penghubung perdagangan dan jasa antar pulau dan internasional																
7.1	Meningkatkan arus perdagangan internasional dan antar pulau dari dan menuju Surabaya																
SASARAN	7.1.1	Peningkatan sistem manajemen city logistik															
	Kode	Indikator Sasaran	Tahun 2014			Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
	7.1.1.a	Tingkat pertumbuhan ekonomi kategori transportasi dan pergudangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.59%	5.64%	100.89%	5.59%	6.96%	124.56%
	7.1.1.1	Program Pengembangan Hub dan Simpul Logistik untuk Mendukung Distribusi Komoditas Potensial															
	Kode	Indikator Program	Tahun 2014			Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
7.1.1.1.a	Persentase realisasi pengembangan hub dan simpul logistik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.00%	25.00%	100.00%	75.00%	75.00%	100.00%	
7.1.1.1.b	Tingkat kelengkapan data gudang terdaftar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.00%	58.27%	194.23%	50.00%	69.59%	139.19%	
7.1.1.2	Program Manajemen Lalu Lintas Angkutan Barang																
Kode	Indikator Program	Tahun 2014			Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018			
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
7.1.1.2.a	Rata-rata waktu tempuh kendaraan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	112.88 menit	44.34 menit	160.72%	106.24m enit	100.22 menit	105.66%	



			barang dari dan menuju hub																
		7.1.1.3	Program Peningkatan Investasi Fasilitas Pendukung Logistik																
		Kode	Indikator Program	Tahun 2014			Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018			
				Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
		7.1.1.3.a	Tingkat pertumbuhan investasi fasilitas pendukung logistik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.00%	50.00%	277.78%	24.00%	100.00%	416.67%	
SASARAN	7.1.2	Meningkatnya jaringan bisnis (G to G dan G to B) jasa dan perdagangan komoditi barang dalam skala internasional dan antar pulau yang ditunjang dengan pusat pelayanan informasi yang terintegrasi																	
		Kode	Indikator Sasaran	Tahun 2014			Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018			
				Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
		7.1.2.a	Persentase realisasi tindak lanjut MoU bidang Perdagangan (G to G dan G to B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.57%	42.86%	150.02%	42.86%	85.71%	199.99%
		7.1.2.1	Program Kerjasama Bidang Perdagangan																
		Kode	Indikator Program	Tahun 2014			Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018			
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian			
		7.1.2.1.a	Persentase MoU yang memuat sektor perdagangan yang telah ditandatangani	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42.86%	57.14%	133.32%	57.14%	57.14%	100.01%	
		7.1.2.1.b	Persentase MoU yang memuat sektor perdagangan tertandatangani yang telah terealisasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66.67%	75.00%	112.49%	75.00%	75.00%	100.00%	
8	Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik																		
	8.1	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik																	
SASARAN	8.1.1	Meningkatkan kapasitas dan kompetensi aparatur pemerintahan																	
		Kode	Indikator Sasaran	Tahun 2014			Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018			
				Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
		8.1.1.a	Angka pelanggaran disiplin aparatur per 1.000 pegawai	-	-	-	-	-	-	1.43	2.00	60.06%	1.37	1.03	124.82%	1.32	1.14	113.37%	
		8.1.1.b	Persentase pelanggaran tata kelola administrasi keuangan pada kasus yang sama yang berhasil diturunkan	-	-	-	-	-	-	3.00%	3.05%	101.52%	6.10%	6.60%	108.20%	9.10%	31.98%	351.43%	
		8.1.1.c	Persentase aparatur (struktural & non struktural) yang	-	-	-	-	-	-	-	53.98%	39.20%	72.62%	61.83%	58.38%	94.42%	69.69%	67.22%	96.46%



Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kota Surabaya 2016 – 2021

kompeten																
8.1.1.1 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal																
Kode	Indikator Program	Tahun 2014			Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
8.1.1.1.a	Persentase penanganan disiplin aparatur wilayah I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
8.1.1.1.b	Persentase penanganan tata kelola administrasi keuangan wilayah I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
8.1.1.1.c	Persentase penanganan disiplin aparatur wilayah II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
8.1.1.1.d	Persentase penanganan tata kelola administrasi keuangan wilayah II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
8.1.1.1.e	Persentase penanganan disiplin aparatur wilayah III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
8.1.1.1.f	Persentase penanganan tata kelola administrasi keuangan wilayah III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
- Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH																
Kode	Indikator Program	Tahun 2014			Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
-	Jumlah kasus pelanggaran disiplin aparatur	203 kasus	27 kasus	186.69%	197 kasus	27 kasus	186.29%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Persentase penanganan pengaduan	-	-	-	-	-	-	100.00%	100.00%	100.00%	-	-	-	-	-	-
-	Persentase penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan	-	-	-	-	-	-	89.80%	83.62%	93.11%	-	-	-	-	-	-
8.1.1.2 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur																
Kode	Indikator Program	Tahun 2014			Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
8.1.1.2.a	Persentase pejabat struktural yang mengikuti diklat struktural	96.71%	79.81%	82.52%	99.28%	84.32%	84.93%	85.84%	69.29%	80.72%	88.08%	71.91%	81.64%	90.33%	78.24%	86.62%
8.1.1.2.b	Persentase pegawai yang mengikuti	-	-	-	-	-	-	22.11%	24.36%	110.16%	35.58%	49.44%	138.95%	49.05%	70.46%	143.66%



				diklat teknis dan fungsional															
		8.1.1.2.c	Persentase terbentuknya dan berfungsinya assessment centre	-	-	-	-	-	-	-	-	20.00%	20.00%	100.00%	40.00%	70.00%	175.00%		
		8.1.1.2.d	Persentase aparatur yang memiliki kinerja baik	-	-	-	-	-	-	-	-	91.00%	96.83%	106.41%	92.00%	96.68%	105.08%		
		-	Persentase penataan jabatan struktural	90.64%	88.78%	97.95%	92.95%	96.20%	103.50%	-	-	-	-	-	-	-	-		
		-	Persentase data pada sistem kepegawaian yang update	-	-	-	-	-	-	100.00%	100.00%	100.00%	-	-	-	-	-		
SASARAN	8.1.2	Meningkatkan tata kelola administrasi pemerintahan yang baik																	
		Kode	Indikator Sasaran	Tahun 2014			Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018			
				Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
		8.1.2.a	Persentase Prosedur Operasi Standar (POS) yang diimplementasikan dengan baik	-	-	-	-	-	-	-	tidak ditetapkan	7.04%	tidak ditetapkan	10.00%	20.03%	200.30%	20.00%	28.46%	142.28%
		8.1.2.b	Tingkat Kepuasan Pelayanan Kedinasan	-	-	-	-	-	-	75.00%	79.18%	105.57%	76.00%	78.55%	103.36%	77.00%	87.32%	113.41%	
		8.1.2.c	Persentase kecamatan dan kelurahan yang tertib administrasi	-	-	-	-	-	-	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
		8.1.2.d	Persentase kegiatan DPRD yang terfasilitasi	-	-	-	-	-	-	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
		8.1.2.e	Indeks kepuasan SKPD terhadap pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran	-	-	-	-	-	-	60.00%	74.24%	123.73%	62.00%	73.43%	118.44%	64.00%	86.63%	135.36%	
		8.1.2.f	Persentase kerjasama non perdagangan yang ditindaklanjuti	-	-	-	-	-	-	66.67%	83.33%	124.99%	73.68%	81.29%	110.33%	80.00%	91.40%	114.25%	
		8.1.2.g	Tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan	-	-	-	-	-	-	90.55%	93.67%	103.45%	90.84%	91.18%	100.37%	91.53%	98.04%	107.11%	



-	Persentase SKPD yang tidak terjadi tumpang tindih pada tugas pokok dan fungsinya	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%	100.00%	100.00%	-	-	-	-	-
8.1.2.2	Program Penataan Daerah Otonom																
Kode	Indikator Program	Tahun 2014			Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018			
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
8.1.2.2.a	Persentase kelurahan yang data profil kelurahannya update	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
8.1.2.2.b	Persentase nama rupabumi yang memenuhi syarat untuk diajukan pembakuan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42.51%	32.50%	76.45%	56.89%	64%	112.50%	
-	Persentase penegasan batas wilayah kecamatan dan kelurahan	44.00%	44.00%	100.00%	50.00%	50.00%	100.00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	Persentase kecamatan dan kelurahan yang tertib administrasi	-	-	-	-	-	-	100.00%	100.00%	100.00%	-	-	-	-	-	-	
8.1.2.3	Program Penataan, Penyelamatan, dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah																
Kode	Indikator Program	Tahun 2014			Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018			
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
8.1.2.3.a	Persentase jumlah arsip yang diakuisisi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.00%	27.42%	137.10%	20.00%	50.78%	253.91%	
8.1.2.3.b	Persentase perangkat daerah, unit kerja, BUMD dan sekolah negeri yang tertib sistem tata kearsipan sesuai ketentuan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.60%	22.51%	99.60%	41.70%	43.89%	105.26%	
-	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah																
Kode	Indikator Program	Tahun 2014			Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018			
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
-	Persentase SKPD dan unit kerja yang diakuisisi dokumen arsip	-	-	-	-	-	-	19.00%	19.44%	102.34%	-	-	-	-	-	-	
-	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan																
Kode	Indikator Program	Tahun 2014			Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018			
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	



Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kota Surabaya 2016 – 2021

-	Persentase unit kerja yang melaksanakan sistem kearsipan pola baru (sistem baku)	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Persentase SKPD dan unit kerja yang tertib sistem tata kearsipan	-	-	-	-	-	-	10.70%	10.71%	100.13%	-	-	-	-	-	-
8.1.2.4 Program Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah																
Kode	Indikator Program	Tahun 2014			Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
8.1.2.4.a	Persentase kajian/rekomendasi terkait perekonomian yang memanfaatkan sebagai dasar kebijakan/keputusan	-	-	-	-	-	-	25.00%	25.00%	100.00%	25.00%	50.00%	200.00%	25.00%	40.00%	160.00%
8.1.2.4.b	Persentase kajian/rekomendasi di sektor kesejahteraan rakyat yang memanfaatkan sebagai dasar kebijakan/keputusan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
-	Persentase BUMD yang berkinerja sesuai standar	-	-	-	-	-	-	50.00%	100.00%	200.00%	-	-	-	-	-	-
8.1.2.5 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Fasilitas Perwakilan Rakyat Daerah																
Kode	Indikator Program	Tahun 2014			Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
8.1.2.5.a	Persentase kegiatan DPRD terkait rapat dan perundang-undangan yang terfasilitasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
8.1.2.5.b	Persentase kegiatan DPRD terkait informasi dan protokol yang terfasilitasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
-																
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah																
Kode	Indikator Program	Tahun 2014			Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
-	Jumlah Raperda	6	4	66.67%	6	6	100.00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-



	usul prakarsa DPRD yang ditindaklanjuti	Raperda	Raperda		Raperda	Raperda										
-	Persentase Raperda yang ditindaklanjuti dalam rapat paripurna	91.00%	83.33%	91.57%	92.00%	94.44%	102.65%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti DPRD	86.00%	65.36%	76.00%	87.00%	87.83%	100.95%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Jumlah publik hearing yang dilaksanakan	5 kali	5 kali	100.00%	5 kali	5 kali	100.00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Persentase jumlah kegiatan DPRD yang terfasilitasi dengan baik	-	-	-	-	-	-	100.00%	100.00%	100.00%	-	-	-	-	-	-
8.1.2.6	Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana kedinasan															
Kode	Indikator Program	Tahun 2014			Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
8.1.2.6.a	Persentase pemanfaatan aset	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91.00%	95.70%	105.16%	92.00%	98.27%	106.81%
8.1.2.6.b	Persentase sistem informasi pemerintah kota surabaya yang diintegrasikan dengan sistem informasi barang daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.00%	20.00%	100.00%	40.00%	40.00%	100.00%
8.1.2.6.c	Persentase kendaraan yang berfungsi dengan baik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77.00%	76.55%	99.42%	79.00%	100.00%	126.58%
8.1.2.6.d	Persentase gedung pemerintahan dalam kondisi baik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74.36%	74.67%	100.42%	80.77%	81.22%	100.56%
8.1.2.6.e	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%	94.29%	94.29%	100.00%	94.71%	94.71%
8.1.2.6.f	Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%	99.35%	99.35%	100.00%	99.11%	99.39%
-	Program Pengelolaan Sarana dan Prasarana Aparatur															
Kode	Indikator Program	Tahun 2014			Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018		



Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kota Surabaya 2016 – 2021

		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
-	Persentase kendaraan yang berfungsi dengan baik	-	-	-	-	-	-	75.00%	76.51%	102.01%	-	-	-	-	-	-
-	Persentase pemanfaatan barang sesuai dengan rencana	-	-	-	-	-	-	90.00%	96.18%	106.87%	-	-	-	-	-	-
-	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur															
Kode	Indikator Program	Tahun 2014			Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
-	Indeks kepuasan karyawan terhadap Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	-	-	-	-	-	70.00%	74.24%	106.06%	-	-	-	-	-	-
-	Persentase gedung pemerintahan dalam kondisi baik	-	-	-	-	-	-	67.95%	71.18%	104.75%	-	-	-	-	-	-
8.1.2.7	Program Pendukung Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah															
Kode	Indikator Program	Tahun 2014			Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
8.1.2.7.a	Persentase terlaksananya urusan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sesuai dengan standar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
-	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah															
Kode	Indikator Program	Tahun 2014			Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
-	Persentase terlayannya urusan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sesuai dengan standar	-	-	-	-	-	-	100.00%	100.00%	100.00%	-	-	-	-	-	-
8.1.2.8	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah															
Kode	Indikator Program	Tahun 2014			Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
8.1.2.8.a	Persentase bidang MoU kerjasama (non	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42.86%	72.88%	170.04%	42.86%	70.59%	164.69%



			perdagangan) antar pemerintah daerah dan pihak ketiga yang ditindaklanjuti														
	8.1.2.8 .b	Persentase bidang MoU kerjasama (non perdagangan) luar negeri yang ditindaklanjuti	-	-	-	-	-	-	-	-	33.33%	53.85%	161.57%	33.33%	80.00%	240.02%	
	8.1.2.8 .c	Persentase MoU kerjasama (non perdagangan) yang dievaluasi	-	-	-	-	-	-	-	-	42.10%	45.71%	108.57%	60.00%	60.00%	100.00%	
	-	Persentase MoU kerjasama antar Pemerintah Daerah yang ditindaklanjuti dengan program kerja	94.44%	97.30%	103.03%	100.00%	100.00%	100.00%	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	Persentase MoU kerjasama antar daerah dan pihak ketiga yang memberikan manfaat	-	-	-	-	-	80.00%	85.71%	107.14%	-	-	-	-	-	-	
	-	Persentase MoU kerjasama luar negeri yang memberikan manfaat	-	-	-	-	-	50.00%	75.00%	150.00%	-	-	-	-	-	-	
	-	Persentase MoU yang dievaluasi	-	-	-	-	-	22.22%	32.35%	145.60%	-	-	-	-	-	-	
	8.1.2.9	Program Perencanaan Pembangunan Daerah															
	Kode	Indikator Program	Tahun 2014			Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
	8.1.2.9 .a	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan strategis dan/atau sektoral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%	96.15%	96.15%	100.00%	98.61%	98.61%
	8.1.2.9 .b	Persentase PD lingkup bidang kesejahteraan rakyat dan aparatur pemerintahan yang dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65.00%	76.47%	117.65%	70.00%	100.00%	142.86%



Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kota Surabaya 2016 – 2021

			perencanaan tahunannya berkualitas														
	8.1.2.9.c	Persentase PD lingkup bidang fisik dan prasarana yang dokumen perencanaan tahunannya berkualitas	-	-	-	-	-	-	-	-	65.00%	77.78%	119.66%	70.00%	100.00%	142.86%	
	8.1.2.9.d	Persentase PD lingkup bidang ekonomi yang dokumen perencanaan tahunannya berkualitas	-	-	-	-	-	-	-	-	65.00%	91.67%	141.03%	70.00%	100.00%	142.86%	
	-	Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	Persentase kualitas penyusunan perencanaan strategis	-	-	-	-	-	60.00%	100.00%	166.67%	-	-	-	-	-	-	
	-	Persentase kualitas monitoring dan evaluasi	-	-	-	-	-	88.00%	97.75%	111.08%	-	-	-	-	-	-	
	8.1.2.10	Program Pengendalian Pembangunan Daerah															
	Kode	Indikator Program	Tahun 2014			Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
	8.1.2.10.a	Persentase ketepatan pelaksanaan kegiatan di aspek waktu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90.00%	92.01%	102.23%	90.00%	92.29%	102.55%
	8.1.2.10.b	Tingkat capaian keberhasilan kegiatan di aspek output	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96.00%	97.50%	101.56%	97.00%	94.45%	97.37%
	8.1.2.11	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan															
	Kode	Indikator Program	Tahun 2014			Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
	8.1.2.11	Persentase realisasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	103.80%	103.80%



		1.a	produk hukum daerah yang dihasilkan															
		8.1.2.1 1.b	Persentase produk hukum daerah yang dievaluasi	-	-	-	-	-	-	-	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%		
		8.1.2.1 1.c	Persentase permasalahan hukum yang ditindaklanjuti	-	-	-	-	-	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%		
		8.1.2.1 1.d	Persentase produk hukum yang disebarluaskan	-	-	-	-	-	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%		
		-	Persentase rancangan produk hukum yang dapat diselesaikan	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	-	-	-	-	-		
		8.1.2.1 2	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran															
		Kode	Indikator Program	Tahun 2014			Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018		
				Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
		8.1.2.1 2.a	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	-	-	-	-	-	-	70.00%	77.34%	110.48%	72.00%	77.23%	107.26%	74.00%	86.97%	117.53%
		8.1.2.1 3	Program Pengembangan Data, Informasi dan Statistik															
		Kode	Indikator Program	Tahun 2014			Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018		
				Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
		8.1.2.1 3.a	Rata-rata toleransi (margin of error) pada data-data terkait perhitungan indikator kinerja dalam RPJMD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.00%	5.76%	84.80%	5.00%	2.67%	146.52%
		8.1.3	Meningkatkan kualitas pelayanan publik															
		Kode	Indikator Sasaran	Tahun 2014			Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018		
				Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
		8.1.3.a	Nilai kepuasan masyarakat unit pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	-	-	-	-	-	-	69	87.11	126.25%	70	77.63	110.90%	71	84.65	119.22%
		8.1.3.b	Nilai Kepuasan Masyarakat unit	-	-	-	-	-	-	76	82.81	108.96%	76.00%	75.30%	99.08%	76.00%	83.69%	110.11%



Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kota Surabaya 2016 – 2021

			elayanan perizinan dan non perizinan														
	8.1.3.c	Tingkat kepuasan penyelenggaraan TIK dalam pelayanan publik administratif	-	-	-	-	-	-	Cukup	Baik	100.00%	75.00(cukup)	97.63	130.17%	75.00(cukup)	97.59	130.12%
	8.1.3.d	Tingkat persepsi masyarakat atas pelaksanaan pembangunan kota	-	-	-	-	-	-	70.00%	73.63%	105.19%	70.00%	74.73%	106.76%	75.00%	75.61%	100.82%
	8.1.3.1	Program Penataan Administrasi Kependudukan															
	Kode	Indikator Program	Tahun 2014			Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
	8.1.3.1.a	Persentase ketepatan waktu pengurusan dokumen pencatatan sipil (akta kelahiran dan akta kematian)	-	-	-	-	-	-	99.56%	50.43%	50.65%	99.57%	95.33%	95.74%	99.65%	100.00%	100.35%
	8.1.3.1.b	Cakupan penerbitan akte kelahiran (berdasarkan data SIAK)	90.00%	99.92%	111.02%	90.00%	99.55%	110.62%	99.56%	99.12%	99.56%	99.57%	98.32%	98.74%	99.60%	100.00%	100.40%
	8.1.3.1.c	Persentase ketepatan waktu pelayanan dokumen pendaftaran penduduk (KTP dan KK)	-	-	-	-	-	-	85.00%	100.00%	118.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	99.46%	99.46%
	8.1.3.1.d	Cakupan penerbitan akte kematian (berdasarkan data SIAK)	-	-	-	-	-	-	85.51%	96.68%	113.06%	86.55%	93.95%	108.55%	87.50%	100.00%	114.29%
	8.1.3.1.e	Persentase ketepatan waktu pelayanan dokumen pencatatan sipil (akta kelahiran dan akta kematian)	-	-	-	-	-	-	93.91%	95.56%	101.75%	93.92%	100.00%	106.47%	93.93%	100.00%	106.46%
	8.1.3.1.f	Persentase jenis data kependudukan yang dimanfaatkan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
	8.1.3.1.g	Persentase sistem pelayanan publik berbasis SIAK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%



8.1.3.1	h	Persentase terlayannya administrasi kependudukan di kecamatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%	99.43%	99.43%	100.00%	99.14%	99.14%
-		Persentase penduduk yang ber-KTP	93.00%	93.79%	100.85%	95.00%	93.16%	98.06%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.1.3.2		Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan															
Kode	Indikator Program	Tahun 2014			Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018			
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
8.1.3.2	a	Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72.00%	74.33%	103.24%	74.00%	84.05%	113.58%
8.1.3.3		Program Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi															
Kode	Indikator Program	Tahun 2014			Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018			
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
8.1.3.3	a	Persentase layanan publik administratif yang berbasis TIK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.56%	31.56%	100.00%	35.11%	35.11%	100.00%
8.1.3.3	b	Persentase pengelolaan jaringan telekomunikasi pendukung pelayanan publik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
-		Program Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi															
Kode	Indikator Program	Tahun 2014			Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018			
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
-		Persentase layanan publik yang berbasis TIK	18.52%	22.22%	119.98%	23.15%	26.85%	115.98%	46.10%	53.25%	115.50%	-	-	-	-	-	-
-		Persentase pengguna layanan publik berbasis web	7.00%	13.83%	197.50%	8.00%	39.23%	490.38%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.1.3.4		Program Komunikasi, Informasi, dan Publikasi Masyarakat															
Kode	Indikator Program	Tahun 2014			Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018			
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
8.1.3.4	a	Persentase berita positif Pemerintah Kota Surabaya yang terinformasikan kepada masyarakat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83.00%	89.99%	108.42%	84.00%	87.95%	104.70%
8.1.3.4	b	Rata-rata pemanfaatan publik terhadap berbagai saluran komunikasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,765 kunjungan	38,229.73 kunjungan	436.16%	9,116.00 kunjungan	42,303.67 kunjungan	464.06%



Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kota Surabaya 2016 – 2021

			informasi yang disediakan oleh Pemerintah Kota Surabaya													
- Program Komunikasi dan Publikasi Masyarakat																
Kode	Indikator Program	Tahun 2014			Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
-	Persentase berita positif Pemerintah Kota Surabaya yang diinformasikan kepada masyarakat	-	-	-	-	-	-	83.00%	86.50%	104.22%	-	-	-	-	-	-
- Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Media Massa																
Kode	Indikator Program	Tahun 2014			Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
-	Rata-rata kunjungan per bulan pada website www.surabaya.go.id	52,689 kunjungan/bulan	244,652 kunjungan/bulan	464.33%	56,453 kunjungan/bulan	155,262 kunjungan/bulan	275.03%	199,768 kunjungan/bulan	218,082 kunjungan/bulan	109.17%	-	-	-	-	-	-
-	Angka partisipasi masyarakat pada kegiatan-kegiatan diseminasi informasi	-	-	-	-	-	-	57,154 peserta	71,736 peserta	125.51%	-	-	-	-	-	-
- Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat																
Kode	Indikator Program	Tahun 2014			Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
-	Persentase jumlah keluhan yang selesai di tindaklanjuti	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.1.3.5 Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan																
Kode	Indikator Program	Tahun 2014			Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
8.1.3.5.a	Persentase temuan yang ditindaklanjuti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70.00%	100.00%	142.86%	75.00%	100.00%	133.33%
-	Persentase penyelesaian sengketa konsumen	87.00%	100.00%	114.94%	90.00%	100.00%	111.11%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Persentase peningkatan jumlah tempat usaha perdagangan yang tertib ukur	-	-	-	-	-	-	15.00%	22.03%	146.85%	-	-	-	-	-	-
-	Persentase peningkatan jumlah Ukur Takar Timbang dan	-	-	-	-	-	-	3.00%	29.05%	968.49%	-	-	-	-	-	-



			Perengkapannya (UTTP) yang tertib ukur														
8.2	Memantapkan kemandirian keuangan daerah																
SASARAN	8.2.1	Meningkatkan dan mengoptimalkan pengelolaan sumber penerimaan daerah secara efektif dan efisien															
	Kode	Indikator Sasaran	Tahun 2014			Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
	8.2.1.a	Persentase kontribusi pajak terhadap PAD	-	-	-	-	-	-	73.39%	73.32%	99.90%	75.69%	69.92%	92.38%	75.04%	78.03%	103.99%
	8.2.1.b	Persentase kontribusi bagi hasil BUMD terhadap PAD	-	-	-	-	-	-	3.34%	3.22%	96.47%	4.02%	2.45%	60.95%	4.03%	2.87%	71.24%
	8.2.1.1	Program Peningkatan dan Pengembangan Pendapatan Daerah															
	Kode	Indikator Program	Tahun 2014			Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
	8.2.1.1.a	Persentase peningkatan pajak daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.19%	31.28%	220.44%	22.70%	26.83%	118.19%
	8.2.1.2	Program Peningkatan Kinerja BUMD Pendukung Keuangan Daerah															
	Kode	Indikator Program	Tahun 2014			Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
	8.2.1.2.a	Persentase BUMD yang berkinerja sesuai standar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67.00%	66.67%	99.51%	67.00%	66.67%	99.50%
	8.2.1.3	Program Pengelolaan Keuangan Daerah															
	Kode	Indikator Program	Tahun 2014			Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
	8.2.1.3.a	Tingkat ketepatan penyelesaian dokumen keuangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80.00%	100.00%	125.00%	80.00%	100.00%	125.00%
	-	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah															
Kode	Indikator Program	Tahun 2014			Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018			
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
-	Persentase peningkatan PAD	22.22%	18.42%	82.90%	16.48%	22.01%	133.54%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	Rata-rata peningkatan PAD	-	-	-	-	-	-	10.00%	11.71%	117.07%	-	-	-	-	-	-	
-	Persentase laporan yang selesai tepat waktu	80.00%	100.00%	125.00%	80.00%	94.00%	117.65%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	Persentase dokumen keuangan yang selesai tepat waktu	-	-	-	-	-	-	100.00%	89.19%	89.19%	-	-	-	-	-	-	
-	Persentase laporan	-	-	-	-	-	-	100.00%	100.00%	100.00%	-	-	-	-	-	-	



Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kota Surabaya 2016 – 2021

			aset/barang daerah diterbitkan tepat waktu																
		-	Persentase peningkatan penerimaan daerah lainnya	28.52%	29.75%	104.32%	-	-	tidak tercapai (-5.89%)	-	-	-	-	-	-	-	-		
		-	Rata-rata pertumbuhan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah	-	-	-	-	-	3.44%	2.95%	85.61%	-	-	-	-	-	-		
9	Memantapkan daya saing usaha-usaha ekonomi lokal, inovasi produk dan jasa, serta pengembangan industri kreatif																		
9.1	Mendorong pemantapan daya saing UMKM pada sektor pertanian, barang dan jasa serta koperasi melalui peningkatan produktivitas dan pengembangan industri kreatif																		
SASARAN	9.1.1	Meningkatkan produktivitas UMKM sektor produksi barang dan jasa																	
		Kode	Indikator Sasaran	Tahun 2014			Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018			
				Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
		9.1.1.a	Tingkat pertumbuhan produktivitas usaha mikro sektor produksi barang dan jasa	-	-	-	-	-	-	11.00%	17.70%	160.87%	15.00%	31.26%	208.40%	19.00%	23.26%	122.43%	
		9.1.1.1	Program Perluasan Jangkauan Pemasaran																
			Kode	Indikator Program	Tahun 2014			Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018		
					Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
		9.1.1.1.a	Persentase UMKM yang dapat meningkatkan aksesibilitas pemasaran produknya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.00%	76.67%	191.68%	50.00%	72%	144.00%	
		9.1.1.1.b	Persentase sentra yang beroperasi secara optimal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35.00%	34.04%	97.26%	50.00%	46.81%	93.62%	
		9.1.1.1.c	Persentase pembangunan fasilitas ekonomi rakyat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.40%	5.36%	223.33%	3.59%	19.40%	540.47%	
		9.1.1.2	Program Perkuatan Permodalan Usaha Mikro																
			Kode	Indikator Program	Tahun 2014			Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018		
					Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
	9.1.1.2.a	Persentase usaha mikro yang berhasil mendapatkan bantuan permodalan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.00%	9.60%	240.00%	4.00%	8.31%	207.79%		
	9.1.1.3	Program Standarisasi Produk Usaha Mikro																	



Kode	Indikator Program	Tahun 2014			Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
9.1.1.3.a	Persentase usaha mikro yang mengaplikasikan Teknologi Tepat Guna (TTG) dalam proses usaha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.00%	20.00%	100.00%	25.00%	44.42%	177.66%
9.1.1.3.b	Persentase produk usaha mikro yang layak diuji mutukan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.00%	20.00%	100.00%	25.00%	35.06%	140.26%
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah																
Kode	Indikator Program	Tahun 2014			Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
-	Jumlah kelompok skala mikro kecil yang memiliki daya saing	59 kelompok	60 kelompok	101.69%	69 kelompok	65 kelompok	94.20%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Persentase peningkatan volume usaha kecil menengah binaan	-	-	-	-	-	-	10.00%	31.24%	312.45%	-	-	-	-	-	-
-	Akumulasi jumlah usaha mikro yang mengisi sentra binaan	-	-	-	-	-	-	810 Pedagang	955 Pedagang	117.90%	-	-	-	-	-	-
-	Persentase peningkatan volume usaha mikro binaan	-	-	-	-	-	-	10.00%	36.22%	362.20%	-	-	-	-	-	-
-	Akumulasi volume usaha kecil menengah binaan	-	-	-	-	-	-	Rp, 68,555,00,000	Rp. 69,398,186,600	101.23%	-	-	-	-	-	-
-	Akumulasi volume usaha mikro binaan	-	-	-	-	-	-	Rp, 2,928,000,000	Rp. 3,222,005,700	110.04%	-	-	-	-	-	-
-	Persentase peningkatan jumlah usaha mikro binaan yang kualitasnya meningkat	-	-	-	-	-	-	20.00%	20.80%	104.00%	-	-	-	-	-	-
-	Persentase fasilitas ekonomi rakyat yang dibangun dalam kondisi baik	-	-	-	-	-	-	100.00%	100.00%	100.00%	-	-	-	-	-	-
Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan																
Kode	Indikator Program	Tahun 2014			Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian



Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kota Surabaya 2016 – 2021

		-	Peningkatan jumlah sentra baru PKL	5 sentra	9 sentra	180.00%	5 sentra	6 sentra	120.00%	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	Peningkatan jumlah sentra PKL yang memiliki daya saing usaha	36 sentra	36 sentra	100.00%	41 sentra	38 sentra	92.68%	-	-	-	-	-	-	-	-
SASARAN	9.1.2	Meningkatkan produktivitas koperasi															
	Kode	Indikator Sasaran	Tahun 2014			Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
	9.1.2.a	Tingkat pertumbuhan produktivitas koperasi	-	-	-	-	-	-	5.00%	3.24%	64.86%	11.00%	11.10%	100.91%	17.00%	30.40%	178.83%
	9.1.2.1	Program Penguatan Kelembagaan Koperasi															
	Kode	Indikator Program	Tahun 2014			Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
	9.1.2.1.a	Persentase koperasi berklasifikasi AAB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57.81%	58.03%	100.38%	62.21%	65.98%	106.06%
	-	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi															
	Kode	Indikator Program	Tahun 2014			Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
	-	Peningkatan jumlah koperasi berkualitas	172 Unit	306 Unit	177.91%	170 Unit	268 Unit	157.65%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	Peningkatan jumlah kelembagaan koperasi pasif yang berhasil direvitalisasi	100 Unit	20 Unit	20.00%	66 Unit	79 Unit	119.70%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	Peningkatan jumlah kelembagaan baru koperasi yang terbentuk	30 Unit	54 Unit	180.00%	30 Unit	31 Unit	103.33%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	9.1.2.2	Program Peningkatan Kualitas Usaha Koperasi															
Kode	Indikator Program	Tahun 2014			Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018			
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
9.1.2.2.a	Tingkat pertumbuhan koperasi yang meningkat volume usahanya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68.00%	62.39%	91.75%	73.00%	73.19%	100.26%	
-	Program Peningkatan Kualitas Koperasi																
Kode	Indikator Program	Tahun 2014			Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018			
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
-	Persentase peningkatan jumlah koperasi tidak aktif yang berhasil direvitalisasi	-	-	-	-	-	-	6.00%	18.99%	316.46%	-	-	-	-	-	-	



			-	Persentase peningkatan jumlah koperasi berkualitas	-	-	-	-	-	-	15.00%	19.78%	131.84%	-	-	-	-	-		
			-	Persentase peningkatan volume usaha koperasi aktif	-	-	-	-	-	-	1.00%	2.69%	269.03%	-	-	-	-	-		
			-	Tingkat pertumbuhan anggota koperasi	-	-	-	-	-	-	0.39%	3.62%	929.04%	-	-	-	-	-		
SASARAN	9.1.3	Meningkatkan produktivitas sektor pertanian																		
		Kode	Indikator Sasaran	Tahun 2014			Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018				
				Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian		
		9.1.3.a	Tingkat produktivitas budidaya pertanian	-	-	-	-	-	-	-	-	3.73 Ton/Ha	4.63 Ton/Ha	124.08%	3.76 Ton/Ha	5.24 Ton/Ha	139.36%	3.80Ton/ Ha	5.56 Ton/Ha	146.20%
		9.1.3.1	Program Penyediaan Sarana Prasarana Budidaya Tanaman Pangan dan Hortikultura																	
		Kode	Indikator Program	Tahun 2014			Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018				
				Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian		
		9.1.3.1.a	Persentase pembudidaya tanaman pangan dan hortikultura yang memanfaatkan fasilitas sarana dan prasarana produksi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.00%	12.03%	100.25%	13.00%	15.31%	117.80%
		9.1.3.2	Program Pengaplikasian Teknologi Tepat Guna dalam Budidaya Tanaman Pangan dan Hortikultura																	
		Kode	Indikator Program	Tahun 2014			Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018				
				Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian		
		9.1.3.2.a	Persentase pembudidaya tanaman pangan dan hortikultura yang mengaplikasikan teknologi tepat guna dalam proses budidaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.00%	25.77%	103.08%	35.00%	36.31%	103.74%
		9.1.3.3	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Pertanian																	
Kode	Indikator Program	Tahun 2014			Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018						
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian				
9.1.3.3.a	Persentase pembudidaya yang omzetnya meningkat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61.00%	61%	100.00%	62.00%	67.49%	108.86%		
-	Program Pelayanan Pembibitan dan Penyuluhan pertanian/ Perkebunan, Perikanan dan Peternakan																			
Kode	Indikator Program	Tahun 2014			Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018						
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian				
-	Cakupan sebaran penyediaan bibit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75.00%	90.35%	120.47%	-	-	-	-	-		



Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kota Surabaya 2016 – 2021

	pada pembudidaya															
-	Persentase kemampuan penyuluh dalam melakukan pendampingan terhadap kelompok tani	-	-	-	-	-	-	80.00%	69.68%	87.10%	-	-	-	-	-	-
-	Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan															
Kode	Indikator Program	Tahun 2014			Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
-	Produktivitas pada bidang pertanian/perkebunan	-	-	-	-	-	-	3.73 Ton/Ha	4.63 Ton/Ha	124.08%	-	-	-	-	-	-
-	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani															
Kode	Indikator Program	Tahun 2014			Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
-	Terbentuknya sentra produk pertanian	30 Sentra	30 Sentra	100.00%	34 Sentra	34 Sentra	100.00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.1.3.4	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hewan Ternak															
Kode	Indikator Program	Tahun 2014			Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
9.1.3.4.a	Persentase populasi hewan ternak yang mendapatkan vaksinasi dan pengobatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83.00%	85.84%	103.42%	84.00%	87.74%	104.45%
-	Persentase populasi hewan ternak yang mendapatkan pengobatan	-	-	-	-	-	-	28.62%	28.69%	100.25%	-	-	-	-	-	-
-	Persentase populasi hewan ternak yang mendapatkan vaksinasi	-	-	-	-	-	-	89.69%	89.75%	100.07%	-	-	-	-	-	-
9.1.3.5	Program Pengaplikasian Teknologi Tepat Guna dalam Budidaya Peternakan															
Kode	Indikator Program	Tahun 2014			Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
9.1.3.5.a	Persentase pembudidaya ternak yang mengaplikasikan teknologi tepat guna dalam proses budidaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.00%	25.00%	100.00%	35.00%	37.81%	108.04%
-	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan															



Kode	Indikator Program	Tahun 2014			Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018			
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
-	Produktivitas di bidang peternakan	-	-	-	-	-	-	2 ekor/kelompok	2 ekor/kelompok	100.00%	-	-	-	-	-	-	
SASARAN	9.1.4	Meningkatkan produktivitas sektor kelautan dan perikanan															
	Kode	Indikator Sasaran	Tahun 2014			Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
	9.1.4.a	Tingkat produktivitas sektor perikanan tangkap dan budidaya	-	-	-	-	-	-	3.2 Ton/Orang	5.17 Ton/Orang	161.59%	3.39 Ton/Orang	4.58 Ton/Orang	135.10%	3.42 Ton/Orang	5 Ton/Orang	146.08%
	9.1.4.1	Program Penyediaan Sarana Prasarana Kelautan dan Perikanan															
	Kode	Indikator Program	Tahun 2014			Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
	9.1.4.1.a	Persentase pembudidaya yang memanfaatkan fasilitas sarana dan prasarana perikanan dan kelautan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.00%	14.21%	118.42%	13.00%	13.38%	102.89%
	9.1.4.2	Program Pengaplikasian Teknologi Tepat Guna Budidaya Perikanan dan Kelautan															
	Kode	Indikator Program	Tahun 2014			Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
	9.1.4.2.a	Persentase pembudidaya perikanan dan kelautan yang mengaplikasikan teknologi tepat guna dalam proses budidaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.00%	30.38%	121.52%	35.00%	35.43%	101.24%
	-	Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir															
	Kode	Indikator Program	Tahun 2014			Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
-	Jumlah kelurahan di kawasan pesisir yang diberdayakan	17	17	100.00%	21	21	100.00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	Produktivitas hasil olahan perikanan	-	-	-	-	-	-	14.16 Ton/Orang	14.58 Ton/Orang	102.97%	-	-	-	-	-	-	
-	Produktivitas usaha garam	-	-	-	-	-	-	81.47 Ton/ha	1.59 Ton/ha	1.95%	-	-	-	-	-	-	
-	Program Pengembangan Perikanan Tangkap																
Kode	Indikator Program	Tahun 2014			Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018			
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
-	Produktivitas	-	-	-	-	-	-	3.2	4.67	145.88%	-	-	-	-	-	-	



Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kota Surabaya 2016 – 2021

			tangkapan ikan (termasuk budidaya ikan di laut)							Ton/Orang	Ton/Orang								
		-	Program Pengembangan Perikanan Budidaya																
		Kode	Indikator Program	Tahun 2014			Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018			
				Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
		-	Produktivitas budidaya perikanan	-	-	-	-	-	-	2.13 Ton/ha	2.77 Ton/ha	129.86%	-	-	-	-	-	-	
SASARAN	9.1.5	Meningkatkan pertumbuhan dan produktivitas pelaku sektor industri kreatif																	
		Kode	Indikator Sasaran	Tahun 2014			Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018			
				Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
		9.1.5.a	Tingkat pertumbuhan pelaku usaha kreatif				-	-	-	-	-	-	4.00%	4.75%	118.75%	5.00%	6.75%	135.00%	
		9.1.5.1	Program Pemanfaatan Rumah Kreatif dan Pengembangan Usaha Kreatif																
			Kode	Indikator Program	Tahun 2014			Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018		
					Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
			9.1.5.1.a	Persentase individu/kelompok yang mengaplikasikan keahlian yang didapat dari proses pembelajaran di rumah kreatif kuliner	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.00%	6.67%	133.40%	6.00%	18.30%	304.96%
		9.1.5.1.b	Persentase individu/kelompok yang mengaplikasikan keahlian yang didapat dari proses pembelajaran di rumah kreatif desain dan fashion	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.00%	5.00%	100.00%	6.00%	7.50%	125.00%	
		9.1.5.1.c	Persentase individu/kelompok yang mengaplikasikan keahlian yang didapat dari proses pembelajaran di rumah kreatif handicraft	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.00%	12.79%	255.80%	6.00%	7.84%	130.72%	
		9.1.5.1.d	Persentase individu/kelompok yang mengaplikasikan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.00%	5.71%	114.20%	6.00%	7.76%	129.35%	



			keahlian yang didapat dari proses pembelajaran di rumah kreatif seni pertunjukkan															
		9.1.5.1	Persentase rumah kreatif yang beroperasi	-	-	-	-	-	-	-	-	43.75%	62.50%	142.86%	62.50%	87.50%	140.00%	
		9.1.5.2	Program Legalisasi Usaha Kreatif															
		Kode	Indikator Program	Tahun 2014			Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018		
				Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
		9.1.5.2	Persentase pelaku usaha kreatif yang mendapatkan legalisasi usaha	-	-	-	-	-	-	-	-	20.00%	20.00%	100.00%	25.00%	50.88%	203.51%	
		9.1.5.3	Program Perkuatan Permodalan Usaha Kreatif															
		Kode	Indikator Program	Tahun 2014			Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018		
				Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
		9.1.5.3	Persentase kebutuhan modal kerja dan modal investasi pelaku usaha kreatif yang dapat dipenuhi	-	-	-	-	-	-	-	-	5.00%	16.00%	320.00%	10.00%	24.56%	245.61%	
9.2	Meningkatkan kinerja pariwisata dalam rangka mewujudkan daya saing global																	
SASARAN	9.2.1	Meningkatkan jumlah transaksi keuangan yang dilakukan wisatawan																
		Kode	Indikator Sasaran	Tahun 2014			Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018		
				Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
		9.2.1.a	Tingkat pertumbuhan penerimaan sektor penunjang pariwisata	-	-	-	-	-	-	7.96%	14.38%	180.65%	14.47%	29.94%	206.91%	21.59%	44.51%	206.17%
		9.2.1.1	Program Pengembangan Destinasi Wisata															
		Kode	Indikator Program	Tahun 2014			Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018		
				Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
		9.2.1.1	Persentase ODTW yang berhasil dikembangkan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.00%	36.36%	202.00%	27.00%	46.15%	170.94%
	-	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata																
	Kode	Indikator Program	Tahun 2014			Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018			
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
	-	Jumlah destinasi wisata yang terbentuk	19 Lokasi	19 Lokasi	100.00%	22 Lokasi	22 Lokasi	100.00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	Rata-rata kunjungan wisatawan	-	-	-	-	-	-	258,333 wisatawan	319,452 wisatawan	123.66%	-	-	-	-	-	-	



Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kota Surabaya 2016 – 2021

			nusantara ke ODTW per bulan						n/bulan	n/bulan								
		-	Rata-rata kunjungan wisatawan mancanegara ke ODTW per bulan	-	-	-	-	-	500 wisatawan n/bulan	1,177 wisatawan n/bulan	235.40%	-	-	-	-	-		
		9.2.1.2	Program Pengembangan Kerjasama dengan Stakeholder Bidang Pariwisata															
		Kode	Indikator Program	Tahun 2014			Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018		
				Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
		9.2.1.2.a	Tingkat capaian kesepakatan dengan stakeholder bidang pariwisata yang dilaksanakan 5 kesepakatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.00%	20.00%	100.00%	40.00%	60.00%	150.00%
		9.2.1.3	Program Pemasaran Pariwisata															
		Kode	Indikator Program	Tahun 2014			Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018		
				Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
		9.2.1.3.a	Persentase kunjungan di objek wisata terhadap kunjungan wisatawan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43.21%	46.35%	107.27%	45.48%	48.03%	105.61%
		-	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata															
		Kode	Indikator Program	Tahun 2014			Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018		
				Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
		-	Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara	190,872 wisatawan	742,084 Wisatawan	388.79%	196,390 wisatawan	638,853 Wisatawan	325.16%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara	8,296,157 Wisatawan	15,929,745 Wisatawan	192.01%	8,509,348 Wisatawan	15,099,061 Wisatawan	177.44%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	Rata-rata kunjungan wisatawan mancanegara per bulan	-	-	-	-	-	-	64,333 wisatawan n/ bulan	64,338 wisatawan n/ bulan	100.01%	-	-	-	-	-	-
		-	Rata-rata kunjungan wisatawan nusantara per bulan	-	-	-	-	-	-	1,373,168 wisatawan n/ bulan	1,715,060 wisatawan n/ bulan	124.90%	-	-	-	-	-	-
		9.3	Meningkatkan kinerja investasi dalam rangka mewujudkan daya saing global															
		9.3.1	Meningkatkan realisasi PMA dan PMDN (SPIPISE dan non SPIPISE)															
		Kode	Indikator Sasaran	Tahun 2014			Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018		
				Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
		9.3.1.a	Rata-rata pertumbuhan nilai	-	-	-	-	-	-	5.00%	39.21%	784.22%	5.00%	11.88%	237.60%	5.00%	32.67%	653.45%



Kode	Indikator Program	Tahun 2014			Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
		9.3.1.1	Program Peningkatan Iklim dan Realisasi Investasi													
9.3.1.1.a	Tingkat pertumbuhan ijin realisasi investasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.00%	14.16%	177.00%	12.00%	20.59%	171.61%
9.3.1.1.b	Tingkat pertumbuhan jumlah minat dan rencana investasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.00%	80.49%	670.75%	18.00%	65.85%	365.85%
-	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi															
-	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan perijinan penunjang investasi	90.00%	75.32%	83.69%	95.00%	74.75%	78.68%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Persentase meningkatnya jumlah realisasi ijin penunjang investasi	-	-	-	-	-	-	6.00%	20.26%	337.74%	-	-	-	-	-	-
10	Mewujudkan infrastruktur dan utilitas kota yang terpadu dan efisien															
10	Mengembangkan dan mengoptimalkan kinerja sistem drainase kota															
10.1.1	Penyediaan sistem drainase kota yang terpadu, efektif dan efisien															
10.1.1.a	Indeks genangan	-	-	-	-	-	-	43.99	44.07	99.82%	43.11	26.52	138.48%	42.25	41.53	101.71%
10.1.1.1	Program Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Drainase Kota															
10.1.1.1.a	Luas genangan (ha)	-	-	-	-	-	-	-	1,257.3 Ha	-	1,209 Ha	765.12 Ha	136.71%	1,179 Ha	697 Ha	140,88%
10.1.1.1.b	Tinggi genangan (cm)	-	-	-	-	-	-	-	16.27 cm	-	16 cm	13.37 cm	116.44%	15 cm	12,49 cm	116,73%
10.1.1.1.c	Lama genangan (menit)	-	-	-	-	-	-	-	52.98 menit	-	51 menit	25.03 menit	150.92%	50 menit	22,43 menit	155,14%
10.1.1.1.d	Persentase pembangunan jaringan drainase yang selesai tepat waktu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80.00%	100.00%	125.00%	80.00%	100.00%	125.00%
-	Program Pengendalian Banjir															
-	Indikator Program	Tahun 2014			Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018		
-		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian



Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kota Surabaya 2016 – 2021

		-	Luas wilayah genangan	2,111 Ha	1,303.13 Ha	138.27%	2,027 Ha	1,270.55 Ha	137.32%	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	Rata-rata lama terjadinya genangan	60 menit	54.75 menit	108.75%	60 menit	53.38 menit	111.03%	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	Rata-rata tinggi genangan yang terjadi	20 cm	16.82 cm	115.90%	20 cm	16.40 cm	118.00%	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	Tingkat genangan	-	-	-	-	-	-	30.7	41.95	63.34%	-	-	-	-	-	
10	Meningkatkan jaringan dan pelayanan transportasi kota yang terpadu																	
SASARAN	10.2.1	Menyediakan dan meningkatkan kinerja jaringan jalan																
		Kode	Indikator Sasaran	Tahun 2014			Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018		
				Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
		10.2.1.a	Tingkat kehandalan jaringan jalan	-	-	-	-	-	-	0.4	0.402	100.52%	0.4	0.4	100.00%	0.41	0.41	100.00%
		10.2.1.1	Program Pengelolaan dan Pembangunan Jalan dan Jembatan															
		Kode	Indikator Program	Tahun 2014			Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018		
				Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
		10.2.1.1.a	Persentase jalan yang terbangun	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.24%	0.28%	116.67%	0.36%	0.65%	180.29%
		10.2.1.1.b	Persentase penyediaan prasarana pejalan kaki	-	-	-	-	-	-	3.80%	28.24%	743.14%	11.45%	18.97%	165.68%	17.18%	17.27%	100.52%
		10.2.1.1.c	Persentase jalan yang mendapatkan perbaikan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.16%	7.58%	146.90%	7.74%	10.46%	135.11%
10.2.1.1.d	Persentase Pembangunan Jaringan Jalan dan Jembatan yang selesai tepat waktu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80.00%	100.00%	125.00%	80.00%	96.88%	121.09%		
-	Lama jam sibuk	6 jam 37 menit	6 jam 30 menit	101.76%	6 jam 22 menit	6 jam 21 menit	100.26%	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	Penambahan jalan baru	-	-	-	-	-	-	1,000 m	2,382 m	238.20%	-	-	-	-	-	-		
-	Persentase jalan dalam kondisi baik	-	-	-	-	-	-	94.95%	98.61%	103.86%	-	-	-	-	-	-		
SASARAN	10.2.2	Menyediakan sistem manajemen transportasi yang berkualitas																
		Kode	Indikator Sasaran	Tahun 2014			Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018		
				Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
10.2.2.a	Persentase jalan kewenangan kota dengan V/C ratio ≤ 0.95	-	-	-	-	-	-	30.00%	50.00%	166.67%	32.00%	66.67%	208.34%	34.00%	88.10%	259.10%		
10.2.2.1	Program Peningkatan Sistem Manajemen Transportasi																	



SASARAN	Kode	Indikator Program	Tahun 2014			Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
			10.2.2.1.a	Kecepatan rata-rata kendaraan di jalan kewenangan kota	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.19 km/jam	28.6 km/jam	97.98%	30.06 km/jam
10.2.2.1.b	Persentase selisih tingkat kecelakaan lalu lintas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.00%	7.73%	386.50%	2.00%	11.71%	585.62%	
10.2.3	Penyediaan dan optimalisasi sistem angkutan umum massal yang berkualitas dan ramah lingkungan																
Kode	Indikator Sasaran	Tahun 2014			Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018			
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
10.2.3.a	Load factor kendaraan umum (Angkot)	-	-	-	-	-	-	22.00%	18.25%	82.95%	23.00%	30.00%	130.43%	24.00%	29.53%	123.05%	
10.2.3.b	Load factor kendaraan umum (Bis Kota)	-	-	-	-	-	-	34.00%	30.96%	91.07%	35.00%	35.60%	101.71%	36.00%	35.88%	99.65%	
10.2.3.1	Program pengembangan sistem transportasi berkelanjutan																
Kode	Indikator Program	Tahun 2014			Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018			
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
10.2.3.1.a	Rata-rata headway angkutan umum (Angkot/feeder)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26 menit	28.11 menit	91.88%	25 menit	26.84 menit	92.64%	
10.2.3.1.b	Rata-rata headway angkutan umum (Bus Kota)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43.32 menit	46.73 menit	92.13%	42.57 menit	41.93 menit	101.50%	
10.2.3.1.c	Persentase penyediaan sarana prasarana pendukung transportasi berkelanjutan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
-	Program Pengembangan Sistem Transportasi																
Kode	Indikator Program	Tahun 2014			Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018			
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
-	Kecepatan perjalanan rata-rata kendaraan di jalan arteri sekunder	21.47 km/jam	28.75 km/jam	133.91%	23.19 km/jam	28.79 km/jam	124.15%	30 km/jam	27.47 km/jam	91.70%	-	-	-	-	-	-	
-	Kecepatan perjalanan rata-rata kendaraan di jalan arteri primer	23.73 km/jam	31.23 km/jam	131.61%	25.63 km/jam	28.88 km/jam	112.68%	30 km/jam	27.86 km/jam	94.77%	-	-	-	-	-	-	
-	Headway angkutan umum untuk mikrolet	14.72 menit	25.91 menit	tidak tercapai	14.72 menit	26.21 menit	tidak tercapai (21.94%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	



Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kota Surabaya 2016 – 2021

		-	Headway angkutan umum untuk biskota	20 menit	43.12 menit	tidak tercapai	20 menit	43.86 menit	tidak tercapai (-19.30%)	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	Rata-rata headway angkutan umum	-	-	-	-	-	-	Angkot : 25.91 menit Bis kota : 43.32 menit	Angkot : 26.50 menit Bis kota : 44.67 menit	97.30%	-	-	-	-	-	
		-	Persentase penggunaan kendaraan umum (load factor)	-	-	-	-	-	-	35.54%	30.96%	87.12%	-	-	-	-	-	
10	Meningkatkan pembangunan dan pelayanan utilitas kota secara terpadu dan merata																	
SASARAN	10.3.1	Meningkatnya sistem jaringan dan kualitas layanan air bersih																
		Kode	Indikator Sasaran	Tahun 2014			Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018		
				Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
		10.3.1.a	Cakupan layanan teknis air bersih	-	-	-	90.00%	92.66%	102.96%	93.83%	95.51%	101.79%	95.00%	96.38%	101.45%	97.00%	98.97%	102.03%
		10.3.1.1	Program Pembangunan Jaringan Air Bersih Perkotaan															
		Kode	Indikator Program	Tahun 2014			Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018		
				Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
10.3.1.1.a	Persentase pelanggan baru PDAM (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.22%	6.45%	69.96%	14.32%	7.66%	53.52%		
-	Cakupan layanan air bersih	88.06%	92.64%	105.20%	90.00%	92.66%	102.96%	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	Kebocoran air bersih	31.95%	26.80%	116.12%	31.45%	25.74%	118.16%	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
SASARAN	10.3.2	Meningkatnya sistem jaringan dan kualitas PJU																
		Kode	Indikator Sasaran	Tahun 2014			Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018		
				Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
		10.3.2.a	Persentase panjang jalan yang sudah terpasang PJU dalam kondisi baik	-	-	-	-	-	-	4.83%	7.40%	153.13%	7.37%	100.00%	1356.85 %	9.90%	100.00%	1010.10 %
		10.3.2.1	Program Pengelolaan dan Peningkatan Pelayanan PJU															
		Kode	Indikator Program	Tahun 2014			Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018		
				Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
10.3.2.1.a	Panjang jalan yang sudah mendapatkan penerangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,540,250 m	2,702,310 m	106.38%	2,600,250 m	2,902,320 m	111.62%		
10.3.2.1.b	Persentase pemasangan PJU hemat energi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64.49%	66.54%	103.18%	74.26%	146.92%	197.84%		
-	Program Utilitas Perkotaan																	



Kode	Indikator Program	Tahun 2014			Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018			
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
-	Rasio panjang jalan yang sudah mendapatkan penerangan terhadap seluruh panjang jalan	83.36%	94.54%	113.42%	86.76%	99.43%	114.60%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	Persentase lama perbaikan PJU padam <6 jam	-	-	-	-	-	-	64.00%	79.86%	124.78%	-	-	-	-	-	-	
-	Panjang jalan yang sudah mendapatkan penerangan	-	-	-	-	-	-	2,431,470 m	2,540,910 m	104.50%	-	-	-	-	-	-	
-	Persentase penggunaan LED untuk PJU	-	-	-	-	-	-	13.00%	39.52%	304.03%	-	-	-	-	-	-	
SASARAN	10.3.3	Meningkatnya pelayanan utilitas kota lainnya															
	Kode	Indikator Sasaran	Tahun 2014			Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
	10.3.3.a	Persentase pelaksanaan rekomendasi utilitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
	10.3.3.1	Program Pengelolaan dan Peningkatan Utilitas Kota															
Kode	Indikator Program	Tahun 2014			Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018			
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
10.3.3.1.a	Persentase rekomendasi utilitas yang dikeluarkan dibanding permohonan utilitas yang memenuhi syarat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	



Tabel II.99
Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kota Surabaya
Tahun 2016-2017

No.	Bidang Pelayanan	Indikator	Tahun 2016			Tahun 2017		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Pendidikan	Tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 km untuk SD/MI dan 6 km untuk SMP/MTs dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil;						
		SD	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		MI	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		SMP	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		MTS	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD/MI tidak melebihi 32 orang, dan untuk SMP/MTs tidak melebihi 36 orang.						
		SD	100%	68,11%	68,11%	100%	69,51%	69,51%
		MI	100%	90,80%	90,80%	100%	91,82%	91,82%
		SMP	100%	75,15%	75,15%	100%	76,85%	76,85%
		MTS	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%
		Untuk setiap rombongan belajar tersedia 1 (satu) ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru, serta papan tulis;						
		SD	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%
		MI	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%
		Di setiap SMP dan MTs tersedia ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk 36 peserta didik dan minimal satu set peralatan praktek IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik;						
		SMP	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%
		MTS	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%



No.	Bidang Pelayanan	Indikator	Tahun 2016			Tahun 2017		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
		Di setiap SD/MI dan SMP/MTs tersedia satu ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya;						
		SD	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%
		MI	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%
		SMP	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%
		MTS	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%
		di setiap SMP/MTs tersedia ruang kepala sekolah yang terpisah dari ruang guru dengan meja dan kursi						
		SMP	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%
		MTS	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%
		Di setiap SD/MI tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 peserta didik						
		SD	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%
		MI	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%
		Di setiap SD/MI tersedia 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan, dan untuk daerah khusus 4 (empat) orang guru setiap satuan pendidikan						
		SD	100%	96,00%	96,00%	100%	97,05%	97,05%
		MI	100%	97,67%	97,67%	100%	98,77%	98,77%
		Di setiap SMP/MTs tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap mata pelajaran, dan untuk daerah khusus tersedia satu orang guru untuk setiap rumpun mata pelajaran;						
		SMP	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%
		MTS	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%
		Di setiap SD/MI tersedia 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV						
		SD	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%
		MI	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%



No.	Bidang Pelayanan	Indikator	Tahun 2016			Tahun 2017		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
		Di setiap SD/MI tersedia 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik						
		SD	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%
		MI	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%
		Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV sebanyak 70%						
		SMP	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%
		MTS	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%
		Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV sebanyak 70% dan separuh diantaranya (35% dari keseluruhan guru) telah memiliki sertifikat pendidik						
		SMP	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%
		MTS	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%
		Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik masing-masing satu orang untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris dan PKn						
		SMP	100%	97,42%	97,42%	100%	98,52%	98,52%
		MTS	100%	93,00%	93,00%	100%	93,33%	93,33%
		Di setiap Kabupaten/Kota semua kepala SD/MI berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik						
		SD	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%
		MI	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%
		Di setiap kab/kota semua kepala SMP/MTs berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik;						
		SMP	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%
		MTS	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%



No.	Bidang Pelayanan	Indikator	Tahun 2016			Tahun 2017		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
		Di setiap kab/kota semua pengawas sekolah/madrasah memiliki kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat Pendidik						
		SD	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%
		MI	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%
		Pemerintah kab/kota memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif;						
		SD	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%
		MI	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%
		SMP	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%
		MTS	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%
		Kunjungan pengawas ke satuan pendidikan dilakukan satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan dilakukan selama 3 jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan;						
		SD	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%
		MI	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%
		SMP	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%
		MTS	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%
		Setiap SD/MI menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS dan PKn dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik						
		SD	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%
		MI	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%
		Setiap SMP/MTs menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup semua mata pelajaran dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik;						
		SMP	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%



No.	Bidang Pelayanan	Indikator	Tahun 2016			Tahun 2017		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
		MTS	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%
		Setiap SD/MI menyediakan satu set peraga IPA dan bahan yang terdiri dari model kerangka manusia, model tubuh manusia, bola dunia (globe), contoh peralatan optik, kit IPA untuk eksperimen dasar, dan poster/carta IPA;						
		SD	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%
		MI	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%
		Setiap SD/MI memiliki 100 judul buku pengayaan dan 10 buku referensi, dan setiap SMP/MTs memiliki 200 judul buku pengayaan dan 20 buku referensi;						
		SD	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%
		MI	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%
		SMP	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%
		MTS	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%
		Setiap guru tetap bekerja 37,5 jam per minggu di satuan pendidikan, termasuk merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing atau melatih peserta didik, dan melaksanakan tugas tambahan;						
		SD	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%
		MI	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%
		SMP	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%
		MTS	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%
		Satuan pendidikan menyelenggarakan proses pembelajaran selama 34 minggu per tahun dengan kegiatan pembelajaran sebagai berikut :						
		Jumlah rombongan belajar yang memenuhi Standar	100%	60,00%	60,00%	100%	61,51%	61,51%
		Jumlah SD atau MI yang Menyelenggarakan proses pembelajaran di sekolah selama 34 minggu per tahun dengan kegiatan pembelajaran kelas I s/d kelas VI seperti diatas						
		SD	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%



No.	Bidang Pelayanan	Indikator	Tahun 2016			Tahun 2017		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
		MI	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%
		Jumlah SMP atau MTs yang Menyelenggarakan akan proses pembelajaran di sekolah selama 34 minggu per tahun dengan kegiatan pembelajaran kelas VII s/d IX selama 27 jam per minggu						
		SMP	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%
		MTS	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%
		Setiap satuan pendidikan menerapkan kurikulum sesuai ketentuan yang berlaku						
		SD	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%
		MI	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%
		SMP	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%
		MTS	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%
		Setiap guru yang menerapkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang disusun berdasarkan silabus untuk setiap mata pelajaran yang diampunya	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%
		Setiap guru mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%
		Kepala sekolah melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru dua kali dalam setiap semester						
		SD	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%
		MI	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%
		SMP	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%
		MTS	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%
		Setiap guru menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian setiap peserta didik kepada Kepala sekolah pada akhir semester dalam bentuk laporan hasil presentasi belajar peserta didik	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%



No.	Bidang Pelayanan	Indikator	Tahun 2016			Tahun 2017		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
		Kepala Sekolah atau Madrasah menyampaikan laporan hasil Ulangan Akhir Semester (UAS) dan Ulangan Kenaiakan Kelas (UKK) serta Ujian Akhire (US/UN) kepada orang tua peserta didik dan menyampaikan rekapitulasinya kepada Dinas Pendidikan kabupaten/kota atau	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%
		Setiap satuan pendidikan menerapkan prinsip- prinsip Manajemen Berbasis Sekolah (MBS).						
		SD	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%
		MI	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%
		SMP	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%
		MTS	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%
2	Kesehatan	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4.	95%	98,40%	103,58%	95%	98,50%	103,68%
		Cakupan Ibu hamil dengan komplikasi yang ditangani.	80%	90,20%	112,75%	80%	91,60%	114,50%
		Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan.	90%	96,80%	107,56%	90%	97,60%	108,44%
		Cakupan pelayanan Ibu Nifas	90%	93,80%	104,22%	90%	94,50%	105,00%
		Cakupan neonatal dengan komplikasi yang ditangani	80%	90,80%	113,50%	80%	91,17%	113,96%
		Cakupan kunjungan bayi.	90%	93,73%	104,14%	90%	95,97%	106,63%
		Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI).	100%	87,01%	87,01%	100%	91,56%	91,56%
		Cakupan pelayanan anak balita.	90%	82,54%	91,71%	90%	87,13%	96,81%
		Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin.	100%	100%	100,00%	100%	100%	100,00%
		Cakupan Balita gizi buruk mendapat perawatan	100%	100,00%	100,00%	100%	100%	100,00%
		Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat	100%	97,50%	97,50%	100%	98,34%	98,34%
		Cakupan peserta KB Aktif	70%	75,58%	107,97%	70%	77,0%	110,00%
		Cakupan Penemuan dan penanganan penderita penyakit						



No.	Bidang Pelayanan	Indikator	Tahun 2016			Tahun 2017		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
		Acute Flacid Paralysis (AFP) rate per 100.000 penduduk < 15 tahun	100%	0,96%	0,96%	100%	3,85%	3,85%
		Penemuan Penderita Pneumonia Balita	100%	40,89%	40,89%	100%	58,22%	58,22%
		Penemuan Pasien Baru TB BTA Positif	100%	77,77%	77,77%	100%	100,56%	100,56%
		Penderita DBD yang Ditangani	100%	100,00%	100,00%	100%	100%	100,00%
		Penemuan Penderita Diare	100%	78,45%	78,45%	100%	98,69%	98,69%
		Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	100%	34,84%	34,84%	100%	40,30%	40,30%
		Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin.	100%	19,02%	19,02%	100%	12,34%	12,34%
		Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yg harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kab/Kota.	100%	100,00%	100,00%	100%	100%	100,00%
		Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 jam	100%	100,00%	100,00%	100%	100%	100,00%
		Cakupan Desa Siaga Aktif	80%	100,00%	125,00%	80%	100%	125,00%
3	Sosial	Persentase (%) PMKS skala kab/kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar.	80%	99,47%	124,34%	80%	99,47%	124,34%
		Persentase (%) PMKS skala kab/kota yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya.	80%	100%	125,00%	80%	100%	125,00%
		Presentase (%) pantai sosial skala kabupaten/ kota yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial.	80%	100%	125,00%	80%	100%	125,00%
		Presentase (%) wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial.	80%	100%	125,00%	80%	100%	125,00%
		Presentase (%) korban bencana skala kabupaten/kota yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	80%	100%	125,00%	80%	100%	125,00%



No.	Bidang Pelayanan	Indikator	Tahun 2016			Tahun 2017		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
		Presentase (%) korban bencana skala kabupaten/kota yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	80%	100%	125,00%	80%	100%	125,00%
		Presentase (%) penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	40%	99,79%	249,48%	40%	99,79%	249,48%
4	Pemerintahan Dalam Negeri	Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga	100%	104,85%	104,85%	100%	100%	100%
		Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk	100%	88,55%	88,55%	100%	100%	100%
		Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran	90%	99,35%	110,39%	90%	99,42%	110,47%
		Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kematian	70%	96,27%	137,53%	70%	93,69%	133,84%
		Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah di Kabupaten/Kota	100%	63,59%	63,59%	100%	N/A	N/A
		Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	3 x patroli dlm sehari	3 x patroli dlm sehari	100,00%	3 x patroli dlm sehari	3 x patroli dlm sehari	100,00%
		Cakupan rasio petugas perlindungan masyarakat (Linmas) di kabupaten / kota	13.668	25.580	187,15%	13.668	19.372	141,73%
		Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran di Kabupaten/Kota	80%	93%	116,25%	80%	93%	116,25%
		Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate)	75%	100%	133,33%	75%	100%	133,33%
		Persentase aparaturnya pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi	85%	100%	117,64%	85%	100%	117,64%
		Jumlah mobil pemadam kebakaran diatas 3000-5000 liter pada WMK (Wilayah Manajemen Kebakaran)	90%	100%	111,11%	90%	100%	111,11%
5	Perumahan Rakyat	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	100%	90,69%	90,69%	100%	90,69%	90,69%
		Cakupan Layanan Rumah Layak Huni Yang Terjangkau	70%	50,46%	72,09%	70%	50,46%	72,09%



No.	Bidang Pelayanan	Indikator	Tahun 2016			Tahun 2017		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
		Cakupan lingkungan yg sehat dan aman yg didukung Prasarana, sarana dan Utilitas Umum (PSU)	100%	33,30%	33,30%	100%	33,30%	33,30%
6	Perempuan dan Anak	Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan oleh Petugas Terlatih di dalam Unit Pelayanan Terpadu	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Kesehatan oleh Tenaga Kesehatan Terlatih di Puskesmas Mampu Tatalaksana KtP/A dan PPT / PKT di RS	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial yang Diberikan oleh Petugas Rehabilitasi sosial Terlatih Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di dalam Unit Pelayanan Terpadu	75%	100%	133%	75%	100%	133%
		Cakupan Layanan Bimbingan Rohani yang Diberikan Oleh Petugas Bimbingan Rohani Terlatih Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Dalam Unit Pelayanan Terpadu	75%	100%	133%	75%	100%	133%
		Cakupan Penegakan Hukum dari Tingkat Penyidikan sampai dengan Putusan Pengadilan atas Kasus-kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	80%	N/A	N/A	80%	N/A	N/A
		Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum	50%	100%	200%	50%	100%	200%
		Cakupan Layanan Pemulangan Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	50%	30%	60%	50%	30%	60%
		Cakupan Layanan Reintegrasi Sosial Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	100%	30%	30%	100%	30%	30%
7	Keluarga Berencana	Cakupan Pasangan Usia Subur yang isterinya dibawah usia 20 tahun	100%	1,14%	198,86	100%	0,05%	199,95%
		Cakupan Sasaran Pasangan Usia Subur menjadi Peserta KB aktif	100%	129,10%	129,10%	100%	81,00%	81,00%



No.	Bidang Pelayanan	Indikator	Tahun 2016			Tahun 2017		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
		Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	100%	18,5%	181,5%	100%	18,24%	181,76%
		Cakupan Anggota Bina Keluar-ga Balita (BKB) ber-KB	100%	119,90%	119,90%	100%	100%	100%
		Cakupan PUS peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pen-dapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB	100%	85,10%	85,10%	100%	N/A	N/A
		Ratio Petugas Lapangan Keluarga Berencana/Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB/ PKB) 1 Petugas di setiap 2 (dua) desa/kelurahan	100%	86%	86,00%	100%	N/A	N/A
		Ratio Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD) 1 (satu) petugas di setiap desa/ kelurahan	100%	100%	100,00%	100%	100%	100%
		Cakupan Penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat 30% setiap tahun	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa/kelurahan 100% setiap tahun	100%	100%	100,00%	100%	100%	100,00%
8	Penataan Ruang	Meningkatnya keberlanjutan dan ketersediaan air untuk memenuhi kebutuhan masyarakat	100%	100,07%	100,07%	100%	100%	100%
		Tersedianya jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah kabupaten/kota.	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Tersedianya jalan yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan nyaman.	60%	98,61%	164,35%	60%	98,72%	165%
		Tersedianya akses air minum yang aman melalui Sistem Penyediaan Air Minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/ hari	100%	95,23%	95,23%	100%	95,23%	95%
		Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan.	20%	N/A	N/A	20%	14,81%	74,05%
		Tersedianya sistem penanganan sampah di perkotaan.	70%	N/A	N/A	70%	90,37%	129,1%
		Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota	50%	100%	200%	50%	100%	200%



No.	Bidang Pelayanan	Indikator	Tahun 2016			Tahun 2017		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
		Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) dan tidak lebih dari 2 kali setahun	50%	100%	200%	50%	100%	200%
		Terlayannya masyarakat dalam pengurusan IMB di kabupaten/kota.	100%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
		Penerbitan IUJK dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah persyaratan lengkap.	100%	100,00%	100,00%	100%	100,00%	100,00%
		Tersedianya Sistem Informasi Jasa Konstruksi setiap tahun	100%	100%	100,00%	100%	100,00%	100%
		Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya melalui Peta Analog	100%	100,00%	100,00%	100%	100%	100%
		Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya melalui Peta Digital	100%	100,00%	100,00%	100%	100,00%	100,00%
		Tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan.	50%	108,65%	217,3%	50%	108,75%	217,5%
9	Ketenagakerjaan	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	60%	2,01%	3,35%	60%	97,93%	163,21%
		Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	60%	51,61%	86,02%	60%	N/A	N/A
		Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	40%	74,51%	186,28%	40%	53,58%	133,95%
		Besaran Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	50%	47,13%	94,26%	50%	100%	200%
		Besaran Pekerja/buruh yang menjadi peserta Jamsostek	50%	79,53%	159,06%	50%	N/A	N/A
		Besaran pemeriksaan perusahaan	45%	52,86%	117,47%	45%	N/A	N/A
		Besaran pengujian peralatan di perusahaan	50%	52,22%	104,44%	50%	N/A	N/A
10	Kominfo	Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi Nasional melalui:						



No.	Bidang Pelayanan	Indikator	Tahun 2016			Tahun 2017		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
		Media massa:	100%	86,00%	86,00%	100%	99,98%	99,98%
		Media website (media online)	100%	78,04%	78,04%	100%	99,85%	99,85%
		Media tradisional seperti pertunjukan rakyat;	100%	83,33%	83,33%	100%	93,51%	93,51%
		Media interpersonal seperti sarasehan, ceramah/diskusi dan lokakarya;	100%	100,00%	100,00%	100%	100,00%	100,00%
		Media luar ruang:	100%	100,00%	100,00%	100%	100,00%	100,00%
		Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	50%	100,00%	200,00%	50%	100,00%	200,00%
11	Kesenian	Cakupan Kajian Seni	100%	60,00%	60,00%	100%	75,00%	75,00%
		Cakupan Fasilitasi Seni	100%	85,71%	85,71%	100%	87,00%	87,00%
		Cakupan Gelar Seni	100%	100,00%	100,00%	100%	100,00%	100,00%
		Misi Kesenian	100%	100,00%	100,00%	100%	100,00%	100,00%
		Cakupan Sumberdaya Manusia Kesenian	100%	63,00%	63,00%	100%	65,00%	65,00%
		Cakupan tempat	100%	100,00%	100,00%	100%	100,00%	100,00%
		Cakupan Organisasi	100%	66,67%	66,67%	100%	70,00%	70,00%



BAB III

GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Dalam melaksanakan pembangunan, setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah sesuai dengan kewenangannya sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Berkaitan dengan pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Kota Surabaya dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran, program maupun kegiatan telah mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan dalam hal penyusunan rencana terkait keuangan daerah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD. Pedoman tersebut mengisyaratkan bahwa dalam pengelolaan keuangan daerah agar berasaskan prestasi kerja. Hal tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban dari suatu kegiatan untuk sebuah produk/hasil yang mengutamakan output.

3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu

Analisis kinerja keuangan masa lalu dimaksudkan untuk mengetahui kinerja kondisi keuangan dimasa lalu. Dari analisis kinerja beberapa tahun ke belakang dapat menjadi referensi melakukan proyeksi kinerja kondisi keuangan melalui berbagai macam metode analisa misalnya dengan melihat rata-rata pertumbuhan, menggunakan asumsi makro ekonomi (PDRB/laju pertumbuhan ekonomi, inflasi dan lain-lain), dan dapat juga dengan dasar kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah serta dapat melalui kebijakan bidang keuangan daerah.



3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD

Pengukuran kinerja pelaksanaan APBD dilaksanakan dengan mengukur perkembangan pendapatan dan belanja tidak langsung, proporsi sumber pendapatan, pencapaian kinerja pendapatan dan gambaran realisasi belanja daerah sebagaimana terlihat pada Tabel III.1 di bawah ini.

Tabel III.1
Rata-rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Surabaya
Tahun 2014-2018

Uraian	Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan
	2014	2015	2016	2017	2018	
PENDAPATAN DAERAH	6.052.441.118.039	6.619.031.160.937	6.825.754.275.892	8.033.573.163.670	8.175.219.120.670	7,09%
1 Pendapatan Asli Daerah	3.307.323.863.978	4.035.649.478.398	4.090.206.769.388	5.161.844.571.172	4.973.031.004.728	11,48%
1,1 Pajak Daerah	2.427.647.860.148	2.738.899.424.558	3.000.152.384.487	3.595.670.492.734	3.817.402.592.324	12,09%
1,2 Retribusi Daerah	270.112.725.497	537.319.752.463	339.453.230.306	557.966.574.670	346.798.583.545	22,16%
1,3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	120.856.635.210	135.324.221.731	131.847.096.407	134.668.941.612	140.036.260.033	3,88%
1,4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	488.706.643.123	624.106.079.645	618.754.058.188	873.538.562.156	668.793.568.826	11,15%
2 Dana Perimbangan	1.488.374.891.545	1.384.772.424.683	1.941.019.526.654	1.965.635.624.698	2.088.869.968.843	10,19%
2,1 Dana Bagi Hasil Pajak	246.211.550.026	206.314.915.900	393.908.771.611	358.835.507.237	410.894.374.246	20,08%
2,2 Bagi Hasil Bukan Pajak	21.419.313.519	23.946.332.783	18.880.139.043	16.587.434.797	67.464.332.495	71,30%
2,3 Dana Alokasi Umum	1.200.889.359.000	1.147.385.486.000	1.233.380.404.000	1.211.713.876.000	1.211.713.876.000	0,32%
2,4 Dana Alokasi Khusus	19.854.669.000	7.125.690.000	294.850.212.000	378.498.806.664	398.797.386.102	1001,87%
3 Lain-lain Pendapatan Daerah	1.256.742.362.516	1.198.609.257.856	794.527.979.850	906.092.967.800	1.113.318.147.099	-0,36%
3,1 Hibah	-	-	-	-	181.544.145.050	0,00%
3,2 Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	779.576.048.153	707.673.658.856	786.702.579.850	853.167.802.800	880.120.602.049	3,39%
3,3 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	448.340.154.000	463.025.317.000	-	-	-	-24,18%
3,3 Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	2.836.580.000	3.107.400.000	2.825.400.000	2.903.400.000	2.903.400.000	0,81%
3,5 Dana Bagi Hasil Lainnya Pemerintah Provinsi	2.360.319.363	-	-	-	-	0,00%
3,4 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	23.629.261.000	24.802.882.000	5.000.000.000	50.021.765.000	48.750.000.000	205,75%
BELANJA DAERAH	5.707.378.466.054	6.490.359.759.532	7.151.661.549.430	7.912.409.152.257	8.176.929.496.299	8,5%
A BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.115.708.274.320	2.202.272.347.768	2.326.910.015.520	2.073.170.416.960	1.956.460.835.709	-1,70%
1 Belanja Pegawai	1.842.969.821.699	1.949.428.530.122	2.092.288.193.728	1.960.289.143.905	1.857.794.385.641	0,39%
2 Belanja Bunga	-	-	-	-	-	0,00%
3 Belanja Subsidi	-	-	19.005.408.000	-	-	-25,00%
4 Belanja Hibah	271.860.862.621	252.111.246.646	214.488.143.792	111.504.410.055	81.167.517.434	-24,35%
5 Belanja Bantuan Sosial	89.670.000	-	-	-	-	-25,00%
6 Belanja Bagi Hasil kpd. Prop/Kab/Kota	-	-	-	-	9.254.742.990	0,00%
7 Belanja Bantuan Keuangan kpd. Prop/Kab/Kota	787.920.000	732.571.000	1.128.270.000	1.376.863.000	2.158.290.000	31,44%
8 Belanja Tidak Terduga	-	-	-	-	6.085.899.644	0,00%
B BELANJA LANGSUNG	3.591.670.191.734	4.288.087.411.764	4.824.751.533.910	5.839.238.735.298	6.220.468.660.590	14,87%
1 Belanja Pegawai	344.917.914.825	376.989.023.238	448.667.099.371	435.954.095.330	483.644.287.890	9,10%
2 Belanja Barang dan Jasa	1.842.385.851.488	2.125.973.133.026	2.586.690.389.712	2.885.392.981.721	3.306.763.333.391	15,80%
3 Belanja Modal	1.404.366.425.421	1.785.125.255.500	1.789.394.044.827	2.517.891.658.246	2.430.061.039.309	16,14%
PEMBIAYAAN DAERAH	966.481.888.081	1.286.258.405.500	1.394.942.990.241	1.068.144.127.993	1.200.286.819.051	3,27%
1 Penerimaan Pembiayaan	977.118.888.081	1.311.550.405.500	1.414.942.990.241	1.068.144.127.993	1.200.286.819.051	2,84%
a Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA) & Silpa BLUD	977.089.154.745	1.311.544.540.067	1.414.929.806.905	1.068.140.827.993	1.200.284.819.051	7,49%
b Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-
c Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-	-	-
d Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-
e Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	29.733.336	5.865.433	13.183.336	3.300.000	2.000.000	-17,47%
f Penerimaan piutang Daerah	-	-	-	-	-	-
2 Pengeluaran Pembiayaan	10.637.000.000	25.292.000.000	20.000.000.000	-	-	7,87%
a Pembentukan dana cadangan	-	-	-	-	-	-
b Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	10.637.000.000	25.292.000.000	20.000.000.000	-	-	4,21%
c Pembayaran Pokok Utang	-	-	-	-	-	-
d Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-

Sumber :BadanPengelolaanKeuangan dan Pajak Daerah 2019



3.1.1.1 Perkembangan dan Kinerja Pendapatan Daerah serta Proporsi Sumber Pendapatan

Sumber utama pendapatan Pemerintah Kota Surabaya berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), kemudian Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Realisasi Pendapatan Daerah Kota Surabaya menunjukkan trend pertumbuhan yang positif, khususnya dari peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah). Berdasarkan data Pendapatan Daerah Kota Surabaya selama 5 tahun kebelakang mulai tahun 2014–2018 menunjukkan tingkat kemandirian Pemerintah Kota Surabaya yang semakin baik, hal ini ditunjukkan dengan proporsi Dana Perimbangan terhadap Pendapatan Daerah semakin kecil yaitu pada Tahun 2014 proporsi PAD terhadap total pendapatan sebesar 54,64% sedangkan proporsi Dana Perimbangan sebesar 24,59% dan Lain – Lain Pendapatan Daerah yang sah sebesar 20,76%. Selanjutnya Tahun 2018 proporsi PAD terhadap total pendapatan telah mencapai sebesar 60,83% sedangkan proporsi Dana Perimbangan yaitu sebesar 25,55% dan Lain – Lain Pendapatan Daerah yang sah sebesar 13,62 %.

Berdasarkan pada Tabel III.1 rata-rata pertumbuhan realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya pada Tahun 2014-2018 sebesar 11,48%, sementara rata-rata pertumbuhan realisasi Dana Perimbangan sebesar 10,19% dan rata-rata pertumbuhan realisasi Lain – lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar (-0,36%). Secara umum, realisasi Pendapatan Daerah Kota Surabaya menunjukkan tren pertumbuhan yang positif dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 7,09%.

3.1.1.2 Realisasi Belanja Daerah

Belanja Daerah merupakan kewajiban Pemerintah Kota sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dan merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis belanja yang bersangkutan. Pengelolaan belanja daerah dilaksanakan berlandaskan pada anggaran kinerja (*performancebudget*) yaitu belanja daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja. Analisis belanja sekurang – kurangnya dilihat dari realisasi belanja dibanding anggaran pada periode 5 tahun sebelumnya.

Kondisi belanja daerah mengalami pertumbuhan sebagaimana pendapatan daerah. Pada tahun 2014, total belanja sebesar Rp5.707,37 Miliar dan pada tahun 2015 sebesar Rp6.490,35 Miliar. Pada tahun 2016 total belanja Pemerintah Kota



Surabaya mencapai Rp7.151,66 Miliar dan pada tahun 2017 sebesar Rp7.912,40 Miliar. Pada tahun 2018 total belanja Pemerintah Kota sebesar Rp8.176,92 Miliar. Rata-rata pertumbuhan total belanja Pemerintah Kota Surabaya pada periode tahun 2014-2018 mencapai 8,50%, dengan rata-rata pertumbuhan Belanja Tidak Langsung sebesar (-1,70%) dan rata-rata pertumbuhan Belanja Langsung sebesar 14,87%.

3.1.1.3 Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Rata – rata pertumbuhan pembiayaan riil kota Surabaya selama 5 tahun terakhir yaitu 2014 – 2018 adalah 3,27% dengan rata – rata pertumbuhan penerimaan pembiayaan sebesar 2,84% dan rata – rata pertumbuhan pengeluaran pembiayaan 7,87%.

3.1.2 Neraca Daerah

Analisis neraca daerah bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan pemerintah daerah melalui perkembangan neraca daerah 2014 – 2018, analisis rasio likuiditas, rasio solvabilitas dan analisis rasio aktivitas serta kemampuan aset daerah untuk penyediaan dana pembangunan daerah. Neraca daerah kota Surabaya tahun 2014 – 2018 tampak pada tabel berikut ini:



Tabel III.2
Neraca Daerah Kota Surabaya 2014 - 2018

Uraian	Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan
	2014	2015	2016	2017	2018	
ASET						
ASET LANCAR						
1 Kas di Kas Daerah	1,238,263,150,105	1,257,542,943,377	994,779,415,850	1,106,448,757,810	1,098,456,435,065,80	-2.21%
2 Kas di Bendahara Penerimaan	108,286,008	102,002,060	247,687,400	454,289,900	118,542,800	36.63%
3 Kas di Bendahara Pengeluaran	83,538,522	501,031,549	326,606,810	53,399	-	66.24%
4 Piutang Lainnya						
a. Kas di BLUD	92,413,827,518	128,882,000,987	65,775,491,105	55,282,292,386	62,765,470,560.88	-2.98%
b. Kas di Bendahara Kapitasi	14,144,539,444	32,372,760,641	31,647,962,220	33,438,001,563	31,065,104,197.0	31.30%
c. Kas Dana BOS	-	11,750,460,043	12,685,055,275	10,822,160,761	11,535,694,152	-0.03%
d. Kas yang Dibatasi Penggunaannya	-	32,625,702,900	28,447,944,225	21,855,947,800	20,427,725,990	-10.63%
e. Kas Lainnya	-	-	628,154,262	-	-	-25.00%
5 Investasi Jangka Pendek	-	-	-	-	-	0.00%
6 Piutang Pajak	599,682,744,180	728,257,333,590	672,148,776,048	742,794,141,342	857,059,939,406	9.91%
7 Piutang Retribusi	67,406,396,625	43,054,696,725	38,391,439,846	24,734,611,417	16,872,108,449.57	-28.58%
8 Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	526,580,776	274,277,461	274,277,461	274,277,461	-11.98%
9 Piutang PAD Lainnya	129,158,706,490	20,316,003,666	17,723,181,838	68,780,308,328	83,807,837,333.86	53.22%
10 Piutang Transfer	-	208,654,773,834	169,394,782,689	146,032,615,008	16,186,055,410	-30.38%
11 Piutang Pendapatan Lainnya	-	27,136,117,016	38,356,633,774	-	-	-14.66%
12 Penyisihan Piutang	(495,384,515,002)	(506,573,382,278)	(526,281,124,173)	(539,298,803,214)	(571,757,723,973.68)	3.66%
13 Belanja Dibayar Dimuka	917,359,531	651,188,879	519,521,508	379,851,943	25,868,166.67	-42.33%
14 Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	353,308,881	283,777,522	271,360,000	271,360,000	271,360,000	-6.01%
15 Persediaan	68,524,785,490	96,760,338,981	109,313,332,067	154,994,751,650	188,257,860,159.95	29.36%
JUMLAH ASET LANCAR	1,715,672,127,792	2,082,844,330,269	1,654,650,498,206	1,827,264,617,554	1,815,366,555,179	2.66%
ASET TETAP						
1 Tanah	26,475,340,943,249	26,707,851,769,186	27,183,937,190,461	28,725,600,041,169	29,083,187,906,079.30	2.39%
2 Peralatan Mesin	1,780,486,966,955	2,149,215,773,508	2,332,547,044,507	2,595,671,290,798	2,942,415,613,620.25	13.47%
3 Gedung dan Bangunan	2,862,272,113,054	3,327,823,435,902	3,693,185,474,141	3,974,387,977,780	4,498,200,100,343.17	12.01%
4 Jalan, Irigasi dan Jaringan	3,304,614,532,028	3,986,329,299,557	4,516,105,143,903	5,236,032,529,486	5,714,134,066,590.56	14.75%
5 Aset Tetap Lainnya	71,967,855,601	134,255,742,980	81,724,862,674	92,032,562,311	102,754,570,325.94	17.92%
6 Konstruksi Dalam Pengerjaan	195,717,827,531	145,015,970,295	219,955,860,933	297,982,321,747	561,856,365,382.23	37.45%
7 Akumulasi Penyusutan	-	(2,674,375,304,562)	(3,935,642,527,163)	(4,516,487,119,900)	(5,132,403,255,428.81)	18.89%
JUMLAH ASET TETAP	34,690,400,238,418	33,776,116,686,866	34,091,813,049,456	36,405,219,603,391	37,770,145,366,913	2.21%
ASET LAINNYA						
1 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	9,999,800	2,000,416,482	1,092,654,062	1,092,654,062	1,092,654,062	4964.80%
2 Kemitraan dengan Pihak Ketiga	186,112,082,293	242,176,678,019	242,202,677,019	256,783,830,019	237,192,407,519.01	7.13%
3 Aset Tidak Berwujud	6,174,598,511	3,919,216,001	8,162,962,555	10,211,148,595	8,157,909,500.50	19.18%
4 Akumulasi Amortisasi	-	(2,452,507,116)	(4,546,351,198)	(6,811,274,933)	(5,416,655,000.50)	28.68%
5 Aset Lain-lain	113,540,014,781	139,491,561,578	141,129,002,408	612,003,291,477	993,953,329,811.09	105.02%
JUMLAH ASET LAINNYA	305,836,695,385	385,135,364,964	388,040,944,846	873,279,649,220	1,234,979,645,892.10	48.29%
JUMLAH ASET	36,711,909,061,594	36,244,096,382,098	36,134,504,492,508	39,105,763,870,166	40,820,491,567,984	2.76%
INVESTASI JANGKA PANJANG						
Investasi Non Permanen						
1. Investasi Non Permanen Lainnya	3,949,380,381	3,943,514,948	3,930,331,612	3,927,031,612	3,925,031,612.27	-0.15%
2. Penyisihan Investasi Non Permanen Lainnya	(3,949,380,381)	(3,943,514,948)	(3,930,331,612)	(3,927,031,612)	(3,925,031,612.27)	-0.15%
Jumlah Investasi Non Permanen	-	-	-	-	-	0.00%
Investasi Permanen						
1. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	1,894,028,603,745	1,978,740,623,482	2,000,099,076,265	2,070,487,067,165	2,152,289,819,133	3.26%
2. Investasi Permanen Lainnya	-	-	-	-	-	0.00%
Jumlah Investasi Permanen	1,894,028,603,745	1,978,740,623,482	2,000,099,076,265	2,070,487,067,165	2,152,289,819,133	3.26%
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	1,894,028,603,745	1,978,740,623,482	2,000,099,076,265	2,070,487,067,165	2,152,289,819,133	3.26%
KEWAJIBAN						
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK						
1 Utang Perhitungan Pihak Ketiga	33,360,515,522	6,460,294,373	16,395,434,260	5,702,053,747	196,658,424.76	-22.15%
2 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-	-	-	4,340,630,691.33	-	-25.00%
3 Pendapatan Diterima Dimuka	6,784,388,304	225,519,076,200	232,806,611,500.0	427,440,703,263	409,998,107,460.49	826.71%
4 Utang Belanja	-	54,476,832,970	70,588,536,341.20	102,546,820,693	95,020,077,453	16.88%
5 Kewajiban - Penerimaan Kas yang Belum Teridentifikasi Kepemilikannya	-	32,625,702,900	28,447,944,225	21,855,947,800	23,419,315,356	-7.21%
6 Utang Jangka Pendek Lainnya	65,037,395,378	53,743,156,659	45,457,782,310.59	45,302,580,252	37,065,224,465.67	-12.83%
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	105,182,299,203	372,825,063,102	393,696,308,637	607,188,736,445	565,699,383,160	76.86%
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG						
1 Utang Kepada Pemerintah Pusat	-	-	-	-	-	0.00%
2 Utang Jangka Panjang Lainnya	-	-	9,143,439,499	8,415,875,917	-	-26.99%
Jumlah Kewajiban Jangka panjang	-	-	9,143,439,499	8,415,875,917	-	-26.99%
JUMLAH KEWAJIBAN	105,182,299,203	372,825,063,102	402,839,748,136	615,604,612,362	565,699,383,160	76.80%
EKUITAS						
1 EKUITAS	38,500,755,366,136	37,850,011,942,479	37,731,763,820,637	40,560,646,324,969	42,407,082,003,956.50	2.51%
JUMLAH EKUITAS	38,500,755,366,136	37,850,011,942,479	37,731,763,820,637	40,560,646,324,969	42,407,082,003,956.50	2.51%
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	38,605,937,665,340	38,222,837,005,581	38,134,603,568,772	41,176,250,937,331	42,972,781,387,116	2.78%

Kondisi Neraca Daerah mengalami pertumbuhan sebagaimana pendapatan daerah. Pada tahun 2014 total aset pemerintah kota Surabaya sebesar Rp36.711,90 Miliar dan pada tahun 2015 sebesar Rp36.244,09 Miliar. Pada tahun 2016 total



aset Pemerintah Kota Surabaya mencapai Rp36.134,50 Miliar dan pada tahun 2017 sebesar Rp39.105,76 Miliar. Pada tahun 2018 total aset Pemerintah Kota sebesar Rp40.820,49 Miliar. Rata-rata pertumbuhan total aset Pemerintah Kota Surabaya pada periode tahun 2014-2018 mencapai 2,79%. Investasi pemerintah kota Surabaya pada tahun 2014 sebesar Rp1.894,02 miliar, tahun 2015 sebesar Rp1.978,74 miliar, tahun 2016 sebesar Rp2.000,09 miliar, tahun 2017 sebesar Rp2.070,48 miliar dan 2018 sebesar Rp2.152,28 miliar. Untuk kewajiban, pada tahun 2014 kewajiban total sebesar Rp105.182,29 miliar sedangkan 2015 sebesar Rp372.825,06 miliar, untuk tahun 2016 Rp402.839,74 miliar sedangkan 2017 sebesar Rp615.604,61 miliar. Pada tahun 2018 kewajiban Pemerintah Kota Surabaya sebesar Rp565.699,38 miliar. Rata – rata pertumbuhan kewajiban pada periode 2014 – 2018 mencapai 76,80%.

Tingkat kualitas pengelolaan keuangan daerah dapat diketahui berdasarkan analisis rasio atau perbandingan antara kelompok/elemen laporan keuangan yang satu dengan kelompok yang lain. Beberapa rasio yang dapat diterapkan di sektor publik adalah rasio likuiditas, rasio solvabilitas dan rasio aktivitas. Rasio likuiditas terdiri rasio lancar (*current ratio*), rasio kas (*cash ratio*) dan rasio cepat (*quick ratio*). Rasio lancar (*current ratio*) adalah rasio standar untuk menilai kesehatan organisasi. Rasio ini menunjukkan apakah pemerintah daerah memiliki aset yang cukup untuk melunasi kewajiban yang jatuh tempo. Kualitas pengelolaan keuangan daerah dikategorikan baik apabila nilai rasio lebih dari satu. Rasio keuangan Kota Surabaya Tahun 2016-2018 dapat dilihat pada Tabel III.5 berikut.

Tabel III.3
Analisis Rasio Keuangan Kota Surabaya
Tahun 2016-2018

Uraian	2016	2017	2018
Rasio lancar (<i>current ratio</i>)	4,20	3,01	3,20
Rasio quick (<i>quick ratio</i>)	3,93	2,75	2,86
Rasio total hutang terhadap total aset (Rasio Solvabilitas)	0,011	0,015	0,014
Rasio hutang terhadap modal (rasio solvabilitas)	0,011	0,015	0,013
Rata-rata umur piutang	52,52	43,69	54,99
Rata-rata umur persediaan	68,19	67,02	87,03

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah 2019, diolah



Dari Tabel III.5 diatas terlihat bahwa pada tahun 2016 rasio lancar (*current ratio*) Pemerintah Kota Surabaya sebesar 4,20 dan pada tahun 2017 rasio lancar mengalami penurunan menjadi 3,01 dan pada tahun 2018 rasio lancar Pemerintah Kota Surabaya sebesar 3,20. Hal ini menunjukkan likuiditas Pemerintah Kota Surabaya cukup bagus karena kemampuan membayar utangnya tinggi.

Trend *quick ratio* hampir sama polanya dengan *current ratio*. Meskipun mengalami penurunan pada tahun 2017 namun meningkat lagi di 2018, tetapi tingginya *quick ratio* memberikan jaminan bahwa kemampuan Pemerintah Kota Surabaya dalam melunasi utang jangka pendeknya masih sangat tinggi.

Rasio solvabilitas adalah rasio untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban – kewajiban jangka panjangnya. Penghitungan solvabilitas menggunakan 2 rasio yaitu rasio utang terhadap aset serta utang terhadap total modal untuk menunjukkan tingkat leverage Pemerintah Kota Surabaya. Nilai leverage Pemerintah Kota Surabaya pada tahun 2016-2018 menunjukkan kisaran angka dibawah 3%. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas aset Pemerintah Kota Surabaya didanai dari modal sendiri. Rendahnya tingkat leverage mengindikasikan bahwa Pemerintah Kota Surabaya pada kondisi yang kuat.

Rasio aktivitas adalah rasio untuk melihat seberapa efektif pemerintah kota Surabaya dalam memanfaatkan semua sumber daya yang dipunyai. Penghitungan rasio aktivitas menggunakan hasil perhitungan dari rata – rata umur piutang dan rata – rata umur persediaan. Piutang merupakan hak Pemerintah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah. Rata-rata umur piutang mengukur efisiensi pengolahan piutang suatu Pemerintah Daerah, serta menunjukkan berapa lama waktu yang diperlukan untuk melunasi piutang atau merubah piutang menjadi kas. Pada tahun 2016, rata-rata umur piutang Pemerintah Kota Surabaya sebesar 52,52% dan pada tahun 2017 sebesar 43,69%. Sedangkan pada tahun 2018 rata-rata umur piutang Pemerintah Kota Surabaya menjadi 54,99%. Berarti kota Surabaya tidak membutuhkan waktu yang lama dalam merubah piutang menjadi kas.

Rata-rata umur persediaan mengukur efisiensi pengelolaan persediaan. Rasio ini merupakan indikasi yang cukup populer untuk menilai efisiensi operasional, yang memperlihatkan seberapa baiknya Pemerintah Daerah mengontrol modal yang ada



pada persediaan. Rata-rata umur persediaan pada Pemerintah Kota relatif berfluktuatif, namun menunjukkan kecenderungan yang semakin membaik karena mengalami peningkatan. Pada tahun 2016, rata-rata umur persediaan Pemerintah Kota Surabaya sebesar 68,19% dan pada tahun 2017 naik menjadi 67,02%. Sedangkan pada tahun 2018 rata-rata umur persediaan Pemerintah Kota Surabaya menjadi 87,03% menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Surabaya semakin baik dalam mengontrol modal yang ada pada persediaannya.

3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Pengelolaan pendapatan daerah diarahkan pada sumber-sumber pendapatan yang selama ini telah menjadi sumber penghasilan Kas Daerah dengan tetap mengupayakan sumber-sumber pendapatan yang baru. Pengelolaan belanja daerah dilaksanakan berlandaskan pada anggaran berbasis kinerja (*performance budget*) yaitu belanja daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja. Kinerja tersebut mencerminkan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik, yang berarti belanja daerah harus berorientasi pada kepentingan publik. Oleh karena itu arah pengelolaan belanja daerah digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan publik terutama pada masyarakat miskin dan kurang beruntung, pertumbuhan ekonomi dan perluasan lapangan kerja.

3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran

3.2.1.1 Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur

Berdasarkan data Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Kota Surabaya Tahun 2014-2018 sebagaimana telah disampaikan pada Tabel III.1, proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur terhadap total pengeluaran yang meliputi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan pada tahun 2014-2018 dirinci pada Tabel III.4 berikut ini:



Tabel III.4
Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur

No	Tahun	Total belanja Untuk pemenuhan kebutuhan aparatur	Total pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran)	Proporsi
1	2014	1,527,276,277,955	5,718,015,166,051	26.71%
2	2015	1,643,073,410,563	6,515,651,759,532	25.22%
3	2016	1,748,472,060,732	7,171,661,549,430	24.38%
4	2017	2,018,094,177,744	7,912,409,152,257	25.51%
5	2018	1,925,302,841,788	8,176,929,496,299	23.55%
			Rata - rata	25.07%

Sumber: Dokumen Laporan Realisasi Anggaran, diolah, 2019

Rata-rata proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur terhadap Total Pengeluaran di Kota Surabaya adalah sebesar 25,07%. Hal ini menunjukkan bahwa APBD kota Surabaya relatif baik dari sisi Belanja, karena proporsi penggunaan anggaran untuk Belanja Aparatur tidak mendominasi terhadap total pengeluaran dalam APBD dan pengeluaran dalam APBD lebih banyak digunakan untuk belanja program pelayanan untuk masyarakat.

3.2.1.2 Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Daerah

Berdasarkan data rata – rata pertumbuhan realisasi Belanja Kota Surabaya Tahun 2014 – 2018 sebagaimana telah disampaikan pada tabel III.1, gambaran proporsi realisasi belanja terhadap anggaran belanja daerah kota Surabaya selama 5 tahun (2014 – 2018) tampak pada tabel III.5 dibawah ini:



Tabel III.5
Tabel Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Daerah
Tahun 2014 - 2018

No	Uraian	2014		2015		2016		2017		2018		Proporsi rata-rata
A	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2,115,708,274,320	37.07%	2,202,272,347,768	33.93%	2,326,910,015,520	32.54%	2,073,170,416,960	26.20%	1,956,460,835,709	23.93%	30.73%
1	Belanja Pegawai	1,842,969,821,699	32.29%	1,949,428,530,122	30.04%	2,092,288,193,728	29.26%	1,960,289,143,905	24.77%	1,857,794,385,641	22.72%	27.82%
2	Belanja Bunga	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	0.00%
3	Belanja Subsidi	-	0.00%	-	0.00%	19,005,408,000	0.27%	-	0.00%	-	0.00%	0.05%
4	Belanja Hibah	271,860,862,621	4.76%	252,111,246,646	3.88%	214,488,143,792	3.00%	111,504,410,055	1.41%	81,167,517,434	0.99%	2.81%
5	Belanja Bantuan Sosial	89,670,000	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	0.00%
6	Belanja Bagi Hasil kpd.	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	9,254,742,990	0.11%	0.02%
7	Belanja Bantuan Keuangan	787,920,000	0.01%	732,571,000	0.01%	1,128,270,000	0.02%	1,376,863,000	0.02%	2,158,290,000	0.03%	0.02%
8	Belanja Tidak Terduga	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	6,085,899,644	0.07%	0.01%
B	BELANJA LANGSUNG	3,591,670,191,734	62.93%	4,288,087,411,764	66.07%	4,824,751,533,910	67.46%	5,839,238,735,298	73.80%	6,220,468,660,590	76.07%	69.27%
1	Belanja Pegawai	344,917,914,825	6.04%	376,989,023,238	5.81%	448,667,099,371	6.27%	435,954,095,330	5.51%	483,644,287,890	5.91%	5.91%
2	Belanja Barang dan Jasa	1,842,385,851,488	32.28%	2,125,973,133,026	32.76%	2,586,690,389,712	36.17%	2,885,392,981,721	36.47%	3,306,763,333,391	40.44%	35.62%
3	Belanja Modal	1,404,366,425,421	24.61%	1,785,125,255,500	27.50%	1,789,394,044,827	25.02%	2,517,891,658,246	31.82%	2,430,061,039,309	29.72%	27.73%
C	TOTAL BELANJA	5,707,378,466,054	100.00%	6,490,359,759,532	100.00%	7,151,661,549,430	100.00%	7,912,409,152,257	100.00%	8,176,929,496,299	100.00%	100.00%

Sumber: Dokumen Laporan Realisasi Anggaran, diolah, 2019

Dari data Tabel III.5 menunjukkan bahwa selama 5 tahun terakhir (2014-2018) proporsi belanja langsung meningkat terus, dan di dalam belanja langsung tersebut proporsi belanja pegawai dan belanja modal berfluktuasi. Namun porsi terbesar tetap pada belanja barang dan jasa yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

3.2.2 Analisis Pembiayaan

Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah, ketika terjadi defisit anggaran. Sumber pembiayaan dapat berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun lalu, penerimaan pinjaman obligasi, transfer dari dana cadangan maupun hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan. Sedangkan pengeluaran dalam pembiayaan itu sendiri adalah anggaran hutang, bantuan modal dan transfer ke dana cadangan.

Dengan diberlakukannya anggaran kinerja, maka dalam penyusunan APBD dimungkinkan adanya defisit maupun surplus. Defisit terjadi ketika pendapatan lebih kecil dibandingkan dengan belanja, sedangkan surplus terjadi ketika pendapatan lebih besar dibandingkan dengan belanja. Pada tahun 2014 sampai dengan 2018 menunjukkan bahwa realisasi belanja Kota Surabaya masih di bawah (lebih



kecil) dari pada realisasi pendapatan sehingga pada periode tersebut Kota Surabaya mengalami surplus anggaran, sebagaimana tampak pada Tabel III.6 berikut:

Tabel III.6
Surplus/Defisit Riil Anggaran Kota Surabaya
Tahun 2014-2018

Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
Realisasi Pendapatan Daerah	6.052.441.118.039	6.619.031.160.937	6.825.754.275.892	8.033.573.163.670	8.175.219.120.669
Dikurangi Realisasi :					
Belanja Daerah	5.707.378.166.051	6.490.359.759.532	7.151.661.549.430	7.912.409.152.257	8.176.929.496.299
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	10.637.000.000	25.292.000.000	20.000.000.000	-	-
Surplus (Defisit) Riil	345.062.951.988	128.671.401.405	(325.907.273.538)	121.164.011.413	(1.710.375.630)

Sumber: Dokumen Laporan Realisasi Anggaran, diolah, 2019

Dari Tabel III.6 di atas tampak bahwa pada tahun 2014 sampai dengan 2015 Kota Surabaya mengalami surplus anggaran. Sedangkan pada 2016 dan 2018 mengalami defisit anggaran. Surplus anggaran pada periode 2014 sampai 2016 dipergunakan sebagai pembiayaan tahun 2016, sedangkan surplus anggaran pada tahun 2017 digunakan untuk pembiayaan tahun 2018. Gambaran komposisi penutup defisit riil anggaran selama 5 tahun terakhir (2014-2018) terlihat pada Tabel III.7 berikut ini:

Tabel III.7
Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran
Kota Surabaya Tahun 2014-2018

No.	Uraian	Proporsi dari Total Defisit		
		2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)
	Defisit Riil			
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	1.414.929.806.905	1.068.140.827.993	1.200.284.819.051
2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-
3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan	-	-	-
4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-
5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	13.183.336,00	3.300.000,00	2.000.000,00
6	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-

Sumber: Dokumen Laporan Realisasi Anggaran, diolah, 2019

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Kota Surabaya selama periode 2014-2018 diantaranya bersumber dari efisiensi pelaksanaan kegiatan tahun sebelumnya dan penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah. Gambaran



realisasi sisa lebih perhitungan anggaran daerah selama 3 tahun terakhir (2016-2018) tampak pada Tabel III.8 berikut.

Tabel III.8
Realisasi Sisa lebih Perhitungan Anggaran

No.	Uraian	2016		2017		2018	
		(Rp)	% dari Silpa	(Rp)	% dari Silpa	(Rp)	% dari Silpa
	Jumlah SILPA	1.414.929.806.905		1.068.140.827.993		1.200.284.819.051	
1	Pelampauan penerimaan PAD	6.825.754.275.892	482,4%	5.161.844.571.172	483%	214.063.767.767	18%
2	Pelampauan penerimaan dana perimbangan	1.941.019.526.654	137,2%	1.965.635.624.698	184%	108.835.666.856	9,07%
3	Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah	794.527.979.850	56,15%	906.092.967.800	84,83%	9.151.174.510	0,76%
4	Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya	963.569.800.965	68,10%	1.051.521.533.803	98,44%	414.958.106.674	34,57%
5	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	16.395.434.260	1,16%	5.702.053.747	0,53%	196.658.424,76	0,02%
6	Kegiatan lanjutan						

Sumber: Dokumen Laporan Realisasi Anggaran, diolah, 2019

Analisis realisasi sisa lebih perhitungan anggaran dilakukan untuk memberikan gambaran tentang komposisi sisa lebih perhitungan anggaran. Dengan mengetahui SILPA realisasi tahun – tahun sebelumnya, dapat diketahui kinerja APBD tahun – tahun sebelumnya yang lebih rasional dan terukur. Dari tabel III.8 dapat dilihat bahwa dalam kurun waktu 3 tahun belanja langsung lebih efisien sehingga bisa digunakan untuk memperbesar belanja pelayanan kepada masyarakat di tahun berikutnya.

3.3 Kerangka Pendanaan

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Suatu kapasitas riil keuangan daerah adalah total penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan berbagai pos atau belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama. Analisis kerangka pendanaan yang meliputi proyeksi pendapatan, belanja dan pembiayaan kota Surabaya tahun 2019 sampai 2021 disajikan pada Tabel III.9.



3.3.1 Proyeksi Pendapatan

Otonomi daerah menimbulkan konsekuensi terhadap Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan segala urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya dalam mewujudkan masyarakat Surabaya yang sentosa. Untuk mencapai tujuan tersebut, dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan diperlukan kemampuan pendanaan dari pemerintah daerah berkaitan dengan upaya melakukan optimalisasi sumber – sumber pendapatan daerah. Pendapatan Daerah merupakan seluruh penerimaan yang berasal dari daerah itu sendiri maupun alokasi dari Pemerintah Pusat sebagai hak pemerintah daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah Kota Surabaya terdiri dari PAD, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Sesuai dengan ruang lingkup keuangan daerah, pengelolaan pendapatan daerah diarahkan pada sumber-sumber pendapatan yang selama ini telah menjadi sumber penghasilan daerah dengan tetap mengupayakan sumber-sumber pendapatan yang baru.

Kebijakan umum pendapatan daerah diarahkan pada peningkatan kemampuan keuangan daerah yang dapat mendorong peranan investasi masyarakat dalam pembangunan dengan menghilangkan kendala yang menghambat di samping peningkatan investasi dan daya saing yang dilakukan dengan mengurangi biaya tinggi. Adapun kebijakan terkait Pendapatan Daerah adalah sebagai berikut:

3.3.1.1 Pendapatan Asli Daerah

Peningkatan pendapatan asli daerah dari masyarakat, harus berdasarkan pada Peraturan Daerah, terutama untuk membiayai layanan-layanan yang diberikan, sehingga kemandirian daerah dalam hal pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat terwujud.

Salah satu upaya yang telah dilakukan dan diandalkan untuk meningkatkan penerimaan daerah adalah dengan menggali sumber-sumber pungutan daerah berdasarkan ketentuan yang memenuhi kriteria pungutan daerah yang baik dan benar serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Arah pengelolaan PAD yang akan datang difokuskan pada langkah-langkah sebagai berikut:



1. Pemantapan kelembagaan dan sistem pemungutan pendapatan daerah.
2. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah.
3. Peningkatan koordinasi dan pengawasan terhadap pemungutan pendapatan daerah.
4. Peningkatan pelayanan publik, baik dari sisi kecepatan pelayanan maupun kemudahan pembayaran untuk memperoleh informasi dan kesadaran masyarakat wajib pajak/retribusi daerah.
5. Pemanfaatan sumber daya organisasi secara efektif dan efisien.
6. Peningkatan upaya sosialisasi pendapatan daerah.
7. Peningkatan kualitas data dasar seluruh pendapatan daerah.
8. Peningkatan peran dan fungsi UPTSA sebagai ujung tombak pelayanan publik.
9. Peningkatan sinergitas dan koordinasi pendapatan asli daerah dengan Pemerintah Pusat, Kabupaten/Kota serta instansi terkait.

3.3.1.2 Dana Perimbangan

Dana Perimbangan merupakan pendapatan pemerintah daerah yang berasal dari pemerintah pusat. Pendapatan yang diperoleh dari dana perimbangan pada dasarnya merupakan hak pemerintah daerah sebagai konsekuensi dari *revenue sharing policy*. Konsep *revenue sharing* didasarkan atas pemikiran untuk pemberdayaan daerah dan prinsip keadilan. Seiring meningkatnya tuntutan akuntabilitas kinerja pemerintah maka kebijakan *revenue sharing* harus transparan, demokratis dan adil.

Sumber Dana yang berasal dari Dana Alokasi Umum perlu dikelola dengan sebaik-baiknya, meskipun relatif sulit untuk memperkirakan besaran alokasinya karena tergantung pada pemerintah pusat. Sumber Dana Alokasi Khusus (DAK) juga dapat diupayakan peningkatannya melalui penyusunan program-program unggulan yang dapat diajukan untuk dibiayai dengan dana DAK. Sedangkan peningkatan pendapatan dari bagi hasil pajak provinsi dan pusat dapat diupayakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. Pendapatan Bagi Hasil sangat terkait dengan aktivitas perekonomian daerah. Dengan semakin meningkatnya aktivitas ekonomi akan berkorelasi dengan naiknya pendapatan yang berasal dari bagi hasil. Pemerintah Daerah harus mendorong meningkatnya aktivitas perekonomian daerah.



Beberapa langkah yang akan dilaksanakan dalam rangka optimalisasi intensifikasi dan ekstensifikasi melalui koordinasi penyaluran dana bagi hasil, peningkatan akurasi data sebagai dasar perhitungan pembagian dalam dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah, dan peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan kabupaten/kota dalam mengoptimalkan bagi hasil dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah.

3.3.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah adalah pendapatan daerah yang berasal dari Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya, dan Dana Penyesuaian dan Otonomi khusus. Kebijakan yang ditetapkan untuk pendapatan tersebut adalah aktif bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur guna meningkatkan penerimaan dari sektor pajak yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi.

Dalam menghitung proyeksi pendapatan, asumsi-asumsi yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Proyeksi Pajak Bumi dan Bangunan berdasarkan asumsi:
 - a. Perhitungan didasarkan atas potensi dari pertumbuhan bangunan-bangunan tinggi dan dari bangkitan ekonomi di Kota Surabaya.
 - b. Perhitungan potensi dari bangunan tinggi didasarkan atas data pendaftaran IMB dan SKRK dari tahun 2012- April 2018 dan asumsi pertumbuhan dimasa yang akandatang
2. Proyeksi BPHTB berdasarkan asumsi potensi dari pertumbuhan aktivitas jual beli properti di kota Surabaya
3. Proyeksi Pajak Hotel berdasarkan asumsi:
 - a. Perhitungan proyeksi pajak hotel didasarkan atas rata-rata okupansi dari hotel sebesar 58%
 - b. Dengan menggunakan rata-rata jumlah kamar per hotel per kelas dan rata-rata tarif hotel per hotel per kelas dan asumsi kenaikan okupansi dan tarif kamar 7% per tahun (berdasarkan PDRB Akomodasi)
4. Proyeksi Pajak Restoran berdasarkan asumsi:
 - a. Perhitungan didasarkan atas data wajib pajak restoran
 - b. Diasumsikan rata-rata pertumbuhan unit restoran sebesar 6% per tahun



5. Proyeksi Pajak Air Bawah berdasarkan asumsi Pemerintah Kota Surabaya berusaha untuk meningkatkan cakupan layanan air bersih dari PDAM dan mengurangi penggunaan air bawah tanah oleh masyarakat
6. Proyeksi Pajak Reklame berdasarkan asumsi Pemerintah Kota Surabaya melakukan penyesuaian regulasi khususnya untuk videotron dengan melakukan perhitungan pajaknya berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dengan pendekatan harga kontrak per setiap kali penayangan materi/iklan
7. Proyeksi Pajak Hiburan berdasarkan asumsi:
 - a. Peningkatan proyeksi pajak hiburan setiap tahunnya dipengaruhi oleh peningkatan even yang akan diadakan di Kota Surabaya
 - b. Selain dari peningkatan even, diasumsikan terdapat penambahan gedung hiburan
8. Proyeksi Pajak Parkir berdasarkan asumsi:
 - a. jumlah kapasitas disesuaikan dengan luas rata-rata daya tampung parkir sesuai kriteria objek pajak
 - b. Tingkat *Turn over* disesuaikan dengan kendaraan yang parkir
 - c. Penentuan *Turn over* yang meningkat dengan mempertimbangkan luas lahan yang tidak bertambah namun tingkat keramaian yang semakin meningkat
9. Proyeksi Pajak Penerangan Jalan berdasarkan asumsi:
 - a. Peningkatan proyeksi pajak penerangan setiap tahunnya diasumsikan oleh peningkatan jumlah bangunan
 - b. diasumsikan adanya kenaikan tarif dasar listrik
10. Proyeksi Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah berdasarkan asumsi :
 - a. belum adanya rencana dari Pemerintah Pusat untuk pemekaran wilayah
 - b. pertumbuhan ekonomi di Kota Surabaya berbanding lurus dengan penjualan kendaraan bermotor sehingga meningkatkan bagi hasil pajak provinsi yang diberikan Pemerintah Provinsi Jawa Timur kepada Pemerintah Kota Surabaya.

Berdasarkan hal – hal diatas, secara umum proyeksi pendapatan daerah tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 rata – rata mengalami peningkatan sebesar 5,02%.



Tabel III.9
Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

	Realisasi			APBD Tahun 2019	Proyeksi		Rata-Rata Pertumbuhan
	2016	2017	2018		2020	2021	
PENDAPATAN DAERAH	6,825,754,275,892	8,033,573,163,670	8,175,219,120,670	8,758,810,027,867	8,913,346,847,640	9,127,604,016,462	6.05%
1 Pendapatan Asli Daerah	4,090,206,769,388	5,161,844,571,172	4,973,031,004,728	5,190,295,025,246	5,391,096,909,848	5,545,244,448,533	6.73%
a Pajak Daerah	3,000,152,384,487	3,595,670,492,734	3,817,402,592,324	4,008,794,324,904	4,244,596,988,225	4,442,976,688,357	8.32%
b Retribusi Daerah	339,453,230,306	557,966,574,670	346,798,583,545	382,785,780,664	392,512,777,081	359,076,522,006	6.19%
c Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	131,847,096,407	134,668,941,612	140,036,260,033	155,431,097,801	167,501,717,512	159,360,135,447	4.00%
d Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	618,754,058,188	873,538,562,156	668,793,568,826	643,283,821,877	586,485,427,030	583,831,102,723	0.93%
2 Dana Perimbangan	1,941,019,526,654	1,965,635,624,698	2,088,869,968,843	2,316,324,635,003	2,338,172,801,173	2,355,683,308,808	4.02%
a Dana Bagi Hasil Pajak	393,908,771,611	358,835,507,237	410,894,374,246	446,354,828,003	468,920,458,076	486,430,965,711	4.60%
b Bagi Hasil Bukan Pajak	18,880,139,043	16,587,434,797	67,464,332,495	83,445,154,000	82,727,690,097	82,727,690,097	63.48%
c Dana Alokasi Umum	1,233,380,404,000	1,211,713,876,000	1,211,713,876,000	1,308,697,316,000	1,308,697,316,000	1,308,697,316,000	1.25%
d Dana Alokasi Khusus	294,850,212,000	378,498,806,664	398,797,386,102	477,827,337,000	477,827,337,000	477,827,337,000	10.71%
3 Lain-lain Pendapatan Daerah	794,527,979,850	906,092,967,800	1,113,318,147,099	1,252,190,367,618	1,184,077,136,619	1,226,676,259,121	9.51%
a Hibah	-	-	181,544,145,050	181,409,399,999	191,975,140,000	199,509,200,000	1.93%
b Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	786,702,579,850	853,167,802,800	880,120,602,049	981,445,686,619	902,445,686,619	937,881,778,121	3.80%
c Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	-	-	-	-	-	0	0.00%
d Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	2,825,400,000	2,903,400,000	2,903,400,000	3,699,400,000	4,020,429,000	3,649,400,000	5.93%
e Dana Bagi Hasil Lainnya Pemerintah Provinsi	-	-	-	-	-	0	0.00%
f Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	5,000,000,000	50,021,765,000	48,750,000,000	85,635,881,000	85,635,881,000	85,635,881,000	194.71%
BELANJA DAERAH	7,151,661,549,430	7,912,409,152,257	8,176,929,496,299	9,506,272,360,295	9,752,087,691,695	9,963,891,498,890	6.23%
1 Belanja Tidak Langsung	2,326,910,015,520	2,073,170,416,960	1,956,460,835,709	2,340,158,401,100	2,494,309,916,248	2,504,054,971,296	2.01%
a. Belanja Pegawai	2,092,288,193,728	1,960,289,143,905	1,857,794,385,641	2,221,237,964,649	2,259,963,015,551	2,400,003,050,599	3.19%
b. Belanja Bunga	-	-	-	-	-	-	0.00%
c. Belanja Subsidi	19,005,408,000	-	-	-	-	-	-20.00%
d. Belanja Hibah	214,488,143,792	111,504,410,055	81,167,517,434	99,989,015,754	215,415,480,000	85,120,500,000	0.58%
e. Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-	-	-	0.00%
f. Belanja Bagi Hasil kpd. Prop/Kab/Kota	-	-	9,254,742,990	750,000,000	750,000,000	750,000,000	-18.38%
g. Belanja Bantuan Keuangan kpd. Prop/Kab/Kota	1,128,270,000	1,376,863,000	2,158,290,000	3,181,420,697	3,181,420,697	3,181,420,697	25.24%
h. Belanja Tidak Terduga	-	-	6,085,899,644	15,000,000,000	15,000,000,000	15,000,000,000	29.29%
2 Belanja Langsung	4,824,751,533,910	5,839,238,735,298	6,220,468,660,590	7,166,113,959,195	7,257,777,775,447	7,459,836,527,594	9.36%
a. Belanja Pegawai	448,667,099,371	435,954,095,330	483,644,287,890	517,650,383,870	569,028,853,084	536,187,198,913	3.86%
b. Belanja Barang dan Jasa	2,586,690,389,712	2,885,392,981,721	3,306,763,333,391	3,841,940,288,330	4,324,716,834,039	4,016,625,772,186	9.56%
c. Belanja Modal	1,789,394,044,827	2,517,891,658,246	2,430,061,039,309	2,806,523,286,995	2,364,032,088,324	2,907,023,556,495	11.98%



	Realisasi			APBD Tahun 2019	Proyeksi		Rata-Rata Pertumbuhan
	2016	2017	2018		2020	2021	
PEMBIAYAAN DAERAH	1,394,942,990,241	1,068,144,127,993	1,201,997,194,680	747,462,332,428	838,740,844,055	836,287,482,428	-8.79%
1 Penerimaan Pembiayaan	1,414,942,990,241	1,068,144,127,993	1,201,997,194,680	756,287,482,428	848,740,844,055	836,287,482,428	-14.17%
a Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA) & Silpa BLUD	1,414,929,806,905	1,068,140,827,993	1,201,995,194,680	756,287,482,428	848,740,844,055	836,287,482,428	-7.66%
b Pencairan Dana Cadangan							
c Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan							
d Penerimaan Pinjaman Daerah							
e Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	13,183,336	3,300,000	2,000,000	-	0	-	-42.87%
f Penerimaan Oiutang Daerah							
2 Pengeluaran Pembiayaan	20,000,000,000	-	-	8,825,150,000	10,000,000,000	-	0.00%
a Pembentukan dana cadangan							
b Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	20,000,000,000			8,825,150,000	10,000,000,000	-	-17.34%
c Pembayaran Pokok Utang							
d Pemberian Pinjaman Daerah							

(Sumber: Tim Anggaran 2019)



3.3.2 Proyeksi Belanja

Belanja Daerah merupakan perwujudan dari kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang berbentuk kuantitatif. Belanja daerah diarahkan untuk dapat mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan 5 tahun ke depan. Sesuai dengan visi pembangunan yang telah ditetapkan, belanja daerah dapat digunakan sebagai instrumen pencapaian visi tersebut. Pengelolaan belanja sejak proses perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban harus memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, transparan dan akuntabel. Belanja harus diarahkan untuk mendukung kebijakan yang telah ditetapkan dengan memperhatikan perbandingan antara masukan dan keluaran (efisiensi), dimana keluaran dari belanja dimaksud seharusnya dapat dinikmati oleh masyarakat (hasil). Selanjutnya alokasi anggaran perlu dilaksanakan secara terbuka berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan. Selain itu pengelolaan belanja harus diadministrasikan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Belanja daerah sebagai komponen keuangan daerah dalam kerangka ekonomi makro diharapkan dapat memberikan dorongan atau stimulan terhadap perkembangan ekonomi daerah secara makro ke dalam kerangka pengembangan yang lebih memberikan efek multiplier yang lebih besar bagi peningkatan kesejahteraan rakyat yang lebih merata. Untuk itu, kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah perlu disusun dalam kerangka yang sistematis dan terpola.

Dalam rangka mempertimbangkan alokasi belanja, maka diperlukan struktur anggaran dan pengelolaan keuangan daerah yang tepat. Struktur anggaran yang tepat merupakan syarat pokok bagi pengelola keuangan yang baik di daerah, untuk itu ada beberapa yang di lakukan, yaitu:

1. Struktur anggaran harus secara eksplisit memisahkan pendapatan dan pembiayaan. Pembiayaan yang berasal dari utang misalnya, tidak bisa diklaim sebagai pendapatan karena suatu saat nanti dana tersebut harus dikembalikan. Demikian pula penerimaan yang berasal dari kinerja anggaran tahun-tahun sebelumnya (seperti dana cadangan dan SilPA) ataupun dana-dana yang bersifat temporer (seperti hasil penjualan aset daerah) perlu dipertimbangkan jika akan dimasukkan ke dalam komponen pendapatan daerah.
2. Struktur alokasi anggaran harus disusun sesuai prioritasnya, yakni antara alokasi belanja untuk urusan pemerintahan dan penunjang urusan pemerintahan, serta



antara alokasi belanja yang dirasakan manfaatnya secara langsung dan tidak langsung oleh masyarakat. Pengelolaan keuangan di daerah meliputi mobilisasi pendapatan, penetapan alokasi belanja daerah, dan mobilisasi pembiayaan. Untuk memenuhi syarat kecukupan (*sufficient condition*) bagi pengelola keuangan daerah yang baik maka daerah perlu memahami dan menggali potensi keunggulan daerah serta mengidentifikasi pokok-pokok permasalahan yang ada, prioritas-prioritas pembangunan daerah dengan beberapa pertimbangan tersebut menjadi dasar pola alokasi belanja di Kota Surabaya.

Belanja daerah disusun dengan pendekatan kinerja yang ingin dicapai (*performance-based budgeting*). Dalam perencanaan lima tahun ke depan, Belanja Daerah diproyeksikan berdasarkan kebutuhan daerah untuk membiayai antara lain:

1. Belanja tidak langsung yang dipergunakan untuk membiayai gaji pegawai, belanja hibah, bantuan sosial, dan sejenisnya;
2. Belanja langsung yang dipergunakan menjalankan program dan kegiatan dalam mewujudkan visi dan misi kota berupa belanja modal, belanja barang jasa dan belanja operasional lainnya.

Dalam upaya mewujudkan "*Surabaya Kota Sentosa yang Berkarakter dan Berdaya Saing Global Berbasis Ekologi*", perlu dilakukan pembenahan tata ruang, pembangunan infrastruktur dan Sumber Daya Manusia (SDM). Untuk itu, ruang gerak anggaran perlu lebih dioptimalkan tidak hanya melalui mobilisasi sumber pendapatan, tetapi juga melakukan efisiensi belanja. Di samping itu, perlu dilakukan proses penganggaran partisipatif (*participatory budgeting*) dengan melibatkan seluruh *stakeholders*. Dalam upaya memenuhi kebutuhan pembangunan infrastruktur kota, perlu dikembangkan model pembiayaan *public-private partnership*. Kebijakan belanja Pemerintah Kota Surabaya diprioritaskan untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dan diarahkan untuk hal-hal sebagai berikut:

a. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat meningkatkan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dapat diwujudkan dengan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia aparatur daerah, terutama yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat. Efisiensi belanja antara



lain dilakukan dengan meminimalkan belanja yang tidak langsung dirasakan pada masyarakat, melakukan *properbudgeting* melalui analisis *costbenefit* dan tingkat efektivitas setiap program, dan melakukan *prudentspending* melalui pemetaan profil resiko atas setiap belanja kegiatan beserta perencanaan langkah antisipasinya.

b. Prioritas

Penggunaan anggaran diprioritaskan untuk mendanai kegiatan-kegiatan di bidang pendidikan, kesehatan, pengembangan wilayah, peningkatan infrastruktur guna mendukung ekonomi kerakyatan dan pertumbuhan ekonomi serta diarahkan untuk penanggulangan kemiskinan, secara berkelanjutan dengan menitikberatkan pada Urusan Wajib Pelayanan Dasar, Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar, urusan Pilihan dan Non Urusan sesuai dengan Prioritas Pembangunan Kota, dengan meningkatkan alokasi anggaran pada bidang-bidang yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat.

c. Tolok Ukur dan Target Kinerja

Belanja daerah pada setiap kegiatan disertai tolok ukur dan target pada setiap indikator kinerja yang meliputi masukan, keluaran dan hasil sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, dengan kata lain bahwa belanja daerah disusun berdasarkan sasaran/target kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang harus dicapai setiap tahunnya (*performance-basedbudgeting*).

d. Optimalisasi Belanja Langsung

Belanja langsung diupayakan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan secara efisien dan efektif. Belanja langsung disusun atas dasar kebutuhan nyata masyarakat, sesuai strategi pembangunan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Optimalisasi belanja langsung untuk pembangunan infrastruktur publik dilakukan melalui kerjasama dengan pihak swasta, sesuai ketentuan.

e. Transparansi dan Akuntabel

Setiap pengeluaran belanja dipublikasikan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dipublikasikan berarti pula masyarakat mudah dan tidak mendapatkan hambatan dalam mengakses informasi belanja. Pertanggungjawaban belanja tidak hanya dari aspek administrasi keuangan, tetapi menyangkut pula proses, keluaran dan hasilnya.



Pada setiap tahunnya, Belanja daerah nantinya akan dikelompokkan dalam Urusan Pemerintahan dan Penunjang Urusan Pemerintahan. Urusan Pemerintahan terdiri dari Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar, dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi Pendidikan; Kesehatan; Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; perumahan rakyat dan kawasan permukiman; Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, dan Sosial. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi Tenaga Kerja; Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Pangan; Pertanahan; Lingkungan Hidup; Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; Perhubungan; Komunikasi dan Informatika; Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah; Penanaman Modal; Kepemudaan dan Olahraga; Statistik; Kebudayaan, Perpustakaan; dan Kearsipan. Urusan Pemerintahan Pilihan meliputi Kelautan dan Perikanan; Pariwisata; Pertanian; Energi dan Sumber Daya Mineral; dan Perdagangan. Sementara Penunjang Urusan Pemerintahan meliputi Perencanaan, serta Penelitian dan Pengembangan; Keuangan; Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan; dan fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada Tabel III.9 diatas tampak bahwa proyeksi belanja daerah Kota Surabaya tahun 2019-2021 terdiri dari belanja langsung dan tidak langsung. Belanja langsung terdiri belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal. Sedangkan belanja tidak langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, dan belanja tak terduga. Estimasi pertumbuhan belanja tidak langsung dari tahun 2019-2021 memiliki pertumbuhan rata-rata sebesar 2,01%. Sedangkan estimasi pertumbuhan belanja langsung dari tahun 2019-2021 memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 9,36%. Sehingga, pertumbuhan belanja Kota Surabaya secara keseluruhan dari tahun 2019-2021 mengalami pertumbuhan rata-rata pertahun sebesar 6,23%.



3.3.2.1 Proyeksi Pembiayaan Daerah

Proyeksi Pembiayaan Daerah dilakukan untuk memperoleh gambaran sisa lebih riil perhitungan anggaran. Pada periode tahun 2019-2021, pembiayaan netto Kota Surabaya diproyeksikan mengalami pertumbuhan rata-rata negatif sebesar 8,79%.

3.3.3 Penghitungan Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan sisa waktu pelaksanaan program pembangunan jangka menengah 3 (tiga) tahun ke depan. Berdasarkan proyeksi penerimaan daerah dan belanja serta pengeluaran pembiayaan wajib dan mengikat serta prioritas utama, maka dapat diproyeksikan kapasitas riil keuangan daerah yang akan digunakan untuk membiayai program/kegiatan di sisa waktu pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kota Surabaya tahun 2016 - 2021.

Berikut ini disajikan Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Kota Surabaya Tahun 2017-2021.



Tabel III.10
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan
Daerah Kota Surabaya Tahun 2019-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Pendapatan	8,015,183,293,117	8,175,219,120,669	8,785,810,027,867	8,913,346,847,640	9,127,604,016,462
2	Pencairan Dana Cadangan	0	0	0	0	0
3	Sisa Lebih Anggaran Riil	1,189,308,139,405	1,200,284,819,051	756,287,482,428	848,740,844,055	836,287,482,428
	Total Penerimaan	9,204,491,432,522	9,375,503,939,720	9,542,097,510,295	9,762,087,691,695	9,963,891,498,890
	Dikurangi					
4	Belanja Tidak Langsung	2,073,170,416,959	1,956,460,835,708	2,340,158,401,100	2,494,309,916,248	2,504,054,971,296
5	Pengeluaran Pembiayaan	0	0	8,825,150,000	10,000,000,000	-
	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan	7,131,321,015,563	7,419,043,104,012	7,193,113,959,195	7,257,777,775,447	7,459,836,527,594

Sumber :Tim Anggaran, 2019

Berdasarkan proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah, selanjutnya ditetapkan kebijakan alokasi dari kapasitas kemampuan keuangan daerah agar dalam mengalokasikan anggaran benar-benar sesuai dengan prioritas daerah. Selanjutnya perlu ditetapkan kebijakan alokasi dari kapasitas kemampuan keuangan daerah tersebut kedalam 3 Kelompok Prioritas, yaitu Prioritas I, Prioritas II dan III, yaitu sebagai berikut:

- Prioritas I, dialokasikan untuk membiayai belanja langsung wajib dan mengikat serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar.
- Prioritas II, dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan visi dan misi Kepala Daerah.
- Prioritas III, dialokasikan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya.

Rencana penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan Kota Surabaya Tahun 2019-2021 dibuat berdasarkan realisasi tahun 2017–2018 disajikan melalui Tabel III.11 berikut:

Tabel III.11
Penggunaan Kapasitas Riil Keuangan Daerah Kota Surabaya
Tahun 2017– 2021

URAIAN	2017	2018	2019	Proyeksi	
				2020	2021
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan	5,839,238,735,297	6,220,468,660,589	7,166,113,959,195	7,257,777,775,447	7,459,836,527,594
Prioritas I	2,811,621,555,776.89	2,995,185,599,696	3,333,687,894,135	3,485,609,920,796	3,541,554,969,651
Prioritas II	1,967,411,444,164.28	2,095,859,029,864	2,467,200,212,139	2,449,511,592,650	2,478,176,966,282
Prioritas III	1,060,205,735,356	1,129,424,031,029	1,365,225,852,921	1,322,656,262,001	1,440,104,591,661

Sumber :Tim Anggaran, 2019



BAB IV

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

4.1 Permasalahan Pembangunan

Permasalahan pembangunan yang disajikan merupakan gambaran kondisi pada aspek-aspek yang berpengaruh terhadap pencapaian Indikator Kinerja Daerah dan permasalahan-permasalahan yang melingkupi urusan-urusan pemerintahan daerah yang relevan. Permasalahan pembangunan berikut merupakan permasalahan pokok yang meliputi beberapa urusan pemerintahan daerah yang relevan, dan menjadi pijakan dalam perumusan Isu Strategis. Permasalahan Pembangunan dan Isu Strategis akan mendukung Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Kota Surabaya, sebagaimana disajikan dalam uraian berikut.

4.1.1 Urusan Pendidikan

Berbagai permasalahan pembangunan pada Urusan Pendidikan adalah sebagai berikut:

1. Masih terdapat ketimpangan antar wilayah terkait rasio ketersediaan sekolah dan penduduk usia sekolah Kota Surabaya
2. Masih terdapat fasilitas pendidikan yang belum dalam kondisi baik dan/atau belum memiliki sarana prasarana yang sesuai standar
3. Perlunya peningkatan kapasitas tenaga pendidik
4. Belum optimalnya angka partisipasi PAUD
5. Masih terdapat peserta pendidikan kesetaraan yang belum tuntas menyelesaikan pendidikan

4.1.2 Urusan Kesehatan

Berbagai permasalahan pembangunan pada Urusan Kesehatan adalah sebagai berikut:

1. Masih terdapat balita yang mengalami gizi buruk dan kurang gizi dan dengan stunting
2. Masih terdapat kematian ibu per 100.000 kelahiran.
3. Masih terdapat kematian bayi per 1.000 kelahiran dengan penyebab terbanyak adalah kelainan kongenital.



4. Perlunya peningkatan pengawasan keamanan pangan olahan sesuai syarat keamanan pangan.
5. Masih terdapat kelurahan yang belum memenuhi status UCI (*Universal child Immunization*)
6. Masih adanya kelurahan yang belum ODF (*Open Defecation Free*)/bebas buang air besar sembarangan
7. Perlunya peningkatan sarana dan prasarana guna menunjang pelayanan kesehatan Puskesmas dan Rumah Sakit milik Pemerintah Kota Surabaya
8. Perlunya peningkatan promosi kesehatan guna membangun gerakan hidup sehat dan perilaku hidup bersih dan sehat
9. Masih belum terpenuhinya *universal health coverage*
10. Masih adanya masalah kesehatan akibat kasus penyakit menular dan makin meningkatnya kasus penyakit tidak menular
11. Perlunya peningkatan pengawasan dan pembinaan terhadap sarana kesehatan dan sumberdaya manusia kesehatan dalam melaksanakan fungsinya

4.1.3 Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Berbagai permasalahan pembangunan pada Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah sebagai berikut:

1. Masih terdapat wilayah yang perlu dibangun jaringan jalan guna membangun konektivitas antar wilayah
2. Masih terdapat jalan yang belum terpasang PJU hemat energi
3. Masih diperlukannya peningkatan penyediaan prasarana pejalan kaki
4. Masih terdapat wilayah dengan genangan air pada musim penghujan

4.1.4 Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Permasalahan pokok pada urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah sebagai berikut :

1. Masih terdapat kawasan permukiman yang belum ditingkatkan kualitas lingkungan hidupnya.
2. Meningkatnya pengajuan izin mendirikan bangunan sehingga memerlukan pengawasan baik dari lingkup bangunan maupun lingkup konstruksi



3. Masih diperlukannya optimalisasi pemenuhan rumah layak huni
4. Masih diperlukannya peningkatan kualitas dan fungsi gedung pemerintahan

4.1.5 Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Berbagai permasalahan pembangunan pada Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Masih terdapat kejadian kebakaran.
2. Munculnya kawasan-kawasan penduduk dengan sarana dan prasarana/infrastruktur yang belum memadai khususnya pemeliharaan listrik rumah tangga yang belum sesuai ketentuan.
3. Cakupan layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) belum merata, tetapi terdapat kawasan yang cakupan layanannya saling berhimpit dan tumpang tindih.
4. Terdapat kawasan yang belum dilayani Wilayah Manajemen Kebakaran pos kebakaran pembantu (2,5 km), memiliki beberapa lapangan sebagai tempat evakuasi, terjadi kebakaran cukup sering namun tanpa ada sumber air sama sekali (atau tidak dilalui sungai).
5. Terdapat Wilayah Manajemen Kebakaran dengan kepadatan penduduk sedang dan tinggi, jumlah kejadian kebakaran banyak, kawasan kumuh luas, titik kemacetan banyak, tidak ada lapangan dan taman sebagai tempat evakuasi, tetapi memiliki jumlah sumur kebakaran banyak dan dilalui sungai.
6. Terdapat Wilayah Manajemen Kebakaran dengan kepadatan penduduk rendah, jumlah kejadian kebakaran banyak, tidak ada kawasan kumuh, titik kemacetan sedang, tidak ada lapangan dan taman sebagai tempat evakuasi, memiliki jumlah sumur kebakaran sedikit bahkan tidak ada sama sekali tetapi dilalui sungai.
7. Masih maraknya unjuk rasa dengan topik di bidang sosial budaya dengan kondisi kondusif dan tidak menimbulkan kerusuhan.
8. Masih adanya pelanggaran peraturan daerah



4.1.6 Urusan Sosial

Berbagai permasalahan pembangunan pada Urusan Sosial adalah sebagai berikut:

1. Masih terdapat PMKS yang belum tertangani oleh Pemerintah Kota Surabaya.
2. Perlunya optimalisasi penanganan dan ketersediaan data PMKS yang terverifikasi serta keterlibatan dan peran serta PSKS.

4.1.7 Urusan Tenaga Kerja

Berbagai permasalahan pembangunan pada Urusan Tenaga Kerja adalah sebagai berikut :

1. Masih tingginya tingkat pengangguran terbuka
2. Masih terdapat pencari kerja yang belum difasilitasi dan terserap pada pasar kerja formal.
3. Perlunya peningkatan kompetensi pencari kerja agar sesuai dengan kebutuhan pasar kerja formal
4. Masih terdapatnya permasalahan hubungan antara pemberi kerja dan pekerja

4.1.8 Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Berbagai permasalahan pembangunan pada Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut:

1. Perlunya optimalisasi Pemenuhan Registrasi Anak dalam bentuk Kartu Identitas Anak (KIA) dan Akta Kelahiran.
2. Perlunya untuk menekan jumlah perkawinan anak.
3. Perlunya Pembatasan Ketat terhadap Iklan, Promosi, dan Sponsor Rokok.
4. Perlunya penanganan terhadap Situasi darurat dan pornografi dalam bentuk Pelayanan Rehabilitasi bagi penderita HIV-AIDS dan penyalahgunaan NAPZA.

4.1.9 Urusan Pangan

Berbagai permasalahan pembangunan pada Urusan Pangan adalah sebagai berikut:



1. Belum stabilnya produksi beras di daerah penghasil akibat cuaca yang tidak menentu sehingga dapat menyebabkan pasokan berkurang.
2. Masih terdapat bahan pangan segar yang tidak memenuhi syarat keamanan pangan
3. Perlunya peningkatan keanekaragaman konsumsi masyarakat (PPH) yang sesuai dengan gizi seimbang

4.1.10 Urusan Pertanahan

Berbagai permasalahan pembangunan pada Urusan Pertanahan adalah sebagai berikut:

1. Perlunya pengadaan tanah bagi pembangunan infrastruktur untuk kepentingan umum
2. Perlunya optimalisasi pengamanan atas aset milik Pemerintah Kota Surabaya

4.1.11 Urusan Lingkungan Hidup

Berbagai permasalahan Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut

1. Perlunya optimalisasi waktu pengangkutan sampah dari TPS ke TPA
2. Perlunya peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah
3. Perlunya peningkatan pengawasan dan pemeliharaan taman hutan raya
4. Perlunya peningkatan pengawasan dan pemeliharaan taman, jalur hijau, dan taman hutan raya
5. Perlunya optimalisasi pembangunan fasilitas pengelolaan sampah yang menerapkan teknologi 3R

4.1.12 Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Berbagai permasalahan pembangunan pada Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebagai berikut:

1. Perlunya optimalisasi pelayanan penerbitan akte kematian
2. Masih terdapat masyarakat yang belum memiliki kartu tanpa penduduk elektronik (e-KTP)
3. Masih terdapat data ganda pada database sistem informasi administrasi kependudukan



4. Perlunya integrasi data intervensi pada masyarakat berdasarkan data kependudukan

4.1.13 Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Berbagai permasalahan pembangunan pada Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah sebagai berikut:

1. Masih terdapat kebutuhan berKB yang tidak terpenuhi (*unmeet need*)
2. Masih terdapat peserta KB aktif yang drop out kontrasepsi

4.1.14 Urusan Perhubungan

Berbagai permasalahan pembangunan pada Urusan Perhubungan adalah sebagai berikut:

1. Masih terdapat jalan kewenangan kota dengan V/C ratio lebih dari 0,95.
2. Nilai *Load Factor* Kendaraan Umum mengalami penurunan dari tahun sebelumnya.
3. Perlunya pengawasan terhadap emisi kendaraan bermotor
4. Perlunya peningkatan kualitas prasarana tempat parkir

4.1.15 Urusan Komunikasi dan Informatika serta Persandian

Berbagai permasalahan pembangunan pada Urusan Komunikasi dan Informatika serta Persandian adalah sebagai berikut

1. Perlunya peningkatan layanan publik administratif yang berbasis TIK
2. Perlunya peningkatan kualitas jaringan internet dalam mendukung pelayanan publik
3. Perlunya peningkatan pemanfaatan publik terhadap berbagai saluran komunikasi informasi yang disediakan oleh Pemerintah Kota Surabaya

4.1.16 Urusan Penanaman Modal

Berbagai permasalahan pembangunan pada Penanaman Modal adalah sebagai berikut :

1. Masih terdapat perusahaan penanaman modal yang belum menyusun dan membuat LKPM



2. Perlunya optimalisasi ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan lingkup penanaman modal

4.1.17 Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Berbagai permasalahan Kepemudaan dan Olahraga adalah sebagai berikut :

1. Perlunya pemerataan akses fasilitas olahraga
2. Perlunya optimalisasi prestasi atlit baik ditingkat regional, nasional dan internasional
3. Masih rendahnya partisipasi pemuda dalam membuka wirausaha mandiri

4.1.18 Urusan Kebudayaan

Berbagai permasalahan pembangunan pada Urusan Kebudayaan adalah sebagai berikut:

1. Masih terdapat bangunan cagar budaya yang belum terawat dengan baik
2. Masih terdapat beberapa jenis seni budaya yang belum dilestarikan
3. Perlunya optimalisasi pemahaman nilai-nilai kepahlawanan dalam kehidupan bermasyarakat

4.1.19 Urusan Perpustakaan

Berbagai permasalahan Perpustakaan adalah sebagai berikut :

1. Masih rendahnya budaya literasi
2. Perlunya optimalisasi upaya penambahan koleksi buku

4.1.20 Urusan Kearsipan

Permasalahan pokok pada urusan kearsipan adalah perlunya optimalisasi pembinaan dalam pengelolaan sistem tata kearsipan sesuai pada perangkat daerah, unit kerja, BUMD dan sekolah negeri.

4.1.21 Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Berbagai permasalahan pembangunan pada Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah sebagai berikut:

1. Masih terdapat koperasi yang tidak aktif di Kota Surabaya.
2. Terjadi penurunan anggota koperasi pada tahun 2018.



3. Masih terdapat Usaha Mikro yang belum menunjukkan produktivitas.

4.1.22 Urusan Statistik

Permasalahan pokok pada urusan statistik adalah perlunya optimalisasi integrasi data statistik daerah.

4.1.23 Urusan Pariwisata

Berbagai permasalahan pembangunan pada Urusan Pariwisata adalah sebagai berikut:

1. Perlunya peningkatan citra dan diversifikasi pemasaran pariwisata yang efektif dan efisien
2. Perlunya optimalisasi pengelolaan obyek wisata
3. Masih adanya potensi yang dapat dikembangkan menjadi destinasi wisata
4. Perlunya optimalisasi sinergi antar stake holder di bidang pariwisata

4.1.24 Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

Permasalahan pembangunan pada Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral adalah perlunya optimalisasi partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif.

4.1.25 Urusan Perdagangan

Permasalahan pokok pada urusan perdagangan adalah perlunya optimalisasi pendataan pergudangan yang ada di Kota Surabaya

4.1.26 Urusan Kelautan dan Perikanan

Permasalahan pokok pada Urusan Kelautan dan Perikanan Perlunya optimalisasi pembudidaya perikanan dan kelautan dengan mengaplikasikan teknologi tepat guna dalam proses budidaya

4.1.27 Urusan Pertanian

Berbagai permasalahan pembangunan pada Urusan Pertanian adalah sebagai berikut:



1. Perlunya optimalisasi upaya Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hewan Ternak
2. Perlunya optimalisasi penerapan teknologi tepat guna dalam pembudidayaan tanaman pangan dan hortikultura
3. Perlunya optimalisasi penerapan teknologi tepat guna dalam budidaya peternakan

4.1.28 Urusan Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah

Berbagai permasalahan pembangunan pada Urusan Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

1. Perlunya optimalisasi pendataan batas wilayah kecamatan
2. Perlunya optimalisasi penyampaian informasi berita postif Pemerintah Kota Surabaya kepada masyarakat
3. Perlunya optimalisasi penyerapan anggaran kegiatan di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya

4.1.29 Keuangan

Berbagai permasalahan pembangunan pada Urusan Keuangan adalah sebagai berikut

1. Masih terdapat piutang pajak daerah yang belum terbayar
2. Perlunya optimalisasi ketepatan waktu penyusunan dokumen penyusunan anggaran dan pertanggungjawaban keuangan

4.1.30 Urusan Pengawasan

Permasalahan pokok pada urusan ini adalah masih terdapat pelanggaran tata kelola administrasi keuangan pada kasus yang belum berhasil diturunkan.

4.1.31 Urusan Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan

Permasalahan pokok pada urusan ini adalah rencana induk sektoral yang disusun belum tersinkronisasi dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.



4.1.32 Urusan Sarana dan Prasarana Perkantoran

Permasalahan pokok dalam urusan sarana dan prasarana perkantoran adalah perlunya optimalisasi pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran yang efektif dan efisien.

4.1.33 Urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

Berbagai permasalahan pembangunan pada Urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan adalah sebagai berikut:

1. Perlunya optimalisasi kepesertaan pegawai dalam diklat teknis dan fungsional
2. Perlunya optimalisasi kepesertaan pejabat struktural dalam diklat struktural

4.2 Isu Strategis

Isu strategis merupakan penelaahan terhadap permasalahan pembangunan pada level lokal, regional, nasional maupun internasional. Rumusan isu strategis yang perlu menjadi perhatian dalam pelaksanaan pembangunan 2 tahun ke depan adalah sebagai berikut:

4.2.1 Isu Nasional dan Global dan Keterkaitannya dengan Visi Kota Surabaya

Tujuan pembangunan milenium (Millenium Development Goals) yang mulai dijalankan sejak tahun 2000, telah berakhir pada tahun 2015. Sejak 2016 Sustainable Development Goals (SDGs) dicetuskan untuk meneruskan MDGs agar lebih terarah dan berkelanjutan. SDGs diharapkan dapat dicapai pada tahun 2031 dan memiliki 5 pondasi utama meliputi: manusia, planet, kesejahteraan, perdamaian dan kemitraan dengan 17 target sasaran utama, yaitu:

1. Tanpa Kemiskinan

Tidak ada kemiskinan dalam bentuk apapun di seluruh penjuru dunia.

2. Tanpa Kelaparan

Tidak ada lagi kelaparan, mencapai ketahanan pangan, perbaikan nutrisi, serta mendorong budidaya pertanian yang berkelanjutan.

3. Kesehatan yang Baik dan Kesejahteraan

Menjamin kehidupan yang sehat serta mendorong kesejahteraan hidup untuk seluruh masyarakat di segala umur.

4. Pendidikan Berkualitas



Menjamin pemerataan pendidikan yang berkualitas dan meningkatkan kesempatan belajar untuk semua orang, menjamin pendidikan yang inklusif dan berkeadilan serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang.

5. Kesetaraan Gender

Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum ibu dan perempuan.

6. Air Bersih dan Sanitasi

Menjamin ketersediaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua orang.

7. Energi Bersih dan Terjangkau

Menjamin akses terhadap sumber energi yang terjangkau, terpercaya, berkelanjutan dan modern untuk semua orang.

8. Pertumbuhan Ekonomi dan Pekerjaan yang Layak

Mendukung perkembangan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, lapangan kerja yang penuh dan produktif, serta pekerjaan yang layak untuk semua orang.

9. Industri, Inovasi dan Infrastruktur

Membangun infrastruktur yang berkualitas, mendorong peningkatan industri yang inklusif dan berkelanjutan serta mendorong inovasi.

10. Mengurangi Kesenjangan

Mengurangi ketidaksetaraan baik di dalam sebuah negara maupun di antara negara-negara di dunia.

11. Keberlanjutan Kota dan Komunitas

Membangun kota-kota serta pemukiman yang inklusif, berkualitas, aman, berketahanan dan berkelanjutan.

12. Konsumsi dan Produksi Bertanggung Jawab

Menjamin keberlangsungan konsumsi dan pola produksi.

13. Aksi Terhadap Iklim

Bertindak cepat untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya.

14. Kehidupan Bawah Laut

Melestarikan dan menjaga keberlangsungan laut dan kehidupan sumber daya laut untuk perkembangan pembangunan yang berkelanjutan.

15. Kehidupan di Darat

Melindungi, mengembalikan, dan meningkatkan keberlangsungan pemakaian ekosistem darat, mengelola hutan secara berkelanjutan, mengurangi tanah tandus serta tukar guling tanah, memerangi penggurunan, menghentikan dan memulihkan degradasi tanah, serta menghentikan kerugian keanekaragaman hayati.

16. Institusi Peradilan yang Kuat dan Kedamaian

Meningkatkan perdamaian termasuk masyarakat untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses untuk keadilan bagi semua orang termasuk lembaga dan bertanggung jawab untuk seluruh kalangan, serta membangun institusi yang efektif, akuntabel, dan inklusif di seluruh tingkatan.

17. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan

Memperkuat implementasi dan menghidupkan kembali kemitraan global untuk pembangunan yang berkelanjutan.

Hal terpenting bagi kota-kota di dunia termasuk Surabaya dalam pencapaian SDGs adalah sasaran yang ke-11 yaitu bagaimana membuat kota dan permukiman penduduk yang inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan. Namun demikian sasaran-sasaran yang lain akan disinkronkan dengan isu-isu strategis yang digali dari permasalahan pembangunan di Kota Surabaya.

Gambar IV.1
Keterkaitan SDG's dengan Visi Kota Surabaya





4.2.2 Isu Strategis Pemerintah Provinsi Jawa Timur

Selain merupakan hasil penelaahan terhadap dinamika pembangunan yang terjadi di skala kota, penetapan isu strategis Kota Surabaya juga mengacu kepada isu-isu yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur serta mempunyai relevansi dengan kondisi dan pengembangan Kota Surabaya.

4.2.2.1 Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif

Selama 3 (tiga) tahun terakhir perekonomian Surabaya mampu tumbuh stabil di kisaran 6 persen. Angka pertumbuhan ekonomi tersebut lebih tinggi jika dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi Jawa Timur dan nasional. Meskipun pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya mengalami perlambatan sejak tahun 2015, namun perlambatan pertumbuhan tersebut disebabkan oleh faktor ketidakstabilan ekonomi global. Tren perlambatan ini juga terjadi baik pada tingkat Jawa Timur dan Nasional. Meskipun demikian perekonomian terus menunjukkan perbaikan seperti nampak pada tabel IV.1



Tabel IV.1
Pertumbuhan Ekonomi Kota Surabaya, Jawa Timur dan Nasional
Tahun 2016 – 2018 (%)

Pertumbuhan Ekonomi	2016	2017	2018*
Surabaya	6,00	6,13	6,19
Jawa Timur	5,57	5,45	5,50
Nasional	5,03	5,07	5,17

Sumber data: BPS Kota Surabaya,*) Angka Sementara, 2018

4.2.2.2 Ketimpangan Wilayah

Disparitas wilayah dapat dilihat dari PDRB Perkapita kabupaten atau kota di lingkup Provinsi Jawa Timur. Kabupaten atau Kota yang memiliki PDRB perkapita tinggi meliputi Kota Kediri, Kota Surabaya, Kabupaten Gresik, Kabupaten Sidoarjo, dan Kota Malang. Adapun Kabupaten atau Kota yang memiliki nilai PDRB perkapita rendah meliputi Pacitan, Trenggalek, Ponorogo, Bondowoso, Jember, dan Madura (Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumenep).

4.2.2.3 Kerjasama Daerah

Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah telah efektif dilaksanakan sejak tahun 2001, hal ini meningkatkan kesempatan bagi pemerintah daerah untuk memberikan alternatif pemecahan inovatif dalam menghadapi berbagai tantangan yang dihadapi dan mengembangkan potensi daerah dengan lebih optimal. Disamping itu dapat menjadi solusi alternatif bagi pemerintah daerah dalam menghadapi berbagai keterbatasan baik keterbatasan sumber daya alam, sumber daya manusia maupun ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam menghadapi perekonomian global maka kerjasama daerah dengan Luar Negeri menjadi sangat penting, baik dalam rangka perluasan pasar ekspor maupun kerjasama investasi. Disamping itu maju mundurnya suatu daerah juga tergantung daerah-daerah lain yang berdekatan, sehingga kerjasama antar daerah dapat menjadi suatu jembatan yang dapat meminimalisir potensi konflik kepentingan antar daerah menjadi potensi pembangunan yang saling menguntungkan.

4.2.3 Isu Strategis Prioritas Kota Surabaya

Memperhatikan permasalahan yang dihadapi kota Surabaya seiring dengan dinamika dan pengembangan kota serta menelaah isu-isu di lingkup Propinsi Jawa



Timur, Nasional dan global, maka dirumuskan 7 (tujuh) isu strategis kota sebagai berikut:

1. Kebutuhan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dalam Persaingan Global
2. Terpeliharanya Stabilitas Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam Kerukunan Tata Kehidupan Bermasyarakat
3. Keseimbangan Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan dalam Mendukung Keberlanjutan Ekologi
4. Melestarikan Budaya Lokal untuk Menunjang Tinggi Nilai-Nilai Luhur Kehidupan Masyarakat
5. Posisi Strategis Kota Surabaya yang Berpotensi sebagai Penghubung Perekonomian dalam Skala Nasional dan Internasional
6. Tuntutan Masyarakat terhadap Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.
7. Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Peran dan Daya Saing Kota Surabaya dalam Menghadapi Persaingan Global

4.2.3.1 Kebutuhan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dalam Persaingan Global

Isu strategis “Kebutuhan Sumber Daya Masyarakat Kota yang Mampu Menjawab Tantangan Global” menyangkut urusan pendidikan dan kesehatan, pangan, tenaga kerja, kepemudaan dan olahraga, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pemberdayaan masyarakat dan desa.

Perumusan isu Kebutuhan Sumber Daya Masyarakat Kota yang Mampu Menjawab Tantangan Global merupakan hasil penelaahan terhadap beberapa permasalahan pembangunan, yaitu: Kualitas layanan pendidikan; Ketersediaan pendidik dan tenaga kependidikan; Kerjasama penyelenggaraan pendidikan; Kesehatan lingkungan; Aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan; Ketersediaan, standarisasi dan kualitas sarana prasarana serta tata kelola layanan kesehatan; Ketersediaan dan kualitas konsumsi pangan masyarakat; Peran pemuda sebagai penggerak pembangunan dan capaian prestasi olahraga; Kualitas angkatan kerja yang berkarakter dan berdaya saing global, khususnya pada aspek peningkatan daya saing angkatan kerja, perluasan kesempatan kerja serta penciptaan hubungan



industrial yang harmonis; Penanganan PMKS, pemberdayaan masyarakat, pengarusutamaan gender dan perlindungan anak.

4.2.3.2 Terpeliharanya Stabilitas Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam Kerukunan Tata Kehidupan Bermasyarakat

Isu strategis “Terpeliharanya stabilitas ketentraman dan ketertiban umum dalam kerukunan tata kehidupan bermasyarakat” menyangkut urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat.

Perumusan isu Terpeliharanya stabilitas ketentraman dan ketertiban umum dalam kerukunan tata kehidupan bermasyarakat merupakan hasil penelaahan terhadap permasalahan Pemeliharaan keamanan, ketertiban dan ketenteraman sebagai sendi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, khususnya pada aspek perwujudan kerjasama di lingkup RT/RW untuk menjamin ketenteraman dan ketertiban serta membangkitkan karakter peduli, toleransi, menghargai dan gotong royong.

4.2.3.3 Keseimbangan Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan dalam Mendukung Keberlanjutan Ekologi

Isu strategis “Keseimbangan pembangunan dan pelestarian lingkungan dalam mendukung keberlanjutan ekologi” menyangkut urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, perumahan dan kawasan permukiman, lingkungan hidup, energi dan sumberdaya mineral.

Perumusan isu Keseimbangan pembangunan dan pelestarian lingkungan dalam mendukung keberlanjutan ekologi merupakan hasil penelaahan terhadap beberapa permasalahan pembangunan, yaitu : Kualitas penataan ruang dan pertanahan, khususnya pada aspek penyusunan rencana tata ruang yang dapat menjadi pedoman pembangunan kota serta penyediaan lahan aset bagi kepentingan umum; Sistem penanggulangan bencana kawasan perkotaan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup, yang mencakup sistem penanggulangan bencana kebakaran, sistem pengelolaan dan pengolahan sampah baik skala kota maupun regional, pengelolaan RTH, pengendalian pencemaran lingkungan; Perumahan dan permukiman yang layak dan berkualitas, khususnya pada aspek layanan sarana dan prasarana pada perumahan dan permukiman untuk mendukung universal access pemenuhan target 0% permukiman kumuh dan 100 % sanitasi; Pemanfaatan energi



secara efektif dan efisien, khususnya pada aspek konservasi energi dan pengembangan energi alternatif, penyediaan infrastruktur berbasis ekologi dan pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan.

4.2.3.4 Melestarikan Budaya Lokal untuk Menjunjung Tinggi Nilai-Nilai Luhur Kehidupan Masyarakat

Isu strategis “Melestarikan budaya lokal untuk menjunjung tinggi nilai-nilai luhur kehidupan masyarakat” menyangkut urusan perpustakaan dan kebudayaan.

Perumusan isu Melestarikan budaya lokal untuk menjunjung tinggi nilai-nilai luhur kehidupan masyarakat merupakan hasil penelaahan terhadap permasalahan Penggalan dan penguatan budaya dan tradisi lokal, termasuk upaya peningkatan minat dan budaya baca masyarakat.

4.2.3.5 Posisi Strategis Kota Surabaya yang Berpotensi sebagai Penghubung Perekonomian dalam Skala Nasional dan Internasional

Isu strategis “Posisi strategis Kota Surabaya yang berpotensi sebagai penghubung perekonomian dalam skala nasional dan internasional” menyangkut urusan perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, kelautan dan perikanan; pertanian, pariwisata, dan penanaman modal.

Perumusan isu Posisi strategis Kota Surabaya yang berpotensi sebagai penghubung perekonomian dalam skala nasional dan internasional merupakan hasil penelaahan terhadap beberapa permasalahan pembangunan, yaitu : Pengembangan Surabaya sebagai penghubung perdagangan/jasa antar pulau, nasional dan regional, khususnya pada aspek penciptaan hubungan strategis antara pemangku kepentingan untuk mendukung iklim dan aktivitas investasi, perdagangan dan industri; Pembangunan dan pengembangan sistem transportasi, khususnya pada aspek penciptaan sistem manajemen transportasi yang berkualitas; Peningkatan kinerja dan daya saing aktivitas ekonomi lokal, khususnya pada aspek peningkatan volume usaha UMKM serta kualitas kelembagaan koperasi, Pengembangan pertanian bernilai tambah tinggi (tanaman hortikultura) dan pemanfaatan teknologi; Mengembangkan pertanian sebagai RTH untuk menggantikan nilai ekologis yang hilang akibat alih fungsi lahan pertanian; Perubahan pola pencaharian nelayan menjadi pelaku budidaya perikanan darat karena penurunan hasil tangkapan laut; Pemanfaatan teknologi untuk menjaga hasil produksi perikanan; Pengawasan peredaran barang



dan jasa; Peningkatan realisasi PMA, PMDN dan investasi daerah; Peningkatan kualitas infrastruktur dan utilitas penunjang sektor pariwisata.

4.2.3.6 Tuntutan Masyarakat terhadap Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Isu strategis “Tuntutan masyarakat terhadap tata kelola pemerintahan yang baik” menyangkut urusan komunikasi dan informatika, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Statistik, Kearsipan, Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan, Pengawasan, Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah, Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan.

Perumusan isu Tuntutan masyarakat terhadap tata kelola pemerintahan yang baik merupakan hasil penelaahan terhadap permasalahan peningkatan pelayanan publik berbasis teknologi informasi, khususnya pada aspek penyediaan layanan publik berbasis TIK yang dapat diakses dengan mudah oleh seluruh lapisan masyarakat, penyediaan infrastruktur TIK penunjang pelayanan publik, perwujudan tertib administrasi pemerintahan kecamatan dan kelurahan, serta peningkatan sistem administrasi kependudukan, Penyediaan data statistik daerah (kota) yang dapat dipertanggungjawabkan, aman, dan update; Kompetensi SDM aparatur; Pengembangan assessment centre; Penanganan Disiplin Aparatur; Penanganan Tata Kelola Administrasi Keuangan; Kualitas Standar Pelayanan yang tersusun; Fungsi evaluasi terhadap Prosedur Operasional Standar (POS) dan Standar Pelayanan (SP) Perangkat Daerah; Kerjasama antar daerah dan luar negeri; Pemanfaatan kajian di semua sektor sebagai dasar kebijakan; Penyebarluasan dan evaluasi produk hukum daerah; Ketepatan Waktu Pelaksanaan kegiatan; Kualitas Penyusunan Perencanaan Strategis serta Monitoring dan Evaluasi; Kualitas dokumen perencanaan tahunan SKPD.

4.2.3.7 Peningkatan Infrastruktur untuk Mendukung Peran dan Daya Saing Kota Surabaya dalam Menghadapi Persaingan Global

Isu strategis “Peningkatan infrastruktur untuk mendukung peran dan daya saing kota surabaya dalam menghadapi persaingan global” menyangkut urusan perhubungan, pekerjaan umum dan penataan ruang, teknologi Informasi dan Komunikasi.



Perumusan isu Peningkatan infrastruktur untuk mendukung peran dan daya saing kota surabaya dalam menghadapi persaingan global merupakan hasil penelaahan terhadap beberapa permasalahan pembangunan, yaitu : Pembangunan dan pengembangan sistem transportasi, khususnya pada aspek Pengembangan sistem angkutan masal cepat perkotaan secara terpadu dan terintegrasi antar moda serta penyediaan dan penuntasan jaringan jalan yang terpadu serta peningkatan kapasitas jalan secara memadai; Pembangunan sarana prasarana pematusan; Peningkatan pelayanan utilitas kota, khususnya pada aspek Pelayanan air bersih melalui pemenuhan kapasitas produksi dengan optimalisasi idle capacity dan penurunan kebocoran pada pemanfaatan sumber air baku kali surabaya, mata air umbulan dan pandaan untuk mendukung universal access pemenuhan target 100 % pelayanan air bersih, Pengembangan utilitas penerangan jalan umum dan utilitas kota lainnya.

4.2.4 Isu Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Isu-isu strategis yang telah diuraikan di atas menurunkan tujuan, sasaran dan program RPJMD. Program-program tersebut akan dinilai kelayakannya dengan menggunakan isu-isu Kajian Lingkungan Hidup Strategis sebagai berikut:

1. Belum optimalnya penataan dan perbaikan kawasan permukiman kumuh dan pinggiran kota serta penyediaan rumah tinggal yang terjangkau bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR);
2. Belum tersedianya 100% sarana sanitasi rumah tangga di Kota Surabaya;
3. Meningkatnya ancaman intrusi air laut ke daerah perkotaan;
4. Tingginya tingkat pencemaran air sungai yang dapat mengancam penyediaan sumber air baku;
5. Meningkatnya ancaman penurunan kualitas kawasan pesisir;
6. Meningkatnya pencemaran udara yang berpotensi menyebabkan efek gas rumah kaca dan perubahan iklim;
7. Belum terintegrasinya jaringan infrastruktur perkotaan dan pemenuhan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) terutama terhadap perkembangan kawasan permukiman, perdagangan jasa dan industri;
8. Belum optimalnya kinerja sistem transportasi yang terkait jaringan jalan, layanan angkutan publik, serta optimlaisasi jalur barang dan orang;



9. Belum optimalnya implementasi penataan ruang;
10. Perlu peningkatan upaya sistem mitigasi bencana dan penanggulangan terhadap bencana banjir, kebakaran dan bencana sosial;
11. Kurangnya peningkatan upaya konservasi energi dan pemanfaatan potensi energi alternatif dari berbagai sumber;
12. Belum optimalnya kontribusi dunia usaha didalam pembentukan pendapatan daerah;
13. Rendahnya daya saing usaha pelaku UMK (Usaha Mikro Kecil) serta membanjirnya produk substitusi impor dengan harga yang lebih kompetitif;
14. Belum optimalnya upaya pengembangan potensi pariwisata yang menjadi ciri khas Kota Surabaya;
15. Belum optimalnya pendidikan karakter untuk mendukung terciptanya Sumber Daya Manusia yang unggul dan memiliki daya tahan terhadap pengaruh budaya asing;
16. Meningkatnya kasus/penyakit degeneratif yang disebabkan karena rendahnya kesadaran masyarakat untuk berpola hidup sehat;
17. Makin banyaknya penduduk kota yang bermasalah secara sosial karena tekanan hidup kawasan urban.

BAB V

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

Visi dan misi merupakan gambaran apa yang ingin dicapai Kota Surabaya pada akhir periode kepemimpinan walikota dan wakil walikota terpilih (tahun 2016-2021), yaitu:

5.1 Visi

Visi Kota Surabaya yang ingin diwujudkan pada akhir periode 5 (lima) tahun ke depan menggambarkan tujuan utama penyelenggaraan pemerintah, yang dapat terwujud melalui upaya pemerintah bersama DPRD, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya, yaitu:

“SURABAYA KOTA SENTOSA YANG BERKARAKTER DAN BERDAYA SAING GLOBAL BERBASIS EKOLOGI”

Makna dalam visi tersebut adalah :

Sentosa adalah kondisi yang menggambarkan Kota Surabaya sebagai kota yang menjamin warganya dalam keadaan makmur, sehat, aman, selamat dan damai untuk berkarya dan beraktualisasi diri.

Berkarakter menunjukkan bahwa Kota Surabaya sebagai kota yang memiliki watak, kepribadian yang arif dengan mempertahankan budaya lokal, yang tercermin dalam perilaku warga kota yang berlandaskan falsafah Pancasila.

Berdaya saing global bermakna Kota Surabaya sebagai kota yang mampu menjadi hub/pusat penghubung perdagangan dan jasa antar pulau dan internasional dengan didukung pemerataan akses ke sumberdaya produktif, tata kelola pemerintahan yang baik, infrastruktur dan utilitas kota yang terpadu dan efisien serta mampu memantapkan usaha-usaha ekonomi lokal, inovasi produk dan jasa dan pengembangan industri kreatif berdaya saing di pasar global.

Berbasis ekologi adalah prinsip yang harus dipegang dalam pelaksanaan pembangunan sehingga dapat mewujudkan Kota Surabaya yang memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan, diantaranya adalah penataan ruangnya dapat mengintegrasikan fungsi kawasan perdagangan/jasa dan kawasan permukiman dengan sistem jaringan jalan dan transportasi, mengantisipasi resiko bencana serta melestarikan kawasan pesisir dengan tetap memperhatikan daya dukung kota



melalui pemantapan sarana dan prasarana lingkungan dan permukiman yang ramah lingkungan.

5.2 Misi

Seiring dengan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya tahun 2016-2021 yang terus berjalan, terdapat perubahan kebijakan nasional sehingga Pemerintah Kota Surabaya melakukan evaluasi terhadap dokumen RPJMD tersebut. Berdasarkan hal tersebut di atas, untuk percepatan pencapaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) dan target kinerja pembangunan daerah, dilakukan regrouping misi pembangunan kota yang dijabarkan menjadi 7 (tujuh) misi pembangunan kota berikut dan dijelaskan pada Tabel V.2.

1. Mewujudkan sumber daya masyarakat yang berkualitas serta memberdayakan masyarakat dan menciptakan seluas-luasnya kesempatan berusaha;
2. Memelihara keamanan dan ketertiban umum;
3. Mewujudkan penataan ruang yang terintegrasi dan memperhatikan daya dukung kota serta infrastruktur dan utilitas kota yang terpadu dan efisien;
4. Memantapkan dan memperkuat nilai-nilai budaya lokal dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat;
5. Mewujudkan Surabaya sebagai pusat penghubung perdagangan dan jasa antar pulau dan internasional serta memantapkan daya saing usaha-usaha ekonomi lokal, inovasi produk dan jasa, serta pengembangan industri kreatif;
6. Memantapkan sarana dan prasarana lingkungan dan permukiman yang ramah lingkungan;
7. Memantapkan tata kelolapemerintahan yang baik.

Tabel V.1
Perumusan Penjelasan Visi - Misi

Visi	Pokok-pokok Visi	Penjelasan Visi	Misi	Penjelasan Misi
SURABAYA KOTA SENTOSA YANG BERKARAKTER DAN BERDAYA SAING GLOBAL BERBASIS EKOLOGI	1. Sentosa	Kota Surabaya sebagai kota yang mampu menjamin warganya dalam kondisi makmur, sehat, aman, selamat dan damai untuk	1. Mewujudkan sumber daya masyarakat yang berkualitas serta memberdayakan masyarakat dan menciptakan seluas-luasnya	Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan serta ketahanan pangan
				Meningkatkan kualitas dan prestasi generasi muda
				Meningkatkan kompetensi angkatan kerja

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kota Surabaya 2016 – 2021

Visi	Pokok-pokok Visi	Penjelasan Visi	Misi	Penjelasan Misi		
		berkarya dan beraktualisasi diri	kesempatan berusaha	Meningkatkan upaya penanganan PMKS dan memberdayakan keluarga miskin serta pemberdayaan kelompok usia produktif dengan melibatkan peran serta swasta melalui upaya untuk meningkatkan pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar dan rehabilitasi PMKS serta pemberdayaan keluarga miskin		
				Meningkatkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melalui upaya untuk meningkatkan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak		
			2. Memelihara keamanan dan ketertiban umum	Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum untuk mendukung pelaksanaan pemerintahan daerah melalui upaya untuk meningkatkan kualitas dan intensitas pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan dan norma masyarakat, meningkatkan toleransi dan kerukunan antar umat beragama		
			2. Berkarakter	Kota Surabaya sebagai kota yang memiliki watak, kepribadian yang arif dengan mempertahankan budaya lokal, yang tercermin dalam perilaku warga kota yang berlandaskan falsafah Pancasila	4. Memantapkan dan memperkuat nilai-nilai budaya lokal dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat	Mewujudkan penggalian dan penguatan budaya dan tradisi lokal sebagai bagian dari upaya mewujudkan harmoni sosial
			3. Berdaya Saing Global	Kota Surabaya sebagai kota yang mampu menjadi hub/pusat penghubung perdagangan dan jasa antar pulau dan internasional dengan didukung pemerataan akses ke	5. Mewujudkan Surabaya sebagai pusat penghubung perdagangan dan jasa antar pulau dan internasional serta memantapkan daya saing usaha-usaha	Menggali potensi, peningkatan investasi, serta mengembangkan dan menerapkan konsep city logistic yang terpadu sebagai pusat serta jaringan dalam kota dan antar kota baik skala regional, nasional, maupun internasional.
						Menghubungkan simpul-simpul yang menjadi jaringan aktivitas perdagangan



Visi	Pokok-pokok Visi	Penjelasan Visi	Misi	Penjelasan Misi		
		sumberdaya produktif, tata kelola pemerintahan yang baik, infrastruktur dan utilitas kota yang terpadu dan efisien serta mampu memantapkan usaha-usaha ekonomi lokal, inovasi produk dan jasa dan pengembangan industri kreatif berdaya saing di pasar global	ekonomi lokal, inovasi produk dan jasa, serta pengembangan industri kreatif	Mempermudah akses yang dapat menjalin hubungan baik antara pemangku kepentingan untuk mendukung iklim dan aktivitas investasi, perdagangan, industri.		
				Meningkatkan daya saing dan aktivitas ekonomi berbasis komunitas.		
				Meningkatkan kinerja investasi dan pariwisata internasional.		
			7. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik yang didukung oleh regulasi dan sistem pemerintahan yang baik serta SDM yang berkualitas		
				Meningkatkan efektivitas perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan, dengan cara memantapkan proses dan sistem perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang didukung TIK		
				Meningkatkan pelayanan publik yang prima pada semua unit pelayanan dan OPD		
				Meningkatkan kemandirian keuangan daerah, dengan cara meningkatkan dan mengoptimalkan pengelolaan sumber penerimaan daerah secara efektif dan efisien		
				Mewujudkan peningkatan minat dan budaya baca masyarakat melalui peningkatan akses baca		
			4. Berbasis Ekologi	Kota Surabaya sebagai kota yang penataan ruangnya mampu mengintegrasikan fungsi kawasan perdagangan/jasa dan kawasan permukiman dengan sistem jaringan jalan dan transportasi, mampu mengantisipasi resiko bencana serta mampu	3. Mewujudkan penataan ruang yang terintegrasi dan memperhatikan daya dukung kota serta infrastruktur dan utilitas kota yang terpadu dan efisien	Mewujudkan sinkronisasi dan keberlanjutan (sustainability) sistem pertanahan dan sistem penataan ruang
					Meningkatkan kualitas lingkungan hidup kota	
		Mewujudkan sistem mitigasi bencana di kawasan perkotaan yang terintegrasi, melalui upaya mengembangkan sistem pencegahan dan penanggulangan bencana yang antisipatif dan tanggap serta didukung dengan prasarana dan sarana yang				

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kota Surabaya 2016 – 2021

Visi	Pokok-pokok Visi	Penjelasan Visi	Misi	Penjelasan Misi
		melestarikan kawasan pesisir dengan tetap memperhatikan daya dukung kota melalui pemantapan sarana dan prasarana lingkungan dan permukiman yang ramah lingkungan		berkualitas
				Optimalisasi kinerja sistem drainase kota yang berfungsi dengan cara menyediakan sistem drainase kota yang terpadu, efektif dan efisien
				Meningkatkan jaringan dan pelayanan transportasi kota yang terintegrasi serta mewujudkan pengembangan sistem angkutan massal cepat perkotaan Surabaya secara terpadu dan terintegrasi antar moda yang disertai dengan kebijakan dan strategi untuk meningkatkan minat masyarakat dalam penggunaan angkutan umum
				Meningkatkan upaya pengembangandan pemanfaatan energi alternatif yang ramah lingkungan
				Mewujudkan pembangunan dan pengembangan utilitas kota secara terpadu dan merata dengan cara menyediakan pelayanan air bersih/air minum bagi masyarakat
				6. Memantapkan sarana dan prasarana lingkungan dan permukiman yang ramah lingkungan



5.3 Tujuan dan Sasaran

Visi dan Misi Kota Surabaya dijabarkan dalam tujuan dan sasaran sebagai berikut:

Misi Pertama : Mewujudkan sumber daya masyarakat yang berkualitas serta memberdayakan masyarakat dan menciptakan seluas-luasnya kesempatan berusaha

Misi Pertama memiliki tiga tujuan yaitu meningkatkan kualitas pembangunan manusia, penurunan penduduk miskin dan mengurangi pengangguran yang dapat dicapai melalui upaya pencapaian sasaran:

1. Meningkatkan derajat kesehatan
2. Meningkatkan ketahanan pangan
3. Meningkatkan kualitas pendidikan
4. Meningkatkan cakupan ketersediaan pelayanan prasarana kesehatan
5. Meningkatnya pengarusutamaan gender, pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak
6. Meningkatkan cakupan ketersediaan pelayanan prasarana pendidikan yang memenuhi standar
7. Meningkatkan dan mempertahankan prestasi atlit di tingkat regional, nasional dan/atau internasional
8. Meningkatkan partisipasi aktif pemuda dalam pembangunan kepemudaan
9. Meningkatkan kesejahteraan PMKS
10. Meningkatkan kesempatan kerja dan kompetensi angkatan kerja, serta menciptakan hubungan industrial yang harmonis
11. Meningkatkan minat baca masyarakat

Peningkatan kualitas pembangunan manusia dan pengurangan pengangguran diukur melalui:

- a) Indeks Pembangunan Manusia (IPM), terdiri dari:
 - Indeks Kesehatan yang diperoleh dari Angka Harapan Hidup (AHH), yakni perkiraan rata-rata tambahan umur seseorang yang diharapkan dapat terus hidup. Peningkatan Angka Harapan Hidup (AHH) juga dipengaruhi oleh faktor eksternal yang bersumber dari masyarakat serta pihak terkait di luar Pemerintah Kota Surabaya. Sesuai kewenangan, yang dapat dilakukan

Pemerintah Kota Surabaya di antaranya adalah terkait layanan kesehatan, kesehatan masyarakat, ketahanan pangan, penanganan PMKS, pengendalian penduduk, dll.

- Indeks Pendidikan yang terdiri dari Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Tidak hanya Pemerintah Kota Surabaya yang berperan dalam pencapaian indikator tersebut, namun juga adanya keterlibatan pihak masyarakat dan *stakeholder* lainnya yang berkaitan dengan sektor pendidikan.
 - Indeks Pengeluaran yang diperoleh dari pengeluaran per kapita per tahun berdasarkan paritas daya beli 96 komoditas yang juga berkaitan dengan berbagai pihak. Adapun upaya yang dilakukan sesuai kewenangan Pemerintah Kota Surabaya dalam meningkatkan pencapaian indikator tersebut dijabarkan pada Misi Kelima.
- b) Persentase penduduk miskin yang membandingkan jumlah penduduk Kota Surabaya yang miskin dengan jumlah penduduk Kota Surabaya. Adanya penduduk miskin juga dipengaruhi oleh faktor eksternal, namun Pemerintah Kota Surabaya sesuai kewenangannya berupaya untuk memberikan intervensi yang tepat, guna menurunkan jumlah penduduk miskin di Kota Surabaya.
- c) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang membandingkan jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja yang juga dipengaruhi oleh faktor eksternal. Pemerintah Kota Surabaya sesuai kewenangannya memperkuat kompetensi tenaga kerja lokal dan menyalurkannya ke dunia industri dan dunia usaha di Kota Surabaya.

Misi Kedua : Memelihara keamanan dan ketertiban umum

Misi Kedua memiliki tujuan untuk meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum, yang dapat dicapai melalui upaya pencapaian sasaran:

- a) Meningkatkan ketertiban umum
- b) Meningkatkan kualitas pelaksanaan norma, toleransi, dan kerukunan masyarakat
- c) Meningkatkan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat
- d) Meningkatkan perlindungan masyarakat

Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum diukur melalui:



a) Indeks Ketertiban dan Ketenteraman Kota , terdiri dari:

- Nilai Ketertiban yang diperoleh dari realisasi angka pelanggaran Perda per 1.000 penduduk. Penurunan Nilai Ketertiban juga dipengaruhi oleh faktor eksternal yang bersumber dari masyarakat serta pihak terkait di luar Pemerintah Kota Surabaya. Upaya yang dilakukan dalam meningkatkan nilai ketertiban sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kota Surabaya antara lain dengan melakukan penindakan dan evaluasi terhadap pelanggaran perda, meningkatkan intensitas pengawasan dan meningkatkan kapasitas tenaga penertiban dan lain-lain.
- Nilai Ketenteraman yang diperoleh dari realisasi angka kejadian anarkis per 100.000 penduduk. Penurunan Nilai Ketenteraman juga dipengaruhi oleh faktor eksternal yang bersumber dari masyarakat serta pihak terkait di luar Pemerintah Kota Surabaya. Guna menurunkan nilai ketenteraman, Pemerintah Kota Surabaya melakukan upaya sesuai kewenangannya antara lain dengan meningkatkan kesiagaan petugas Linmas di Kota Surabaya, pemasangan CCTV di setiap lokasi-lokasi yang berpotensi menimbulkan gangguan ketenteraman serta peningkatan kesadaran dan kepatuhan warga masyarakat.

Misi Ketiga : Mewujudkan penataan ruang yang terintegrasi dan memperhatikan daya dukung kota serta infrastruktur dan utilitas kota yang terpadu dan efisien

Misi Ketiga memiliki dua tujuan yaitu mewujudkan sistem infrastruktur kota yang terakses, terkoneksi, dan menjamin mobilitas melalui peningkatan ketahanan terhadap bencana, sinkronisasi sistem penataan ruang dan pertanahan, pengoptimalan utilitas dan sistem drainase kota serta jaringan transportasi kota yang terpadu dan meningkatkan penataan ruang yang terintegrasi dan memperhatikan daya dukung kota, yaitu melalui upaya pencapaian sasaran:

1. Pengembangan sistem penanggulangan bencana yang antisipatif dan tanggap
2. Meningkatkan efektivitas perwujudan penataan ruang dan bangunan
3. Meningkatkan pengamanan dan pengelolaan aset tanah untuk pembangunan infrastruktur

4. Meningkatkan sinkronisasi dan integrasi rencana induk sektoral dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW)
5. Meningkatnya pengamanan dan pengelolaan aset tanah dan/atau bangunan
6. Mewujudkan penyediaan lahan bagi kepentingan umum
7. Meningkatnya sistem jaringan dan kualitas PJU hemat energi
8. Penyediaan sistem drainase kota yang terpadu, efektif dan efisien
9. Penyediaan sistem lalu lintas yang berkualitas
10. Menyediakan dan meningkatkan kinerja jaringan jalan
11. Penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana angkutan
12. Meningkatkan pelayanan utilitas kota lainnya
13. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup kota yang bersih dan hijau
14. Meningkatkan kualitas udara dan air
15. Optimalisasi sistem pengelolaan dan pelayanan kebersihan secara terpadu yang berbasis masyarakat dengan penerapan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan
16. Peningkatan kapasitas pelayanan pengolahan air limbah

Dalam mewujudkan sistem infrastruktur kota yang terakses, terkoneksi, dan menjamin mobilitas melalui ketahanan terhadap bencana, sinkronisasi sistem penataan ruang dan pertanahan, pengoptimalan utilitas dan sistem drainase kota serta jaringan transportasi kota yang terpadu dan meningkatkan penataan ruang yang terintegrasi dan memperhatikan daya dukung kota dapat diukur melalui :

a) Indeks Infrastruktur Kota, yang terdiri dari :

- Indeks Mobilitas yang diperoleh dari indikator Tingkat Pelayanan Jalan/*Level of Service (LOS)* dan Lama Jam Sibuk. Dalam hal ini, seluruh *stakeholder* dan masyarakat di Kota Surabaya diharapkan dapat berperan aktif dalam mencapai pelayanan transportasi berbasis jalan yang ideal. Hal tersebut ditunjukkan dengan kenyataan yang ada saat ini yaitu semakin banyaknya volume kendaraan (baik roda dua dan roda empat) yang perlu diimbangi dengan kapasitas jalan yang memadai. Adapun upaya yang dilakukan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kota Surabaya untuk meningkatkan



indikator tersebut antara lain menyediakan dan meningkatkan kinerja jaringan jalan serta penyediaan sistem lalu lintas dan angkutan jalan yang berkualitas.

- Indeks Aksesibilitas yang diperoleh dari indikator Kapasitas Penanggulangan Bencana Daerah dan Penurunan Luas Kawasan Tergenang, di mana bencana tersebut tidak dapat diprediksi sebelumnya namun dapat dicegah dan/atau diantisipasi. Bencana yang sering terjadi di Kota Surabaya antara lain bencana kebakaran yang diakibatkan oleh berbagai sebab. Genangan yang terjadi di beberapa wilayah kota belum menjadi sebuah kejadian bencana jika aktivitas masyarakat tetap dapat berlangsung meski mengalami beberapa kendala. Di samping itu, terdapat isu hangat yang muncul sekitar tahun 2017-2018 yaitu ancaman gempa bumi yang terjadi di Kota Surabaya akibat dilewati oleh jalur Sesar Kendeng yang masih aktif. Untuk itu, upaya yang dilakukan sesuai kewenangan Pemerintah Kota Surabaya adalah meminimalkan jumlah kerusakan/kerugian dan korban jiwa dengan pengembangan sistem penanggulangan bencana alam yang antisipatif dan tanggap serta penyediaan sistem drainase kota yang terpadu, efektif dan efisien
 - Indeks Konektivitas yang diperoleh berdasarkan penyebaran dan layanan jaringan utilitas kota(baik air bersih, gas, telekomunikasi, listrik, dsb.) yang mencakup seluruh wilayah Kota Surabaya serta sistem penataan ruang dalam kebijakan satu peta tata ruang kota yang telah tersinkronisasi dengan sistem pertanahan dalam membangun Kota Surabaya. Sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kota Surabaya, upaya yang dilakukan antara meningkatkan sinkronisasi dan integrasi rencana induk sektoral dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan pertanahan serta meningkatkan cakupan layanan jaringan utilitas ke seluruh wilayah serta tertata dengan baik.
- b) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Persampahan (IKLHS), bertujuan untuk menggambarkan kondisi lingkungan hidup dengan mengukur kualitas air sungai dan kualitas udara (IPA + IPU), tutupan lahan (ITH) dan kualitas layanan persampahan agar nantinya tercipta kualitas lingkungan hidup kota yang bersih, hijau, dan terjamin. Adapun upaya yang dilakukan sesuai

dengan kewenangan Pemerintah Kota Surabaya antara lain pengelolaan dan pelayanan kebersihan secara terpadu dengan penerapan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan, penghematan energi dengan cara konservasi energi yang dapat menurunkan pemakaian energi secara tidak tepat dan tidak efisien, serta upaya pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif yang ramah lingkungan.

Misi Keempat : Memantapkan dan memperkuat nilai-nilai budaya lokal dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat

Misi Keempat memiliki tujuan untuk meningkatkan nilai-nilai budaya lokal dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat, yang dapat dicapai melalui upaya pencapaian sasaran:

1. Meningkatkan pemahaman nilai-nilai kepahlawanan dalam kehidupan bermasyarakat.
2. Meningkatnya pelestarian seni dan cagar budaya.

Peningkatan nilai-nilai budaya lokal dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat diukur melalui indikator Indeks Budaya Lokal. Pelestarian dapat dilaksanakan dalam tiga kegiatan utama yaitu perlindungan, pemanfaatan, dan pengembangan sebagai berikut :

- a) Perlindungan dimaksudkan untuk mencegah agar seni dan cagar budaya tidak mengalami kerusakan dan kehancuran, sehingga tidak akan kehilangan jati diri dan nilai-nilai yang terkandung dalam seni dan budaya tersebut
- b) Pemanfaatan, memberikan kegunaan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, baik untuk pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan, ekonomi, maupun kebudayaan di masa kini dan mendatang
- c) Pengembangan dapat diartikan sebagai upaya untuk menjaga kualitas penampilan seni dan cagar budaya agar dapat difungsikan terus seperti fungsi semula atau untuk fungsi lain yang sesuai dengan ketentuan undang-undang

Pelestarian seni dan cagar budaya dipengaruhi oleh keterlibatan dan dukungan serta partisipasi/pelibatan masyarakat secara aktif. Pemerintah Kota Surabaya sesuai kewenangannya berupaya untuk terus melakukan pelestarian seni



dan cagar budaya secara berkesinambungan (*sustainable activity*) dan terus menerus dengan perencanaan yang matang dan sistematis, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Misi Kelima : Mewujudkan Surabaya sebagai pusat penghubung perdagangan dan jasa antar pulau dan internasional serta memantapkan daya saing usaha-usaha ekonomi lokal, inovasi produk dan jasa, serta pengembangan industri kreatif

Misi Kelima memiliki tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan sistem manajemen *city logistic*, pemantapan daya saing usaha-usaha ekonomi lokal, serta pengembangan inovasi produk dan jasa, yang dapat dicapai melalui upaya pencapaian sasaran:

- 1) Meningkatkan sistem logistik perdagangan serta produktivitas sektor pariwisata dalam upaya menambah nilai kekayaan ekonomi.
- 2) Meningkatkan realisasi investasi.
- 3) Mendorong pemantapan daya saing usaha mikro dan koperasi.

Peningkatan pertumbuhan ekonomi diukur melalui indikator Indeks Gini dan Pertumbuhan Ekonomi dan dampaknya juga akan turut mempengaruhi Indeks Pengeluaran sebagai salah satu dimensi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang diukur pada Misi 1. Indeks Gini di Kota Surabaya memiliki tren menurun dan pada tahun 2018 berada pada tingkatan sedang. Pertumbuhan Ekonomi dipengaruhi oleh keterlibatan dan dukungan *stakeholder* dari berbagai sektor meliputi:

- a) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
- b) Pertambangan dan Penggalian
- c) Industri Pengolahan
- d) Pengadaan Listrik dan Gas
- e) Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang
- f) Konstruksi
- g) Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
- h) Transportasi dan Pergudangan
- i) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
- j) Informasi dan Komunikasi
- k) Jasa Keuangan dan Asuransi

- l) Real Estate
- m) Jasa Perusahaan
- n) Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib
- o) Jasa Pendidikan
- p) Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
- q) Jasa Lainnya

Pemerintah Kota Surabaya sesuai kewenangannya berupaya untuk terus memperkuat produktivitas sektor utama, antara lain : sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, sektor industri pengolahan, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, sektor konstruksi serta meningkatkan investasi dan memantapkan daya saing usaha mikro dan koperasi.

Misi Keenam : Memantapkan sarana dan prasarana lingkungan dan permukiman yang ramah lingkungan

Misi Keenam memiliki tujuan untuk memantapkan sarana prasarana pada kawasan perumahan dan permukiman untuk mewujudkan lingkungan yang berkualitas melalui upaya pencapaian sasaran:

- a) Meningkatkan efektivitas pemanfaatan perumahan layak huni
- b) Meningkatkan penyediaan serta pengelolaan lingkungan perumahan dan kawasan permukiman layak huni
- c) Menurunkan potensi wilayah perumahan kumuh

Dalam memantapkan sarana prasarana pada kawasan perumahan dan permukiman untuk mewujudkan lingkungan yang berkualitas dapat diukur melalui :

- a) Penurunan persentase luas kawasan permukiman kumuh prioritas yang didukung dengan Program 100% Air Bersih, 0% Kawasan Kumuh, dan 100% Drainase/Sanitasi (yang dikenal dengan Program 100-0-100) dari Pemerintah Republik Indonesia, di mana masyarakat kurang mampu dapat menikmati hunian yang layak dan bersih. Adapun upaya yang dilakukan sesuai kewenangan Pemerintah Kota Surabaya antara lain penyediaan serta pengelolaan lingkungan perumahan dan kawasan permukiman layak huni serta pemanfaatan perumahan layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).



Misi Ketujuh : Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik

Misi Ketujuh memiliki tujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pengelolaan keuangan daerah, yaitu melalui upaya :

1. Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
2. Meningkatkan kompetensi ASN.
3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik.
4. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan.
5. Meningkatkan cakupan ketersediaan prasarana pemerintahan dan pelayanan publik.
6. Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah.
7. Meningkatkan peran serta DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan.
8. Meningkatkan sistem pengawasan internal pemerintah.

Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pengelolaan keuangan daerah diukur melalui indikator Indeks Reformasi Birokrasi, yakni hasil evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terhadap penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah terdiri dari:

- Komponen Pengungkit (*Enablers*), yaitu seluruh upaya yang dilakukan dalam menjalankan fungsinya. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya sesuai kewenangannya antara lain dengan melakukan penataan unsur dan fungsi manajemen pemerintahan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik termasuk pelayanan perizinan dan non perizinan.
- Komponen Hasil (*Results*), yaitu kinerja yang diperoleh dari komponen pengungkit meliputi kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta kualitas pelayanan publik.

Perumusan tujuan dan sasaran dari visi dan misi Kota Surabaya dijabarkan pada Tabel V.3 dan Tabel V.4.



Tabel V.2

Visi, Misi, Tujuan dan Indikator Tujuan (IKU) Jangka Menengah Kota Surabaya

VISI : SURABAYA KOTA SENTOSA YANG BERKARAKTER DAN BERDAYA SAING GLOBAL BERBASIS EKOLOGI					
Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Target		
			2019	2020	2021
1. Mewujudkan sumber daya masyarakat yang berkualitas serta memberdayakan masyarakat dan menciptakan seluas-luasnya kesempatan berusaha	Meningkatkan kualitas pembangunan manusia	Indeks Pembangunan Manusia	80-81	81-82	81-82
	Penurunan Penduduk Miskin	Persentase Penduduk Miskin	N/A	4,75%-4,70%	4,71%-4,60%
	Mengurangi pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	6,47%	6,40%-5,95%	6,30%-5,90%
2. Memelihara keamanan dan ketertiban umum	Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum	Indeks Ketertiban dan Ketenteraman Kota	0,99	1,01	1,04
3. Mewujudkan penataan ruang yang terintegrasi dan memperhatikan daya dukung kota serta infrastruktur dan utilitas kota yang terpadu dan efisien	Mewujudkan sistem infrastruktur kota yang terakses, terkoneksi, dan menjamin mobilitas melalui ketahanan terhadap bencana, sinkronisasi sistem penataan ruang dan pertanahan, pengoptimalan utilitas dan sistem drainase kota serta jaringan transportasi kota yang terpadu	Indeks Infrastruktur Kota	N/A	0,8	0,84
	Meningkatkan penataan ruang yang terintegrasi dan memperhatikan daya dukung kota	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Persampahan (IKLHS)	64,91	65	65,1
4. Memantapkan dan memperkuat nilai-nilai budaya lokal dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat	Meningkatkan nilai-nilai budaya lokal dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat	Indeks Budaya Lokal	79,61%	80,00%	81,50%
5. Mewujudkan Surabaya sebagai pusat penghubung perdagangan dan jasa antar pulau dan internasional serta memantapkan daya saing usaha-usaha ekonomi lokal,	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan sistem manajemen city logistic, pemantapan daya saing usaha-usaha ekonomi lokal, serta pengembangan inovasi produk dan jasa	Pertumbuhan Ekonomi	N/A	6,3 - 6,7	6,3 - 6,8
		Indeks gini	N/A	0,38-0,37	0,38-0,37



VISI : SURABAYA KOTA SENTOSA YANG BERKARAKTER DAN BERDAYA SAING GLOBAL BERBASIS EKOLOGI					
Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Target		
			2019	2020	2021
inovasi produk dan jasa, serta pengembangan industri kreatif					
6. Memantapkan sarana dan prasarana lingkungan dan permukiman yang ramah lingkungan	Memantapkan sarana prasarana pada kawasan perumahan dan permukiman untuk mewujudkan lingkungan yang berkualitas	Persentase luas kawasan permukiman kumuh prioritas	N/A	0,22%	0,00%
7. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pengelolaan keuangan daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	N/A	BB	A



Tabel V.3
Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kota Surabaya (Tabel T-C.11)

VISI : SURABAYA KOTA SENTOSA YANG BERKARAKTER DAN BERDAYA SAING GLOBAL BERBASIS EKOLOGI								
Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Kondisi Awal		Target		
				2017	2018	2019	2020	2021
1. Mewujudkan sumber daya masyarakat yang berkualitas serta memberdayakan masyarakat dan menciptakan seluas-luasnya kesempatan berusaha	Meningkatkan kualitas pembangunan manusia	Meningkatkan derajat kesehatan	Angka Harapan Hidup (AHH)	73,88	73,98	73,89	74,01	74,04
		Meningkatkan ketahanan pangan	Indeks Ketahanan Pangan	N/A	N/A	N/A	0,93	0,933
		Meningkatkan kualitas pendidikan	Indeks Pendidikan	N/A	N/A	N/A	79,23	80,16
		Meningkatkan cakupan ketersediaan pelayanan prasarana kesehatan	Persentase cakupan ketersediaan prasarana kesehatan yang memenuhi standar klasifikasi dan akreditasi	N/A	N/A	N/A	95,23%	98,35%
		Meningkatnya pengarusutamaan gender, pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	93,65	93,66	93,68	93,69	93,7
			Persentase indikator Kota Layak Anak (KLA) yang terpenuhi	N/A	N/A	N/A	100,00%	100,00%



VISI : SURABAYA KOTA SENTOSA YANG BERKARAKTER DAN BERDAYA SAING GLOBAL BERBASIS EKOLOGI								
Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Kondisi Awal		Target		
				2017	2018	2019	2020	2021
		Meningkatkan cakupan ketersediaan pelayanan prasarana pendidikan yang memenuhi standar	Persentase cakupan ketersediaan prasarana pendidikan memenuhi standar	N/A	N/A	N/A	92,15%	92,68%
		Meningkatkan dan mempertahankan prestasi atlet di tingkat regional, nasional dan/atau internasional	Indeks prestasi atlet di tingkat regional, nasional dan/atau internasional	N/A	N/A	N/A	1,99	2,01
		Meningkatkan partisipasi aktif pemuda dalam pembangunan kepemudaan	Persentase kader kenakalan remaja dan pemuda pelopor yang menjalankan fungsi advokasi pembangunan kepemudaan	N/A	N/A	N/A	10,00%	20,00%
		Meningkatkan minat baca masyarakat	Indeks minat baca masyarakat	N/A	N/A	N/A	0,5	0,6
	Penurunan Penduduk Miskin	Meningkatkan kesejahteraan PMKS	Persentase PMKS yang tertangani	N/A	N/A	N/A	45,00%	45,00%



VISI : SURABAYA KOTA SENTOSA YANG BERKARAKTER DAN BERDAYA SAING GLOBAL BERBASIS EKOLOGI

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Kondisi Awal		Target		
				2017	2018	2019	2020	2021
	Mengurangi pengangguran	Meningkatkan kesempatan kerja dan kompetensi angkatan kerja, serta menciptakan hubungan industrial yang harmonis	Persentase pencari kerja terserap pada pasar kerja formal	53,58%	70,03%	>40,00%	55,00%	57,00%
2. Memelihara keamanan dan ketertiban umum	Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum	Meningkatkan ketertiban umum	Rasio pelanggaran Perda per 1.000 Penduduk	13,97	7,61	17,26	7,18	6,98
		Meningkatkan kualitas pelaksanaan norma, toleransi, dan kerukunan masyarakat	Persentase konflik yang menimbulkan gangguan ketenteraman dan ketertiban masyarakat	N/A	N/A	N/A	4,50%	4,00%
		Meningkatkan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat	Persentase peserta kegiatan keagamaan yang memahami nilai-nilai keagamaan	N/A	N/A	N/A	100,00%	100,00%
		Meningkatkan perlindungan masyarakat	Rasio Linmas per 1.000 penduduk	N/A	N/A	N/A	62,6	62,6
3. Mewujudkan penataan ruang yang terintegrasi dan memperhatikan daya dukung	Mewujudkan sistem infrastruktur kota yang terakses, terkoneksi, dan menjamin	Pengembangan sistem penanggulangan bencana yang antisipatif dan tanggap	Indeks Penanggulangan Bencana	98,15%	89,09%	74,33%	89,19%	92,83%



VISI : SURABAYA KOTA SENTOSA YANG BERKARAKTER DAN BERDAYA SAING GLOBAL BERBASIS EKOLOGI								
Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Kondisi Awal		Target		
				2017	2018	2019	2020	2021
kota serta infrastruktur dan utilitas kota yang terpadu dan efisien	mobilitas melalui ketahanan terhadap bencana, sinkronisasi sistem penataan ruang dan pertanahan, pengoptimalan utilitas dan sistem drainase kota serta jaringan transportasi kota yang terpadu	Meningkatkan efektivitas perwujudan penataan ruang dan bangunan	Persentase ketersediaan perangkat pengendalian penataan ruang dan bangunan (implementasi SLF)	N/A	N/A	N/A	22,32%	31,25%
		Meningkatkan pengamanan dan pengelolaan aset tanah untuk pembangunan infrastruktur	Persentase pengamanan aset tanah dan saluran untuk pembangunan infrastruktur	N/A	N/A	N/A	1,00%	1,50%
		Meningkatkan sinkronisasi dan integrasi rencana induk sektoral dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW)	Persentase rencana induk sektoral yang disusun dan telah tersinkronisasi dengan Rencana Tata Ruang Wilayah	N/A	N/A	N/A	34,48%	41,38%
		Meningkatnya pengamanan dan pengelolaan aset tanah dan/atau bangunan	Persentase aset tanah dan/atau bangunan yang terintegrasi dalam sistem pengamanan dan pengelolaan aset	15,10%	26,47%	41,88%	58,55%	75,22%



VISI : SURABAYA KOTA SENTOSA YANG BERKARAKTER DAN BERDAYA SAING GLOBAL BERBASIS EKOLOGI

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Kondisi Awal		Target		
				2017	2018	2019	2020	2021
		Mewujudkan penyediaan lahan bagi kepentingan umum	Persentase lokasi lahan yang tersedia untuk kepentingan umum	N/A	N/A	N/A	100,00%	100,00%
		Meningkatnya sistem jaringan dan kualitas PJU hemat energi	Persentase panjang jalan yang sudah terpasang PJU hemat energi	N/A	N/A	N/A	14,98%	17,51%
		Penyediaan sistem drainase kota yang terpadu, efektif dan efisien	Indeks Genangan	26,52%	41,53%	41,41%	40,58%	39,77%
		Penyediaan sistem lalu lintas yang berkualitas	Persentase jalan kewenangan kota dengan v/c ratio $\leq 0,95$	66,67%	97,62%	36%	77,39%	78,00%
		Menyediakan dan meningkatkan kinerja jaringan jalan	Tingkat Keandalan Jaringan Jalan	0,40	0,41	0,41	0,42	0,42
		Penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana angkutan	Persentase Load Factor Kendaraan Umum (Angkot)	30,00%	29,53%	26,00%	28,00%	30,00%
			Persentase Load Factor Kendaraan Umum (Suroboyo Bus)	N/A	N/A	N/A	40,00%	42,00%



VISI : SURABAYA KOTA SENTOSA YANG BERKARAKTER DAN BERDAYA SAING GLOBAL BERBASIS EKOLOGI								
Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Kondisi Awal		Target		
				2017	2018	2019	2020	2021
		Meningkatnya pelayanan utilitas kota lainnya	Persentase pelaksanaan rekomendasi utilitas	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Meningkatkan penataan ruang yang terintegrasi dan memperhatikan daya dukung kota	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup kota yang bersih dan hijau	Persentase selisih luasan taman dan jalur hijau yang dibangun dan dipelihara	N/A	N/A	N/A	9,33%	11,20%
		Meningkatkan kualitas udara dan air	Indeks Kualitas Air Permukaan	57,5	57,62	52,68	57,62	57,63
			Indeks Kualitas Udara Ambien	90,26	90,27	84,75	90,27	90,28
			Persentase wilayah dengan rumah yang dilengkapi jamban	N/A	N/A	N/A	80,00%	85,00%
		Optimalisasi sistem pengelolaan dan pelayanan kebersihan secara terpadu yang berbasis masyarakat dengan penerapan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan	Persentase penurunan sampah yang masuk ke TPA melalui TPS	N/A	N/A	N/A	20,40%	21,90%



VISI : SURABAYA KOTA SENTOSA YANG BERKARAKTER DAN BERDAYA SAING GLOBAL BERBASIS EKOLOGI

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Kondisi Awal		Target		
				2017	2018	2019	2020	2021
		Peningkatan kapasitas pelayanan pengolahan air limbah	Persentase air limbah yang diolah pada instalasi pengolahan air limbah	N/A	N/A	N/A	57,81%	69,07%
4. Memantapkan dan memperkuat nilai-nilai budaya lokal dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat	Meningkatkan nilai-nilai budaya lokal dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat	Meningkatkan pemahaman nilai-nilai kepahlawanan dalam kehidupan bermasyarakat	Persentase peserta kegiatan kepahlawanan yang memahami nilai-nilai kepahlawanan	N/A	N/A	N/A	100,00%	100,00%
		Meningkatnya pelestarian seni dan cagar budaya	Persentase budaya yang dapat dilestarikan	90,31%	90,84%	91,39%	90,90%	90,95%
5. Mewujudkan Surabaya sebagai pusat penghubung perdagangan dan jasa antar pulau dan internasional serta memantapkan daya saing usaha-usaha ekonomi lokal, inovasi produk dan jasa, serta pengembangan industri kreatif	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan sistem manajemen city logistic, pemantapan daya saing usaha-usaha ekonomi lokal, serta pengembangan inovasi produk dan jasa	Meningkatkan sistem logistik perdagangan dan produktivitas sektor pariwisata dalam upaya menambah nilai ekonomi	PDRB Kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	Rp 137.322.725,1	Rp 154.687.456,0	Rp 165.485.167,1	Rp 180.850.513,67	Rp 200.011.526,17
			PDRB Kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	Rp 78.971.933,9	Rp 88.834.803,2	Rp 94.273.077,21	Rp 103.193.864,79	Rp 112.164.511,53
		Mendorong pemantapan daya saing usaha mikro dan koperasi	Persentase Tingkat Produktivitas Koperasi	11,10%	30,40%	23,00%	31,00%	32,00%
			Persentase Tingkat Produktivitas Usaha Mikro	N/A	N/A	N/A	53,00%	62,00%



VISI : SURABAYA KOTA SENTOSA YANG BERKARAKTER DAN BERDAYA SAING GLOBAL BERBASIS EKOLOGI								
Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Kondisi Awal		Target		
				2017	2018	2019	2020	2021
		Meningkatkan realisasi investasi	Nilai Realisasi Investasi	N/A	N/A	N/A	Rp71.161.699.310.450	Rp74.719.784.275.973
6. Memantapkan sarana dan prasarana pada kawasan lingkungan dan permukiman yang ramah lingkungan	Memantapkan sarana prasarana pada kawasan permukiman dan permukiman untuk mewujudkan lingkungan yang berkualitas	Meningkatkan efektivitas pemanfaatan perumahan layak huni	Persentase pemanfaatan rusunawa yang tepat sasaran	N/A	N/A	N/A	100,00%	100,00%
		Meningkatkan penyediaan serta pengelolaan lingkungan perumahan dan kawasan permukiman layak huni	Luas kawasan permukiman yang telah ditingkatkan kualitas lingkungannya	4,053,29 Ha	6,086,26 Ha	8295,64 Ha	9.853,57 Ha	11.437,03 Ha
		Menurunkan potensi wilayah perumahan kumuh	Persentase wilayah dengan rumah tapak yang layak huni seluruhnya	N/A	N/A	N/A	85,00%	100,00%
7. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pengelolaan keuangan daerah	Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai SAKIP	68,86	70,03	>60-70	>70-80	>80-90
		Meningkatkan kompetensi ASN	Indeks Profesionalitas Pegawai	N/A	N/A	N/A	71,08%	71,97%
		Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Nilai Kepuasan Masyarakat	76,46%	83,74%	76%	86,03%	88,31%



VISI : SURABAYA KOTA SENTOSA YANG BERKARAKTER DAN BERDAYA SAING GLOBAL BERBASIS EKOLOGI

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Kondisi Awal		Target		
				2017	2018	2019	2020	2021
			Nilai Tingkat Kepuasan Penyelenggaraan TIK dalam Pelayanan Publik Administratif	97,63	97,59	75 (Cukup)	76-100 (Baik)	76-100 (Baik)
		Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan	Persentase Tingkat Capaian Keberhasilan Pelaksanaan Program	91,18%	98,04%	91,96%	98,00%	98,00%
		Meningkatkan cakupan ketersediaan prasarana pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase cakupan ketersediaan prasarana pemerintahan dan pelayanan publik	N/A	N/A	N/A	91,23%	92,35%
		Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
			Persentase kontribusi pajak terhadap PAD	69,92%	78,03%	75,54%	79,78%	80,12%
		Meningkatkan peran serta DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan	Persentase kegiatan DPRD yang terfasilitasi	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
		Meningkatkan sistem pengawasan internal	Rasio Angka Pelanggaran Disiplin Aparatur per 1.000	1,03	1,14	1,26	1,21	1,15



VISI : SURABAYA KOTA SENTOSA YANG BERKARAKTER DAN BERDAYA SAING GLOBAL BERBASIS EKOLOGI								
Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Kondisi Awal		Target		
				2017	2018	2019	2020	2021
		pemerintah	Pegawai					
			Persentase pelanggaran tata kelola administrasi keuangan pada kasus yang sama yang berhasil diturunkan	N/A	N/A	N/A	14,20%	16,80%



BAB VI

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Strategi dan arah kebijakan dalam bab ini dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan dalam mendukung pencapaian visi dan misi walikota dan wakil walikota Surabaya. Adapun visi dari Kota Surabaya adalah **Surabaya Kota Sentosa Yang Berkarakter Dan Berdaya Saing Global Berbasis Ekologi**. Berikut ini dijabarkan arah kebijakan, strategi, dan program dari Perubahan RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021.

VI.1 Strategi

VI.1.1 Misi Pertama

Misi 1 dimaksudkan untuk meningkatkan derajat kesehatan dan mencerdaskan masyarakat sehingga mempunyai kualifikasi sebagai manusia yang berkualitas dan dapat mengaktualisasikan dirinya di masyarakat serta dapat memenuhi kebutuhan dasar bagi kelompok rentan dan memberdayakan masyarakat agar memiliki kemampuan berusaha serta menciptakan seluas-luasnya kesempatan berusaha, serta untuk menciptakan situasi dan kondisi yang memberikan rasa aman, tenang dan kondusif untuk melaksanakan aktivitas keseharian bagi warga kota melalui peningkatan ketentraman dan ketertiban umum untuk mendukung pelaksanaan pemerintahan daerah. Tujuan dari misi pertama, yaitu :

VI.1.1.1 Meningkatkan kualitas pembangunan manusia, dengan Sasaran :

1. Meningkatkan ketahanan pangan.

Strategi yang diambil dari sasaran tersebut, yaitu :

- a. Meningkatkan pemahaman dan budaya masyarakat dalam mengkonsumsi makanan yang beragam, bergizi seimbang dan aman
- b. Meningkatkan nilai tambah dan jangkauan pemasaran produk pertanian, kelautan dan perikanan
- c. Menjalinkan hubungan kerjasama dengan wilayah penghasil komoditas pangan



2. Meningkatkan partisipasi aktif pemuda dalam pembangunan kepemudaan.

Strategi yang diambil dari sasaran tersebut, yaitu :

- a. Meningkatkan partisipasi aktif pemuda dalam pembangunan kepemudaan di berbagai bidang

3. Meningkatkan derajat kesehatan.

Strategi yang diambil dari sasaran tersebut, yaitu :

- a. Meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat.
- b. Meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan dan gizi ibu dan anak.
- c. Mendorong pola hidup bersih dan sehat di masyarakat melalui upaya promotif dan preventif.
- d. Mencukupi kebutuhan sarana dan prasarana RSUD dan Puskesmas sesuai standar sarana dan prasarana, tipe rumah sakit, dan perkembangan ilmu kesehatan.
- e. Menjamin ketersediaan serta pendistribusian obat dan perbekalan kesehatan di sarana kesehatan sesuai standar.
- f. Pelaksanaan akreditasi puskesmas & rumah sakit dan pemantauan implementasinya secara berkala.
- g. Meningkatkan mutu dan akses pelayanan di RSUD dan Puskesmas sesuai standar.
- h. Meningkatkan pencegahan dan pengendalian terhadap penyakit menular dan tidak menular.
- i. Mencukupi kebutuhan sarana dan prasarana RSUD dan puskesmas sesuai standar sarana dan prasarana, tipe rumah sakit, dan perkembangan ilmu kesehatan

4. Meningkatkan dan mempertahankan prestasi atlet di tingkat regional, nasional dan/atau internasional.

Strategi yang diambil dari sasaran tersebut, yaitu :

- a. Meningkatkan dan mempertahankan prestasi dalam event olahraga.
- b. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana olahraga.

5. Meningkatkan kualitas pendidikan.

Strategi yang diambil dari sasaran tersebut, yaitu :

- a. Meningkatkan kualitas pendidikan non formal.



- b. Meningkatkan kualitas pendidikan formal.
- c. Meningkatkan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan.
- d. Meningkatkan manajemen pengelolaan pendidikan formal.

- 6. Meningkatnya pengarusutamaan gender, pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak.

Strategi yang diambil dari sasaran tersebut, yaitu :

- a. Meningkatkan kualitas layanan KB dasar.
 - b. Meningkatkan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat laki-laki dan perempuan dalam pelaksanaan pembangunan.
 - c. Melindungi perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan dan trafficking.
- 7. Meningkatkan cakupan ketersediaan pelayanan prasarana pendidikan yang memenuhi standar.

Strategi yang diambil dari sasaran tersebut, yaitu :

- a. Menyediakan prasarana pendidikan.
- 8. Meningkatkan cakupan ketersediaan pelayanan prasarana kesehatan.
- Strategi yang diambil dari sasaran tersebut, yaitu :
- a. Mencukupi kebutuhan prasarana RSUD dan puskesmas/puskesmas pembantu.

- 9. Meningkatkan minat baca masyarakat.

Strategi yang diambil dari sasaran tersebut, yaitu :

- a. Meningkatkan akses dan kualitas layanan baca.

VI.1.1.2 Mengurangi pengangguran, dengan sasaran

- 1. Meningkatkan kesempatan kerja dan kompetensi angkatan kerja, serta menciptakan hubungan industrial yang harmonis.

Strategi yang diambil dari sasaran tersebut, yaitu :

- a. Memperluas kesempatan kerja formal.
- b. Meningkatkan kompetensi tenaga kerja.
- c. Menerapkan prinsip-prinsip hubungan industrial dalam pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial.



VI.1.1.3 Penurunan Penduduk Miskin

1. Meningkatkan kesejahteraan PMKS.

Strategi yang diambil dari sasaran tersebut, yaitu :

- a. Meningkatkan jangkauan layanan rehabilitasi kesejahteraan sosial dengan mendorong partisipasi aktif dari seluruh elemen untuk penanganan PMKS.

VI.1.2 Misi Kedua

Misi 2 dimaksudkan untuk menciptakan situasi dan kondisi yang memberikan rasa aman, tenang dan kondusif untuk melaksanakan aktivitas keseharian bagi warga kota melalui peningkatan ketentraman dan ketertiban umum untuk mendukung pelaksanaan pemerintahan daerah. Tujuan dari misi kedua ini, yaitu :

VI.1.2.1 Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum, dengan Sasaran :

1. Meningkatkan kualitas pelaksanaan norma, toleransi, dan kerukunan masyarakat.

Strategi yang diambil dari sasaran tersebut, yaitu :

- a. Meningkatkan pengendalian keamanan dan ketenteraman lingkungan serta mewujudkan kerukunan hidup bermasyarakat.

2. Meningkatkan perlindungan masyarakat.

Strategi yang diambil dari sasaran tersebut, yaitu :

- a. Pengerahan dan pengendalian satuan perlindungan masyarakat.

3. Meningkatkan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat.

Strategi yang diambil dari sasaran tersebut, yaitu :

- a. Meningkatkan peran serta lembaga/organisasi/kelompok keagamaan dalam memberikan pemahaman nilai-nilai keagamaan kepada masyarakat.

4. Meningkatkan ketertiban umum.

Strategi yang diambil dari sasaran tersebut, yaitu :

- a. Meningkatkan ketertiban umum dengan melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan daerah.

VI.1.3 Misi Ketiga

Misi 3 dimaksudkan untuk melakukan upaya perencanaan, pengawasan dan pengendalian tata ruang yang menjamin terintegrasinya fungsi-fungsi pusat kegiatan



dan kawasan lindung melalui struktur ruang kota yang antisipatif terhadap bencana serta memperhatikan daya dukung kota serta melakukan upaya integrasi pembangunan jaringan infrastruktur kota (jalan, jembatan, drainase dan rel kereta api) dan utilitas kota (listrik, air, gas dan telekomunikasi) agar aksesibilitas dan mobilitas kegiatan perdagangan dan jasa menjadi efisien disertai pemanfaatan teknologi ramah lingkungan yang menjamin pelestarian lingkungan serta mendorong pemanfaatan energi alternatif yang ramah lingkungan dan konservasi energi. Tujuan dari misi ketiga ini, yaitu :

VI.1.3.1 Meningkatkan penataan ruang yang terintegrasi dan memperhatikan daya dukung kota, dengan Sasaran :

1. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup kota yang bersih dan hijau.
Strategi yang diambil dari sasaran tersebut, yaitu :
 - a. Mengoptimalkan pengelolaan taman hutan raya yang sudah dikuasai Pemerintah Kota Surabaya.
 - b. Mengoptimalkan pengelolaan RTH yang dikuasai Pemerintah Kota Surabaya.
2. Optimalisasi sistem pengelolaan dan pelayanan kebersihan secara terpadu yang berbasis masyarakat dengan penerapan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan.
Strategi yang diambil dari sasaran tersebut, yaitu :
 - a. Peningkatan pemanfaatan fasilitas pengelolaan sampah berteknologi tepat guna dan ramah lingkungan
3. Peningkatan kapasitas pelayanan pengolahan air limbah.
Strategi yang diambil dari sasaran tersebut, yaitu :
 - a. Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam penggunaan IPAL
4. Meningkatkan kualitas udara dan air.
Strategi yang diambil dari sasaran tersebut, yaitu :
 - a. Pengendalian pencemaran air dan udara skala kota



VI.1.3.2 Mewujudkan sistem infrastruktur kota yang terakses, terkoneksi, dan menjamin mobilitas melalui ketahanan terhadap bencana, sinkronisasi sistem penataan ruang dan pertanahan, pengoptimalan utilitas dan sistem drainase kota serta jaringan transportasi kota yang terpadu, dengan Sasaran:

1. Pengembangan sistem penanggulangan bencana yang antisipatif dan tanggap.

Strategi yang diambil dari sasaran tersebut, yaitu :

- a. Peningkatan mitigasi dan penanggulangan bencana alam.
- b. Memantau secara berkesinambungan dan memutakhirkan sistem mitigasi dan penanggulangan bencana kebakaran skala kota.

2. Meningkatkan sinkronisasi dan integrasi rencana induk sektoral dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW).

Strategi yang diambil dari sasaran tersebut, yaitu :

- a. Mempercepat penyelesaian penyusunan rencana induk sektoral yang terintegrasi rencana tata ruang kota

3. Meningkatnya pelayanan utilitas kota lainnya.

Strategi yang diambil dari sasaran tersebut, yaitu :

- a. Koordinasi perencanaan dan pembangunan utilitas dan sarana prasarananya

4. Penyediaan sistem drainase kota yang terpadu, efektif dan efisien.

Strategi yang diambil dari sasaran tersebut, yaitu :

- a. Meningkatkan kapasitas sistem drainase kota untuk mengurangi dampak genangan air saat musim hujan dan laut pasang

5. Meningkatnya sistem jaringan dan kualitas PJU hemat energi.

Strategi yang diambil dari sasaran tersebut, yaitu :

- a. Meningkatkan kuantitas, efektivitas dan efisiensi penggunaan PJU hemat energi yang terpasang

6. Menyediakan dan meningkatkan kinerja jaringan jalan.

Strategi yang diambil dari sasaran tersebut, yaitu :

- a. Mengembangkan kapasitas dan kualitas jaringan jalan yang terkoneksi dengan jaringan jalan dan jembatan regional dan nasional

7. Mewujudkan penyediaan lahan bagi kepentingan umum.



Strategi yang diambil dari sasaran tersebut, yaitu

- a. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan lahan bagi pembangunan infrastruktur untuk kepentingan umum
- b. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan lahan bagi pembangunan non infrastruktur untuk kepentingan umum

8. Meningkatnya pengamanan dan pengelolaan aset tanah dan/atau bangunan.

Strategi yang diambil dari sasaran tersebut, yaitu :

- a. Mengoptimalkan sistem manajemen pengamanan dan pengelolaan aset tanah dan/atau bangunan milik Pemerintah Kota Surabaya

9. Penyediaan sistem lalu lintas yang berkualitas.

Strategi yang diambil dari sasaran tersebut, yaitu :

- a. Meningkatkan keselamatan dan kenyamanan berlalu lintas
- b. Pelaksanaan pengujian kelayakan kendaraan angkutan umum (KIR) sesuai ketentuan

10. Meningkatkan pengamanan dan pengelolaan aset tanah untuk pembangunan infrastruktur.

Strategi yang diambil dari sasaran tersebut, yaitu :

- a. Meningkatkan pengamanan aset tanah, saluran, jalan dan kelengkapannya

11. Penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana angkutan.

Strategi yang diambil dari sasaran tersebut, yaitu :

- a. Peningkatan sistem manajemen angkutan umum massal yang aman, nyaman dan ramah
- b. Pembangunan dan pengembangan prasarana perpindahan moda transportasi kota yang aman, nyaman dan terintegrasi dengan pelayanan regional dan nasional

12. Meningkatkan efektivitas perwujudan penataan ruang dan bangunan.

Strategi yang diambil dari sasaran tersebut, yaitu :

- a. Optimalisasi penataan ruang melalui pengendalian pemanfaatan ruang

VI.1.4 Misi Keempat

Misi 4 dimaksudkan untuk melakukan upaya menanamkan dan mempertahankan kesenian dan nilai-nilai budaya lokal (ulet, egaliter, terbuka,



kreatif) serta nilai-nilai kepahlawanan yang berfalsafah pancasila kepada warga kota utamanya generasi muda. Tujuan dari misi keempat ini, yaitu :

VI.1.4.1 Meningkatkan nilai-nilai budaya lokal dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat, dengan Sasaran :

1. Meningkatnya pelestarian seni dan cagar budaya.

Strategi yang diambil dari sasaran tersebut, yaitu :

- a. Menggali potensi serta menetapkan budaya lokal dan cagar budaya.
 - b. Mengembangkan budaya lokal dengan cara mengenalkan dan menampilkan budaya lokal kepada masyarakat sehingga bisa dimanfaatkan sebagai tujuan pariwisata.
2. Meningkatkan pemahaman nilai-nilai kepahlawanan dalam kehidupan bermasyarakat.

Strategi yang diambil dari sasaran tersebut, yaitu :

- a. Meningkatkan peran serta lembaga / organisasi / kelompok kepahlawanan dalam memberikan pemahaman nilai-nilai kepahlawanan kepada masyarakat.

VI.1.5 Misi Kelima

Misi 5 dimaksudkan untuk melakukan upaya integrasi fasilitas pendukung perdagangan dan jasa (termasuk di dalamnya pelabuhan laut dan udara, pergudangan, kawasan industri, kawasan perdagangan, terminal dan stasiun) melalui implementasi manajemen logistik kota/*city logistic*. Penggalan potensi, peningkatan investasi, serta pengembangan dan penerapan konsep *city logistic* yang terpadu sebagai pusat serta jaringan dalam kota dan antar kota baik skala regional, nasional, maupun internasional serta melakukan upaya mendorong usaha-usaha ekonomi lokal untuk mampu berinovasi dan mengembangkan industri kreatif agar bisa bersaing di pasar global. Tujuan dari misi kelima, yaitu :

VI.1.5.1 Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan sistem manajemen *city logistic*, pemantapan daya saing usaha-usaha ekonomi lokal, serta pengembangan inovasi produk dan jasa, dengan Sasaran:

1. Meningkatkan sistem logistik perdagangan serta produktivitas sektor pariwisata dalam upaya menambah nilai kekayaan ekonomi.

Strategi yang diambil dari sasaran tersebut, yaitu :



- a. Meningkatkan daya tarik wisata
 - b. Mengembangkan distribusi logistik perdagangan.
2. Mendorong pematapan daya saing usaha mikro dan koperasi.
Strategi yang diambil dari sasaran tersebut, yaitu :
- a. Meningkatkan proporsi jumlah koperasi sehat melalui penataan kelembagaan dan pembinaan usaha.
 - b. Memperkuat permodalan usaha mikro.
 - c. Meningkatkan daya saing usaha mikro melalui pengembangan desiminasi, pemanfaatan teknologi informasi, dan peningkatan kualitas SDM.
 - d. Meningkatkan nilai tambah dan jangkauan pemasaran produk usaha mikro.
3. Meningkatkan realisasi investasi.
Strategi yang diambil dari sasaran tersebut, yaitu :
- a. Meningkatkan iklim investasi dan usaha dengan memberikan kepastian usaha dan mengembangkan daya tarik investasi.

VI.1.6 Misi Keenam

Misi 6 dimaksudkan untuk melakukan upaya penyediaan sarana dan prasarana lingkungan dan permukiman yang layak huni serta mengurangi perumahan kumuh. Tujuan dari misi keenam, yaitu:

VI.1.6.1 Memantapkan sarana prasarana pada kawasan perumahan dan permukiman untuk mewujudkan lingkungan yang berkualitas, dengan Sasaran:

1. Meningkatkan efektivitas pemanfaatan perumahan layak huni.
Strategi yang diambil dari sasaran tersebut, yaitu :
 - a. Peningkatan kualitas pengelolaan perumahan layak huni.
2. Meningkatkan penyediaan serta pengelolaan lingkungan perumahan dan kawasan permukiman layak huni.
Strategi yang diambil dari sasaran tersebut, yaitu :
 - a. Menyediakan rumah layak huni dan peningkatan kualitas lingkungan permukiman.
3. Menurunkan potensi wilayah perumahan kumuh.



Strategi yang diambil dari sasaran tersebut, yaitu :

- a. Menurunkan potensi terciptanya kawasan kumuh di wilayah perumahan.

VI.1.7 Misi Ketujuh

Misi 7 dimaksudkan untuk upaya pematapan tata kelola pemerintahan yang baik yaitu dengan pencapaian pelayanan prima di sektor perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan pembangunan, pengelolaan keuangan daerah dan pelayanan perizinan yang didukung TIK. Selain itu juga termasuk pembinaan terhadap BUMD yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Kota Surabaya, yang memiliki rencana kerja dan anggaran perusahaan sendiri. Pemerintah Kota sebagai pemilik modal memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap BUMD tersebut. Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 48 Tahun 2018, Bagian Administrasi Perekonomian dan Usaha Daerah melakukan pembinaan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Tujuan dari misi ketujuh ini, yaitu :

VI.1.7.1 Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pengelolaan keuangan daerah, dengan Sasaran :

1. Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Strategi yang diambil dari sasaran tersebut, yaitu :

- a. Meningkatkan efektivitas dan kinerja lembaga pemerintahan melalui peningkatan kerjasama, penyediaan sarana dan prasarana, pengendalian pembangunan serta regulasi untuk mendukung pelayanan publik yang baik.
- b. Meningkatkan pelayanan kecamatan dan kelurahan.
- c. Mengoptimalkan penyelenggaraan akuntabilitas kinerja, kelembagaan, dan ketatalaksanaan.
- d. Melakukan pembinaan untuk peningkatan kinerja BUMD.
- e. Melakukan kajian dan analisis untuk rekomendasi kebijakan serta melakukan monitoring dan evaluasi atas implementasi kebijakan.
- f. Menyediakan saluran komunikasi dan informasi yang memadai bagi masyarakat dan pihak berkepentingan berkaitan dengan implementasi kebijakan dan pembangunan skala kota



2. Meningkatkan cakupan ketersediaan prasarana pemerintahan dan pelayanan publik.

Strategi yang diambil dari sasaran tersebut, yaitu :

- a. Meningkatkan kualitas dan fungsi prasarana pemerintahan dan pelayanan publik

3. Meningkatkan kompetensi ASN

Strategi yang diambil dari sasaran tersebut, yaitu :

- a. Menempatkan aparatur sesuai kapasitas dan kompetensi, serta melakukan evaluasi atas kompetensi secara berkelanjutan

4. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan.

Strategi yang diambil dari sasaran tersebut, yaitu :

- a. Meningkatkan konsistensi, efektivitas, dan efisiensi perencanaan pembangunan.

5. Meningkatkan peran serta DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Strategi yang diambil dari sasaran tersebut, yaitu :

- a. Meningkatkan kapasitas lembaga fasilitator perwakilan rakyat daerah.

6. Meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Strategi yang diambil dari sasaran tersebut, yaitu :

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan
- b. Pengembangan database kependudukan secara terpadu serta pemutakhiran data secara berkesinambungan yang melibatkan seluruh instansi terkait di Pemerintah Kota
- c. Menyediakan layanan publik berbasis teknologi informasi
- d. Menyediakan saluran komunikasi dan informasi yang memadai bagi masyarakat dan pihak berkepentingan berkaitan dengan implementasi kebijakan dan pembangunan skala kota
- e. Peningkatan kualitas sarana TIK pendukung pelayanan publik
- f. Menyusun data statistik daerah
- g. Meningkatkan kualitas pelayanan publik
- h. Meningkatkan kualitas pelayanan rekomendasi teknis
- i. Memberikan perlindungan kepada konsumen serta menjamin keamanan perdagangan
- j. Meningkatkan penataan, penyelamatan dan pelestarian arsip



7. Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah.
Strategi yang diambil dari sasaran tersebut, yaitu :
 - a. Mengoptimalkan potensi pendapatan daerah, terutama dari pajak dan retribusi daerah.
8. Meningkatkan sistem pengawasan internal pemerintah.
Strategi yang diambil dari sasaran tersebut, yaitu :
 - a. Meningkatkan kedisiplinan aparatur.



Tabel VI.1
Hubungan antara Tujuan, Sasaran dan Strategi Kota Surabaya (Tabel T-C.12)

VISI : Surabaya Kota Sentosa yang Berkarakter dan Berdaya Saing Global Berbasis Ekologi				
MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	
1. Mewujudkan sumber daya masyarakat yang berkualitas serta memberdayakan masyarakat dan menciptakan seluas-luasnya kesempatan berusaha	Mengurangi pengangguran	Meningkatkan kesempatan kerja dan kompetensi angkatan kerja, serta menciptakan hubungan industrial yang harmonis	Memperluas kesempatan kerja formal	
			Menerapkan prinsip-prinsip hubungan industrial dalam pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial	
			Meningkatkan kompetensi tenaga kerja	
	Meningkatkan kualitas pembangunan manusia	Meningkatkan cakupan ketersediaan pelayanan prasarana kesehatan	Meningkatkan dan mempertahankan prestasi atlet di tingkat regional, nasional dan/atau internasional	Mencukupi kebutuhan prasarana RSUD dan puskesmas/puskesmas pembantu
				Menyediakan prasarana pendidikan
		Meningkatkan derajat kesehatan	Meningkatkan dan mempertahankan prestasi atlet di tingkat regional, nasional dan/atau internasional	Meningkatkan dan mempertahankan prestasi dalam event olahraga
				Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana olahraga
				Mencukupi kebutuhan sarana dan prasarana RSUD dan Puskesmas sesuai standar sarana dan prasarana, tipe rumah sakit, dan perkembangan ilmu kesehatan
		Meningkatkan derajat kesehatan	Meningkatkan derajat kesehatan	Mendorong pola hidup bersih dan sehat di masyarakat melalui upaya promotif dan preventif
				Meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat
Meningkatkan derajat kesehatan	Meningkatkan derajat kesehatan	Meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan dan gizi ibu dan anak		



VISI : Surabaya Kota Sentosa yang Berkarakter dan Berdaya Saing Global Berbasis Ekologi			
MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
			Meningkatkan mutu dan akses pelayanan di RSUD dan puskesmas sesuai standar
			Meningkatkan pencegahan dan pengendalian terhadap penyakit menular dan tidak menular
			Menjamin ketersediaan serta pendistribusian obat dan perbekalan kesehatan di sarana kesehatan sesuai standar
			Pelaksanaan akreditasi puskesmas & rumah sakit dan pemantauan implementasinya secara berkala
		Meningkatkan ketahanan pangan	Meningkatkan nilai tambah dan jangkauan pemasaran produk pertanian, kelautan dan perikanan
			Meningkatkan pemahaman dan budaya masyarakat dalam mengkonsumsi makanan yang beragam, bergizi seimbang dan aman
			Menjalin hubungan kerjasama dengan wilayah penghasil komoditas pangan
		Meningkatkan kualitas pendidikan	Meningkatkan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan
			Meningkatkan kualitas pendidikan formal
			Meningkatkan kualitas pendidikan non formal
			Meningkatkan manajemen pengelolaan pendidikan formal



VISI : Surabaya Kota Sentosa yang Berkarakter dan Berdaya Saing Global Berbasis Ekologi			
MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
		Meningkatkan partisipasi aktif pemuda dalam pembangunan kepemudaan	Meningkatkan partisipasi aktif pemuda dalam pembangunan kepemudaan di berbagai bidang
		Meningkatnya pengarusutamaan gender, pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak	Melindungi perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan dan trafficking
			Meningkatkan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat laki-laki dan perempuan dalam pelaksanaan pembangunan
			Meningkatkan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat laki-laki dan perempuan dalam pelaksanaan pembangunan
		Meningkatkan kualitas layanan KB dasar	
	Meningkatkan minat baca masyarakat	Meningkatkan akses dan kualitas layanan baca	
	Penurunan Penduduk Miskin	Meningkatkan kesejahteraan PMKS	Meningkatkan jangkauan layanan rehabilitasi kesejahteraan sosial dengan mendorong partisipasi aktif dari seluruh elemen untuk penanganan PMKS
2. Memelihara keamanan dan ketertiban umum	Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum	Meningkatkan ketertiban umum	Meningkatkan ketertiban umum dengan melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan daerah
		Meningkatkan kualitas pelaksanaan norma, toleransi, dan kerukunan masyarakat	Meningkatkan pengendalian keamanan dan ketenteraman lingkungan serta mewujudkan kerukunan hidup bermasyarakat



VISI : Surabaya Kota Sentosa yang Berkarakter dan Berdaya Saing Global Berbasis Ekologi			
MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
		Meningkatkan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat	Meningkatkan peran serta lembaga/organisasi/kelompok keagamaan dalam memberikan pemahaman nilai-nilai keagamaan kepada masyarakat
		Meningkatkan perlindungan masyarakat	Pengerahan dan pengendalian satuan perlindungan masyarakat
3. Mewujudkan penataan ruang yang terintegrasi dan memperhatikan daya dukung kota serta infrastruktur dan utilitas kota yang terpadu dan efisien	Meningkatkan penataan ruang yang terintegrasi dan memperhatikan daya dukung kota	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup kota yang bersih dan hijau	Mengoptimalkan pengelolaan taman hutan raya yang sudah dikuasai Pemerintah Kota Surabaya
		Meningkatkan kualitas udara dan air	Mengoptimalkan pengelolaan RTH yang dikuasai Pemerintah Kota Surabaya
			Mengoptimalkan penyebaran informasi dan pengetahuan upaya pelestarian lingkungan hidup
			Pengendalian pencemaran air dan udara skala kota
			Pengendalian pencemaran air dan udara skala kota
			Pengendalian pencemaran air dan udara skala kota
			Peningkatan kualitas sarana air limbah rumah tangga
Optimalisasi sistem pengelolaan dan pelayanan kebersihan secara terpadu yang berbasis masyarakat dengan penerapan	Peningkatan pemanfaatan fasilitas pengelolaan sampah berteknologi tepat guna dan ramah lingkungan		



VISI : Surabaya Kota Sentosa yang Berkarakter dan Berdaya Saing Global Berbasis Ekologi			
MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
		teknologi tepat guna dan ramah lingkungan	
		Peningkatan kapasitas pelayanan pengolahan air limbah	Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam penggunaan IPAL
	Mewujudkan sistem infrastruktur kota yang terakses, terkoneksi, dan menjamin mobilitas melalui ketahanan terhadap bencana, sinkronisasi sistem penataan ruang dan pertanahan, pengoptimalan utilitas dan sistem drainase kota serta jaringan transportasi kota yang terpadu	Meningkatkan efektivitas perwujudan penataan ruang dan bangunan	Optimalisasi penataan ruang melalui pengendalian pemanfaatan ruang
		Meningkatkan pengamanan dan pengelolaan aset tanah untuk pembangunan infrastruktur	Meningkatkan pengamanan aset tanah, saluran, jalan dan kelengkapannya
		Meningkatkan sinkronisasi dan integrasi rencana induk sektoral dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW)	Mempercepat penyelesaian penyusunan rencana induk sektoral yang terintegrasi rencana tata ruang kota
		Meningkatnya pelayanan utilitas kota lainnya	Koordinasi perencanaan dan pembangunan utilitas dan sarana prasarananya
		Meningkatnya pengamanan dan pengelolaan aset tanah dan/atau bangunan	Mengoptimalkan sistem manajemen pengamanan dan pengelolaan aset tanah dan/atau bangunan milik Pemerintah Kota Surabaya
		Meningkatnya sistem jaringan dan kualitas PJU hemat energi	Meningkatkan kuantitas, efektivitas dan efisiensi penggunaan PJU hemat energi yang terpasang
		Menyediakan dan meningkatkan kinerja jaringan jalan	Mengembangkan kapasitas dan kualitas jaringan jalan yang terkoneksi dengan jaringan jalan dan jembatan regional dan nasional



VISI : Surabaya Kota Sentosa yang Berkarakter dan Berdaya Saing Global Berbasis Ekologi			
MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
		Mewujudkan penyediaan lahan bagi kepentingan umum	Meningkatkan pemenuhan kebutuhan lahan bagi pembangunan infrastruktur untuk kepentingan umum
			Meningkatkan pemenuhan kebutuhan lahan bagi pembangunan non infrastruktur untuk kepentingan umum
		Pengembangan sistem penanggulangan bencana yang antisipatif dan tanggap	Memantau secara berkesinambungan dan memutakhirkan sistem mitigasi dan penanggulangan bencana kebakaran skala kota
			Peningkatan mitigasi dan penanggulangan bencana alam
		Penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana angkutan	Pembangunan dan pengembangan prasarana perpindahan moda transportasi kota yang aman, nyaman dan terintegrasi dengan pelayanan regional dan nasional
			Peningkatan sistem manajemen angkutan umum massal yang aman, nyaman dan ramah
		Penyediaan sistem drainase kota yang terpadu, efektif dan efisien	Meningkatkan kapasitas sistem drainase kota untuk mengurangi dampak genangan air saat musim hujan dan laut pasang
Penyediaan sistem lalu lintas yang berkualitas	Meningkatkan keselamatan dan kenyamanan berlalu lintas		
	Pelaksanaan pengujian kelayakan kendaraan angkutan umum (KIR) sesuai ketentuan		



VISI : Surabaya Kota Sentosa yang Berkarakter dan Berdaya Saing Global Berbasis Ekologi			
MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
4. Memantapkan dan memperkuat nilai-nilai budaya lokal dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat	Meningkatkan nilai-nilai budaya lokal dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat	Meningkatkan pemahaman nilai-nilai kepahlawanan dalam kehidupan bermasyarakat	Meningkatkan peran serta lembaga/organisasi/kelompok kepahlawanan dalam memberikan pemahaman nilai-nilai kepahlawanan kepada masyarakat
		Meningkatnya pelestarian seni dan cagar budaya	Mengembangkan budaya lokal dengan cara mengenalkan dan menampilkan budaya lokal kepada masyarakat sehingga bisa dimanfaatkan sebagai tujuan pariwisata
			Menggali potensi serta menetapkan budaya lokal dan cagar budaya
5. Mewujudkan Surabaya sebagai pusat penghubung perdagangan dan jasa antar pulau dan internasional serta memantapkan daya saing usaha-usaha ekonomi lokal, inovasi produk dan jasa, serta pengembangan industri kreatif	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan sistem manajemen city logistic, pemantapan daya saing usaha-usaha ekonomi lokal, serta pengembangan inovasi produk dan jasa	Mendorong pemantapan daya saing usaha mikro dan koperasi	Memperkuat permodalan usaha mikro
			Meningkatkan daya saing usaha mikro melalui pengembangan desiminasi, pemanfaatan teknologi informasi, dan peningkatan kualitas SDM
			Meningkatkan nilai tambah dan jangkauan pemasaran produk usaha mikro
			Meningkatkan proporsi jumlah koperasi sehat melalui penataan kelembagaan dan pembinaan usaha
		Meningkatkan realisasi investasi	Meningkatkan iklim investasi dan usaha dengan memberikan kepastian usaha dan mengembangkan daya tarik investasi
		Meningkatkan sistem logistik perdagangan serta produktivitas sektor pariwisata dalam upaya menambah nilai kekayaan	Mengembangkan distribusi logistik perdagangan
Meningkatkan daya tarik wisata			



VISI : Surabaya Kota Sentosa yang Berkarakter dan Berdaya Saing Global Berbasis Ekologi			
MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
6. Memantapkan sarana dan prasarana lingkungan dan permukiman yang ramah lingkungan	Memantapkan sarana prasarana pada kawasan perumahan dan permukiman untuk mewujudkan lingkungan yang berkualitas	ekonomi	
		Meningkatkan efektivitas pemanfaatan perumahan layak huni	Peningkatan kualitas pengelolaan perumahan layak huni
		Meningkatkan penyediaan serta pengelolaan lingkungan perumahan dan kawasan permukiman layak huni	Menyediakan rumah layak huni dan peningkatan kualitas lingkungan permukiman
		Menurunkan potensi wilayah perumahan kumuh	Menurunkan potensi terciptanya kawasan kumuh di wilayah perumahan
7. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pengelolaan keuangan daerah	Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Melakukan kajian dan analisis untuk rekomendasi kebijakan serta melakukan monitoring dan evaluasi atas implementasi kebijakan
			Melakukan pembinaan untuk peningkatan kinerja BUMD
			Membuat mekanisme analisa kebutuhan dan ketersediaan sarana dan prasarana yang berbasis teknologi informasi
			Mengoptimalkan penyelenggaraan akuntabilitas kinerja, kelembagaan, dan ketatalaksanaan
			Meningkatkan efektivitas dan kinerja lembaga pemerintahan melalui peningkatan kerjasama, penyediaan sarana dan prasarana, pengendalian pembangunan serta regulasi untuk mendukung pelayanan publik yang baik



VISI : Surabaya Kota Sentosa yang Berkarakter dan Berdaya Saing Global Berbasis Ekologi			
MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
			Meningkatkan pelayanan kecamatan dan kelurahan
			Menyediakan saluran komunikasi dan informasi yang memadai bagi masyarakat dan pihak berkepentingan berkaitan dengan implementasi kebijakan dan pembangunan skala kota
		Meningkatkan cakupan ketersediaan prasarana pemerintahan dan pelayanan publik	Meningkatkan kualitas dan fungsi prasarana pemerintahan dan pelayanan publik
		Meningkatkan kompetensi ASN	Menempatkan aparatur sesuai kapasitas dan kompetensi, serta melakukan evaluasi atas kompetensi secara berkelanjutan
		Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Memberikan perlindungan kepada konsumen serta menjamin keamanan perdagangan
			Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan
			Meningkatkan kualitas pelayanan publik
			Meningkatkan penataan, penyelamatan dan pelestarian arsip
			Menyediakan layanan publik berbasis teknologi informasi



VISI : Surabaya Kota Sentosa yang Berkarakter dan Berdaya Saing Global Berbasis Ekologi			
MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
			Menyediakan saluran komunikasi dan informasi yang memadai bagi masyarakat dan pihak berkepentingan berkaitan dengan implementasi kebijakan dan pembangunan skala kota
			Menyusun data statistik daerah
			Pengembangan database kependudukan secara terpadu serta pemutakhiran data secara berkesinambungan yang melibatkan seluruh instansi terkait di Pemerintah Kota
			Peningkatan kualitas sarana TIK pendukung pelayanan publik
		Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan	Meningkatkan konsistensi, efektivitas, dan efisiensi perencanaan pembangunan
			Mengoptimalkan potensi pendapatan daerah, terutama dari pajak dan retribusi daerah
		Meningkatkan peran serta DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan	Meningkatkan kapasitas lembaga fasilitator perwakilan rakyat daerah
		Meningkatkan sistem pengawasan internal pemerintah	Meningkatkan kedisiplinan aparatur



VI.2 Arah Kebijakan

Mengacu pada strategi pembangunan di atas, maka dapat dirumuskan Arah Kebijakan Pembangunan Kota Surabaya Tahun 2020-2021 sebagaimana disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel VI.2
Arah Kebijakan Kota Surabaya (Tabel T-C.13)

ARAH KEBIJAKAN	
2020	2021
Pemantapan daya saing kota melalui percepatan pembangunan infrastruktur ekologis, sumber daya manusia berkualitas serta kesejahteraan dan kemandirian masyarakat	Mewujudkan visi pembangunan : Surabaya Kota Sentosa Yang Berkarakter dan Berdaya Saing Global Berbasis Ekologi

Penentuan arah kebijakan diatas telah disesuaikan dengan Tema RKP Tahun 2020, Arah Kebijakan yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024, serta Tema RKPD Kota Surabaya Tahun 2016-2020, yang mana merupakan target indikatif menuju tercapainya Visi Pembangunan RPJMD Kota Surabaya di akhir periode perencanaan tahun 2021. Keselarasan arah kebijakan baik secara vertical maupun horizontal akan menjamin keserasian pembangunan antar level maupun antar daerah.



VI.3 Program Pembangunan Daerah

Rencana program, dalam Perubahan RPjMD Kota Surabaya 2016-2021 terdiri dari program pembangunan daerah yang menunjang secara langsung pencapaian visi dan misi Walikota Surabaya yang dikelompokkan dalam program prioritas 1, serta program Perangkat Daerah yang tidak menunjang secara langsung terhadap pencapaian visi dan misi Walikota dalam kelompok program prioritas 2.



Tabel VI.3
Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif Kota Surabaya (Tabel T-C.14)

Misi-Tujuan-Sasaran-Program				Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD			Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					Realisasi			Target atau Realisasi (*)	Tahun 2020		Tahun 2021			Kondisi Kinerja	
					2016	2017	2018	2019	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1. Mewujudkan sumber daya masyarakat yang berkualitas serta memberdayakan masyarakat dan menciptakan seluas-luasnya kesempatan berusaha										2.498.841.869.670		2.537.784.561.765		5.036.626.431.435	
			Meningkatkan kualitas pembangunan manusia	Indeks Pembangunan Manusia	80,38	81,07	81,74	80-81	81-82	2.277.696.142.852	81-82	2.314.723.390.922	81-82	4.592.419.533.774	
			Meningkatkan cakupan ketersediaan pelayanan prasarana pendidikan yang memenuhi standar	Persentase cakupan ketersediaan prasarana pendidikan sesuai standar	N/A	N/A	N/A	N/A	92,15%	119.948.904.507	92,68%	120.360.714.518	92,68%	240.309.619.025	
			Program Peningkatan dan Perbaikan Prasarana Pendidikan	Persentase prasarana pendidikan dalam kondisi baik	N/A	N/A	N/A	N/A	88,94%	119.948.904.507	100,00%	120.360.714.518	100,00%	240.309.619.025	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
			Meningkatkan dan mempertahankan prestasi atlet di tingkat regional, nasional dan/atau internasional	Indeks prestasi atlet di tingkat regional, nasional dan/atau internasional	N/A	N/A	N/A	N/A	1,99	95.280.035.348	2,01	95.618.637.015	2,01	190.898.672.363	
			Program Pembangunan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Cakupan/sebaran fasilitas olahraga	N/A	115 kelurahan	124 kelurahan	130 kelurahan	142 kelurahan	80.090.291.768	154 kelurahan	80.323.733.417	154 kelurahan	160.414.025.185	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
			Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Akumulasi prestasi atlet di tingkat regional, nasional dan/atau internasional	N/A	N/A	N/A	N/A	1.660 medali	15.189.743.580	1.690 medali	15.294.903.598	1.690 medali	30.484.647.178	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
			Meningkatkan cakupan ketersediaan pelayanan prasarana kesehatan	Persentase cakupan ketersediaan prasarana kesehatan yang memenuhi standar klasifikasi dan akreditasi	N/A	N/A	N/A	N/A	95,23%	323.632.811.405	98,35%	323.723.718.467	98,35%	647.356.529.872	
			Program Peningkatan dan Perbaikan Prasarana Layanan Kesehatan	Persentase prasarana layanan kesehatan dalam kondisi baik	N/A	N/A	N/A	N/A	88,17%	323.632.811.405	100,00%	323.723.718.467	100,00%	647.356.529.872	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang



Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kota Surabaya 2016 – 2021

Misi-Tujuan-Sasaran-Program				Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD			Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					Realisasi			Target atau Realisasi (*)	Tahun 2020		Tahun 2021			Kondisi Kinerja	
					2016	2017	2018	2019	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Meningkatkan minat baca masyarakat	Indeks minat baca masyarakat	N/A	N/A	N/A	N/A	0,5	27.495.972.624	0,6	28.037.387.970	0,6	55.533.360.594	
			Program Pembinaan Layanan Baca	Persentase perpustakaan yang berhasil dibina	N/A	12,90%	31,06%	22,80%	46,60%	900.111.258	51,60%	910.017.836	51,60%	1.810.129.094	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			Program Peningkatan Informasi dan Layanan Perpustakaan	Persentase peningkatan jumlah kegiatan petugas pengelola layanan baca	N/A	N/A	N/A	N/A	8,00%	22.940.862.155	10,00%	23.355.657.497	10,00%	46.296.519.652	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
				Persentase pertumbuhan event literasi yang diselenggarakan	N/A	13,42%	8,33%	10,00%	10,00%		10,00%		10,00%		
			Program Peningkatan Minat dan Baca Masyarakat	Persentase penambahan koleksi buku	N/A	N/A	N/A	N/A	94,41%	3.654.999.211	100,00%	3.771.712.637	100,00%	7.426.711.848	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			Meningkatkan partisipasi aktif pemuda dalam pembangunan kepemudaan	Persentase kader kenakalan remaja dan pemuda pelopor yang menjalankan fungsi advokasi pembangunan kepemudaan	N/A	N/A	N/A	N/A	10,00%	3.593.671.623	20,00%	3.629.884.854	20,00%	7.223.556.477	
			Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Persentase pemuda yang aktif memberikan penyuluhan sebagai kader anti kenakalan remaja	N/A	N/A	N/A	N/A	15,00%	3.593.671.623	35,00%	3.629.884.854	35,00%	7.223.556.477	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
			Meningkatkan derajat kesehatan	Angka Harapan Hidup (AHH)	N/A	73,88	73,98	73,89	74,01	847.224.450.241	74,04	857.598.530.649	74,04	1.704.822.980.890	
			Program Jaminan Kesehatan	Persentase Kepemilikan Jaminan Kesehatan	N/A	99,09%	100,00%	100,00%	100,00%	175.733.535.729	100,00%	179.544.916.347	100,00%	355.278.452.076	Dinas Kesehatan
			Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Puskesmas/Puskesmas Pembantu	Persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan Dinas Kesehatan	107,14%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	23.108.395.641	100,00%	23.887.161.715	100,00%	46.995.557.356	Dinas Kesehatan
			Program Obat dan Perbekalan Kesehatan RSUD Bhakti Dharma Husada	Persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan RSUD Bhakti Dharma Husada	100,00%	99,87%	100,00%	100,00%	100,00%	32.174.798.660	100,00%	32.174.872.998	100,00%	64.349.671.658	RSUD Bhakti Dharma Husada
			Program Obat dan Perbekalan Kesehatan RSUD dr. Mohamad Soewandhie	Persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan RSUD dr. Mohammad Soewandhie	N/A	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	71.000.000.000	100,00%	71.000.000.000	100,00%	142.000.000.000	RSUD Dr. Mohamad Soewandhie
			Program Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Cakupan kunjungan ibu hamil K4	N/A	98,55%	98,98%	98,48%	99,00%	36.900.521.792	99,01%	37.346.448.121	99,01%	74.246.969.913	Dinas Kesehatan



Misi-Tujuan-Sasaran-Program				Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD			Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					Realisasi			Target atau Realisasi (*)	Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja		
					2016	2017	2018	2019	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				Cakupan kunjungan neonatal lengkap	N/A	100,19%	100,28%	90,00%	100,00%		100,00%		100,00%		
				Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan (Tolinakes)	N/A	97,63%	97,68%	96,96%	97,72%		97,74%		97,74%		
				Prevalensi balita gizi buruk	N/A	0,15%	0,14%	<1%	0,11 %		0,10 %		0,10 %		
				Prevalensi balita gizi kurang	N/A	9,10%	8,26%	9,50%	8,24%		8,23%		8,23%		
				Prevalensi balita stunting	N/A	N/A	N/A	N/A	8,90%		8,89%		8,89%		
			Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Cakupan imunisasi dasar lengkap	N/A	94,57%	97,77%	93,85%	97,79%	32.233.850.650	97,80%	32.505.318.298	97,80%	64.739.168.948	Dinas Kesehatan
				Cakupan kelurahan mengalami KLB yang ditangani <20 jam	N/A	N/A	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%		100,00%		
				Cakupan kelurahan yang memiliki Pembinaan Terpadu (Bindu)	N/A	100,00%	100,00%	86,00%	100,00%		100,00%		100,00%		
			Program Pengembangan Pola Hidup Bersih Sehat Masyarakat	Persentase kelurahan siaga aktif minimal strata madya	N/A	N/A	100,00%	100,00%	100,00%	71.150.358.056	100,00%	71.680.218.989	100,00%	142.830.577.045	Dinas Kesehatan
				Persentase rumah sehat	N/A	84,36%	86,38%	78,00%	86,42%		86,44%		86,44%		
				Persentase TPM memenuhi syarat higienis sanitasi	N/A	93,02%	84,84%	83,00%	84,88%		84,90%		84,90%		
			Program Pengembangan SDM dan Promosi Kesehatan RSUD Bhakti Dharma Husada	Persentase pelaksanaan kegiatan PKRS sesuai standar	N/A	N/A	N/A	N/A	80,00%	16.238.103.134	80,00%	16.307.535.850	80,00%	32.545.638.984	RSUD Bhakti Dharma Husada
				Persentase SDM RSUD Bhakti Dharma Husada yang mendapatkan peningkatan kompetensi sesuai standar	N/A	N/A	N/A	N/A	60,00%		60,00%		60,00%		
			Program Pengembangan SDM dan Sistem Pengelolaan RSUD dr. Mohamad Soewandhie	Persentase SDM RSUD dr. Mohamad Soewandhie yang memiliki kompetensi sesuai standar	N/A	N/A	N/A	N/A	50,00%	28.580.067.089	52,00%	28.790.199.322	52,00%	57.370.266.411	RSUD Dr. Mohamad Soewandhie
			Program Peningkatan	Persentase sample	N/A	96,02%	98,04%	86,00%	98,06%	1.815.189.240	98,07%	1.824.692.976	98,07%	3.639.882.216	Dinas



Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kota Surabaya 2016 – 2021

Misi-Tujuan-Sasaran-Program				Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD			Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					Realisasi			Target atau Realisasi (*)	Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja		
					2016	2017	2018	2019	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Keamanan Pangan Olahan dan Siap Saji	yang memenuhi syarat keamanan makanan											Kesehatan
			Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan RSUD Bhakti Dharma Husada	Average Length of Stay (AvLOS)	N/A	N/A	N/A	N/A	4 Hari	5.182.688.887	4 Hari	5.215.066.785	4 Hari	10.397.755.672	RSUD Bhakti Dharma Husada
				Bed Turn Over Ratio (BTO)	N/A	N/A	N/A	N/A	45 Kali		45 Kali		45 Kali		
				Turn Over Interval (TOI)	N/A	N/A	N/A	N/A	3 Hari		3 Hari		3 Hari		
			Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan RSUD dr. Mohamad Soewandhie	Angka Kejadian Infeksi Nosokomial	N/A	N/A	N/A	N/A	1,10%	8.165.044.720	1,00%	8.194.631.923	1,00%	16.359.676.643	RSUD Dr. Mohamad Soewandhie
				Angka Kejadian Infeksi Pasca Operasi	N/A	N/A	N/A	N/A	1,25%		1,00%		1,00%		
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana puskesmas dan puskesmas pembantu	72,95%	76,23%	83,61%	78,00%	83,70%	22.285.183.838	83,75%	22.526.003.804	83,75%	44.811.187.642	Dinas Kesehatan
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan RSUD dr. Mohamad Soewandhie	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana RSUD dr. Mohamad Soewandhie sesuai standar tipe rumah sakit	N/A	116,37%	96,07%	96,08%	96,25%	184.148.430.646	96,40%	186.795.135.738	96,40%	370.943.566.384	RSUD Dr. Mohamad Soewandhie
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit RSUD Bhakti Dharma Husada	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana RSUD Bhakti Dharma Husada sesuai standar tipe rumah sakit	N/A	216,88%	98,95%	90,00%	90,00%	14.053.095.816	90,00%	14.139.572.590	90,00%	28.192.668.406	RSUD Bhakti Dharma Husada
			Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Persentase puskesmas yang terakreditasi	N/A	N/A	N/A	N/A	85,71%	89.879.196.772	100,00%	90.084.343.929	100,00%	179.963.540.701	Dinas Kesehatan
			Program Sumber Daya Kesehatan	Persentase puskesmas dengan alat kesehatan sesuai standard	N/A	N/A	N/A	N/A	98,84%	34.575.989.571	100%	35.582.411.264	100%	70.158.400.835	Dinas Kesehatan
				Persentase tenaga kesehatan yang memiliki izin	N/A	96,08%	98,15%	86,00%	98,17%		98,18%		98,18%		
			Meningkatkan ketahanan pangan	Indeks Ketahanan Pangan	N/A	N/A	N/A	N/A	0,93	20.874.712.399	0,933	21.332.520.576	0,933	42.207.232.975	
			Program Ketersediaan Informasi Komoditas Pangan	Persentase informasi OD yang diperoleh berdasarkan origin (asal) komoditas pangan	N/A	N/A	N/A	N/A	36,40%	717.335.424	63,60%	725.722.583	63,60%	1.443.058.007	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
			Program Pencegahan	Persentase populasi	N/A	85,84%	87,74%	85,00%	88,00%	1.142.341.245	88,50%	1.163.947.096	88,50%	2.306.288.341	Dinas



Misi-Tujuan-Sasaran-Program				Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD			Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					Realisasi			Target atau Realisasi (*)	Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja		
					2016	2017	2018	2019	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			dan Penanggulangan Penyakit Hewan Ternak	hewan ternak yang mendapatkan vaksinasi dan pengobatan											Ketahanan Pangan dan Pertanian
			Program Pengaplikasian Teknologi Tepat Guna dalam Budidaya Peternakan	Persentase pembudidaya ternak yang mengaplikasikan teknologi tepat guna dalam proses budidaya	N/A	25,00%	37,81%	50,00%	65,00%	778.933.564	80,00%	806.672.468	80,00%	1.585.606.032	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
			Program Pengaplikasian Teknologi Tepat Guna dalam Budidaya Tanaman Pangan dan Hortikultura	Persentase pembudidaya tanaman pangan dan hortikultura yang mengaplikasikan teknologi tepat guna dalam proses budidaya	N/A	25,77%	36,31%	14,00%	65,00%	6.314.392.805	80,00%	6.523.541.871	80,00%	12.837.934.676	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
			Program Pengaplikasian Teknologi Tepat Guna Perikanan dan Kelautan	Persentase pembudidaya perikanan dan kelautan yang mengaplikasikan teknologi tepat guna dalam proses budidaya	N/A	30,38%	35,43%	50,00%	65,00%	461.003.460	80,00%	465.098.315	80,00%	926.101.775	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
			Program Peningkatan Ketersediaan, Keanekaragaman dan Keamanan Pangan	Tingkat/Indeks Kecukupan Pangan	N/A	N/A	N/A	N/A	1,00	2.903.341.906	1,00	2.928.285.159	1,00	5.831.627.065	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
				Tingkat keamanan bahan pangan segar yang beredar	N/A	86,95%	89,01%	83,00%	89,50%			89,75%		89,75%	
				Tingkat keanekaragaman konsumsi masyarakat (PPH)	N/A	95,62%	96,76%	96,00%	95,00%			95,00%		95,00%	
			Program Peningkatan Pemasaran Hasil Pertanian dan Perikanan Kelautan	Persentase pembudidaya yang omzetnya meningkat	N/A	61,00%	67,49%	63,00%	67,50%	904.721.910	67,60%	908.007.753	67,60%	1.812.729.663	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
			Program Penyediaan Sarana Prasarana Budidaya Tanaman Pangan dan Hortikultura	Persentase pembudidaya tanaman pangan dan hortikultura yang memanfaatkan fasilitas sarana dan prasarana produksi	N/A	12,03%	15,31%	14,00%	16,00%	2.574.586.248	17,00%	2.640.439.158	17,00%	5.215.025.406	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
			Program Penyediaan Sarana Prasarana Kelautan dan Perikanan	Persentase pembudidaya yang memanfaatkan fasilitas sarana dan prasarana perikanan dan kelautan	N/A	14,21%	13,38%	14,00%	15,00%	5.078.055.837	16,00%	5.170.806.173	16,00%	10.248.862.010	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
			Meningkatkan kualitas pendidikan	Indeks Pendidikan	N/A	N/A	N/A	N/A	79,23	819.856.649.820	80,16	844.396.751.604	80,16	1.664.253.401.424	
			Program Pendidikan	Persentase ketuntasan	N/A	92,56%	89,04%	85,92%*	86,25%	127.066.124.151	87,10%	129.030.169.879	87,10%	256.096.294.030	Dinas



Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kota Surabaya 2016 – 2021

Misi-Tujuan-Sasaran-Program				Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD			Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					Realisasi			Target atau Realisasi (*)	Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja		
					2016	2017	2018	2019	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Anak Usia Dini, Pendidikan Masyarakat dan Kesenian Olahraga Pendidikan	pendidikan kesetaraan paket A											Pendidikan
				Persentase ketuntasan pendidikan kesetaraan paket B	N/A	82,93%	89,65%	89,24%*	89,27%		89,66%		89,66%		
				Persentase ketuntasan pendidikan kesetaraan paket C	N/A	98,13%	91,06 %	86,35%*	91,24%		91,37%		91,37%		
				Persentase ketuntasan pendidikan lembaga kursus dan pelatihan	N/A	N/A	N/A	N/A	72,25%		74,50%		74,50%		
				Persentase ketuntasan pendidikan PAUD	N/A	N/A	N/A	N/A	78,50%		79,75%		79,75%		
				Persentase prestasi non akademik peserta didik PAUD pada lomba tingkat kecamatan/kota/provinsi/nasional/internasional	N/A	N/A	N/A	N/A	0,15%		0,20%		0,20%		
				Persentase prestasi non akademik peserta didik SD pada lomba tingkat kota/provinsi/nasional/internasional	N/A	N/A	N/A	N/A	1,70%		2,00%		2,00%		
				Persentase prestasi non akademik peserta didik SMP pada lomba tingkat kota/provinsi/nasional/internasional	N/A	N/A	N/A	N/A	4,00%		4,50%		4,50%		
				Persentase sasaran penerima beasiswa pendidikan dari kelompok masyarakat berpenghasilan rendah	N/A	N/A	N/A	N/A	45,71%		46,12%		46,12%		
			Program Pengembangan Sekolah Dasar	Persentase daya tampung relatif terhadap jumlah kebutuhan SD/MI	N/A	100,31%	100,00%	100,00%	100,00%	303.929.882.126	100,00%	317.789.832.640	100,00%	621.719.714.766	Dinas Pendidikan
				Persentase lembaga pendidikan SD yang sarana prasarananya sesuai standar	N/A	99,46%	89,44%	72,83%	92,01%		93,19%		93,19%		
				Persentase prestasi akademik peserta didik	N/A	N/A	N/A	N/A	0,12%		0,15%		0,15%		



Misi-Tujuan-Sasaran-Program				Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD			Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					Realisasi			Target atau Realisasi (*)	Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja		
					2016	2017	2018	2019	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				SD pada lomba tingkat kota/provinsi/nasional/internasional											
			Program Pengembangan Sekolah Menengah	Persentase daya tampung relatif terhadap jumlah kebutuhan SMP/MTS	N/A	89,15%	102,57%	100,00%	100,00%	153.840.443.138	100,00%	160.437.824.713	100,00%	314.278.267.851	Dinas Pendidikan
				Persentase lembaga pendidikan SMP yang sarana prasarananya sesuai standar	N/A	98,85%	82,66%	78,03%	95,73%		96,04%		96,04%		
				Persentase prestasi akademik SMP pada event tingkat provinsi/nasional/internasional	N/A	N/A	N/A	N/A	0,14%		0,30%		0,30%		
			Program Peningkatan Manajemen Sekolah	Persentase lembaga pendidikan SD/MI yang tertib administrasi	N/A	N/A	N/A	N/A	81,86%	87.798.278.996	83,18%	89.382.952.794	83,18%	177.181.231.790	Dinas Pendidikan
				Persentase lembaga pendidikan SMP/MTs yang tertib administrasi	N/A	N/A	N/A	N/A	87,38%		88,88%		88,88%		
			Program Peningkatan Mutu Guru dan Tenaga Kependidikan	Persentase guru PAUD yang kompeten	N/A	77,07%	100,00%	69,09%	100,00%	147.221.921.409	100,00%	147.755.971.578	100,00%	294.977.892.987	Dinas Pendidikan
				Persentase guru SD yang kompeten	N/A	N/A	N/A	N/A	100,00%		100,00%		100,00%		
				Persentase guru SD yang memiliki kesesuaian kualifikasi akademik yang dibuktikan melalui ijazah S1 dari fakultas keguruan dan ilmu pendidikan atau AKTA4	N/A	93,26%	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%		100,00%		
				Persentase guru SMP yang kompeten	N/A	N/A	N/A	N/A	100,00%		100,00%		100,00%		
				Persentase guru SMP yang memiliki kesesuaian kualifikasi akademik dengan mata pelajaran yang diajar	N/A	95,92%	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%		100,00%		
				Persentase tenaga kependidikan (administrasi) SD yang berkualitas	N/A	N/A	N/A	N/A	85,00%		85,00%		85,00%		
				Persentase tenaga kependidikan (administrasi) SMP	N/A	N/A	N/A	N/A	90,00%		90,00%		90,00%		



Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kota Surabaya 2016 – 2021

Misi-Tujuan-Sasaran-Program				Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD			Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					Realisasi			Target atau Realisasi (*)	Tahun 2020		Tahun 2021			Kondisi Kinerja	
					2016	2017	2018	2019	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				yang berkualitas											
				Persentase tenaga kependidikan PAUD jenjang TK yang kompeten	N/A	N/A	N/A	N/A	100,00%		100,00%		100,00%		
				Meningkatnya pengarusutamaan gender, pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	93,66	93,65	93,66	93,68	93,69	19.788.934.885	93,7	20.025.245.269	93,7	39.814.180.154
				Persentase indikator Kota Layak Anak (KLA) yang terpenuhi	100,00%	83,33%	83,33%	100,00%	100,00%			100,00%		100,00%	
				Program Keadilan dan Kesetaraan Gender serta Pemberdayaan Perempuan	Persentase kelurahan yang responsif gender	N/A	N/A	N/A	N/A	20,13%	2.775.850.683	41,56%	2.801.368.251	41,56%	5.577.218.934
					Persentase Perangkat Daerah Pemerintah Kota Surabaya yang telah menerapkan responsif gender dalam pelaksanaan kegiatan	N/A	N/A	N/A	N/A	100,00%		100,00%		100,00%	
				Program Keluarga Berencana	Persentase kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (unmeet need)	N/A	18,24%	19,78%	20,20%	19,47%	7.945.614.245	19,22%	8.030.137.258	19,22%	15.975.751.503
					Persentase peserta KB aktif	82,00%	80,96%	80,28%	79,60%	80,89%		80,95%		80,95%	
					Persentase peserta KB aktif yang drop out kontrasepsi	N/A	2,37%	3,20%	5,25%	2,99%		2,78%		2,78%	
					Persentase peserta KB baru	N/A	96,15%	97,90%	82,75%	97,92%		97,94%		97,94%	
				Program Peningkatan Ketahanan Keluarga	Persentase kelompok Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, dan Bina Keluarga Lansia yang aktif	24,96%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	4.426.767.221	100,00%	4.490.482.823	100,00%	8.917.250.044



Misi-Tujuan-Sasaran-Program				Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD			Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					Realisasi			Target atau Realisasi (*)	Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja		
					2016	2017	2018	2019	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
															Anak
				Persentase perempuan usia produktif dari hasil pendampingan yang berproduksi	N/A	N/A	N/A	N/A	19,67%		10,33%		10,33%		
			Program Perlindungan Perempuan dan Anak	Persentase efektivitas pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak (PPTP2A)	N/A	83,00%	72,70%	66,86%	73,84%	4.640.702.736	74,98%	4.703.256.937	74,98%	9.343.959.673	Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
				Persentase kelurahan ramah anak	19,48%	32,47%	52,60%	68,18%	84,42%		100,00%		100,00%		
				Persentase permasalahan perempuan dan anak yang ditangani	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%		100,00%		
			Penurunan Penduduk Miskin	Persentase Penduduk Miskin	N/A	N/A	N/A	N/A	80-81	203.147.813.854	80-81	204.872.415.545	80-81	408.020.229.399	
			Meningkatkan kesejahteraan PMKS	Persentase PMKS yang tertangani	N/A	N/A	N/A	N/A	45,00%	203.147.813.854	45,00%	204.872.415.545	45,00%	408.020.229.399	
			Program Bantuan Masyarakat Berpenghasilan Rendah	Persentase bantuan pangan non tunai dan program keluarga harapan yang tersalurkan	N/A	N/A	N/A	N/A	100,00%	5.244.491.370	100,00%	5.356.954.043	100,00%	10.601.445.413	Dinas Sosial
				Persentase sasaran penerima layanan pemakaman dan ambulance gratis dari kelompok masyarakat berpenghasilan rendah	N/A	N/A	N/A	N/A	50,00%		50,00%		50,00%		
			Program Pelayanan Kebutuhan Dasar dan Rehabilitasi Sosial	Persentase pemulangan PMKS	N/A	N/A	N/A	N/A	30,00%	193.243.741.596	35,00%	194.790.086.495	35,00%	388.033.828.091	Dinas Sosial
				Persentase sasaran penerima intervensi sosial dari kelompok masyarakat berpenghasilan rendah	N/A	N/A	N/A	N/A	100,00%		100,00%		100,00%		
			Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Persentase PSKS yang berpartisipasi dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial	N/A	45,73%	58,36%	55,00%	60,00%	983.201.794	62,00%	989.814.515	62,00%	1.973.016.309	Dinas Sosial
			Program Pengendalian Layanan Sosial	Persentase data kesejahteraan sosial yang dimanfaatkan	N/A	N/A	N/A	N/A	100,00%	3.676.379.094	100,00%	3.735.560.492	100,00%	7.411.939.586	Dinas Sosial



Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kota Surabaya 2016 – 2021

Misi-Tujuan-Sasaran-Program				Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD			Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					Realisasi			Target atau Realisasi (*)	Tahun 2020		Tahun 2021			Kondisi Kinerja	
					2016	2017	2018	2019	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Mengurangi pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	N/A	5,98%	6,12%	6,47%	6,40%-5,95%	17.997.912.964	6,30%-5,90%	18.188.755.298	6,30%-5,90%	36.186.668.262	
			Meningkatkan kesempatan kerja dan kompetensi angkatan kerja, serta menciptakan hubungan industrial yang harmonis	Persentase pencari kerja terserap pada pasar kerja formal	N/A	53,58%	70,03%	> 40%	55,00%	17.997.912.964	55,00%	18.188.755.298	55,00%	36.186.668.262	
			Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Syarat Kerja	Persentase perusahaan yang memiliki Peraturan Perusahaan/Perjanjian Kerja Bersama	6,70%	7,18%	7,77%	7,26%	7,77%	2.936.137.636	7,77%	2.972.130.659	7,77%	5.908.268.295	Dinas Tenaga Kerja
			Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Persentase pertumbuhan kesempatan kerja yang dapat diinformasikan	N/A	5,10%	5,04%	5,00%	5,10%	3.147.164.184	5,20%	3.182.082.121	5,20%	6.329.246.305	Dinas Tenaga Kerja
			Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja	Persentase angkatan kerja yang lulus sertifikasi	64,32%	68,69%	81,72%	66,00%	75,00%	11.914.611.144	77,00%	12.034.542.518	77,00%	23.949.153.662	Dinas Tenaga Kerja
				Persentase peserta pelatihan berbasis kompetensi yang lulus pelatihan	N/A	97,93%	100,00%	81,00%	85,00%		90,00%		90,00%		
2. Memelihara keamanan dan ketertiban umum										85.606.908.276		87.020.208.623		172.627.116.899	
			Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum	Indeks Ketertiban dan Ketenteraman Kota	1,26	1,39	1,73	0,99	1,01	85.606.908.276	1,04	87.020.208.623	1,04	172.627.116.899	
			Meningkatkan ketertiban umum	Rasio pelanggaran Perda per 1.000 Penduduk	N/A	13,97	7,61	17,26	7,18	40.103.439.580	6,98	40.732.656.959	6,98	80.836.096.539	
			Program Penegakan Peraturan Daerah Bidang Ekonomi	Persentase pelanggaran Perda terkait reklame yang ditemukan/dilaporkan dan ditindaklanjuti	N/A	N/A	N/A	N/A	100,00%	1.753.605.106	100,00%	1.770.441.006	100,00%	3.524.046.112	Satuan Polisi Pamong Praja
			Program Penegakan Peraturan Daerah Bidang Sarana Prasarana Wilayah	Persentase pelanggaran Perda terkait IMB, kebersihan, parkir umum, Perda lainnya yang ditemukan/dilaporkan dan ditindaklanjuti	N/A	N/A	N/A	N/A	100,00%	1.571.826.627	100,00%	1.585.927.098	100,00%	3.157.753.725	Satuan Polisi Pamong Praja
			Program Penegakan Peraturan Daerah Bidang Sosial	Persentase pelanggaran Perda bidang terkait PKL, PSK, anjal dan gepeng, dan RHU yang ditemukan/dilaporkan dan ditindaklanjuti	N/A	N/A	N/A	N/A	100,00%	35.359.611.850	100,00%	35.951.348.360	100,00%	71.310.960.210	Satuan Polisi Pamong Praja
			Program	Persentase aparat	N/A	N/A	N/A	N/A	100,00%	1.418.395.997	100,00%	1.424.940.495	100,00%	2.843.336.492	Satuan Polisi



Misi-Tujuan-Sasaran-Program				Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD			Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					Realisasi			Target atau Realisasi (*)	Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja		
					2016	2017	2018	2019	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Pengembangan Kapasitas Aparatur Polisi Pamong Praja	yang ditingkatkan kapasitasnya sesuai tugas dan fungsi											Pamong Praja
			Meningkatkan perlindungan masyarakat	Rasio Linmas per 1.000 penduduk	N/A	N/A	N/A		62,6	39.985.342.401	62,6	40.698.109.481	62,6	80.683.451.882	
			Program Pengembangan Kapasitas Petugas Perlindungan Masyarakat	Persentase petugas perlindungan masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya sesuai tugas dan fungsi	N/A	N/A	N/A	N/A	76,85%	39.985.342.401	77,72%	40.698.109.481	77,72%	80.683.451.882	Badan Penanggulangan Bencana Dan Perlindungan Masyarakat
			Meningkatkan kualitas pelaksanaan norma, toleransi, dan kerukunan masyarakat	Persentase konflik yang menimbulkan gangguan ketenteraman dan ketertiban masyarakat	N/A	N/A	N/A	N/A	4,50%	5.518.126.295	4,00%	5.589.442.183	4,00%	11.107.568.478	
			Program Kesatuan Bangsa	Persentase organisasi masyarakat dan partai politik yang mendukung pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	N/A	N/A	N/A	N/A	70,00%	1.948.675.735	80,00%	1.967.613.097	80,00%	3.916.288.832	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
			Program Penanganan Strategis Gangguan Ketenteraman Umum	Persentase gangguan ketenteraman umum yang ditangani	N/A	N/A	N/A	N/A	100,00%	3.569.450.560	100,00%	3.621.829.086	100,00%	7.191.279.646	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
3. Mewujudkan penataan ruang yang terintegrasi dan memperhatikan daya dukung kota serta infrastruktur dan utilitas kota yang terpadu dan efisien										2.653.199.163.958		2.691.007.312.987		5.344.206.476.945	
			Mewujudkan sistem infrastruktur kota yang terakses, terkoneksi, dan menjamin mobilitas melalui ketahanan terhadap bencana, sinkronisasi sistem penataan ruang dan pertanahan, pengoptimalan utilitas dan sistem drainase kota serta jaringan transportasi kota yang terpadu	Indeks Infrastruktur Kota	N/A	N/A	N/A	N/A	0,8	2.066.544.102.915	0,84	2.096.659.263.219	0,84	4.163.203.366.134	
			Menyediakan dan meningkatkan kinerja jaringan jalan	Tingkat Keandalan Jaringan Jalan	N/A	0,40	0,41	0,41	0,42	364.051.886.221	0,42	367.333.702.432	0,42	731.385.588.653	
			Program Pengelolaan dan Pembangunan Jalan dan Jembatan	Persentase jalan yang mendapatkan perbaikan	N/A	7,58%	10,46%	10,32%	12,90%	345.080.328.538	15,48%	348.082.962.040	15,48%	693.163.290.578	Dinas Pekerjaan Umum Bina



Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kota Surabaya 2016 – 2021

Misi-Tujuan-Sasaran-Program				Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD			Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					Realisasi			Target atau Realisasi (*)	Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja		
					2016	2017	2018	2019	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
															Marga dan Pematusan
				Persentase jaringan jalan yang terbangun	N/A	0,28%	0,65%	0,48%	0,68%		0,71%		0,71%		
				Persentase penyediaan prasarana pejalan kaki	N/A	18,97%	17,27%	22,91%	28,64%		34,36%		34,36%		
			Program Perancangan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan	Persentase dokumen perancangan dan pengawasan jalan dan jembatan yang tepat waktu	N/A	N/A	N/A	N/A	100,00%	18.971.557.683	100,00%	19.250.740.392	100,00%	38.222.298.075	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
			Penyediaan sistem drainase kota yang terpadu, efektif dan efisien	Indeks Genangan	N/A	26,52%	41,53%	41,41%	40,58%	495.669.647.996	39,77%	508.236.899.288	39,77%	1.003.906.547.284	
			Program Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Drainase Kota	Lama genangan	N/A	25,03 menit	22,43 menit	48 menit	22,30 menit	471.923.555.122	22,10 menit	484.024.179.110	22,10 menit	955.947.734.232	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
				Luas genangan	N/A	765,12 ha	697 Ha	1150 Ha	600 Ha		500 Ha		500 Ha		
				Tinggi genangan	N/A	13,37 cm	12,49 cm	15 cm	12,30 cm		12,10 cm		12,10 cm		
			Program Perancangan dan Pengawasan Pematusan	Persentase dokumen perancangan dan pengawasan pematusan yang tepat waktu	N/A	N/A	N/A	N/A	100,00%	23.746.092.874	100,00%	24.212.720.178	100,00%	47.958.813.052	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
			Mewujudkan penyediaan lahan bagi kepentingan umum	Persentase lokasi lahan yang tersedia untuk kepentingan umum	N/A	N/A	N/A	N/A	100,00%	616.882.294.228	100,00%	622.346.829.939	100,00%	1.239.229.124.167	
			Program Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan bagi Pembangunan Infrastruktur untuk Kepentingan Umum	Akumulasi luas tanah dan/atau bangunan bagi pembangunan infrastruktur untuk kepentingan umum	1,76 Ha	6,93 Ha	12,61 Ha	4,7 Ha	15,77 Ha	265.904.492.390	17,07 Ha	268.279.468.175	17,07 Ha	534.183.960.565	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
			Program Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan bagi Pembangunan Non Infrastruktur untuk Kepentingan Umum	Akumulasi luas tanah dan/atau bangunan yang disediakan bagi pembangunan non infrastruktur untuk kepentingan umum	N/A	18,88 Ha	24,56 Ha	41,75 Ha	44,90 Ha	350.977.801.838	48,05 Ha	354.067.361.764	48,05 Ha	705.045.163.602	Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
			Meningkatnya pengamanan dan pengelolaan aset tanah dan/atau bangunan	Persentase aset tanah dan/atau bangunan yang terintegrasi dalam sistem pengamanan dan pengelolaan aset	N/A	15,10%	26,47%	41,88%	58,55%	38.901.422.286	75,22%	39.454.319.529	75,22%	78.355.741.815	
			Program Penanganan	Persentase kasus tanah	N/A	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	4.377.423.790	100,00%	4.444.387.441	100,00%	8.821.811.231	Dinas



Misi-Tujuan-Sasaran-Program				Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD			Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					Realisasi			Target atau Realisasi (*)	Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja		
					2016	2017	2018	2019	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Sengketa Tanah dan Bangunan	dan/atau bangunan yang ditangani											Pengelolaan Bangunan dan Tanah
			Program Pengamanan Aset	Persentase tanah aset yang telah dilakukan pemagaran, papan, patok	N/A	13,44%	16,21%	17,85%	36,80%	9.473.283.489	39,74%	9.593.121.569	39,74%	19.066.405.058	Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
				Persentase tanah aset yang tersertifikasi	N/A	16,56%	20,27%	13,22%	43,08%		45,29%		45,29%		
			Program Pengelolaan Aset Tanah	Persentase aset tanah yang tercatat pemanfaatannya	N/A	N/A	N/A	N/A	81,30%	6.163.431.301	100,00%	6.261.669.402	100,00%	12.425.100.703	Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
			Program Pengelolaan Bangunan Gedung	Persentase bangunan gedung yang dipelihara	N/A	N/A	N/A	N/A	100,00%	18.887.283.706	100,00%	19.155.141.117	100,00%	38.042.424.823	Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
			Meningkatkan sinkronisasi dan integrasi rencana induk sektoral dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW)	Persentase rencana induk sektoral yang disusun dan telah tersinkronisasi dengan Rencana Tata Ruang Wilayah	N/A	N/A	N/A	N/A	34,48%	2.127.817.581	41,38%	2.160.880.974	41,38%	4.288.698.555	
			Program Perencanaan Kota	Persentase penyusunan rencana induk sektoral	N/A	64,29%	71,43%	85,71%	92,86%	2.127.817.581	100,00%	2.160.880.974	100,00%	4.288.698.555	Badan Perencanaan Pembangunan
			Meningkatnya sistem jaringan dan kualitas PJU hemat energi	Persentase panjang jalan yang sudah terpasang PJU hemat energi	N/A	N/A	N/A	N/A	14,98%	266.489.508.726	17,51%	270.349.993.588	17,51%	536.839.502.314	
			Program Pengelolaan dan Peningkatan Pelayanan PJU Hemat Energi	Persentase titik pemasangan PJU hemat energi	N/A	N/A	N/A	N/A	83,39%	266.489.508.726	85,90%	270.349.993.588	85,90%	536.839.502.314	Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau
			Penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana angkutan	Persentase Load Factor Kendaraan Umum (Angkot)	N/A	30,00%	29,53%	26,00%	28,00%	85.450.725.903	30,00%	86.609.270.613	30,00%	172.059.996.516	
				Persentase Load Factor Kendaraan Umum (Suroboyo Bus)	N/A	35,60%	35,88%	38%	40,00%		42,00%		42,00%		
			Program Pembangunan dan Pemeliharaan Prasarana Transportasi	Persentase penyediaan prasarana pendukung transportasi berkelanjutan dalam kondisi baik	N/A	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	50.755.284.337	100,00%	51.371.899.799	100,00%	102.127.184.136	Dinas Perhubungan
			Program Pengembangan Sistem Transportasi yang Berkelanjutan	Cakupan layanan angkutan trunk Suroboyo Bus	N/A	N/A	N/A	N/A	100,00%	34.695.441.566	100,00%	35.237.370.814	100,00%	69.932.812.380	Dinas Perhubungan



Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kota Surabaya 2016 – 2021

Misi-Tujuan-Sasaran-Program				Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD			Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					Realisasi			Target atau Realisasi (*)	Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja		
					2016	2017	2018	2019	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				Persentase angkutan umum dalam trayek yang memenuhi ketentuan perijinan	N/A	N/A	N/A	N/A	40,00%		40,00%		40,00%		
				Rata-rata waktu tempuh kendaraan barang pada rute tertentu	N/A	44,34 menit	100,22 menit	100,33 menit	95,05 menit		90,30 menit		90,30 menit		
			Penyediaan sistem lalu lintas yang berkualitas	Persentase jalan kewenangan kota dengan v/c ratio $\leq 0,95$	N/A	66,67%	88,10%	36%	77,39%	102.667.555.352	78,00%	104.465.807.964	78,00%	207.133.363.316	
			Program Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Persentase kelulusan uji emisi kendaraan bermotor	N/A	91,22%	90,06%	81,00%	93,00%	25.006.117.087	94,00%	25.404.415.210	94,00%	50.410.532.297	Dinas Perhubungan
			Program Peningkatan Sistem Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Kecepatan rata-rata kendaraan di jalan kewenangan kota	N/A	28,60 km/jam	49,73 km/jam	31,27 km/jam	39,00 km/jam	77.661.438.265	40,00 km/jam	79.061.392.754	40,00 km/jam	156.722.831.019	Dinas Perhubungan
				Persentase selisih tingkat kecelakaan lalu lintas	N/A	7,73%	11,71%	2,00%	2,00%		2,00%		2,00%		
			Meningkatnya pelayanan utilitas kota lainnya	Persentase pelaksanaan rekomendasi utilitas	N/A	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	1.601.327.877	100,00%	1.625.093.935	100,00%	3.226.421.812	
			Program Sinkronisasi Pemanfaatan Jalan, Saluran dan Utilitas	Persentase rekomendasi utilitas yang dikeluarkan dibanding permohonan utilitas yang memenuhi syarat	N/A	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	1.601.327.877	100,00%	1.625.093.935	100,00%	3.226.421.812	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
			Pengembangan sistem penanggulangan bencana yang antisipatif dan tanggap	Indeks Penanggulangan Bencana	N/A	98,15%	89,09%	74,33%	89,19%	70.829.763.412	92,83%	71.843.067.739	92,83%	142.672.831.151	
			Program Penanggulangan Bencana Alam	Persentase penanggulangan kejadian bencana alam ≤ 24 jam	N/A	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	4.989.276.798	100,00%	5.047.196.718	100,00%	10.036.473.516	Badan Penanggulangan Bencana Dan Perlindungan Masyarakat
			Program Penanggulangan Bencana Kebakaran	Angka Kejadian Kebakaran Gedung/Bangunan per 1 Juta Penduduk Surabaya	N/A	51,06	51,38	53	51	42.016.866.961	50,5	42.764.462.215	50,5	84.781.329.176	Dinas Pemadam Kebakaran
				Persentase waktu tanggap kejadian kebakaran kurang dari 15 menit	N/A	100%	100%	97%	100%		100%		100%		



Misi-Tujuan-Sasaran-Program				Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD			Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					Realisasi			Target atau Realisasi (*)	Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja		
					2016	2017	2018	2019	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana Alam	Persentase kelurahan tangguh bencana	N/A	30,52%	40,91%	68,00%	88,00%	2.400.189.841	100,00%	2.427.256.252	100,00%	4.827.446.093	Badan Penanggulangan Bencana Dan Perlindungan Masyarakat
			Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana Kebakaran	Persentase sarana dan prasarana pemadam kebakaran dalam kondisi baik	N/A	N/A	N/A	N/A	80%	21.423.429.812	83%	21.604.152.554	83%	43.027.582.366	Dinas Pemadam Kebakaran
			Meningkatkan efektivitas perwujudan penataan ruang dan bangunan	Persentase ketersediaan perangkat pengendalian penataan ruang dan bangunan (implementasi SLF)	N/A	N/A	N/A	N/A	22,32%	21.872.153.333	31,25%	22.233.397.218	31,25%	44.105.550.551	
			Program Penataan Ruang	Indeks Pelayanan Tata Ruang	N/A	N/A	N/A	N/A	94,00%	18.162.326.872	95,00%	18.468.950.491	95,00%	36.631.277.363	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
			Program Pengendalian Bidang Bangunan	Persentase jumlah bangunan yang ber IMB	N/A	54,31%	55,96%	56,93%	58,81%	3.709.826.461	60,79%	3.764.446.727	60,79%	7.474.273.188	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
				Persentase tindak lanjut terhadap laporan pelanggaran IMB	N/A	100,00%	119,00%	100,00%	100,00%		100,00%		100,00%		
			Meningkatkan penataan ruang yang terintegrasi dan memperhatikan daya dukung kota	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Persampahan (IKLHS)	62,09	64,86	64,91	64,9	65	586.655.061.043	65,1	594.348.049.768	65,1	1.181.003.110.811	
			Meningkatkan kualitas udara dan air	Indeks Kualitas Air Permukaan	N/A	57,5	57,62	52,68	57,62	8.893.635.628	57,63	9.059.720.137	57,63	17.953.355.765	
				Indeks Kualitas Udara Ambien	N/A	90,26	90,26	84,75	90,27		90,28		90,28		
				Persentase wilayah dengan rumah yang dilengkapi jamban	N/A	N/A	N/A	N/A	80,00%		85,00%		85,00%		
			Program Pengadaan Prasarana Air Limbah Domestik Rumah Tangga	Persentase jamban yang memenuhi standar minimal ramah lingkungan	N/A	N/A	N/A	N/A	80,00%	1.883.569.278	85,00%	1.961.056.373	85,00%	3.844.625.651	Dinas Lingkungan Hidup



Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kota Surabaya 2016 – 2021

Misi-Tujuan-Sasaran-Program				Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD			Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					Realisasi			Target atau Realisasi (*)	Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja		
					2016	2017	2018	2019	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Program Pengendalian dan Pengawasan Dampak Lingkungan	Persentase ketaatan/kepatuhan terhadap aspek lingkungan	N/A	50,00%	63,50%	70,00%	80,00%	3.692.461.395	95,00%	3.735.332.680	95,00%	7.427.794.075	Dinas Lingkungan Hidup
			Program Peningkatan Kapasitas Pemahaman dan Evaluasi Lingkungan Hidup	Persentase aspek lingkungan hidup yang dievaluasi	N/A	N/A	N/A	N/A	100,00%	3.317.604.955	100,00%	3.363.331.084	100,00%	6.680.936.039	Dinas Lingkungan Hidup
				Persentase masyarakat yang kapasitas pemahaman lingkungan hidupnya meningkat	N/A	N/A	N/A	N/A	70,00%		75,00%		75,00%		
			Peningkatan kapasitas pelayanan pengolahan air limbah	Persentase air limbah yang diolah pada instalasi pengolahan air limbah	N/A	N/A	N/A	N/A	57,81%	26.630.478.526	69,07%	27.077.093.286	69,07%	53.707.571.812	
			Program Pengelolaan Air Limbah Kota	Persentase instalasi pengolahan air limbah yang beroperasi dengan baik	N/A	N/A	N/A	N/A	100,00%	26.630.478.526	100,00%	27.077.093.286	100,00%	53.707.571.812	Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau
			Meningkatkan kualitas lingkungan hidup kota yang bersih dan hijau	Persentase selisih luasan taman dan jalur hijau yang dibangun dan dipelihara	N/A	N/A	N/A	N/A	9,33%	113.201.082.467	11,20%	115.247.810.679	11,20%	228.448.893.146	
			Program Pengelolaan dan Peningkatan Taman Hutan Raya	Persentase pertumbuhan luas taman hutan raya yang dipelihara dan diawasi	N/A	N/A	N/A	N/A	54,76%	25.235.077.537	60,19%	25.649.271.813	60,19%	50.884.349.350	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
			Program Pengelolaan dan Peningkatan Taman dan Jalur Hijau	Persentase pertumbuhan luas taman dan jalur hijau yang dipelihara dan diawasi	N/A	N/A	N/A	N/A	8,68%	87.966.004.930	10,24%	89.598.538.866	10,24%	177.564.543.796	Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau
			Optimalisasi sistem pengelolaan dan pelayanan kebersihan secara terpadu yang berbasis masyarakat dengan penerapan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan	Persentase penurunan sampah yang masuk ke TPA melalui TPS	N/A	N/A	N/A	N/A	20,40%	437.929.864.422	21,90%	442.963.425.666	21,90%	880.893.290.088	
			Program Kebersihan	Persentase pengangkutan sampah dari TPS ke TPA ≤ 1 hari	N/A	N/A	N/A	N/A	84,86%	216.118.634.617	85,95%	218.878.113.573	85,95%	434.996.748.190	Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau
			Program Pemberdayaan Masyarakat dalam	Tingkat pertumbuhan peran serta masyarakat dalam pengelolaan	N/A	N/A	N/A	N/A	8,75%	3.950.324.086	10,93%	3.972.065.124	10,93%	7.922.389.210	Dinas Kebersihan dan Ruang



Misi-Tujuan-Sasaran-Program				Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD			Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					Realisasi			Target atau Realisasi (*)	Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja		
					2016	2017	2018	2019	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Pengelolaan Sampah Mandiri	sampah											Terbuka Hijau
			Program Pengelolaan Sampah dan Limbah	Persentase fasilitas pengolahan sampah dengan teknologi 3R yang beroperasi dengan baik	N/A	N/A	N/A	N/A	30,77%	2.646.563.302	38,46%	2.690.977.289	38,46%	5.337.540.591	Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau
			Program Peningkatan Sarana Prasarana Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau	Persentase pembangunan fasilitas pengelolaan sampah yang menerapkan teknologi 3R	N/A	14,81%	14,81%	23,08%	30,77%	215.214.342.417	38,46%	217.422.269.680	38,46%	432.636.612.097	Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau
4. Memantapkan dan memperkuat nilai-nilai budaya lokal dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat										8.002.898.166		8.112.513.878		16.115.412.044	
			Meningkatkan nilai-nilai budaya lokal dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat	Indeks Budaya Lokal	N/A	70,73%	78,39%	79,61%	80,00%	8.002.898.166	81,50%	8.112.513.878	81,50%	16.115.412.044	
			Meningkatnya pelestarian seni dan cagar budaya	Persentase budaya yang dapat dilestarikan	N/A	90,31%	90,84%	91,39%	90,90%	8.002.898.166	90,95%	8.112.513.878	90,95%	16.115.412.044	
			Program Pengembangan dan Pemanfaatan Budaya Lokal	Persentase hotel, restoran, dan ruang publik yang menampilkan budaya lokal pada 20 lokasi	N/A	N/A	N/A	N/A	95,00%	5.882.157.430	100,00%	5.964.878.441	100,00%	11.847.035.871	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
				Persentase kelompok seni terdaftar yang layak tampil	N/A	38,55%	57,63%	47,00%	58,50%			59,00%		59,00%	
			Program Perlindungan Budaya Lokal	Persentase cagar budaya yang terpelihara	N/A	91,58%	91,58%	91,50%	91,60%	2.120.740.736	91,69%	2.147.635.437	91,69%	4.268.376.173	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
5. Mewujudkan Surabaya sebagai pusat penghubung perdagangan dan jasa antar pulau dan internasional serta memantapkan daya saing usaha-usaha ekonomi lokal, inovasi produk dan jasa, serta pengembangan industri kreatif										42.705.604.499		43.271.993.849		85.977.598.348	
			Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan sistem manajemen city logistic, pemantapan daya saing usaha-usaha ekonomi lokal, serta pengembangan inovasi produk dan jasa	Indeks gini	0,41	0,39	0,375	0,38-0,37	0,38-0,37	42.705.604.499	0,38-0,37	43.271.993.849	0,38-0,37	85.977.598.348	
				Pertumbuhan Ekonomi	6	6,13	N/A	N/A	6,3 - 6,7			6,3 - 6,8		6,3 - 6,8	
			Meningkatkan realisasi investasi	Nilai Realisasi Investasi	N/A	N/A	N/A	N/A	Rp71.161.699.310.450	2.914.248.029	Rp74.719.784.275.973	2.945.080.186	Rp74.719.784.275.973	5.859.328.215	
			Program Pengolahan	Persentase perusahaan	N/A	N/A	N/A	N/A	40,00%	1.592.322.638	42,00%	1.610.378.855	42,00%	3.202.701.493	Dinas



Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kota Surabaya 2016 – 2021

Misi-Tujuan-Sasaran-Program				Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD			Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					Realisasi			Target atau Realisasi (*)	Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja		
					2016	2017	2018	2019	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Data dan Pengendalian Penanaman Modal	penanaman modal yang menyusun dan membuat LKPM											Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Program Peningkatan Iklim dan Realisasi Investasi	Tingkat pertumbuhan izin realisasi investasi	N/A	N/A	N/A	N/A	20,00%	1.321.925.391	24,00%	1.334.701.331	24,00%	2.656.626.722	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Mendorong pemantapan daya saing usaha mikro dan koperasi	Persentase Tingkat Produktivitas Koperasi	N/A	11,10%	30,40%	23,00%	31,00%	23.032.593.927	32,00%	23.349.726.245	32,00%	46.382.320.172	
				Persentase Tingkat Produktivitas Usaha Mikro	N/A	N/A	N/A	N/A	53,00%		62,00%		62,00%		
			Program Pemasaran Produk Usaha Mikro	Persentase usaha mikro binaan yang mendapatkan fasilitas pemasaran produk	N/A	N/A	N/A	N/A	90,00%	9.598.878.906	100,00%	9.726.219.568	100,00%	19.325.098.474	Dinas Perdagangan
			Program Pengembangan Produk Usaha Mikro	Persentase pelaku usaha mikro yang produknya layak diujimutukan	N/A	20,00%	35,06%	30,00%	35,11%	1.198.355.686	40,00%	1.213.758.622	40,00%	2.412.114.308	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
			Program Pengembangan Sentra Usaha	Persentase sentra usaha makanan dan minuman yang beroperasi secara optimal	N/A	N/A	N/A	N/A	58,00%	7.610.561.633	63,00%	7.734.338.151	63,00%	15.344.899.784	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
			Program Pengembangan Usaha Koperasi	Tingkat pertumbuhan koperasi yang meningkat volume usahanya	N/A	62,39%	73,19%	78,00%	79,00%	1.533.226.471	80,00%	1.547.134.950	80,00%	3.080.361.421	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
			Program Penguatan Kelembagaan Koperasi	Persentase koperasi berklasifikasi AAB	N/A	58,03%	65,98%	66,24%	69,95%	2.425.271.656	72,95%	2.456.381.453	72,95%	4.881.653.109	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
			Program Perkuatan Permodalan Usaha Mikro	Persentase pelaku usaha mikro yang berhasil mendapatkan bantuan permodalan	N/A	9,60%	8,31%	5,00%	8,31%	666.299.575	8,50%	671.893.501	8,50%	1.338.193.076	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
			Meningkatkan sistem logistik perdagangan serta produktivitas sektor pariwisata dalam upaya menambah nilai kekayaan ekonomi	PDRB Kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	N/A	Rp78.971.933,9	Rp88.834.803,2	Rp94.273.077,21	Rp11.881.832,59	16.758.762.543	Rp13.751.240,92	16.977.187.418	Rp13.751.240,92	33.735.949.961	
				PDRB Kategori Perdagangan Besar	N/A	Rp137.322.725,1	Rp154.687.456,0	Rp165.485.167,1	Rp17.387.488,70		Rp19.161.012,50		Rp19.161.012,50		



Misi-Tujuan-Sasaran-Program				Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD			Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					Realisasi			Target atau Realisasi (*)	Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja		
					2016	2017	2018	2019	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor											
			Program Distribusi Perdagangan	Frekuensi fasilitasi pelaku distribusi perdagangan	N/A	N/A	N/A	N/A	17 kali	2.999.457.610	17 kali	3.031.780.121	17 kali	6.031.237.731	Dinas Perdagangan
				Frekuensi intervensi ketersediaan komoditas	N/A	16 kali/kejadian	15 kali/kejadian	15 kali/kejadian	31 kali/kejadian		31 kali/kejadian		31 kali/kejadian		
				Tingkat kelengkapan data gudang terdaftar	N/A	58,27%	69,59%	75,00%	80,00%		85,00%		85,00%		
			Program Pemasaran Pariwisata	Persentase kunjungan di objek wisata terhadap kunjungan wisatawan	N/A	46,35%	48,03%	47,74%	50,01%	6.240.995.764	52,27%	6.310.965.651	52,27%	12.551.961.415	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
			Program Pengembangan Destinasi Wisata	Persentase ODTW yang berhasil dikembangkan	N/A	36,36%	46,15%	36,00%	69,23%	6.803.024.286	76,92%	6.913.683.166	76,92%	13.716.707.452	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
			Program Pengembangan Kerjasama dengan Stakeholder Bidang Pariwisata	Tingkat capaian kesepakatan dengan stakeholder bidang pariwisata yang dilaksanakan 5 kesepakatan	N/A	20,00%	60,00%	60,00%	80,00%	715.284.883	100,00%	720.758.480	100,00%	1.436.043.363	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
6. Memantapkan sarana dan prasarana lingkungan dan permukiman yang ramah lingkungan										229.976.655.608		231.545.963.569		461.522.619.177	
			Memantapkan sarana prasarana pada kawasan perumahan dan permukiman untuk mewujudkan lingkungan yang berkualitas	Persentase luas kawasan permukiman kumuh prioritas	N/A	0,73%	0,25%	0,28%	0,22%	229.976.655.608	0,00%	231.545.963.569	0,00%	461.522.619.177	
			Menurunkan potensi wilayah perumahan kumuh	Persentase wilayah dengan rumah tapak yang layak huni seluruhnya	N/A	N/A	N/A	N/A	85,00%	13.846.447.004	100,00%	14.471.015.948	100,00%	28.317.462.952	
			Program Rehabilitasi Rumah Tapak Tidak Layak Huni	Persentase rumah tapak tidak layak huni yang diperbaiki	N/A	N/A	N/A	N/A	85,00%	13.846.447.004	100,00%	14.471.015.948	100,00%	28.317.462.952	Dinas Sosial
			Meningkatkan efektivitas pemanfaatan perumahan layak huni	Persentase pemanfaatan rusunawa yang tepat sasaran	N/A	N/A	N/A	N/A	100,00%	29.798.733.038	100,00%	30.170.491.661	100,00%	59.969.224.699	
			Program Pengelolaan Rusunawa	Tingkat kesesuaian penghuni rusunawa	N/A	N/A	N/A	N/A	100,00%	29.798.733.038	100,00%	30.170.491.661	100,00%	59.969.224.699	Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
			Meningkatkan penyediaan serta pengelolaan lingkungan	Luas kawasan permukiman yang telah ditingkatkan kualitas	N/A	4,053.29 Ha	6,086.26 Ha	8295,64 Ha	9.853,57 Ha	186.331.475.566	11.437,03 Ha	186.904.455.960	11.437,03 Ha	373.235.931.526	



Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kota Surabaya 2016 – 2021

Misi-Tujuan-Sasaran-Program				Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD			Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					Realisasi			Target atau Realisasi (*)	Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja		
					2016	2017	2018	2019	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			perumahan dan kawasan permukiman layak huni	lingkungannya											
			Program Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Persentase pembangunan/rehabilitasi jalan lingkungan dan kelengkapannya	N/A	N/A	N/A	N/A	67,65%	186.331.475.566	73,80%	186.904.455.960	73,80%	373.235.931.526	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
				Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni	N/A	12,02%	22,33%	35%	47,00%		50,83%		50,83%		
7. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik										416.788.413.269		420.989.381.262		837.777.794.531	
			Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pengelolaan keuangan daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	N/A	N/A	N/A	N/A	BB	416.788.413.269	A	420.989.381.262	A	837.777.794.531	
			Meningkatkan sistem pengawasan internal pemerintah	Persentase pelanggaran tata kelola administrasi keuangan pada kasus yang sama yang berhasil diturunkan	N/A	6.60%	31.98%	33,50%	14,20%	3.781.383.260	16,80%	3.793.758.934	16,80%	7.575.142.194	
				Rasio Angka Pelanggaran Disiplin Aparatur per 1.000 Pegawai	N/A	1.03	1.14	1,26	1,21		1,15		1,15		
			Program Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Persentase Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang ditingkatkan kapabilitasnya	N/A	N/A	N/A	N/A	100,00%	694.160.380	100,00%	699.113.731	100,00%	1.393.274.111	Inspektorat
			Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Wilayah I	Persentase penanganan disiplin aparatur wilayah I	N/A	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	823.623.170	100,00%	825.458.883	100,00%	1.649.082.053	Inspektorat
				Persentase penanganan tata kelola administrasi keuangan wilayah I	N/A	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%		100,00%		
			Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Wilayah II	Persentase penanganan disiplin aparatur wilayah II	N/A	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	749.015.270	100,00%	750.866.526	100,00%	1.499.881.796	Inspektorat
				Persentase penanganan tata kelola administrasi keuangan wilayah II	N/A	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%		100,00%		
			Program Peningkatan	Persentase	N/A	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	794.145.270	100,00%	796.044.911	100,00%	1.590.190.181	Inspektorat



Misi-Tujuan-Sasaran-Program				Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD			Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					Realisasi			Target atau Realisasi (*)	Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja		
					2016	2017	2018	2019	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Sistem Pengawasan Internal Wilayah III	penanganan disiplin aparaturnya wilayah III											
				Persentase penanganan tata kelola administrasi keuangan wilayah III	N/A	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%		100,00%		
			Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Wilayah IV	Persentase penanganan disiplin aparaturnya wilayah IV	N/A	N/A	N/A	N/A	100,00%	720.439.170	100,00%	722.274.883	100,00%	1.442.714.053	Inspektorat
				Persentase penanganan tata kelola administrasi keuangan wilayah IV	N/A	N/A	N/A	N/A	100,00%		100,00%		100,00%		
			Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai SAKIP	N/A	68,86	70,03	>60-70	>70-80	5.135.507.410	>80-90	5.207.525.799	>80-90	10.343.033.209	
			Program Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah Lingkup Pembangunan	Persentase kegiatan yang penyerapan anggarannya ≥ 76%	N/A	N/A	N/A	N/A	94,00%	4.795.815.551	94,50%	4.862.953.671	94,50%	9.658.769.222	Bagian Administrasi Pembangunan
			Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja	Persentase instansi yang nilai akuntabilitas kerjanya minimal BB	N/A	N/A	N/A	N/A	84,72%	339.691.859	100,00%	344.572.128	100,00%	684.263.987	Bagian Organisasi
			Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan	Persentase Tingkat Capaian Keberhasilan Pelaksanaan Program	N/A	91.18%	98.04%	91,96%	98,00%	15.497.618.016	98,00%	15.660.539.502	98,00%	31.158.157.518	
			Program Penelitian, Pengembangan dan Evaluasi Pembangunan	Persentase rekomendasi penelitian, pengembangan dan evaluasi yang ditindaklanjuti	N/A	N/A	N/A	N/A	100,00%	1.448.473.380	100,00%	1.466.167.573	100,00%	2.914.640.953	Badan Perencanaan Pembangunan
				Tingkat capaian keberhasilan kegiatan di aspek output	N/A	97,50%	94,45%	98,00%	99,00%		100,00%		100,00%		
			Program Pengembangan Data dan Informasi	Persentase data indikator RPJMD yang dapat disediakan	N/A	N/A	N/A	N/A	100,00%	1.424.314.518	100,00%	1.443.668.484	100,00%	2.867.983.002	Badan Perencanaan Pembangunan
			Program Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	N/A	N/A	N/A	N/A	100,00%	5.062.906.267	100,00%	5.088.737.951	100,00%	10.151.644.218	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan, Bagian Umum Dan Protokol,



Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kota Surabaya 2016 – 2021

Misi-Tujuan-Sasaran-Program				Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD			Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					Realisasi			Target atau Realisasi (*)	Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja		
					2016	2017	2018	2019	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
															Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan, Dinas Pendidikan, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang, Inspektorat, RSUD Bhakti Dharma Husada, RSUD Dr. Mohamad Soewandie
			Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan strategis dan/atau sektoral	N/A	96,15%	98,%	100,00%	100,00%	1.385.976.613	100,00%	1.405.609.677	100,00%	2.791.586.290	Badan Perencanaan Pembangunan
			Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Persentase perencanaan pembangunan ekonomi yang diimplementasikan di dokumen perencanaan	N/A	N/A	N/A	N/A	80,00%	2.423.165.041	85,00%	2.455.628.308	85,00%	4.878.793.349	Badan Perencanaan Pembangunan
			Program Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Wilayah	Persentase perencanaan pembangunan sarana dan prasarana wilayah yang diimplementasikan	N/A	N/A	N/A	N/A	80,00%	1.852.713.606	85,00%	1.880.696.521	85,00%	3.733.410.127	Badan Perencanaan Pembangunan
			Program Perencanaan Pembangunan Sosial dan Pemerintahan	Persentase perencanaan pembangunan sosial dan pemerintahan yang diimplementasikan di	N/A	N/A	N/A	N/A	80,00%	1.900.068.591	85,00%	1.920.030.988	85,00%	3.820.099.579	Badan Perencanaan Pembangunan



Misi-Tujuan-Sasaran-Program				Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD			Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
					Realisasi			Target atau Realisasi (*)	Tahun 2020		Tahun 2021			Kondisi Kinerja		
					2016	2017	2018	2019	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
				dokumen perencanaan												
				Meningkatkan cakupan ketersediaan prasarana pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase cakupan ketersediaan prasarana pemerintahan dan pelayanan publik	N/A	N/A	N/A	N/A	91,23%	138.357.686.104	92,35%	138.753.762.596	92,35%	277.111.448.700	
				Program Pembangunan dan Rehabilitasi Bangunan Gedung	Persentase gedung pemerintahan dan pelayanan publik yang berfungsi baik	N/A	N/A	N/A	N/A	90,59%	138.357.686.104	100,00%	138.753.762.596	100,00%	277.111.448.700	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
				Meningkatkan peran serta DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan	Persentase kegiatan DPRD yang terfasilitasi	N/A	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	94.388.089.386	100,00%	95.222.733.381	100,00%	189.610.822.767	
				Program Fasilitasi Informasi dan Protokol DPRD	Persentase kegiatan DPRD terkait informasi dan protokol yang terfasilitasi	N/A	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	82.906.464.081	100,00%	83.608.376.385	100,00%	166.514.840.466	Sekretariat DPRD
				Program Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Sekretariat DPRD	Persentase kegiatan peningkatan kapasitas Sekretariat DPRD yang terfasilitasi	N/A	N/A	N/A	N/A	100,00%	3.683.898.025	100,00%	3.716.522.354	100,00%	7.400.420.379	Sekretariat DPRD
				Program Fasilitasi Rapat dan Perundang-Undangan DPRD	Persentase kegiatan DPRD terkait rapat dan perundang-undangan yang terfasilitasi	N/A	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	7.797.727.280	100,00%	7.897.834.642	100,00%	15.695.561.922	Sekretariat DPRD
				Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Nilai Kepuasan Masyarakat	N/A	76,46%	83,74%	76%	86,03%	112.977.819.800	88,31%	114.803.442.594	88,31%	227.781.262.394	
					Nilai Tingkat Kepuasan Penyelenggaraan TIK dalam Pelayanan Publik Administratif	N/A	97,63	97,59	75,00 (Cukup)	76-100 (Baik)		76-100 (Baik)		76-100 (Baik)		
				Program Pelayanan Administrasi Pencatatan Sipil	Cakupan penerbitan akte kelahiran	N/A	N/A	N/A	N/A	99,75%	1.052.910.487	99,94%	1.060.856.944	99,94%	2.113.767.431	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
					Cakupan penerbitan akte kematian	N/A	N/A	N/A	N/A	88,00%		89,51%		89,51%		
					Persentase ketepatan waktu pelayanan dokumen pencatatan sipil (akta kelahiran dan akta kematian)	95,56%	100,00%	100,00%	93,94%	100,00%		100,00%		100,00%		
					Persentase ketepatan waktu pengurusan	50,43%	95,33%	100,00%	99,69%	100,00%		100,00%		100,00%		



Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kota Surabaya 2016 – 2021

Misi-Tujuan-Sasaran-Program				Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD			Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					Realisasi			Target atau Realisasi (*)	Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja		
					2016	2017	2018	2019	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				dokumen pencatatan sipil (akta kelahiran dan akta kematian)											
			Program Pelayanan Administrasi Pendaftaran Penduduk	Cakupan penerbitan KTP	N/A	N/A	N/A	N/A	92,00%	7.537.286.775	95,00%	7.688.088.975	95,00%	15.225.375.750	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				Persentase ketepatan waktu pelayanan dokumen pendaftaran penduduk (KTP dan KK)	100,00%	100,00%	99,46%	100,00%	100,00%		100,00%		100,00%		
			Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Lingkup Bangunan	Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan lingkup bangunan	N/A	N/A	N/A	N/A	70,00%	4.933.578.328	75,00%	5.012.374.634	75,00%	9.945.952.962	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
			Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Lingkup Ketenagakerjaan	Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan lingkup ketenagakerjaan	N/A	N/A	N/A	N/A	78,00%	153.320.010	80,00%	153.432.872	80,00%	306.752.882	Dinas Tenaga Kerja
			Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Lingkup Lingkungan Hidup	Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan lingkup lingkungan hidup	N/A	N/A	N/A	N/A	78,00%	2.597.705.736	80,00%	2.632.368.391	80,00%	5.230.074.127	Dinas Lingkungan Hidup
			Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Lingkup Pariwisata	Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan lingkup pariwisata	N/A	N/A	N/A	N/A	60,00%	722.393.411	65,00%	727.578.049	65,00%	1.449.971.460	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
			Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Lingkup Perdagangan	Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan lingkup perdagangan	N/A	N/A	N/A	N/A	78,00%	1.639.982.976	80,00%	1.663.155.597	80,00%	3.303.138.573	Dinas Perdagangan
			Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Lingkup Pertanian	Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan lingkup pertanian	N/A	N/A	N/A	N/A	78,00%	216.538.320	80,00%	218.595.840	80,00%	435.134.160	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
			Program Pelayanan Perizinan Konstruksi	Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non	N/A	N/A	N/A	N/A	90,00%	389.751.366	93,00%	393.760.666	93,00%	783.512.032	Dinas Perumahan Rakyat dan



Misi-Tujuan-Sasaran-Program				Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD			Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					Realisasi			Target atau Realisasi (*)	Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja			
					2016	2017	2018	2019	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
				perizinan lingkup konstruksi												Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
			Program Pelayanan Publik Lingkup Perhubungan	Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan lingkup perhubungan	N/A	N/A	N/A	76%	78,00%	2.981.198.378	80,00%	2.988.829.236	80,00%	5.970.027.614	Dinas Perhubungan	
			Program Pelayanan Rekomendasi Teknis Infrastruktur	Persentase rekomendasi teknis yang dikeluarkan dibanding permohonan rekomendasi teknis yang memenuhi syarat	N/A	N/A	N/A	N/A	100,00%	1.354.740.836	100,00%	1.375.504.872	100,00%	2.730.245.708	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan	
			Program Pemanfaatan Data Kependudukan	Persentase peningkatan inovasi pelayanan	N/A	N/A	N/A	N/A	33,33%	1.258.849.419	66,66%	1.271.026.354	66,66%	2.529.875.773	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
				Persentase sistem informasi intervensi masyarakat yang telah menggunakan data kependudukan	N/A	N/A	N/A	N/A	10,00%		20,00%		20,00%			
			Program Pembinaan Penataan Kearsipan	Persentase perangkat daerah, unit kerja, BUMD dan sekolah negeri yang berhasil dibina sistem tata kearsipan sesuai ketentuan	N/A	N/A	N/A	N/A	79,90%	479.796.894	100,00%	484.142.133	100,00%	963.939.027	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
			Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase layanan publik administratif yang berbasis TIK	N/A	31,56%	35,11%	38,65%	53,85%	27.742.226.276	58,37%	28.039.717.342	58,37%	55.781.943.618	Dinas Komunikasi dan Informatika	
			Program Pengelolaan Data Administrasi Kependudukan	Persentase penurunan data ganda pada database SIAK	N/A	N/A	N/A	N/A	85,00%	1.899.144.266	90,00%	1.924.478.755	90,00%	3.823.623.021	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
			Program Pengelolaan Data Statistik Daerah	Tersedianya data statistik daerah yang terintegrasi	N/A	N/A	N/A	N/A	100,00%	283.143.583	100,00%	285.287.050	100,00%	568.430.633	Dinas Komunikasi dan Informatika	
			Program Pengelolaan informasi dan Komunikasi Publik	Rata-rata pemanfaatan publik terhadap berbagai saluran	N/A	N/A	N/A	N/A	32.000 Kunjungan	6.805.119.319	32.414 Kunjungan	6.880.173.679	32.414 Kunjungan	13.685.292.998	Dinas Komunikasi dan	



Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kota Surabaya 2016 – 2021

Misi-Tujuan-Sasaran-Program				Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD			Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					Realisasi			Target atau Realisasi (*)	Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja		
					2016	2017	2018	2019	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				komunikasi informasi yang disediakan oleh Pemerintah Kota Surabaya											Informatika
			Program Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Persentase pengelolaan sarana TIK pendukung pelayanan publik	N/A	N/A	N/A	N/A	100,00%	41.314.145.951	100,00%	42.246.638.533	100,00%	83.560.784.484	Dinas Komunikasi dan Informatika
			Program Peningkatan Informasi dan Layanan Kearsipan	Indeks Kepuasan Pelayanan Kearsipan	N/A	N/A	N/A	N/A	81,00	342.467.061	81,50	345.813.783	81,50	688.280.844	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			Program Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Lingkup Penanaman Modal	Persentase industri/perusahaan yang dibina dan diawasi perizinan dan pelaporannya	N/A	N/A	N/A	N/A	72,00%	5.803.192.520	75,00%	5.886.273.509	75,00%	11.689.466.029	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
				Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan lingkup penanaman modal	N/A	N/A	N/A	N/A	78,00%		80,00%		80,00%		
			Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	Persentase arsip sejarah yang didigitalisasi	N/A	N/A	N/A	N/A	85,19%	3.470.327.888	100,00%	3.525.345.380	100,00%	6.995.673.268	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
				Persentase jumlah arsip yang diakuisisi	N/A	N/A	N/A	N/A	80,00%		100,00%		100,00%		
			Meningkatkan kompetensi ASN	Indeks Profesionalitas Pegawai	N/A	N/A	N/A	N/A	71,08%	13.001.674.209	71,97%	13.137.161.200	71,97%	26.138.835.409	
			Program Pengembangan dan Penilaian Kinerja Pegawai	Persentase pegawai yang difasilitasi penilaian kinerja	N/A	N/A	N/A	N/A	100,00%	4.187.998.064	100,00%	4.236.649.709	100,00%	8.424.647.773	Badan Kepegawaian dan Diklat
			Program Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM	Persentase pegawai yang mengikuti diklat teknis dan fungsional	N/A	N/A	N/A	N/A	50,03%	6.317.639.957	52,03%	6.374.461.171	52,03%	12.692.101.128	Badan Kepegawaian dan Diklat
				Persentase pejabat struktural yang mengikuti diklat struktural	N/A	N/A	N/A	N/A	65,06%		65,06%		65,06%		
			Program Peningkatan Pelayanan dan Penataan Pegawai	Persentase penataan pegawai sesuai analisa jabatan	N/A	N/A	N/A	N/A	100,00%	2.496.036.188	100,00%	2.526.050.320	100,00%	5.022.086.508	Badan Kepegawaian dan Diklat
			Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah	Opini BPK	N/A	WTP	WTP	WTP	WTP	33.648.635.084	WTP	34.410.457.256	WTP	68.059.092.340	



Misi-Tujuan-Sasaran-Program				Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD			Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					Realisasi			Target atau Realisasi (*)	Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja		
					2016	2017	2018	2019	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				Persentase kontribusi pajak terhadap PAD	N/A	69.92%	78.03%	75,54%	79,78%		80,12%		80,12%		
			Program Penagihan Pajak Daerah	Persentase tagihan piutang pajak daerah yang terbayar	N/A	N/A	N/A	N/A	84,50%	4.584.028.527	85,00%	4.673.776.648	85,00%	9.257.805.175	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah
			Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen pertanggungjawaban keuangan	N/A	N/A	N/A	N/A	90,00%	4.044.714.215	90,00%	4.141.317.093	90,00%	8.186.031.308	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah
			Program Peningkatan Pendataan dan Penetapan Objek Pajak Daerah	Persentase objek pajak daerah yang telah ditetapkan	N/A	N/A	N/A	N/A	84,00%	23.582.611.782	85,00%	24.133.807.307	85,00%	47.716.419.089	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah
			Program Perencanaan Anggaran Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen anggaran	N/A	N/A	N/A	N/A	75,00%	1.437.280.560	75,00%	1.461.556.208	75,00%	2.898.836.768	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah
										5.935.121.513.446		6.019.731.935.933		11.954.853.449.379	



BAB VII

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini akan dibahas mengenai rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaannya, yang meliputi Tahun 2020. Sebagai kondisi awal penyusunan Review RPJMD ini adalah hasil capaian pada Tahun 2018.

7.1 Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah

Kerangka Pendanaan pembangunan daerah dapat dilihat pada Tabel VII.1 sebagai berikut.



Tabel VII.1
Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah
Tahun 2020 - 2021
Kota Surabaya

Kode	Kapasitas Riil/Belanja	Proyeksi	
		2020	2021
1	2	3	4
	KAPASITAS RIIL KEUANGAN		
	BELANJA		
	<i>Belanja Tidak Langsung</i>		
	Belanja Pegawai	2.259.963.015.551	2.400.003.050.599
	Belanja Bunga	-	-
	Belanja Subsidi	-	-
	Belanja Hibah	215.415.480.000	85.120.500.000
	Belanja Bantuan Sosial	-	-
	Belanja Bagi Hasil	750.000.000	750.000.000
	Belanja Bantuan Keuangan	3.181.420.697	3.181.420.697
	Belanja Tidak Terduga	15.000.000.000	15.000.000.000
	<i>Belanja Langsung</i>		
	Belanja Pegawai	569.028.853.084	576.035.135.502
	Belanja Modal	4.324.716.834.039	4.390.956.273.631
	Belanja Barang Jasa	2.364.032.088.324	2.388.189.418.628



7.2 Indikasi Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan

Penjabaran Program Pembangunan Daerah dibagi berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Penunjang Urusan Pemerintahan. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota, di dalamnya memuat program-program penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pada Urusan Pemerintahan, terdapat urusan yang sifatnya Wajib dan Pilihan. Urusan yang bersifat Wajib, terdiri dari Pelayanan Dasar dan Non Pelayanan Dasar.

Pada Penunjang Urusan Pemerintahan, terdapat program-program yang mengambil fungsi sebagai penunjang dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diperlukan oleh tiap Perangkat Daerah untuk bisa menjalankan fungsinya. Pembagiannya meliputi Fungsi Manajemen dan Unsur Manajemen. Fungsi Manajemen terdiri dari Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan; Keuangan; Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah; serta Pengawasan. Sedangkan Unsur Manajemen meliputi Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan; dan Sarana dan Prasarana Perkantoran. Penjelasan mengenai hal tersebut dapat dilihat pada Tabel VIII.2.



Tabel VII.2
Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
Kota Surabaya

Urusan-Program	Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD				Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan Program	Keterangan Perubahan	
		Realisasi			Target atau Realisasi (*)	Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja					
		2016	2017	2018		2019	Target	Rp	Target	Rp	Target				Rp
Urusan Pemerintahan							5,783,201,567,429		5,866,148,412,583		11,649,349,980,012				
Urusan Wajib							5,739,877,687,086		5,821,987,794,439		11,561,865,481,525				
Pelayanan Dasar							4,018,067,136,373		4,080,197,913,558		8,098,265,049,931				
Pendidikan							939,805,554,327		964,757,466,122		1,904,563,020,449				
	Program Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Masyarakat dan Kesenian Olahraga Pendidikan	Persentase ketuntasan pendidikan kesetaraan paket A	N/A	92.56%	89.04%	85.92%*	86.25%	127,066,124,151	87.10%	129,030,169,879	87.10%	256,096,294,030	Dinas Pendidikan	P1	Program berlanjut dengan penambahan indikator sesuai dengan tugas dan fungsi.
		Persentase ketuntasan pendidikan kesetaraan paket B	N/A	82.93%	89.65%	89.24%*	89,27%		89,66%		89,66%				
		Persentase ketuntasan pendidikan kesetaraan paket C	N/A	98.13%	91,06%	86.35%*	91,24%		91,37%		91,37%				
		Persentase ketuntasan pendidikan lembaga kursus dan pelatihan	N/A	N/A	N/A	N/A	72,25%		74,50%		74,50%				
		Persentase ketuntasan pendidikan PAUD	N/A	N/A	N/A	N/A	78,50%		79,75%		79,75%				
		Persentase prestasi non akademik peserta didik PAUD pada lomba tingkat kecamatan/kota/provinsi/nasional/internasional	N/A	N/A	N/A	N/A	0,15%		0,20%		0,20%				
		Persentase prestasi non akademik peserta didik SD pada lomba tingkat kota/provinsi/nasional/internasional	N/A	N/A	N/A	N/A	1,70%		2,00%		2,00%				
		Persentase prestasi non akademik peserta didik SMP pada lomba tingkat	N/A	N/A	N/A	N/A	4,00%		4,50%		4,50%				



Urusan-Program	Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD					Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan Program	Keterangan Perubahan	
		Realisasi			Target atau Realisasi (*)	Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja						
		2016	2017	2018		2019	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
	kota/provinsi/nasional /internasional															
	Persentase sasaran penerima beasiswa pendidikan dari kelompok masyarakat berpenghasilan rendah	N/A	N/A	N/A	N/A	45,71%			46,12%		46,12%					
	Program Pengembangan Sekolah Dasar	Persentase daya tampung relatif terhadap jumlah kebutuhan SD/MI	N/A	100.31%	103.2%	100.00%	100,00%	303,929,882,126	100,00%	317,789,832,640	100,00%	621,719,714,766	Dinas Pendidikan	P1	Program berlanjut dengan penambahan indikator sesuai dengan tugas dan fungsi.	
		Persentase lembaga pendidikan SD yang sarana prasarananya sesuai standar	N/A	99.46%	89,44%	72.83%	92,01%			93,19%		93,19%				
		Persentase prestasi akademik peserta didik SD pada lomba tingkat kota/provinsi/nasional /internasional	N/A	N/A	N/A	N/A	0,12%			0,15%		0,15%				
	Program Pengembangan Sekolah Menengah	Persentase daya tampung relatif terhadap jumlah kebutuhan SMP/MTS	N/A	89.15%	102,57%	100.00%	100,00%	153,840,443,138	100,00%	160,437,824,713	100,00%	314,278,267,851	Dinas Pendidikan	P1	Program berlanjut dengan penambahan indikator sesuai dengan tugas dan fungsi.	
		Persentase lembaga pendidikan SMP yang sarana prasarananya sesuai standar	N/A	98.85%	82.66%	78.03%	95,73%			96,04%		96,04%				
		Persentase prestasi akademik SMP pada event tingkat provinsi/nasional/inter nasional	N/A	N/A	N/A	N/A	0,14%			0,30%		0,30%				
	Program Peningkatan dan Perbaikan Prasarana Pendidikan	Persentase prasarana pendidikan dalam kondisi baik	N/A	N/A	N/A	N/A	88,94%	119,948,904,507	100,00%	120,360,714,518	100,00%	240,309,619,025	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang	P1	Pengembangan program dengan indikator baru	
	Program Peningkatan Manajemen Sekolah	Persentase lembaga pendidikan SD/MI yang tertib administrasi	N/A	N/A	N/A	N/A	81,86%	87,798,278,996	83,18%	89,382,952,794	83,18%	177,181,231,790	Dinas Pendidikan	P1	Program baru sesuai dengan tugas dan fungsi.	



Urusan-Program	Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD					Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan Program	Keterangan Perubahan
		Realisasi			Target atau Realisasi (*)	Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja					
		2016	2017	2018	2019	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
	Persentase lembaga pendidikan SMP/MTs yang tertib administrasi	N/A	N/A	N/A	N/A	87,38%		88,88%		88,88%					
Program Peningkatan Mutu Guru dan Tenaga Kependidikan	Persentase guru PAUD yang kompeten	N/A	77.07%	100.00%	69.09%	100.00%	147,221,921,409	100.00%	147,755,971,578	100.00%	294,977,892,987	Dinas Pendidikan	P1	Program berlanjut dengan penambahan indikator sesuai dengan tugas dan fungsi.	
	Persentase guru SD yang kompeten	N/A	N/A	N/A	N/A	100,00%		100,00%		100,00%					
	Persentase guru SD yang memiliki kesesuaian kualifikasi akademik yang dibuktikan melalui ijazah S1 dari fakultas keguruan dan ilmu pendidikan atau AKTA 4	N/A	93.26%	100.00%	100.00%	100,00%		100,00%		100,00%					
	Persentase guru SMP yang kompeten	N/A	N/A	N/A	N/A	100,00%		100,00%		100,00%					
	Persentase guru SMP yang memiliki kesesuaian kualifikasi akademik dengan mata pelajaran yang diajar	N/A	95.92%	100.00%	100.00%	100,00%		100,00%		100,00%					
	Persentase tenaga kependidikan (administrasi) SD yang berkualitas	N/A	N/A	N/A	N/A	85,00%		85,00%		85,00%					
	Persentase tenaga kependidikan (administrasi) SMP yang berkualitas	N/A	N/A	N/A	N/A	90,00%		90,00%		90,00%					
	Persentase tenaga kependidikan PAUD jenjang TK yang kompeten	N/A	N/A	N/A	N/A	100,00%		100,00%		100,00%					
	Kesehatan						1,170,857,261,646		1,181,322,249,116		2,352,179,510,762				
Program Jaminan Kesehatan	Persentase Kepemilikan Jaminan Kesehatan	N/A	99.09%	100.00%	100.00%	100,00%	175,733,535,729	100,00%	179,544,916,347	100,00%	355,278,452,076	Dinas Kesehatan	P1	Program berlanjut dengan perubahan narasi agar sasaran penjaminan lebih luas	
Program Obat dan Perbekalan	Persentase ketersediaan obat	107.14%	100.00%	100.00%	100.00%	100,00%	23,108,395,641	100,00%	23,887,161,715	100,00%	46,995,557,356	Dinas Kesehatan	P1	Program Berlanjut	



Urusan-Program	Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD				Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan Program	Keterangan Perubahan	
		Realisasi			Target atau Realisasi (*)	Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja					
		2016	2017	2018		2019	Target	Rp	Target	Rp	Target				Rp
	Kesehatan Puskesmas/Puskesmas Pembantu	dan perbekalan kesehatan Dinas Kesehatan													
	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan RSUD Bhakti Dharma Husada	Persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan RSUD Bhakti Dharma Husada	100.00%	99.87%	100.00%	100.00%	100,00%	32,174,798,660	100,00%	32,174,872,998	100,00%	64,349,671,658	RSUD Bhakti Dharma Husada	P1	Program Berlanjut
	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan RSUD dr. Mohamad Soewandhie	Persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan RSUD dr. Mohammad Soewandhie	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	100,00%	71,000,000,000	100,00%	71,000,000,000	100,00%	142,000,000,000	RSUD Dr. Mohamad Soewandhie	P1	Program Berlanjut
	Program Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Cakupan kunjungan ibu hamil K4	N/A	98.55%	98,98%	98.48%	99,00%	36,900,521,792	99,01%	37,346,448,121	99,01%	74,246,969,913	Dinas Kesehatan	P1	Penggabungan program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak dengan Perbaikan Gizi Ibu dan Anak
		Cakupan kunjungan neonatal lengkap	N/A	100.19%	100,28%	90.00%	100,00%		100,00%		100,00%				
		Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan (Tolinakes)	N/A	97.63%	97,68%	96.96%	97.72%				97.74%				
		Prevalensi balita gizi buruk	N/A	0.15%	0,14%	<1%	0.11 %			0.10 %		0.10 %			
		Prevalensi balita gizi kurang	N/A	9.10%	8,26%	9.50%	8.24%			8.23%		8.23%			
		Prevalensi balita stunting	N/A	N/A	N/A	N/A	8.90%			8.89%		8.89%			
	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Cakupan imunisasi dasar lengkap	N/A	94.57%	97,77%	93.85%	97.79%	32,233,850,650	97.80%	32,505,318,298	97.80%	64,739,168,948	Dinas Kesehatan	P1	Refocusing Program
		Cakupan kelurahan mengalami KLB yang ditangani <20 jam	N/A	N/A	100,00%	100%	100,00%			100,00%		100,00%			
		Cakupan kelurahan yang memiliki Pembinaan Terpadu (Bindu)	N/A	100.00%	100,00%	86.00%	100,00%			100,00%		100,00%			
	Program Pengembangan Pola Hidup Bersih Sehat	Persentase kelurahan siaga aktif minimal strata madya	N/A	N/A	100,00%	100%	100,00%	71,150,358,056	100,00%	71,680,218,989	100,00%	142,830,577,045	Dinas Kesehatan	P1	Refocusing Program



Urusan-Program	Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD					Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan Program	Keterangan Perubahan	
		Realisasi			Target atau Realisasi (*)	Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja						
		2016	2017	2018		2019	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
	Masyarakat															
		Persentase rumah sehat	N/A	84.36%	86,38%	78.00%	86.42%		86.44%		86.44%					
		Persentase TPM memenuhi syarat higienis sanitasi	N/A	93.02%	84,84%	83.00%	84.88%		84.90%		84.90%					
	Program Pengembangan SDM dan Promosi Kesehatan RSUD Bhakti Dharma Husada	Persentase pelaksanaan kegiatan PKRS sesuai standar	N/A	N/A	N/A	N/A	80,00%	16,238,103,134	80,00%	16,307,535,850	80,00%	32,545,638,984	RSUD Bhakti Dharma Husada	P1	Program baru sesuai dengan tugas dan fungsi.	
		Persentase SDM RSUD Bhakti Dharma Husada yang mendapatkan peningkatan kompetensi sesuai standar	N/A	N/A	N/A	N/A	60,00%		60,00%		60,00%					
	Program Pengembangan SDM dan Sistem Pengelolaan RSUD dr. Mohamad Soewandhie	Persentase SDM RSUD dr. Mohammad Soewandhie yang memiliki kompetensi sesuai standar	N/A	N/A	N/A	N/A	50,00%	28,580,067,089	52,00%	28,790,199,322	52,00%	57,370,266,411	RSUD Dr. Mohamad Soewandhie	P1	Program Baru	
	Program Peningkatan dan Perbaikan Prasarana Layanan Kesehatan	Persentase prasarana layanan kesehatan dalam kondisi baik	N/A	N/A	N/A	N/A	88,17%	323,632,811,405	100,00%	323,723,718,467	100,00%	647,356,529,872	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang	P1	Penggabungan program dengan menggunakan indikator baru	
	Program Peningkatan Keamanan Pangan Olahan dan Siap Saji	Persentase sample yang memenuhi syarat keamanan makanan	N/A	96.02%	98.04%	86.00%	98.06%	1,815,189,240	98.07%	1,824,692,976	98.07%	3,639,882,216	Dinas Kesehatan	P1	Program berlanjut dengan perubahan narasi	
	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan RSUD Bhakti Dharma Husada	Average Length of Stay (AvLOS)	N/A	N/A	N/A	N/A	4 Hari	5,182,688,887	4 Hari	5,215,066,785	4 Hari	10,397,755,672	RSUD Bhakti Dharma Husada	P1	Program Baru	
		Bed Turn Over Ratio (BTO)	N/A	N/A	N/A	N/A	45 Kali		45 Kali		45 Kali					
		Turn Over Interval (TOI)	N/A	N/A	N/A	N/A	3 Hari		3 Hari		3 Hari					
	Program	Angka Kejadian	N/A	N/A	N/A	N/A	1,10%	8,165,044,720	1,00%	8,194,631,923	1,00%	16,359,676,643	RSUD Dr.	P1	Program Baru	



Urusan-Program	Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD					Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan Program	Keterangan Perubahan	
		Realisasi			Target atau Realisasi (*)	Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja						
		2016	2017	2018	2019	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
	Peningkatan Pelayanan Kesehatan RSUD dr. Mohamad Soewandhie	Infeksi Nosokomial												Mohamad Soewandhie		
		Angka Kejadian Infeksi Pasca Operasi	N/A	N/A	N/A	N/A	1,25%		1,00%		1,00%					
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana puskesmas dan puskesmas pembantu	72.95%	76.23%	83.61%	78.00%	83.70%	22,285,183,838	83.75%	22,526,003,804	83.75%	44,811,187,642	Dinas Kesehatan	P1	Program berlanjut dengan perubahan narasi	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan RSUD dr. Mohamad Soewandhie	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana RSUD dr. Mohammad Soewandhie sesuai standar tipe rumah sakit	N/A	116.37%	96.07%	96.08%	96,25%	184,148,430,646	96,40%	186,795,135,738	96,40%	370,943,566,384	RSUD Dr. Mohamad Soewandhie	P1	Program Berlanjut	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit RSUD Bhakti Dharma Husada	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana RSUD Bhakti Dharma Husada sesuai standar tipe rumah sakit	N/A	216.88%	98.95%	90.00%	90.00%	14,053,095,816	90.00%	14,139,572,590	90,00%	28,192,668,406	RSUD Bhakti Dharma Husada	P1	Program Berlanjut	
	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Persentase puskesmas yang terakreditasi	N/A	N/A	N/A	N/A	85.71%	89,879,196,772	100,00%	90,084,343,929	100,00%	179,963,540,701	Dinas Kesehatan	P1	Refocusing program berdasarkan tugas dan fungsi.	
	Program Sumber Daya Kesehatan	Persentase puskesmas dengan alat kesehatan sesuai standar	N/A	N/A	N/A	N/A	98.84%	34,575,989,571	100%	35,582,411,264	100%	70,158,400,835	Dinas Kesehatan	P1	Refocusing program berdasarkan tugas dan fungsi.	
		Persentase tenaga kesehatan yang memiliki izin	N/A	96.08%	98.15%	86.00%	98.17%		98.18%		98.18%					
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang							1,151,039,264,989		1,171,154,591,333		2,322,193,856,322				
	Program Pelayanan Rekomendasi Teknis Infrastruktur	Persentase rekomendasi teknis yang dikeluarkan dibanding permohonan rekomendasi teknis yang memenuhi	N/A	N/A	N/A	N/A	100.00%	1,354,740,836	100,00%	1,375,504,872	100,00%	2,730,245,708	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan	P1	Program baru	



Urusan-Program	Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD				Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan Program	Keterangan Perubahan	
		Realisasi			Target atau Realisasi (*)	Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja						
		2016	2017	2018		2019	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
	syarat															
	Program Penataan Ruang	Indeks Pelayanan Tata Ruang	N/A	N/A	N/A	N/A	94,00%	18,162,326,872	95,00%	18,468,950,491	95,00%	36,631,277,363	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang	P2	Pengembangan program dengan pengembangan indikator baru	
	Program Pengelolaan dan Pembangunan Jalan dan Jembatan	Persentase jalan yang mendapatkan perbaikan	N/A	7,58%	10,46%	10,32%	12,90%	345,080,328,538	15,48%	348,082,962,040	15,48%	693,163,290,578	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan	P1	Pengembangan program dengan pengembangan indikator baru	
		Persentase jaringan jalan yang terbangun	N/A	0,28%	0,65%	0,48%	0,68%		0,71%		0,71%					
		Persentase penyediaan prasarana pejalan kaki	N/A	18,97%	17,27%	22,91%	28,64%		34,36%		34,36%					
	Program Pengelolaan dan Peningkatan Pelayanan PJU Hemat Energi	Persentase titik pemasangan PJU hemat energi	N/A	N/A	N/A	N/A	83,39%	266,489,508,726	85,90%	270,349,993,588	85,90%	536,839,502,314	Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau	P2	Pengembangan program dengan menggunakan indikator baru	
	Program Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Drainase Kota	Lama genangan	N/A	25,03 menit	22,43 menit	48 menit	22,30 menit	471,923,555,122	22,10 menit	484,024,179,110	22,10 menit	955,947,734,232	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan	P1	Program Berlanjut	
		Luas genangan	N/A	765,12 ha	697 Ha	1150 Ha	600 Ha		500 Ha		500 Ha					
		Tinggi genangan	N/A	13,37 cm	12,49 cm	15 cm	12,30 cm		12,10 cm		12,10 cm					
	Program Pengendalian Bidang Bangunan	Persentase jumlah bangunan yang ber IMB	N/A	54,31%	55,96%	56,93%	58,81%	3,709,826,461	60,79%	3,764,446,727	60,79%	7,474,273,188	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang	P2	Pengembangan program dari Program Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang Kota	
		Persentase tindak lanjut terhadap laporan pelanggaran IMB	N/A	100,00%	119,00%	100,00%	100,00%		100,00%		100,00%					
	Program Perancangan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan	Persentase dokumen perancangan dan pengawasan jalan dan jembatan yang tepat waktu	N/A	N/A	N/A	N/A	100,00%	18,971,557,683	100,00%	19,250,740,392	100,00%	38,222,298,075	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan	P1	Program Baru	
	Program	Persentase dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	100,00%	23,746,092,874	100,00%	24,212,720,178	100,00%	47,958,813,052	Dinas	P1	Program Baru	



Urusan-Program	Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD					Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan Program	Keterangan Perubahan		
		Realisasi			Target atau Realisasi (*)	Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja							
		2016	2017	2018		2019	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
	Perancangan dan Pengawasan Pematuan	perancangan dan pengawasan pematuan yang tepat waktu															
	Program Sinkronisasi Pemanfaatan Jalan, Saluran dan Utilitas	Persentase rekomendasi utilitas yang dikeluarkan dibanding permohonan utilitas yang memenuhi syarat	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	100,00%	1,601,327,877	100,00%	1,625,093,935	100,00%	3,226,421,812	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematuan	P1	Pengembangan program dengan menggunakan indikator yang tersedia		
	Perumahan dan Kawasan Permukiman							359,811,224,402		361,234,845,517		721,046,069,919					
	Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Lingkup Bangunan	Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan lingkup bangunan	N/A	N/A	N/A	N/A	70,00%	4,933,578,328	75,00%	5,012,374,634	75,00%	9,945,952,962	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang	P2	Refocusing Program pada pelayanan perizinan dan non perizinan lingkup bangunan		
	Program Pelayanan Perizinan Konstruksi	Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan lingkup konstruksi	N/A	N/A	N/A	N/A	90,00%	389,751,366	93,00%	393,760,666	93,00%	783,512,032	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang	P2	Refocusing Program pada pelayanan perizinan dan non perizinan lingkup konstruksi		
	Program Pembangunan dan Rehabilitasi Bangunan Gedung	Persentase gedung pemerintahan dan pelayanan publik yang berfungsi baik	N/A	N/A	N/A	N/A	90,59%	138,357,686,104	100,00%	138,753,762,596	100,00%	277,111,448,700	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang	P2	Pengembangan program dengan menggunakan indikator baru		
	Program Pengelolaan Rusunawa	Tingkat kesesuaian penghuni rusunawa	N/A	N/A	N/A	N/A	100,00%	29,798,733,038	100,00%	30,170,491,661	100,00%	59,969,224,699	Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah	P2	Program Baru		
	Program Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Persentase pembangunan/rehabilitasi jalan lingkungan dan kelengkapannya	N/A	N/A	N/A	N/A	67,65%	186,331,475,566	73,80%	186,904,455,960	73,80%	373,235,931,526	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang	P1	Pengembangan program dengan menggunakan indikator baru		
		Persentase	N/A	12.02%	22.33%	35.00%	47,00%			50,83%		50,83%					



Urusan-Program	Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD				Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan Program	Keterangan Perubahan	
		Realisasi			Target atau Realisasi (*)	Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja					
		2016	2017	2018		2019	Target	Rp	Target	Rp	Target				Rp
	pemenuhan kebutuhan rumah layak huni														
	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat							156,436,671,688		158,863,276,362		315,299,948,050			
	Program Kesatuan Bangsa	Persentase organisasi masyarakat dan partai politik yang mendukung pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	N/A	N/A	N/A	N/A	70,00%	1,948,675,735	80,00%	1,967,613,097	80,00%	3,916,288,832	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	P1	Program Baru
	Program Penanganan Strategis Gangguan Ketenteraman Umum	Persentase gangguan ketenteraman umum yang ditangani	N/A	N/A	N/A	N/A	100,00%	3,569,450,560	100,00%	3,621,829,086	100,00%	7,191,279,646	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	P1	Program Baru
	Program Penanggulangan Bencana Alam	Persentase penanggulangan kejadian bencana alam ≤ 24 jam	N/A	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	4,989,276,798	100,00%	5,047,196,718	100,00%	10,036,473,516	Badan Penanggulangan Bencana Dan Perlindungan Masyarakat	P2	Refocusing Program dengan perubahan indikator
	Program Penanggulangan Bencana Kebakaran	Angka Kejadian Kebakaran Gedung/Bangunan per 1 Juta Penduduk Surabaya	N/A	51,06	51,38	53	51	42,016,866,961	50,5	42,764,462,215	50,5	84,781,329,176	Dinas Pemadam Kebakaran	P1	Pengembangan program
		Persentase waktu tanggap kejadian kebakaran kurang dari 15 menit	N/A	100%	100%	97%	100%		100%		100%				
	Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana Alam	Persentase keluhan tangguh bencana	N/A	30.52%	40.91%	68.00%	88,00%	2,400,189,841	100,00%	2,427,256,252	100,00%	4,827,446,093	Badan Penanggulangan Bencana Dan Perlindungan Masyarakat	P2	Program Berlanjut
	Program Penegakan Peraturan Daerah Bidang Ekonomi	Persentase pelanggaran Perda terkait reklame yang ditemukan/dilaporkan dan ditindaklanjuti	N/A	N/A	N/A	N/A	100,00%	1,753,605,106	100,00%	1,770,441,006	100,00%	3,524,046,112	Satuan Polisi Pamong Praja	P2	Refocusing program berdasarkan tugas dan fungsi.
	Program Penegakan	Persentase pelanggaran Perda	N/A	N/A	N/A	N/A	100,00%	1,571,826,627	100,00%	1,585,927,098	100,00%	3,157,753,725	Satuan Polisi Pamong Praja	P2	Refocusing program



Urusan-Program	Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD				Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan Program	Keterangan Perubahan		
		Realisasi			Target atau Realisasi (*)	Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja						
		2016	2017	2018		2019	Target	Rp	Target	Rp	Target				Rp	
	Peraturan Daerah Bidang Sarana Prasarana Wilayah	terkait IMB, kebersihan, parkir umum, Perda lainnya yang ditemukan/dilaporkan dan ditindaklanjuti														berdasarkan tugas dan fungsi.
	Program Penegakan Peraturan Daerah Bidang Sosial	Persentase pelanggaran Perda bidang terkait PKL, PSK, anjal dan gepeng, dan RHU yang ditemukan/dilaporkan dan ditindaklanjuti	N/A	N/A	N/A	N/A	100,00%	35,359,611,850	100,00%	35,951,348,360	100,00%	71,310,960,210	Satuan Polisi Pamong Praja	P2	Refocusing program berdasarkan tugas dan fungsi.	
	Program Pengembangan Kapasitas Aparatur Polisi Pamong Praja	Persentase aparaturnya yang ditingkatkan kapasitasnya sesuai tugas dan fungsi	N/A	N/A	N/A	N/A	100,00%	1,418,395,997	100,00%	1,424,940,495	100,00%	2,843,336,492	Satuan Polisi Pamong Praja	P2	Program Baru	
	Program Pengembangan Kapasitas Petugas Perlindungan Masyarakat	Persentase petugas perlindungan masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya sesuai tugas dan fungsi	N/A	N/A	N/A	N/A	76,85%	39,985,342,401	77,72%	40,698,109,481	77,72%	80,683,451,882	Badan Penanggulangan Bencana Dan Perlindungan Masyarakat	P1	Program Baru	
	Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana Kebakaran	Persentase sarana dan prasarana pemadam kebakaran dalam kondisi baik	N/A	N/A	N/A	N/A	80%	21,423,429,812	83%	21,604,152,554	83%	43,027,582,366	Dinas Pemadam Kebakaran	P1	Program baru	
	Sosial							240,117,159,321		242,865,485,108		482,982,644,429				
	Program Bantuan Masyarakat Berpenghasilan Rendah	Persentase bantuan pangan non tunai dan program keluarga harapan yang tersalurkan	N/A	N/A	N/A	N/A	100,00%	5,244,491,370	100,00%	5,356,954,043	100,00%	10,601,445,413	Dinas Sosial	P1	Program baru sesuai dengan tugas dan fungsi.	
		Persentase sasaran penerima layanan pemakaman dan ambulance gratis dari kelompok masyarakat berpenghasilan rendah	N/A	N/A	N/A	N/A	50,00%		50,00%		50,00%					
	Program Partisipasi Keagamaan	Persentase lembaga/organisasi/kelompok keagamaan yang berpartisipasi dalam kegiatan keagamaan	N/A	N/A	N/A	N/A	100,00%	14,906,715,658	100,00%	15,161,323,416	100,00%	30,068,039,074	Dinas Sosial	P3	Program baru sesuai dengan tugas dan fungsi.	



Urusan-Program	Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD					Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan Program	Keterangan Perubahan
		Realisasi			Target atau Realisasi (*)	Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja					
		2016	2017	2018		2019	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
Program Partisipasi Kepahlawanan	Persentase lembaga/organisasi/kelompok keahlawanan yang berpartisipasi dalam kegiatan keahlawanan	N/A	N/A	N/A	N/A	100,00%	8,216,182,805	100,00%	8,360,730,199	100,00%	16,576,913,004	Dinas Sosial	P3	Program baru sesuai dengan tugas dan fungsi.	
Program Pelayanan Kebutuhan Dasar dan Rehabilitasi Sosial	Persentase pemulangan PMKS	N/A	N/A	N/A	N/A	30,00%	193,243,741,596	35,00%	194,790,086,495	35,00%	388,033,828,091	Dinas Sosial	P1	Program berlanjut dengan perubahan narasi	
	Persentase sasaran penerima intervensi sosial dari kelompok masyarakat berpenghasilan rendah	N/A	N/A	N/A	N/A	100,00%		100,00%		100,00%					
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Persentase PSKS yang berpartisipasi dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial	N/A	45.73%	58.36%	55.00%	60,00%	983,201,794	62,00%	989,814,515	62,00%	1,973,016,309	Dinas Sosial	P1	Program berlanjut	
Program Pengendalian Layanan Sosial	Persentase data kesejahteraan sosial yang dimanfaatkan	N/A	N/A	N/A	N/A	100,00%	3,676,379,094	100,00%	3,735,560,492	100,00%	7,411,939,586	Dinas Sosial	P1	Program baru sesuai dengan tugas dan fungsi.	
Program Rehabilitasi Rumah Tapak Tidak Layak Huni	Persentase rumah tapak tidak layak huni yang diperbaiki	N/A	N/A	N/A	N/A	85,00%	13,846,447,004	100,00%	14,471,015,948	100,00%	28,317,462,952	Dinas Sosial	P1	Program baru sesuai dengan tugas dan fungsi.	
Non Pelayanan Dasar							1,721,810,550,713		1,741,789,880,881		3,463,600,431,594				
Tenaga Kerja							18,151,232,974		18,342,188,170		36,493,421,144				
Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Lingkup Ketenagakerjaan	Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan lingkup ketenagakerjaan	N/A	N/A	N/A	N/A	78,00%	153,320,010	80,00%	153,432,872	80,00%	306,752,882	Dinas Tenaga Kerja	P2	Refocusing program berdasarkan tugas dan fungsi.	
Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Syarat Kerja	Persentase perusahaan yang memiliki Peraturan Perusahaan/Perjanjian Kerja Bersama	6.70%	7.18%	7.77%	7.26%	7,77%	2,936,137,636	7,77%	2,972,130,659	7,77%	5,908,268,295	Dinas Tenaga Kerja	P2	Program Berlanjut	
Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Persentase pertumbuhan kesempatan kerja yang dapat diinformasikan	N/A	5.10%	5.04%	5.00%	5.10%	3,147,164,184	5.20%	3,182,082,121	5.20%	6,329,246,305	Dinas Tenaga Kerja	P2	Program Berlanjut	



Urusan-Program	Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD					Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan Program	Keterangan Perubahan	
		Realisasi					Target atau Realisasi (*)	Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	Target		Rp	Target	Rp	Target	Rp				
	Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja	Persentase angkatan kerja yang lulus sertifikasi	64.32%	68.69%	81.72%	66.00%	75.00%	11,914,611,144	77.00%	12,034,542,518	77.00%	23,949,153,662	Dinas Tenaga Kerja	P2	Program Berlanjut	
		Persentase peserta pelatihan berbasis kompetensi yang lulus pelatihan	N/A	97.93%	100.00%	81.00%	85.00%		90.00%		90.00%					
	Penanaman Modal							8,717,440,549		8,831,353,695		17,548,794,244				
	Program Pengolahan Data dan Pengendalian Penanaman Modal	Persentase perusahaan penanaman modal yang menyusun dan membuat LKPM	N/A	N/A	N/A	N/A	40,00%	1,592,322,638	42,00%	1,610,378,855	42,00%	3,202,701,493	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	P2	Program Baru	
	Program Peningkatan Iklim dan Realisasi Investasi	Tingkat pertumbuhan izin realisasi investasi	N/A	N/A	N/A	N/A	20,00%	1,321,925,391	24,00%	1,334,701,331	24,00%	2,656,626,722	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	P2	Penggabungan program	
	Program Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Lingkup Penanaman Modal	Persentase industri/perusahaan yang dibina dan diawasi perizinan dan pelaporannya	N/A	N/A	N/A	N/A	72,00%	5,803,192,520	75,00%	5,886,273,509	75,00%	11,689,466,029	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	P2	Refocusing program berdasarkan tugas dan fungsi.	
		Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan lingkup penanaman modal	N/A	N/A	N/A	N/A	78,00%		80,00%		80,00%					
	Kepemudaan dan Olahraga							101,273,073,533		101,671,483,249		202,944,556,782				
	Program Pembangunan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Cakupan/sebaran fasilitas olahraga	N/A	115 kelurahan	124 kelurahan	130 kelurahan	142 kelurahan	80,090,291,768	154 kelurahan	80,323,733,417	154 kelurahan	160,414,025,185	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	P2	Program Berlanjut	
	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	Akumulasi prestasi atlet di tingkat regional, nasional dan/atau internasional	N/A	N/A	N/A	N/A	1.660 medali	15,189,743,580	1.690 medali	15,294,903,598	1.690 medali	30,484,647,178	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	P2	Program berlanjut dengan perubahan indikator.	
	Program Peningkatan Peran Serta	Persentase pemuda yang aktif memberikan	N/A	N/A	N/A	N/A	15,00%	3,593,671,623	35,00%	3,629,884,854	35,00%	7,223,556,477	Dinas Kepemudaan dan Olah	P2	Refocusing program dengan perubahan	



Urusan-Program	Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD				Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan Program	Keterangan Perubahan		
		Realisasi			Target atau Realisasi (*)	Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja						
		2016	2017	2018		2019	Target	Rp	Target	Rp	Target				Rp	
	Kepemudaan	penyuluhan sebagai kader anti kenakalan remaja												Raga		indikator dalam rangka memacu kader pemuda yang telah dibina untuk melakukan advokasi pembangunan kepemudaan di masyarakat.
	Program Peningkatan Prestasi Pemuda	Persentase individu/kelompok yang mengaplikasikan keahlian yang didapat dari proses pembelajaran seni kreatif	N/A	N/A	N/A	N/A	10,00%	2,399,366,562	12,00%	2,422,961,380	12,00%	4,822,327,942	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	P3	Pengembangan dari program pemanfaatan rumah kreatif dan pengembangan usaha kreatif dan peningkatan kesempatan kerja	
		Persentase pemuda yang membuka wirausaha mandiri	N/A	15.07%	35.19%	15.00%	15,00%		30,00%		30,00%					
	Kebudayaan							8,002,898,166		8,112,513,878		16,115,412,044				
	Program Pengembangan dan Pemanfaatan Budaya Lokal	Persentase hotel, restoran, dan ruang publik yang menampilkan budaya lokal pada 20 lokasi	N/A	N/A	N/A	N/A	95,00%	5,882,157,430	100,00%	5,964,878,441	100,00%	11,847,035,871	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	P2	Program Berlanjut	
		Persentase kelompok seni terdaftar yang layak tampil	N/A	38.55%	57.63%	47.00%	58.50%		59,00%		59,00%					
	Program Perlindungan Budaya Lokal	Persentase cagar budaya yang terpelihara	N/A	91.58%	91.58%	91.50%	91,60%	2,120,740,736	91,69%	2,147,635,437	91,69%	4,268,376,173	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	P2	Program Berlanjut	
	Perpustakaan							27,495,972,624		28,037,387,970		55,533,360,594				
	Program Pembinaan Layanan Baca	Persentase perpustakaan yang berhasil dibina	N/A	12.90%	31.06%	22.80%	46,60%	900,111,258	51,60%	910,017,836	51,60%	1,810,129,094	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	P2	Refocusing program sesuai dengan tugas dan fungsi	
	Program Peningkatan Informasi dan Layanan Perpustakaan	Persentase peningkatan jumlah kegiatan petugas pengelola layanan baca	N/A	N/A	N/A	N/A	8,00%	22,940,862,155	10,00%	23,355,657,497	10,00%	46,296,519,652	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	P2	Refocusing program sesuai dengan tugas dan fungsi	
		Persentase pertumbuhan event literasi yang diselenggarakan	N/A	13.42%	8.33%	10.00%	10,00%		10,00%		10,00%					
	Program Peningkatan Minat dan Baca	Persentase penambahan koleksi buku	N/A	N/A	N/A	N/A	94,41%	3,654,999,211	100,00%	3,771,712,637	100,00%	7,426,711,848	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	P2	Refocusing program sesuai dengan tugas	



Urusan-Program	Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD					Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan Program	Keterangan Perubahan	
		Realisasi			Target atau Realisasi (*)	Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja						
		2016	2017	2018	2019	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
	Masyarakat															
	Kearsipan							4,292,591,843		4,355,301,296		8,647,893,139				dan fungsi
	Program Pembinaan Penataan Kearsipan	Persentase perangkat daerah, unit kerja, BUMD dan sekolah negeri yang berhasil dibina sistem tata kearsipan sesuai ketentuan	N/A	N/A	N/A	N/A	79,90%	479,796,894	100,00%	484,142,133	100,00%	963,939,027	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	P2	Program baru	
	Program Peningkatan Informasi dan Layanan Kearsipan	Indeks Kepuasan Pelayanan Kearsipan	N/A	N/A	N/A	N/A	81,00	342,467,061	81,50	345,813,783	81,50	688,280,844	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	P2	Program baru	
	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	Persentase arsip sejarah yang didigitalisasi	N/A	N/A	N/A	N/A	85,19%	3,470,327,888	100,00%	3,525,345,380	100,00%	6,995,673,268	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	P2	Refocusing Program	
		Persentase jumlah arsip yang diakuisisi	N/A	N/A	N/A	N/A	80,00%		100,00%		100,00%					
	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah							23,032,593,927		23,349,726,245		46,382,320,172				
	Program Pemasaran Produk Usaha Mikro	Persentase usaha mikro binaan yang mendapatkan fasilitasi pemasaran produk	N/A	N/A	N/A	N/A	90,00%	9,598,878,906	100,00%	9,726,219,568	100,00%	19,325,098,474	Dinas Perdagangan	P2	Refocusing program berdasarkan tugas dan fungsi.	
	Program Pengembangan Produk Usaha Mikro	Persentase pelaku usaha mikro yang produknya layak diujimutukan	N/A	20.00%	35.06%	30.00%	35,11%	1,198,355,686	40,00%	1,213,758,622	40,00%	2,412,114,308	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	P2	Program Berlanjut	
	Program Pengembangan Sentra Usaha	Persentase sentra usaha makanan dan minuman yang beroperasi secara optimal	N/A	N/A	N/A	N/A	58,00%	7,610,561,633	63,00%	7,734,338,151	63,00%	15,344,899,784	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	P2	Refocusing program berdasarkan tugas dan fungsi.	
	Program Pengembangan Usaha Koperasi	Tingkat pertumbuhan koperasi yang meningkat volume usahanya	N/A	62.39%	73.19%	78.00%	79,00%	1,533,226,471	80,00%	1,547,134,950	80,00%	3,080,361,421	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	P2	Program Berlanjut dengan penyesuaian narasi program	
	Program Penguatan Kelembagaan Koperasi	Persentase koperasi berklasifikasi AAB	N/A	58.03%	65.98%	66.24%	69,95%	2,425,271,656	72,95%	2,456,381,453	72,95%	4,881,653,109	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	P2	Program Berlanjut	
	Program Perkuatan Permodalan Usaha Mikro	Persentase pelaku usaha mikro yang berhasil mendapatkan bantuan permodalan	N/A	9,60%	8,31%	5,00%	8,31%	666,299,575	8,50%	671,893,501	8,50%	1,338,193,076	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	P2	Program Berlanjut	



Urusan-Program	Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD					Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan Program	Keterangan Perubahan	
		Realisasi			Target atau Realisasi (*)	Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja						
		2016	2017	2018		2019	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
	Statistik															
	Program Pengelolaan Data Statistik Daerah	Tersedianya data statistik daerah yang terintegrasi	N/A	N/A	N/A	N/A	100,00%	283,143,583	100,00%	285,287,050	100,00%	568,430,633	Dinas Komunikasi dan Informatika	P2	Program baru karena adanya penyesuaian tugas dan fungsi, statistika menjadi tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika	
	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak							7,416,553,419		7,504,625,188		14,921,178,607				
	Program Keadilan dan Kesetaraan Gender serta Pemberdayaan Perempuan	Persentase kelurahan yang responsif gender	N/A	N/A	N/A	N/A	20,13%	2,775,850,683	41,56%	2,801,368,251	41,56%	5,577,218,934	Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	P2	Pengembangan program dengan penajaman sasaran sampai ke tingkat kelurahan yang sebelumnya pada tingkat kecamatan dan perangkat daerah.	
		Persentase Perangkat Daerah Pemerintah Kota Surabaya yang telah menerapkan responsif gender dalam pelaksanaan kegiatan	N/A	N/A	N/A	N/A	100,00%		100,00%		100,00%					
	Program Perlindungan Perempuan dan Anak	Persentase efektivitas pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak (PPT2A)	N/A	83,00%	72,70%	66,86%	73,84%	4,640,702,736	74,98%	4,703,256,937	74,98%	9,343,959,673	Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	P2	Program berlanjut dan refocusing sasaran sampai dengan tingkat kelurahan.	
		Persentase kelurahan ramah anak	19,48%	32,47%	52,60%	68,18%	84,42%		100,00%		100,00%					
		Persentase permasalahan perempuan dan anak yang ditangani	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%		100,00%					
	Pangan							3,620,677,330		3,654,007,742		7,274,685,072				
	Program Ketersediaan Informasi	Persentase informasi OD yang diperoleh berdasarkan origin	N/A	N/A	N/A	N/A	36,40%	717,335,424	63,60%	725,722,583	63,60%	1,443,058,007	Dinas Ketahanan Pangan dan	P2	Program Baru	



Urusan-Program	Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD					Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan Program	Keterangan Perubahan	
		Realisasi			Target atau Realisasi (*)	Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja						
		2016	2017	2018	2019	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
	Komoditas Pangan	(asal) komoditas pangan												Pertanian		
	Program Peningkatan Ketersediaan, Keanekaragaman dan Keamanan Pangan	Tingkat/Indeks Kecukupan Pangan	N/A	N/A	N/A	N/A	1,00	2,903,341,906	1,00	2,928,285,159	1,00	5,831,627,065	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	P2	Refocusing Program dengan penambahan indikator	
		Tingkat keamanan bahan pangan segar yang beredar	N/A	86.95%	89.01%	83.00%	89,50%		89,75%		89,75%					
		Tingkat keanekaragaman konsumsi masyarakat (PPH)	N/A	95.62%	96.76%	96.00%	95,00%		95,00%		95,00%					
	Pertanahan							639,190,062,394		644,970,079,763		1,284,160,142,157				
	Program Penanganan Sengketa Tanah dan Bangunan	Persentase kasus tanah dan/atau bangunan yang ditangani	N/A	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	4,377,423,790	100,00%	4,444,387,441	100,00%	8,821,811,231	Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah	P2	Program Baru	
	Program Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan bagi Pembangunan Infrastruktur untuk Kepentingan Umum	Akumulasi luas tanah dan/atau bangunan bagi pembangunan infrastruktur untuk kepentingan umum	1,76 Ha	6,93 Ha	12,61 Ha	4,7 Ha	15,77 Ha	265,904,492,390	17,07 Ha	268,279,468,175	17,07 Ha	534,183,960,565	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan	P2	Refocusing Program dari Program pengadaan tanah dan/atau bangunan bagi pembangunan untuk kepentingan umum	
	Program Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan bagi Pembangunan Non Infrastruktur untuk Kepentingan Umum	Akumulasi luas tanah dan/atau bangunan yang disediakan bagi pembangunan non infrastruktur untuk kepentingan umum	N/A	18,88 Ha	24,56 Ha	41,75 Ha	44,90 Ha	350,977,801,838	48,05 Ha	354,067,361,764	48,05 Ha	705,045,163,602	Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah	P2		
	Program Pengamanan Aset	Persentase tanah aset yang telah dilakukan pemagaran, papan, patok	N/A	13.44%	16.21%	17.85%	36,80%	9,473,283,489	39,74%	9,593,121,569	39,74%	19,066,405,058	Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah	P2	Refocusing Program	
		Persentase tanah aset yang tersertifikasi	N/A	16.56%	20.27%	13.22%	43,08%		45,29%		45,29%					
	Program Pengamanan Aset	Persentase aset tanah, saluran, jalan dan kelengkapannya	N/A	N/A	N/A	N/A	2,50%	2,293,629,586	3,50%	2,324,071,412	3,50%	4,617,700,998	Dinas Pekerjaan Umum Bina	P3	Refocusing Program dari Program	



Urusan-Program	Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD					Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan Program	Keterangan Perubahan	
		Realisasi			Target atau Realisasi (*)	Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja						
		2016	2017	2018		2019	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
	Infrastruktur	yang diamankan												Marga dan Pematusan		Pengamanan Aset
	Program Pengelolaan Aset Tanah	Persentase aset tanah yang tercatat pemanfaatannya	N/A	N/A	N/A	N/A	81,30%	6,163,431,301	100,00%	6,261,669,402	100,00%	12,425,100,703	Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah	P2	Pengembangan program dengan menggunakan indikator baru	
	Lingkungan Hidup							589,252,766,779		596,980,418,159		1,186,233,184,938				
	Program Kebersihan	Persentase pengangkutan sampah dari TPS ke TPA ≤ 1 hari	N/A	N/A	N/A	N/A	84,86%	216,118,634,617	85,95%	218,878,113,573	85,95%	434,996,748,190	Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau	P2	Pengembangan program dengan perubahan indikator	
	Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Lingkup Lingkungan Hidup	Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan lingkup lingkungan hidup	N/A	N/A	N/A	N/A	78,00%	2,597,705,736	80,00%	2,632,368,391	80,00%	5,230,074,127	Dinas Lingkungan Hidup	P2	Refocusing program pada pelayanan perizinan dan non perizinan lingkup lingkungan hidup	
	Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah Mandiri	Tingkat pertumbuhan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah	N/A	N/A	N/A	N/A	8,75%	3,950,324,086	10,93%	3,972,065,124	10,93%	7,922,389,210	Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau	P2	Program baru	
	Program Pengadaan Prasarana Air Limbah Domestik Rumah Tangga	Persentase jamban yang memenuhi standar minimal ramah lingkungan	N/A	N/A	N/A	N/A	80,00%	1,883,569,278	85,00%	1,961,056,373	85,00%	3,844,625,651	Dinas Lingkungan Hidup	P2	Program baru	
	Program Pengelolaan Air Limbah Kota	Persentase instalasi pengolahan air limbah yang beroperasi dengan baik	N/A	N/A	N/A	N/A	100,00%	26,630,478,526	100,00%	27,077,093,286	100,00%	53,707,571,812	Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau	P2	Program baru	
	Program Pengelolaan dan Peningkatan Taman Hutan Raya	Persentase pertumbuhan luas taman hutan raya yang dipelihara dan diawasi	N/A	N/A	N/A	N/A	54,76%	25,235,077,537	60,19%	25,649,271,813	60,19%	50,884,349,350	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	P2	Refocusing Program	
	Program Pengelolaan dan Peningkatan Taman dan Jalur Hijau	Persentase pertumbuhan luas taman dan jalur hijau yang dipelihara dan diawasi	N/A	N/A	N/A	N/A	8,68%	87,966,004,930	10,24%	89,598,538,866	10,24%	177,564,543,796	Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau	P2	Refocusing program dari program sebelumnya yaitu program pengelolaan dan peningkatan ruang terbuka hijau	
	Program	Persentase fasilitas	N/A	N/A	N/A	N/A	30,77%	2,646,563,302	38,46%	2,690,977,289	38,46%	5,337,540,591	Dinas	P2	Refocusing	



Urusan-Program	Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD					Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan Program	Keterangan Perubahan	
		Realisasi			Target atau Realisasi (*)	Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja						
		2016	2017	2018	2019	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
	Pengelolaan Sampah dan Limbah	pengolahan sampah dengan teknologi 3R yang beroperasi dengan baik												Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau		program dari program sebelumnya yaitu Program pengelolaan kebersihan
	Program Pengendalian dan Pengawasan Dampak Lingkungan	Persentase ketaatan/kepatuhan terhadap aspek lingkungan	N/A	50.00%	63.50%	70.00%	80,00%	3,692,461,395	95,00%	3,735,332,680	95,00%	7,427,794,075	Dinas Lingkungan Hidup	P2	Program Berlanjut	
	Program Peningkatan Kapasitas Pemahaman dan Evaluasi Lingkungan Hidup	Persentase aspek lingkungan hidup yang dievaluasi	N/A	N/A	N/A	N/A	100,00%	3,317,604,955	100,00%	3,363,331,084	100,00%	6,680,936,039	Dinas Lingkungan Hidup	P2	Program baru	
		Persentase masyarakat yang kapasitas pemahaman lingkungan hidupnya meningkat	N/A	N/A	N/A	N/A	70,00%		75,00%		75,00%					
	Program Peningkatan Sarana Prasarana Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau	Persentase pembangunan fasilitas pengelolaan sampah yang menerapkan teknologi 3R	N/A	14.81%	14.81%	23.08%	30,77%	215,214,342,417	38,46%	217,422,269,680	38,46%	432,636,612,097	Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau	P2	Refocusing program dengan menggunakan indikator yang tersedia	
	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil							11,748,190,947		11,944,451,028		23,692,641,975				
	Program Pelayanan Administrasi Pencatatan Sipil	Cakupan penerbitan akte kelahiran	N/A	N/A	N/A	N/A	99,75%	1,052,910,487	99,94%	1,060,856,944	99,94%	2,113,767,431	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	P2	Refocusing program sesuai dengan tugas dan fungsi	
		Cakupan penerbitan akte kematian	N/A	N/A	N/A	N/A	88,00%		89,51%		89,51%					
		Persentase ketepatan waktu pelayanan dokumen pencatatan sipil (akte kelahiran dan akta kematian)	95.56%	100.00%	100.00%	93.94%	100,00%		100,00%		100,00%					
		Persentase ketepatan waktu pengurusan dokumen pencatatan	50.43%	95.33%	100.00%	99.69%	100,00%		100,00%		100,00%					



Urusan-Program	Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD					Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan Program	Keterangan Perubahan	
		Realisasi			Target atau Realisasi (*)	Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja						
		2016	2017	2018	2019	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
	sipil (akta kelahiran dan akta kematian)															
	Program Pelayanan Administrasi Pendaftaran Penduduk	Cakupan penerbitan KTP	N/A	N/A	N/A	N/A	92,00%	7,537,286,775	95,00%	7,688,088,975	95,00%	15,225,375,750	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	P2	Program baru	
		Persentase ketepatan waktu pelayanan dokumen pendaftaran penduduk (KTP dan KK)	100,00%	100,00%	99,46%	100,00%	100,00%		100,00%		100,00%					
	Program Pemanfaatan Data Kependudukan	Persentase peningkatan inovasi pelayanan	N/A	N/A	N/A	N/A	33,33%	1,258,849,419	66,66%	1,271,026,354	66,66%	2,529,875,773	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	P2	Program baru	
		Persentase sistem informasi intervensi masyarakat yang telah menggunakan data kependudukan	N/A	N/A	N/A	N/A	10,00%		20,00%		20,00%					
	Program Pengelolaan Data Administrasi Kependudukan	Persentase penurunan data ganda pada database SIAK	N/A	N/A	N/A	N/A	85,00%	1,899,144,266	90,00%	1,924,478,755	90,00%	3,823,623,021	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	P2	Refocusing program sesuai dengan tugas dan fungsi	
	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana							12,372,381,466		12,520,620,081		24,893,001,547				
	Program Keluarga Berencana	Persentase kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (unmeet need)	N/A	18,24%	19,78%	20,20%	19,47%	7,945,614,245	19,22%	8,030,137,258	19,22%	15,975,751,503	Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	P2	Program Berlanjut	
		Persentase peserta KB aktif	82,00%	80,96%	80,28%	79,60%	80,89%		80,95%		80,95%					
		Persentase peserta KB aktif yang drop out kontrasepsi	N/A	2,37%	3,20%	5,25%	2,99%		2,78%		2,78%					
		Persentase peserta KB baru	N/A	96,15%	97,90%	82,75%	97,92%		97,94%		97,94%					
	Program Peningkatan Ketahanan Keluarga	Persentase kelompok Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, dan Bina Keluarga Lansia yang	24,96%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	4,426,767,221	100,00%	4,490,482,823	100,00%	8,917,250,044	Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan	P2	Refocusing Program dengan menggabungkan Program Peningkatan	



Urusan-Program	Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD				Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan Program	Keterangan Perubahan	
		Realisasi			Target atau Realisasi (*)	Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja					
		2016	2017	2018		Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
	aktif												dan Perlindungan Anak		Keberdayaan Masyarakat, Program Pemanfaatan Rumah Kreatif dan Pengembangan Usaha Kreatif, dan Program Bina Keluarga.
	Persentase perempuan usia produktif dari hasil pendampingan yang berproduksi	N/A	N/A	N/A	N/A	19,67%		10,33%		10,33%					
	Perhubungan						191,099,479,633		194,063,907,813		385,163,387,446				
	Program Pelayanan Publik Lingkup Perhubungan	Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan lingkup perhubungan	N/A	N/A	N/A	N/A	78,00%	2,981,198,378	80,00%	2,988,829,236	80,00%	5,970,027,614	Dinas Perhubungan	P2	Refocusing program pada pelayanan perizinan dan non perizinan lingkup perhubungan
	Program Pembangunan dan Pemeliharaan Prasarana Transportasi	Persentase penyediaan prasarana pendukung transportasi berkelanjutan dalam kondisi baik	N/A	N/A	N/A	N/A	100,00%	50,755,284,337	100,00%	51,371,899,799	100,00%	102,127,184,136	Dinas Perhubungan	P2	Pengembangan program dengan menggunakan indikator baru
	Program Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Persentase kelulusan uji emisi kendaraan bermotor	N/A	91,22%	90,06%	81,00%	93,00%	25,006,117,087	94,00%	25,404,415,210	94,00%	50,410,532,297	Dinas Perhubungan	P2	Pengembangan program dengan menggunakan indikator baru
	Program Pengembangan Sistem Transportasi yang Berkelanjutan	Cakupan layanan angkutan trunk Suroboyo Bus	N/A	N/A	N/A	N/A	100,00%	34,695,441,566	100,00%	35,237,370,814	100,00%	69,932,812,380	Dinas Perhubungan	P2	Pengembangan program dengan menggunakan indikator baru
		Persentase angkutan umum dalam trayek yang memenuhi ketentuan perijinan	N/A	N/A	N/A	N/A	40,00%		40,00%		40,00%				
		Rata-rata waktu tempuh kendaraan barang pada rute tertentu	N/A	44,34 menit	100,22 menit	100,33 menit	95,05 menit		90,30 menit		90,30 menit				
	Program Peningkatan	Kecepatan rata-rata kendaraan di jalan	N/A	28,60 km/jam	49,73 km/jam	31,27 km/jam	39,00 km/jam	77,661,438,265	40,00 km/jam	79,061,392,754	40,00 km/jam	156,722,831,019	Dinas Perhubungan	P2	Pengembangan program



Urusan-Program	Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD					Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan Program	Keterangan Perubahan	
		Realisasi			Target atau Realisasi (*)	Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja						
		2016	2017	2018		2019	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
	Sistem Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	kewenangan kota														
		Persentase selisih tingkat kecelakaan lalu lintas	N/A	7.73%	11.71%	2.00%	2,00%		2,00%		2,00%					
	Komunikasi dan Informatika serta Persandian							75,861,491,546		77,166,529,554		153,028,021,100				
	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase layanan publik administratif yang berbasis TIK	N/A	31.56%	35.11%	38.65%	53,85%	27,742,226,276	58,37%	28,039,717,342	58,37%	55,781,943,618	Dinas Komunikasi dan Informatika	P2	Pengembangan program dengan mengikuti nomenklatur dari Kementerian Komunikasi dan Informatika	
	Program Pengelolaan informasi dan Komunikasi Publik	Rata-rata pemanfaatan publik terhadap berbagai saluran komunikasi informasi yang disediakan oleh Pemerintah Kota Surabaya	N/A	N/A	N/A	N/A	32,000 Kunjungan	6,805,119,319	32,414 Kunjungan	6,880,173,679	32,414 Kunjungan	13,685,292,998	Dinas Komunikasi dan Informatika	P2	Pengembangan program dengan mengikuti nomenklatur dari Kementerian Komunikasi dan Informatika	
	Program Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Persentase pengelolaan sarana TIK pendukung pelayanan publik	N/A	N/A	N/A	N/A	100,00%	41,314,145,951	100,00%	42,246,638,533	100,00%	83,560,784,484	Dinas Komunikasi dan Informatika	P2	Program baru	
	Urusan Pilihan							43,323,880,343		44,160,618,144		87,484,498,487				
	Non Pelayanan Dasar							43,323,880,343		44,160,618,144		87,484,498,487				
	Pariwisata							14,481,698,344		14,672,985,346		29,154,683,690				
	Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Lingkup Pariwisata	Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan lingkup pariwisata	N/A	N/A	N/A	N/A	60,00%	722,393,411	65,00%	727,578,049	65,00%	1,449,971,460	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	P2	Refocusing program berdasarkan tugas dan fungsi.	
	Program Pemasaran Pariwisata	Persentase kunjungan di objek wisata terhadap kunjungan wisatawan	N/A	46.35%	48.03%	47.74%	50,01%	6,240,995,764	52,27%	6,310,965,651	52,27%	12,551,961,415	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	P2	Program Berlanjut	
	Program Pengembangan Destinasi Wisata	Persentase ODTW yang berhasil dikembangkan	N/A	36.36%	46.15%	36.00%	69,23%	6,803,024,286	76,92%	6,913,683,166	76,92%	13,716,707,452	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	P2	Program Berlanjut	
	Program Pengembangan	Tingkat capaian kesepakatan dengan	N/A	20.00%	60.00%	60.00%	80,00%	715,284,883	100,00%	720,758,480	100,00%	1,436,043,363	Dinas Kebudayaan	P2	Program Berlanjut	



Urusan-Program	Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD					Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan Program	Keterangan Perubahan	
		Realisasi			Target atau Realisasi (*)	Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja						
		2016	2017	2018		2019	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
	Kerjasama dengan Stakeholder Bidang Pariwisata	stakeholder bidang pariwisata yang dilaksanakan 5 kesepakatan												dan Pariwisata		
	Energi dan Sumber Daya Mineral							3,365,651,336		3,486,024,538		6,851,675,874				
	Program Pengembangan dan Pemanfaatan Energi Alternatif	Akumulasi entitas lingkungan yang berperan serta dalam pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif	N/A	6 lingkungan	7 lingkungan	10 lingkungan	11 lingkungan	359,801,940	13 lingkungan	364,334,296	13 lingkungan	724,136,236	Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau	P3	Refocusing program dengan menggunakan indikator yang tersedia	
	Program Pengembangan dan Pemanfaatan Energi Alternatif di Gedung Milik Pemerintah Kota	Akumulasi penerapan teknologi dalam pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif terbarukan di gedung milik pemerintah kota	N/A	N/A	N/A	N/A	45 Unit	2,453,793,990	49 Unit	2,562,086,022	49 Unit	5,015,880,012	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang	P3	Pengembangan program	
	Program Upaya Konservasi Energi	Akumulasi kegiatan dan/atau usaha yang telah menerapkan konservasi energi	N/A	125 kegiatan dan /atau usaha	245 kegiatan dan /atau usaha	144 kegiatan dan /atau usaha	154 kegiatan dan /atau usaha	552,055,406	164 kegiatan dan /atau usaha	559,604,220	164 kegiatan dan /atau usaha	1,111,659,626	Dinas Lingkungan Hidup	P3	Program Berlanjut	
	Perdagangan							8,005,957,274		8,104,499,586		16,110,456,860				
	Program Distribusi Perdagangan	Frekuensi fasilitasi pelaku distribusi perdagangan	N/A	N/A	N/A	N/A	17 kali	2,999,457,610	17 kali	3,031,780,121	17 kali	6,031,237,731	Dinas Perdagangan	P2	Program Baru	
		Frekuensi intervensi ketersediaan komoditas	N/A	16 kali/kejadian	19 kali/kejadian	15 kali/kejadian	31 kali/kejadian				31 kali/kejadian					
		Tingkat kelengkapan data gudang terdaftar	N/A	58.27%	69.59%	75.00%	80,00%				85,00%					
	Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Lingkup Perdagangan	Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan lingkup perdagangan	N/A	N/A	N/A	N/A	78,00%	1,639,982,976	80,00%	1,663,155,597	80,00%	3,303,138,573	Dinas Perdagangan	P2	Refocusing program berdasarkan tugas dan fungsi.	
	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Persentase temuan yang ditindaklanjuti	N/A	100.00%	100.00%	80.00%	85,00%	3,366,516,688	90,00%	3,409,563,868	95,00%	6,776,080,556	Dinas Perdagangan	P3	Program Berlanjut	
	Kelautan dan Perikanan							5,539,059,297		5,635,904,488		11,174,963,785				
	Program Pengaplikasian Teknologi Tepat	Persentase pembudidaya perikanan dan	N/A	30.38%	35.43%	50.00%	65,00%	461,003,460	80,00%	465,098,315	80,00%	926,101,775	Dinas Ketahanan Pangan dan	P2		



Urusan-Program	Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD					Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan Program	Keterangan Perubahan	
		Realisasi			Target atau Realisasi (*)	Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja						
		2016	2017	2018	2019	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
	Guna Perikanan dan Kelautan	kelautan yang mengaplikasikan teknologi tepat guna dalam proses budidaya												Pertanian		
	Program Penyediaan Sarana Prasarana Kelautan dan Perikanan	Persentase pembudidaya yang memanfaatkan fasilitas sarana dan prasarana perikanan dan kelautan	N/A	14.21%	13.38%	14.00%	15,00%	5,078,055,837	16,00%	5,170,806,173	16,00%	10,248,862,010	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	P2	Program Berlanjut	
	Pertanian							11,931,514,092		12,261,204,186		24,192,718,278				
	Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Lingkup Pertanian	Persentase ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan lingkup pertanian	N/A	N/A	N/A	N/A	78,00%	216,538,320	80,00%	218,595,840	80,00%	435,134,160	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	P2	Refocusing program berdasarkan tugas dan fungsi.	
	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hewan Ternak	Persentase populasi hewan ternak yang mendapatkan vaksinasi dan pengobatan	N/A	85.84%	87.74%	85.00%	88,00%	1,142,341,245	88,50%	1,163,947,096	88,50%	2,306,288,341	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	P2	Program Berlanjut	
	Program Pengaplikasian Teknologi Tepat Guna dalam Budidaya Peternakan	Persentase pembudidaya ternak yang mengaplikasikan teknologi tepat guna dalam proses budidaya	N/A	25.00%	37.81%	50.00%	65,00%	778,933,564	80,00%	806,672,468	80,00%	1,585,606,032	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	P2	Program Berlanjut	
	Program Pengaplikasian Teknologi Tepat Guna dalam Budidaya Tanaman Pangan dan Hortikultura	Persentase pembudidaya tanaman pangan dan hortikultura yang mengaplikasikan teknologi tepat guna dalam proses budidaya	N/A	25.77%	36.31%	14.00%	65,00%	6,314,392,805	80,00%	6,523,541,871	80,00%	12,837,934,676	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	P2	Program Berlanjut	
	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Pertanian dan Perikanan Kelautan	Persentase pembudidaya yang omzetnya meningkat	N/A	61.00%	67.49%	63.00%	67,50%	904,721,910	67,60%	908,007,753	67,60%	1,812,729,663	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	P2	Program Berlanjut	
	Program Penyediaan Sarana Prasarana Budidaya Tanaman Pangan dan	Persentase pembudidaya tanaman pangan dan hortikultura yang memanfaatkan fasilitas sarana dan prasarana produksi	N/A	12.03%	15.31%	14.00%	16,00%	2,574,586,248	17,00%	2,640,439,158	17,00%	5,215,025,406	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	P2	Program Berlanjut	



Urusan-Program	Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD					Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan Program	Keterangan Perubahan
		Realisasi			Target atau Realisasi (*)	Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja					
		2016	2017	2018		Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
Hortikultura															
Fungsi Penunjang Urusan								1,474,576,208,018		1,489,032,415,178		2,963,608,623,196			
Fungsi Manajemen								845,710,730,007		850,165,828,219		1,695,876,558,226			
Non Pelayanan Dasar								845,710,730,007		850,165,828,219		1,695,876,558,226			
Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah								790,655,276,066		794,140,191,553		1,584,795,467,619			
Program Fasilitasi Informasi dan Protokol DPRD	Persentase kegiatan DPRD terkait informasi dan protokol yang terfasilitasi	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	100,00%	82,906,464,081	100,00%	83,608,376,385	100,00%	166,514,840,466	Sekretariat DPRD	P2	Program Berlanjut	
Program Fasilitasi Kegiatan Kewilayahan	Terfasilitasinya kegiatan kewilayahan sesuai dengan Berita Acara kesepakatan	N/A	N/A	N/A	N/A	100,00%	471,152,353,268	100,00%	471,152,353,268	100,00%	942,304,706,536	Kec. Asemrowo, Kec. Benowo, Kec. Bubutan, Kec. Bulak, Kec. Dukuh Pakis, Kec. Gayungan, Kec. Genteng, Kec. Gubeng, Kec. Gunung Anyar, Kec. Jambangan, Kec. Karangpilang, Kec. Kenjeran, Kec. Krembangan, Kec. Lakarsantri, Kec. Mulyorejo, Kec. Pabean Cantian, Kec. Pakal, Kec. Rungkut, Kec. Sambikerep, Kec. Sawahan, Kec. Semampir, Kec. Simokerto, Kec. Sukolilo, Kec. Sukomanung	P3		



Urusan-Program	Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD					Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan Program	Keterangan Perubahan	
		Realisasi			Target atau Realisasi (*)	Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja						
		2016	2017	2018		2019	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terfasilitasi	N/A	N/A	N/A	N/A	100,00%	66,270,787,094	100,00%	67,363,471,393	100,00%	133,634,258,487	al, Kec. Tambaksari, Kec. Tandes, Kec. Tegalsari, Kec. Tenggilis Mejoyo, Kec. Wiyung, Kec. Wonocolo, Kec. Wonokromo	P3	Program baru sesuai dengan tugas dan fungsi.		
												Kec. Asemrowo, Kec. Benowo, Kec. Bubutan, Kec. Bulak, Kec. Dukuh Pakis, Kec. Gayungan, Kec. Genteng, Kec. Gubeng, Kec. Gunung Anyar, Kec. Jambangan, Kec. Karangpilang, Kec. Kenjeran, Kec. Krembangan, Kec. Lakarsantri, Kec. Mulyorejo, Kec. Pabean Cantian, Kec. Pakal, Kec. Rungkut, Kec. Sambikerep, Kec. Sawahan, Kec. Semampir, Kec. Simokerto, Kec. Sukolilo, Kec. Sukomanunggal, Kec. Tambaksari, Kec. Tandes, Kec. Tegalsari, Kec. Tenggilis				



Urusan-Program	Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD					Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan Program	Keterangan Perubahan
		Realisasi			Target atau Realisasi (*)	Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja					
		2016	2017	2018		2019	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
													Mejoyo, Kec. Wiyung, Kec. Wonocolo, Kec. Wonokromo		
	Program Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Sekretariat DPRD	Persentase kegiatan peningkatan kapasitas Sekretariat DPRD yang terfasilitasi	N/A	N/A	N/A	N/A	100,00%	3,683,898,025	100,00%	3,716,522,354	100,00%	7,400,420,379	Sekretariat DPRD	P2	Program Baru
	Program Fasilitasi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kegiatan kesra yang terfasilitasi	N/A	N/A	N/A	N/A	100,00%	17,317,313,956	100,00%	17,396,695,522	100,00%	34,714,009,478	Kec. Asemrowo, Kec. Benowo, Kec. Bubutan, Kec. Bulak, Kec. Dukuh Pakis, Kec. Gayungan, Kec. Genteng, Kec. Gubeng, Kec. Gunung Anyar, Kec. Jambangan, Kec. Karangpilang, Kec. Kenjeran, Kec. Krembangan, Kec. Lakarsantri, Kec. Mulyorejo, Kec. Pabean Cantian, Kec. Pakal, Kec. Rungkut, Kec. Sambikerep, Kec. Sawahan, Kec. Semampir, Kec. Simokerto, Kec. Sukolilo, Kec. Sukomanunggal, Kec. Tambaksari, Kec. Tandes, Kec. Tegalsari,	P3	Program baru sesuai dengan tugas dan fungsi.



Urusan-Program	Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD					Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan Program	Keterangan Perubahan
		Realisasi			Target atau Realisasi (*)	Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja					
		2016	2017	2018		2019	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
													Kec. Tenggilis Mejoyo, Kec. Wiyung, Kec. Wonocolo, Kec. Wonokromo		
	Persentase terlayannya administrasi kependudukan di kecamatan	N/A	99.43%	99.14%	100.00%	100,00%			100,00%		100,00%				
Program Fasilitasi Peningkatan Sarana Prasarana Wilayah	Persentase kegiatan sarana prasarana wilayah yang terfasilitasi	N/A	N/A	N/A	N/A	100,00%	23,189,533,606	100,00%	23,284,767,971	100,00%	46,474,301,577	Kec. Asemrowo, Kec. Benowo, Kec. Bubutan, Kec. Bulak, Kec. Dukuh Pakis, Kec. Gayungan, Kec. Genteng, Kec. Gubeng, Kec. Gunung Anyar, Kec. Jambangan, Kec. Karangpilang, Kec. Kenjeran, Kec. Krembangan, Kec. Lakarsantri, Kec. Mulyorejo, Kec. Pabean Cantian, Kec. Pakal, Kec. Rungkut, Kec. Sambikerep, Kec. Sawahan, Kec. Semampir, Kec. Simokerto, Kec. Sukolilo, Kec. Sukomanunggal, Kec. Tambaksari, Kec. Tandes, Kec. Tegalsari,	P3	Program baru sesuai dengan tugas dan fungsi.	



Urusan-Program	Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD					Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan Program	Keterangan Perubahan	
		Realisasi			Target atau Realisasi (*)	Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja						
		2016	2017	2018		2019	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
	Program Fasilitasi Rapat dan Perundang-Undangan DPRD	Persentase kegiatan DPRD terkait rapat dan perundang-undangan yang terfasilitasi	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	100,00%	7,797,727,280	100,00%	7,897,834,642	100,00%	15,695,561,922	Kec. Tenggilis Mejoyo, Kec. Wiyung, Kec. Wonocolo, Kec. Wonokromo			
	Program Pembinaan Peningkatan Kinerja BUMD	Persentase BUMD yang berhasil dibina	N/A	N/A	N/A	N/A	67,00%	1,162,871,681	78,00%	1,179,293,358	78,00%	2,342,165,039	Sekretariat DPRD	P2	Program Berlanjut	
	Program Penataan Daerah Otonom	Persentase kelurahan yang data profil kelurahannya update	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	100,00%	5,043,441,055	100,00%	5,108,645,374	100,00%	10,152,086,429	Bagian Administrasi Perekonomian Dan Usaha Daerah	P3	Refocusing Program dengan perubahan indikator	
		Persentase nama rupabumi yang memenuhi syarat untuk diajukan pembakuan	N/A	32.50%	64.00%	71.27%	85,65%		100,00%		100,00%					
		Persentase pendataan batas wilayah kecamatan	N/A	N/A	N/A	N/A	45,16%		64,52%		64,52%					
		Persentase permasalahan tanah yang terfasilitasi	N/A	N/A	N/A	N/A	60,00%		60,00%		60,00%					
	Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Persentase instansi yang memiliki POS sesuai probis	N/A	N/A	N/A	N/A	74,29%	2,309,210,098	100,00%	2,343,228,215	100,00%	4,652,438,313	Bagian Administrasi Pemerintahan Dan Otonomi Daerah	P3	Program berlanjut dengan penambahan indikator sesuai dengan tugas dan fungsi.	
		Persentase instansi yang probisnya telah menggambarkan keterhubungan antar proses	N/A	N/A	N/A	N/A	50,00%		100,00%		100,00%					
		Persentase kinerja unit penyelenggara pelayanan yang minimal mutu pelayanannya kategori baik	N/A	N/A	N/A	N/A	70,00%		70,00%		70,00%					
	Program Penataan	Persentase permasalahan hukum	100%	100.00%	100.00%	100,00%	100,00%	5,546,035,566	100,00%	5,613,658,238	100,00%	11,159,693,804	Bagian Administrasi Pemerintahan Dan Otonomi Daerah	P3	Refocusing program dengan perubahan indikator	



Urusan-Program	Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD					Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan Program	Keterangan Perubahan	
		Realisasi			Target atau Realisasi (*)	Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja						
		2016	2017	2018		2019	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
	Peraturan Perundang-Undangan	yang ditindaklanjuti														
		Persentase produk hukum daerah yang dievaluasi	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%		100,00%		100,00%					
		Persentase produk hukum yang disebarluaskan	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%		100,00%		100,00%					
		Persentase realisasi produk hukum daerah yang dihasilkan	N/A	100.00%	103.80%	100.00%	100.00%		100,00%		100,00%					
	Program Pendukung Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Persentase terlaksananya urusan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sesuai dengan standar	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	14,268,801,353	100,00%	14,568,228,045	100,00%	28,837,029,398	Bagian Umum Dan Protokol	P3	Program Berlanjut	
	Program Pengelolaan Bangunan Gedung	Persentase bangunan gedung yang dipelihara	N/A	N/A	N/A	N/A	100,00%	18,887,283,706	100,00%	19,155,141,117	100,00%	38,042,424,823	Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah	P2	Refocusing Program	
	Program Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah Bidang Kesejahteraan Rakyat	Persentase rekomendasi kajian/evaluasi yang mendapat arahan dari pimpinan	N/A	N/A	N/A	N/A	100,00%	1,212,153,659	100,00%	1,221,315,822	100,00%	2,433,469,481	Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat	P3	Program berlanjut dengan indikator baru	
	Program Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah Lingkup Kehumasan	Persentase berita positif Pemerintah Kota Surabaya yang terinformasikan kepada masyarakat	86.50%	89.99%	87.95%	84.00%	85,00%	11,525,688,792	85,00%	11,610,447,682	85,00%	23,136,136,474	Bagian Hubungan Masyarakat	P3	Penggabungan program dengan menggunakan indikator baru	
	Program Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah Lingkup Pembangunan	Persentase kegiatan yang penyerapan anggarannya ≥ 76%	N/A	N/A	N/A	N/A	94,00%	4,795,815,551	94,50%	4,862,953,671	94,50%	9,658,769,222	Bagian Administrasi Pembangunan	P2	Program Baru	
	Program Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah lingkup Pengelolaan	Persentase kendaraan yang berfungsi dengan baik	76.51%	76.55%	100.00%	81.00%	88,00%	44,117,959,977	90,00%	44,496,499,417	90,00%	88,614,459,394	Bagian Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Aset	P3	Refocusing program berdasarkan tugas dan fungsi.	



Urusan-Program	Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD					Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan Program	Keterangan Perubahan	
		Realisasi			Target atau Realisasi (*)	Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja						
		2016	2017	2018	2019	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
	Aset															
		Persentase pemanfaatan aset	N/A	95.70%	98.27%	93.00%	96,00%			97,00%		97,00%				
		Persentase sistem informasi pemerintah kota surabaya yang diintegrasikan dengan sistem informasi barang daerah	N/A	20.00%	40.00%	60.00%	80,00%			100,00%		100,00%				
	Program Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah Lingkup Perencanaan	Persentase kajian/rekomendasi terkait perekonomian yang dimanfaatkan sebagai dasar kebijakan/keputusan	N/A	50.00%	40.00%	25.00%	100,00%	723,169,840	100,00%	732,265,066	100,00%	1,455,434,906	Bagian Administrasi Perekonomian Dan Usaha Daerah	P3	Refocusing program dengan penyesuaian narasi program.	
	Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja	Persentase instansi yang nilai akuntabilitas kinerjanya minimal BB	N/A	N/A	N/A	N/A	84,72%	339,691,859	100,00%	344,572,128	100,00%	684,263,987	Bagian Organisasi	P2	Program Baru	
	Program Peningkatan Kerjasama Daerah	Persentase MoU kerjasama antar pemerintah daerah dan pihak ketiga yang ditindaklanjuti	N/A	N/A	N/A	N/A	95,00%	8,405,075,619	100,00%	8,483,921,885	100,00%	16,888,997,504	Bagian Administrasi Kerjasama	P3	Refocusing program sesuai dengan tugas dan fungsi	
		Persentase MoU kerjasama luar negeri yang ditindaklanjuti	N/A	N/A	N/A	N/A	87,50%			100,00%		100,00%				
		Persentase MoU kerjasama yang dievaluasi	N/A	N/A	N/A	N/A	85,00%			100,00%		100,00%				
	Keuangan							33,648,635,084		34,410,457,256		68,059,092,340				
	Program Penagihan Pajak Daerah	Persentase tagihan piutang pajak daerah yang terbayar	N/A	N/A	N/A	N/A	84,50%	4,584,028,527	85,00%	4,673,776,648	85,00%	9,257,805,175	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah	P2	Refocusing program berdasarkan tugas dan fungsi.	
	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen pertanggungjawaban keuangan	N/A	N/A	N/A	N/A	90,00%	4,044,714,215	90,00%	4,141,317,093	90,00%	8,186,031,308	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah	P2	Refocusing program berdasarkan tugas dan fungsi.	
	Program Peningkatan Pendataan dan Penetapan Objek Pajak Daerah	Persentase objek pajak daerah yang telah ditetapkan	N/A	N/A	N/A	N/A	84,00%	23,582,611,782	85,00%	24,133,807,307	85,00%	47,716,419,089	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah	P2	Refocusing program berdasarkan tugas dan fungsi.	
	Program Perencanaan Anggaran	Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen anggaran	N/A	N/A	N/A	N/A	75,00%	1,437,280,560	75,00%	1,461,556,208	75,00%	2,898,836,768	Badan Pengelolaan Keuangan dan	P2	Refocusing program berdasarkan	



Urusan-Program	Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD					Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan Program	Keterangan Perubahan	
		Realisasi			Target atau Realisasi (*)	Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja						
		2016	2017	2018		Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
Daerah																
Pengawasan								3,781,383,260		3,793,758,934		7,575,142,194	Pajak Daerah			tugas dan fungsi.
Program Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Persentase Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang ditingkatkan kapabilitasnya	N/A	N/A	N/A	N/A	100,00%	694,160,380	100,00%	699,113,731	100,00%	1,393,274,111	Inspektorat	P2	Refocusing program berdasarkan tugas dan fungsi.		
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Wilayah I	Persentase penanganan disiplin aparatur wilayah I	N/A	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	823,623,170	100,00%	825,458,883	100,00%	1,649,082,053	Inspektorat	P2	Refocusing program berdasarkan tugas dan fungsi.		
	Persentase penanganan tata kelola administrasi keuangan wilayah I	N/A	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%		100,00%						
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Wilayah II	Persentase penanganan disiplin aparatur wilayah II	N/A	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	749,015,270	100,00%	750,866,526	100,00%	1,499,881,796	Inspektorat	P2	Refocusing program berdasarkan tugas dan fungsi.		
	Persentase penanganan tata kelola administrasi keuangan wilayah II	N/A	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%		100,00%						
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Wilayah III	Persentase penanganan disiplin aparatur wilayah III	N/A	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	794,145,270	100,00%	796,044,911	100,00%	1,590,190,181	Inspektorat	P2	Refocusing program berdasarkan tugas dan fungsi.		
	Persentase penanganan tata kelola administrasi keuangan wilayah III	N/A	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%		100,00%						
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Wilayah IV	Persentase penanganan disiplin aparatur wilayah IV	N/A	N/A	N/A	N/A	100,00%	720,439,170	100,00%	722,274,883	100,00%	1,442,714,053	Inspektorat	P2	Refocusing program berdasarkan tugas dan fungsi.		
	Persentase penanganan tata kelola administrasi keuangan wilayah IV	N/A	N/A	N/A	N/A	100,00%		100,00%		100,00%						
Perencanaan							17,625,435,597		17,821,420,476		35,446,856,073					



Urusan-Program	Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD				Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan Program	Keterangan Perubahan	
		Realisasi			Target atau Realisasi (*)	Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja					
		2016	2017	2018		2019	Target	Rp	Target	Rp	Target				Rp
	serta Penelitian dan Pengembangan														
	Program Penelitian, Pengembangan dan Evaluasi Pembangunan	Persentase rekomendasi penelitian, pengembangan dan evaluasi yang ditindaklanjuti	N/A	N/A	N/A	N/A	100,00%	1,448,473,380	100,00%	1,466,167,573	100,00%	2,914,640,953	Badan Perencanaan Pembangunan	P2	Program baru
		Tingkat capaian keberhasilan kegiatan di aspek output	N/A	97.50%	94.45%	98.00%	99,00%		100,00%		100,00%				
	Program Pengembangan Data dan Informasi	Persentase data indikator RPJMD yang dapat disediakan	N/A	N/A	N/A	N/A	100,00%	1,424,314,518	100,00%	1,443,668,484	100,00%	2,867,983,002	Badan Perencanaan Pembangunan	P2	Program baru
	Program Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	N/A	N/A	N/A	N/A	100,00%	5,062,906,267	100,00%	5,088,737,951	100,00%	10,151,644,218	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan, Bagian Umum Dan Protokol, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan, Dinas Pendidikan, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang, Inspektorat, RSUD Bhakti Dharma Husada,	P2	Pengembangan program sesuai dengan tugas dan fungsi



Urusan-Program	Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD					Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan Program	Keterangan Perubahan
		Realisasi			Target atau Realisasi (*)	Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja					
		2016	2017	2018	2019	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
													RSUD Dr. Mohamad Soewandie		
	Program Perencanaan Kota	Persentase penyusunan rencana induk sektoral	N/A	64.29%	71.43%	85.71%	92,86%	2,127,817,581	100,00%	2,160,880,974	100,00%	4,288,698,555	Badan Perencanaan Pembangunan	P2	Perubahan Pada Narasi Program
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan strategis dan/atau sektoral	N/A	96.15%	98.61%	100.00%	100,00%	1,385,976,613	100,00%	1,405,609,677	100,00%	2,791,586,290	Badan Perencanaan Pembangunan	P2	Program berlanjut
	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Persentase perencanaan pembangunan ekonomi yang diimplementasikan di dokumen perencanaan	N/A	N/A	N/A	N/A	80,00%	2,423,165,041	85,00%	2,455,628,308	85,00%	4,878,793,349	Badan Perencanaan Pembangunan	P2	Penyesuaian program sesuai dengan Tusi masing masing bidang pengampu
	Program Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Wilayah	Persentase perencanaan pembangunan sarana dan prasarana wilayah yang diimplementasikan	N/A	N/A	N/A	N/A	80,00%	1,852,713,606	85,00%	1,880,696,521	85,00%	3,733,410,127	Badan Perencanaan Pembangunan	P2	Penyesuaian program sesuai dengan Tusi masing masing bidang pengampu
	Program Perencanaan Pembangunan Sosial dan Pemerintahan	Persentase perencanaan pembangunan sosial dan pemerintahan yang diimplementasikan di dokumen perencanaan	N/A	N/A	N/A	N/A	80,00%	1,900,068,591	85,00%	1,920,030,988	85,00%	3,820,099,579	Badan Perencanaan Pembangunan	P2	Penyesuaian program sesuai dengan Tusi masing masing bidang pengampu
	Unsur Manajemen							628,865,478,011		638,866,586,959		1,267,732,064,970			
	Non Pelayanan Dasar							628,865,478,011		638,866,586,959		1,267,732,064,970			
	Sarana dan Prasarana Perkantoran							615,863,803,802		625,729,425,759		1,241,593,229,561			
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	N/A	77.23%	86.97%	76.00%	87,00 %	522,034,818,478	88,00 %	530,459,990,069	88,00 %	1,052,494,808,547	Seluruh Perangkat Daerah	P3	Program Berlanjut
	Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan	Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran	N/A	99.35%	99.11%	100.00%	100,00%	93,828,985,324	100,00%	95,269,435,690	100,00%	189,098,421,014	Seluruh Perangkat Daerah	P3	Program Berlanjut



Urusan-Program	Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD				Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan Program	Keterangan Perubahan	
		Realisasi			Target atau Realisasi (*)	Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja					
		2016	2017	2018	2019	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
	Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	N/A	94.29%	94.71%	100.00%	100,00%		100,00%		100,00%					
	Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan						13,001,674,209		13,137,161,200		26,138,835,409				
	Program Pengembangan dan Penilaian Kinerja Pegawai	N/A	N/A	N/A	N/A	100,00%	4,187,998,064	100,00%	4,236,649,709	100,00%	8,424,647,773	Badan Kepegawaian dan Diklat	P2	Refocusing program berdasarkan tugas dan fungsi.	
	Program Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM	N/A	N/A	N/A	N/A	50,03%	6,317,639,957	52,03%	6,374,461,171	52,03%	12,692,101,128	Badan Kepegawaian dan Diklat	P2	Program berlanjut dengan perubahan narasi	
	Persentase pejabat struktural yang mengikuti diklat struktural	N/A	N/A	N/A	N/A	65,06%		65,06%		65,06%					
	Program Peningkatan Pelayanan dan Penataan Pegawai	N/A	N/A	N/A	N/A	100,00%	2,496,036,188	100,00%	2,526,050,320	100,00%	5,022,086,508	Badan Kepegawaian dan Diklat	P2	Refocusing program berdasarkan tugas dan fungsi.	
							7,257,777,775,447		7,355,180,827,761		14,612,958,603,208				



BAB VIII

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Indikator Kinerja Daerah adalah alat ukur kuantitatif untuk mengetahui dampak dari pembangunan daerah yang telah dilaksanakan. Tujuan dalam penetapan Indikator Kinerja Daerah adalah memberikan gambaran tentang pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Indikator yang termasuk dalam Indikator Kinerja Daerah merupakan indikator kinerja yang terdiri dari Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci, dimana Indikator Kinerja Utama merupakan indikator tujuan kota, sedangkan Indikator Kinerja Kunci merupakan indikator sasaran kota yang menjadi tujuan dari Perangkat Daerah.

Keberhasilan pencapaian visi dan misi tersebut dapat diukur dari tiga aspek pencapaian kinerja melalui aspek kesejahteraan, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Keberhasilan kinerja pada aspek tersebut ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* dari sasaran pembangunan daerah atau ditunjukkan dari pencapaian indikator yang bersifat mandiri setingkat *impact* yang dipantau capaiannya serta diukur keberhasilannya pada akhir tahun masa berlaku dokumen.

Aspek kesejahteraan masyarakat diukur melalui indikator makro yang melingkupi kebutuhan dasar masyarakat/warga Kota Surabaya terkait pembangunan manusia, ketertiban dan ketentraman, pemerataan pendapatan, dan kesempatan kerja. Aspek pelayanan umum mengukur kinerja Pemerintah Kota dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah antara lain pengarusutamaan gender, kualitas lingkungan hidup dan persampahan, perumahan dan kawasan permukiman, pemerataan pembangunan infrastruktur, dan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik. Sedangkan aspek daya saing daerah merupakan indikator yang mengukur kemampuan daerah dalam mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan (*sustainable growth*) didukung oleh pertumbuhan volume komoditi keluar masuk Kota Surabaya, serta masyarakat yang menerapkan budaya lokal dalam sendi-sendi kehidupan.

Indikator kinerja daerah sebagai indikator kinerja utama (*key performance indicators*) berdasarkan uraian tersebut di atas sebagai alat ukur menilai kinerja



organisasi, maka indikator kinerja daerah ditetapkan dengan memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Terkait dengan upaya pencapaian sasaran pembangunan daerah;
2. Menggunakan indikator pencapaian sasaran dan program pembangunan yang diharapkan;
3. Memfokuskan pada hal-hal utama, kearifan lokal yang penting dan sinergi dengan pembangunan antar jenjang pemerintahan;
4. Terkait dengan penanggung jawab pelaksanaan pembangunan daerah.

Secara rinci, dapat dilihat pada Tabel VIII.1 dan Tabel VIII.2.



Tabel VIII.1
Penetapan Indikator Kinerja Utama Kota Surabaya (Tabel T-C.17)

No.	Indikator	Capaian			Target		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Indeks Pembangunan Manusia	80,38	81,07	81,74	80-81	81-82	81-82
2	Persentase Penduduk Miskin	N/A	N/A	N/A	N/A	4,75-4,70%	4,71-4,6%
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	N/A	5,98%	6,12%	6,47%	6,40%-5,95%	6,30%-5,90%
4	Indeks Ketertiban dan Ketenteraman Kota	1,39	1,45	1,73	0,99	1,01	1,04
5	Indeks Infrastruktur Kota	N/A	N/A	N/A	N/A	0,80	0,84
6	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Persampahan (IKLHS)	62,09	64,86	64,91	64,90	65,00	65,10
7	Indeks Budaya Lokal	N/A	70,73%	78,39%	79,61%	80%	81,50%
8	Pertumbuhan Ekonomi	6,00	6,13	N/A	N/A	6,3 - 6,7	6,3 - 6,8
9	Indeks Gini	0,41	0,39	0,375	0,38-0,37	0,38-0,37	0,38-0,37
10	Persentase luas kawasan permukiman kumuh	N/A	0,73%	0,25%	0,28%	0,22%	0,00%
11	Indeks Reformasi Birokrasi	N/A	N/A	N/A	N/A	BB	A



Tabel VIII.2
Penetapan Indikator Kinerja Daerah
Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Kota Surabaya

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada Awal periode RPJMD		Target 2019	Target Capaian Setiap Tahun		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2017	2018		2020	2021	
1	Aspek Kesejahteraan Masyarakat						
1.1	Persentase luas kawasan permukiman kumuh prioritas	N/A	N/A	0,28%	0,22%	0%	0%
	<i>Perumahan dan Kawasan Permukiman</i>						
1.1.1	Kawasan permukiman yang telah ditingkatkan kualitas lingkungannya	4,053.29 Ha	6,086.26 Ha	8295,64 Ha	9.853,57 Ha	11.437,03 Ha	11.437,03 Ha
1.2	Indeks Pembangunan Manusia	81,07	81,74	80-81	81-82	81-82	81-82
	<i>Kesehatan</i>						
1.2.1	Angka Harapan Hidup (AHH)	73.88	73.98	73.89	73,9	73,91	73,91
	<i>Pangan</i>						
1.2.2	Indeks Ketahanan Pangan	N/A	N/A	N/A	0.93	0.933	0.933
	<i>Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</i>						
1.2.3	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	93,66	93,65	93,68	93,69	93,7	93,7
	<i>Pendidikan</i>						
1.2.4	Indeks Pendidikan	N/A	N/A	N/A	79,23	80,16	80,16
1.2.5	Indeks Minat Baca Masyarakat	N/A	N/A	N/A	0,5	0,6	0,6



No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah		Kondisi Kinerja pada Awal periode RPJMD		Target	Target Capaian Setiap Tahun		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2017	2018	2019	2020	2021	
1.3	Persentase Penduduk Miskin		N/A	N/A	N/A	4,75-4,70%	4,71-4,6%	4,71-4,6%
	<i>Sosial</i>							
1.3.1	Persentase PMKS yang tertangani		N/A	N/A	N/A	45,00%	45,00%	45,00%
2	Aspek Daya Saing Daerah							
2.1	Indeks Infrastruktur Kota		N/A	N/A	N/A	0,8	0,84	0,84
	<i>Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</i>							
2.1.1	Indeks Genangan		26.52%	41.53%	41,41%	40,58%	39,77%	39,77%
	<i>Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat</i>							
2.1.2	Indeks Penanggulangan Bencana		98.15%	89.09%	74,33%	89,19%	92,83%	92,83%
	<i>Perhubungan</i>							
2.1.3	Persentase jalan kewenangan kota dengan v/c ratio $\leq 0,95$		66,67%	97,62%	36%	77.39%	78.00%	78.00%
2.2	Pertumbuhan Ekonomi		6,13	N/A	N/A	6,3 - 6,7	6,3 - 6,8	6,3 - 6,8
	<i>Perdagangan</i>							
2.2.1	PDRB Kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor		Rp 137.322. 725,1	Rp 154.687. 456,0	Rp 165.485.1 67,1	Rp 180.850.513,67	Rp 200.011.526,17	Rp 137.322.725,1
	<i>Pariwisata</i>							
2.2.2	PDRB Kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum		Rp 78.971.9 33,9	Rp 88.834.8 03,2	Rp 94.273.07 7,21	Rp 103.193.864,79	Rp 112.164.511,53	Rp 78.971.933,9
2.3	Indeks Gini		0,39	0,375	0,38-0,37	0,38-0,37	0,38-0,38	0,38-0,39
	<i>Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah</i>							



No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada Awal periode RPJMD		Target	Target Capaian Setiap Tahun		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2017	2018	2019	2020	2021	
2.3.1	Persentase Tingkat Produktivitas Koperasi	11,10%	30,40%	23,00%	31,00%	32,00%	32,00%
2.3.2	Persentase Tingkat Produktivitas Usaha Mikro	N/A	N/A	N/A	53,00%	62,00%	62,00%
2.4	Indeks Reformasi Birokrasi	N/A	N/A	N/A	BB	A	A
<i>Pertanian, Pariwisata, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Lingkungan Hidup, Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Perdagangan, Perhubungan, Perpustakaan, Kearsipan, Perumahan dan Kawasan Permukiman, Tenaga Kerja, Penanaman Modal</i>							
2.4.1	Nilai Kepuasan Masyarakat	76.46%	83.74%	76%	86,03%	88,31%	88,31%
<i>Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah, Sarana dan Prasarana Perkantoran</i>							
2.4.2	Nilai SAKIP	68,86	70,03	>60-70	>70-80	>80-90	>80-90
<i>Keuangan</i>							
2.4.3	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2.5	Indeks Ketertiban dan Ketenteraman Kota	1.39	1,73	0,99	1,01	1,04	1,04
<i>Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat</i>							
2.5.1	Persentase konflik yang menimbulkan gangguan ketenteraman dan ketertiban masyarakat	N/A	N/A	N/A	4,50%	4,00%	4,00%
3	Aspek Pelayanan Umum						
3.1	Indeks Pembangunan Manusia	81,07	81,74	80-81	81-82	81-82	81-82
<i>Kesehatan</i>							
3.1.1	Peningkatan keamanan pangan olahan di masyarakat	N/A	N/A	N/A	2,00%	2,00%	2,00%



No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada Awal periode RPJMD		Target	Target Capaian Setiap Tahun		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2017	2018	2019	2020	2021	
3.1.2	Persentase cakupan ketersediaan prasarana kesehatan yang memenuhi standar klasifikasi dan akreditasi	N/A	N/A	N/A	95,23%	98,35%	98,35%
<i>Pendidikan</i>							
3.1.3	Persentase capaian prasarana pendidikan yang dibangun/direhabilitasi	N/A	N/A	N/A	92,15%	92,68%	92,68%
<i>Kepemudaan dan Olahraga</i>							
3.1.4	Indeks prestasi atlit di tingkat regional, nasional dan/atau internasional	N/A	N/A	N/A	1,99	2,01	2,01
3.1.5	Persentase kader kenakalan remaja dan pemuda pelopor yang menjalankan fungsi advokasi pembangunan kepemudaan	N/A	N/A	N/A	10,00%	20,00%	20,00%
<i>Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</i>							
3.1.6	Persentase indikator Kota Layak Anak (KLA) yang terpenuhi	N/A	N/A	N/A	100,00%	100,00%	100,00%
<i>Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</i>							
3.2	Indeks Ketertiban dan Ketenteraman Kota	1,45	1,73	0,99	1,01	1,04	1,04
<i>Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat</i>							
3.2.1	Rasio Pelanggaran Perda per 1.000 Penduduk	13,97	7,61	17,26	7,18	6,98	6,98



No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada Awal periode RPJMD		Target	Target Capaian Setiap Tahun		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2017	2018	2019	2020	2021	
3.2.2	Rasio Linmas per 1.000 penduduk	N/A	N/A	N/A	62,6	62,6	62,6
<i>Pengawasan</i>							
3.2.3	Angka Pelanggaran Disiplin Aparatur per 1.000 Pegawai	1.03	1.14	1,26	1,21	1,15	1,15
3.2.4	Persentase pelanggaran tata kelola administrasi keuangan pada kasus yang sama yang berhasil diturunkan	N/A	N/A	N/A	14,20%	16,80%	16,80%
3.3	Indeks Infrastruktur Kota	N/A	N/A	N/A	0,8	0,84	0,84
<i>Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</i>							
3.3.1	Ketersediaan perangkat pengendalian penataan ruang dan bangunan (implementasi SLF)	N/A	N/A	N/A	22,32%	31,25%	31,25%
<i>Pertanahan</i>							
3.3.2	Persentase lokasi lahan yang tersedia untuk kepentingan umum	N/A	N/A	N/A	100,00%	100,00%	100,00%
<i>Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</i>							
3.3.3	Persentase pelaksanaan rekomendasi utilitas	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
3.3.4	Tingkat Keandalan Jaringan Jalan	0.40	0.41	0,41	0,42	0,42	0,42
<i>Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan</i>							



No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada Awal periode RPJMD		Target	Target Capaian Setiap Tahun		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
		2017	2018	2019	2020	2021		
	3.3.5	Persentase rencana induk sektoral yang disusun dan telah tersinkronisasi dengan Rencana Tata Ruang Wilayah	N/A	N/A	N/A	34,48%	41,38%	41,38%
	<i>Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</i>							
	3.3.6	Persentase panjang jalan yang sudah terpasang PJU hemat energi	N/A	N/A	N/A	14,98%	17,51%	17,51%
	<i>Perhubungan</i>							
	3.3.7	Load Factor Kendaraan Umum (Angkot)	30.00%	29.53%	26.00%	28,00%	30,00%	30,00%
	3.3.8	Load Factor Kendaraan Umum (Suroboyo Bus)	N/A	N/A	N/A	40,00%	42,00%	42,00%
	<i>Pertanahan</i>							
	3.3.9	Persentase aset tanah dan/atau bangunan yang terintegrasi dalam sistem pengamanan dan pengelolaan aset	15.10%	26.47%	41,88%	58,55%	75,22%	75,22%
3.4	Persentase luas kawasan permukiman kumuh prioritas		N/A	N/A	0,28%	0,22%	0%	0%
	<i>Perumahan dan Kawasan Permukiman</i>							
	3.4.1	Persentase pemanfaatan rusunawa yang tepat sasaran	N/A	N/A	N/A	100,00%	100,00%	100,00%
	<i>Sosial</i>							



No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada Awal periode RPJMD		Target	Target Capaian Setiap Tahun		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2017	2018	2019	2020	2021	
3.4.2	Persentase wilayah dengan rumah tapak yang layak huni seluruhnya	N/A	N/A	N/A	85,00%	100,00%	100,00%
3.5	Indeks Budaya Lokal	70.73%	78.39%	79,61%	73%	75%	75%
	<i>Kebudayaan</i>						
3.5.1	Persentase budaya yang dapat dilestarikan	90.31%	90.84%	91,39%	90,90%	90,95%	90,95%
3.6	Indeks Reformasi Birokrasi	N/A	N/A	N/A	BB	A	A
	<i>Komunikasi dan Informatika serta Persandian, dan Statistik</i>						
3.6.1	Nilai Tingkat Kepuasan Penyelenggaraan TIK dalam Pelayanan Publik Administratif	97.63	97.59	75.00 (Cukup)	76-100 (Baik)	76-100 (Baik)	76-100 (Baik)
	<i>Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan</i>						
3.6.2	Indeks Profesionalitas Pegawai	N/A	N/A	N/A	71,08%	71,97%	71,97%
	<i>Perumahan dan Kawasan Permukiman</i>						
3.6.3	Persentase pemenuhan kebutuhan prasarana pemerintahan dan pelayanan publik	N/A	N/A	N/A	91,23%	92,35%	92,35%
	<i>Kebijakan dan Koordinasi Perangkat Daerah</i>						
3.6.4	Persentase kegiatan DPRD yang terfasilitasi	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	<i>Keuangan</i>						
3.6.5	Persentase kontribusi pajak terhadap PAD	69.92%	78.03%	75,54%	79,78%	80,12%	80,12%



No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada Awal periode RPJMD		Target	Target Capaian Setiap Tahun		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
		2017	2018	2019	2020	2021		
	<i>Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan</i>							
	3.6.6	Persentase Tingkat Capaian Keberhasilan Pelaksanaan Program	91.18%	98.04%	91,96%	98,00%	98,00%	98,00%
3.7	Pertumbuhan Ekonomi		6,13	N/A	N/A	6,3 - 6,7	6,3 - 6,8	6,3 - 6,8
	<i>Penanaman Modal</i>							
	3.7.1	Nilai Realisasi Investasi	N/A	N/A	N/A	Rp71.161.699.310.450,00	Rp74.719.784.275.973,00	Rp74.719.784.275.973,00
3.8	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Persampahan (IKLHS)		64,86	64,91	64,9	65	65,1	65,1
	<i>Lingkungan Hidup</i>							
	3.8.1	Indeks Kualitas Air Permukaan	57.5	57.62	52,68	57,62	57,63	57,63
	3.8.2	Indeks Kualitas Udara Ambien	90.26	90.26	84,75	90,27	90,28	90,28
	3.8.3	Persentase air limbah yang diolah pada instalasi pengolahan air limbah	N/A	N/A	N/A	57,81%	69,07%	69,07%
	3.8.4	Persentase penurunan sampah yang masuk ke TPA melalui TPS	N/A	N/A	N/A	20,40%	21,90%	21,90%
	3.8.5	Persentase selisih luasan taman dan jalur hijau yang dibangun dan dipelihara	N/A	N/A	N/A	9,33%	11,20%	11,20%
	3.8.6	Persentase wilayah dengan rumah yang dilengkapi jamban	N/A	N/A	N/A	80,00%	85,00%	85,00%



No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada Awal periode RPJMD		Target	Target Capaian Setiap Tahun		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2017	2018	2019	2020	2021	
3.9	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	5.98%	6,12%	6,47%	6,40%-5,95%	6,30%-5,90%	6,30%-5,90%
	<i>Tenaga Kerja</i>						
3.9.1	Persentase pencari kerja terserap pada pasar kerja formal	53.58%	70.03%	> 40%	55,00%	55,00%	55,00%



BAB IX PENUTUP

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2016-2021 merupakan dokumen yang strategis bagi pembangunan Kota Surabaya yang menerjemahkan cita-cita Kepala Daerah terpilih yang dijelaskan dalam visi dan misi. Perubahan RPJMD telah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Keterpaduan langkah yang harus ditempuh dalam mencapai tujuan, sasaran, dan program pembangunan, lalu upaya-upaya yang harus dilakukan, serta penentuan keterlibatan dan peran dari berbagai pihak serta pemangku kepentingan dijabarkan dalam dokumen RPJMD ini. Karena itu, pada bab ini juga akan dijelaskan mengenai kaidah pelaksanaan secara umum.

IX.1 Pedoman Transisi

Dokumen Perubahan RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021 menjadi panduan dalam merencanakan dan mewujudkan pembangunan yang dijabarkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Setelah berakhirnya RPJMD Kota Surabaya pada tahun 2021, perlu disusun RPJMD Kota Surabaya Tahun 2021-2025 sebagai acuan bagi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan lima tahun berikutnya. Pada masa transisi tersebut, diperlukan sebuah acuan bagi penyusunan perencanaan pembangunan tahun 2022. Acuan penyusunan perencanaan pembangunan tahun 2022 akan didasarkan pada RPJPD Kota Surabaya Tahun 2005-2025, RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024, RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2022, amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022.



IX.2 Kaidah Pelaksanaan

Perubahan RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021 ini merupakan panduan bagi Pemerintah Kota Surabaya serta pemangku kepentingan lainnya dalam melakukan pembangunan sampai dengan tahun 2021. Maka dari itu, diperlukan kesepahaman, kerjasama, transparansi, konsistensi, dan inovasi, serta rasa tanggung jawab yang tinggi demi tercapainya target-target yang telah ditetapkan dalam Perubahan RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021, yang akan dilaksanakan dengan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

- a. Walikota Surabaya berkewajiban menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang Perubahan RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021 kepada masyarakat;
- b. Walikota Surabaya menetapkan Peraturan Kepala Daerah yang mengatur tentang pedoman penyusunan penjabaran perencanaan dan tata cara pengendalian dan evaluasi Perubahan RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021;
- c. Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Kota Surabaya dan seluruh pemangku kepentingan mendukung pencapaian target-target sebagaimana yang telah ditetapkan dalam tujuan, sasaran, dan program Perubahan RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021;
- d. Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Kota Surabaya wajib menyusun Perubahan Rencana Strategis (Renstra) OPD dengan berpedoman pada Perubahan RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021;
- e. Badan Perencanaan Pembangunan Kota melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021.

IX.3 Pengembangan Pembiayaan Pembangunan

Terhadap program/kegiatan dalam prioritas, namun Pemerintah Daerah tidak mampu mendanainya seperti penyediaan fasilitas/infrastruktur strategis yang dapat meningkatkan daya saing daerah dan penyediaan pelayanan dasar masyarakat, maka kebijakan pendanaan pembangunan diarahkan :

1. Kerjasama Pemerintah Daerah dengan pemerintah daerah lainnya serta kerjasama pemerintah daerah dan Swasta (*public private partnership*)



- diarahkan pada pembiayaan pembangunan untuk program/kegiatan penyediaan infrastruktur dan pelayanan publik yang berpotensi menghasilkan pendapatan dan dalam jangka panjang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, meningkatkan daya saing daerah dan menurunkan disparitas wilayah serta meningkatkan perekonomian daerah.
2. Kemitraan pembangunan dengan dunia usaha melalui pelaksanaan tanggung jawab sosial dan Lingkungan Perusahaan diarahkan untuk pembiayaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, pemulihan dan/atau peningkatan fungsi lingkungan hidup dan memacu pertumbuhan ekonomi.
 3. Kemitraan dengan Lembaga non Pemerintah baik Lembaga Dalam Negeri maupun Lembaga Internasional, diarahkan pada pelaksanaan program, kegiatan yang sesuai dengan budaya lokal dan mendukung Program Prioritas Daerah serta dapat menstimulasi adanya transfer teknologi dan perubahan perilaku yang lebih baik di masyarakat.

WALIKOTA SURABAYA

ttd.

TRI RISMAHARINI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



IRA TURSILOWATI, SH., M.H.

Pembina Tingkat I

NIP. 19691017 199303 2 006